

SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Individu, Masyarakat, dan Pendidikan

Prof. Dr. H. Abdullah Idi, M.Ed.
Hj. Safarina HD, M.Pd., M.Si.(editor)

SOSIOLOGI PENDIDIKAN

SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Individu, Masyarakat, dan Pendidikan

Prof. Dr. H. Abdullah Idi, M.Ed.
Hj. Safarina HD, M.Pd., M.Si. (editor)



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	v
DAFTAR SINGKATAN	ix
Bab 1 SEJARAH SOSIOLOGI PENDIDIKAN	1
A. Sosiologi	1
B. Sejarah Sosiologi Pendidikan	6
C. Ruang Lingkup Sosiologi Pendidikan	24
Bab 2 ILMU PENGETAHUAN DAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN	33
A. Sumber Ilmu Pengetahuan	33
B. Desain Penelitian Sosiologi Pendidikan	47
Bab 3 PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT	59
A. Pendidikan dan Sumber Daya Manusia	59
B. Sekolah dan Masyarakat	66
Bab 4 ANAK DIDIK DAN KONTAK SOSIAL-EDUKATIF	81
A. Kontak Sosial Anak Didik	82
B. Jenis Kontak Sosial: Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat	91
Bab 5 SOSIALISASI ANAK DIDIK	99
A. Urgensi Sosialisasi	99
B. Sosialisasi Anak Didik	104
Bab 6 INTERAKSI EDUKATIF DI SEKOLAH	117
A. Definisi Kelompok (<i>Group</i>)	117
B. Interaksi Edukatif Anak Didik	120
Bab 7 SEKOLAH SEBAGAI ORGANISASI	141
A. Sekolah: Organisasi	142
B. Sekitar Persoalan di Sekolah	150

Bab 8	PENDIDIKAN DAN PRANATA SOSIAL	161
	A. Visi dan Misi Pendidikan Nasional	161
	B. Pendidikan dan Pranata Sosial	165
	C. Pendidikan dan Fungsi: Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah	168
Bab 9	PENDIDIKAN DAN STRATIFIKASI SOSIAL	177
	A. Stratifikasi Sosial	177
	B. Hierarki Kelas dan Realitas Sosial	185
Bab 10	PENDIDIKAN DAN MOBILITAS SOSIAL	193
	A. Pendidikan: "Jalan" Menuju Kemandirian Anak Didik	194
	B. Pendidikan dan Mobilitas Sosial	195
Bab 11	PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIAL	207
	A. Proses Sosial dan Perubahan Sosial	207
	B. Pendidikan dan Perubahan Sosial	220
Bab 12	PROFESIONALISME GURU DAN GLOBALISASI	227
	A. Persyaratan Profesionalisme Guru	227
	B. Globalisasi dan Tantangan Profesionalisme Guru	229
Bab 13	CATATAN PENUTUP:	
	<i>Dilema UN: Antara Etika dan Profesional Guru?</i>	245
	DAFTAR PUSTAKA	253
	LAMPIRAN	263
	BIODATA PENULIS	371
	BIODATA EDITOR	373

DAFTAR SINGKATAN

AFTA	: <i>Asia Fasific Trade Association</i>
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
EBTA	: Evaluasi Belajar Tahap Akhir
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
IQ	: <i>Intelligence Quotient</i>
KTSP	: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
NEM	: Nilai EBTA Murni
PAIKEM	: Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan.
PMR	: Palang Merah Remaja
PP	: Peraturan Pemerintah
KKG	: Kelompok Kerja Guru
MDGs	: <i>Mellinium Development Goals</i>
MGMP	: Musyawarah Guru Mata Pelajaran
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PT	: Perguruan Tinggi
P4TK	: Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
RPP	: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SD/MI	: Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah
SMP/MTs	: Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

- SMA/MA** : Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
SMK : Sekolah Menengah Kejuruan
TAP MPR : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
UN : Ujian Nasional
UNS : Universitas Negeri Surakarta
UU SISDIKNAS : Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
WTO : *World Trade Organization*
LPMP : Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan

Bab 1

SEJARAH SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Sosiologi pendidikan merupakan cabang ilmu sosiologi, yang sering disebut sebagai sosiologi mikro (*micro sociology*). Dalam pembahasan bab ini, diungkapkan tentang sejumlah aspek, antara lain: sejarah munculnya ilmu sosiologi, sosiologi pendidikan, dan ruang lingkup sosiologi pendidikan.

A. Sosiologi

Jika lambat laun dalam pertumbuhan ketatanegaraan terdapat konflik antara pemerintah dan masyarakat dan jika pemahaman negara dan pemahaman masyarakat tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga hanya dikenal satu pemahaman saja, sosiologi atau ilmu masyarakat sedapat mungkin harus dapat menjembatani antara ilmu kenegaraan dan ilmu tentang manusia.

Negara tidak cukup ditangani oleh seorang ahli hukum atau seorang ahli ekonomi saja, tetapi memerlukan pengetahuan tentang sosiologi. Apalagi pada zaman modern, di mana sosiologi berkembang dengan banyak cabang dan tiap cabang memerlukan keahlian tertentu, seperti juga terdapat dalam bidang kedokteran, ekonomi, hukum, dan sebagainya yang masing-masing lebih terperinci lagi dalam bidang tertentu.¹

¹Sebagai ilustrasi, dalam bidang kedokteran, di samping ada dokter umum ada dokter spesialis: dokter telinga, hidung dan tenggorokan (THT), dokter mata, dokter anak, dokter ahli saraf, dan lain-lain. Dalam ilmu hukum, ada ahli kriminal, ahli agraria, ahli pidana, perdata, dan ahli lainnya. Juga dalam bidang ilmu sosiologi terdapat bidang

Di masa lalu, pada awalnya ilmu filsafat dipandang sebagai satu-satunya ilmu pengetahuan umum. Sesudah beberapa abad kemudian orang telah memikirkan tentang ilmu falak dan masalah kemanusiaan yang praktis. Plato (429-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM) filosof Yunani memberi dasar sistematis bagi ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan selanjutnya, yang mempunyai pengaruh yang kuat dalam perkembangan pemikiran Barat.

Pada abad sesudah itu, timbullah beberapa ilmu yang memisahkan diri dari ilmu filsafat umum. Pada abad ke-17 ilmu alam menjadi ilmu yang berdiri sendiri dan pada abad ke-18 ilmu ekonomi berdiri sendiri pula. Sedangkan ilmu sosiologi baru dikenal sebagai ilmu yang berdiri sendiri sejak awal abad ke-19. Kebutuhan untuk memisahkan sosiologi dari ilmu-ilmu lain lebih tampak dan terasa pada masa revolusi abad ke-18 di Eropa saat terjadi Revolusi Prancis (1789-1799). Sedangkan ilmu sosiologi di Inggris sejak 100 tahun telah lebih dahulu mengalami perubahan sosial dan politik dalam revolusi tidak berdarah, yang lazim disebut *Glorious Revolution* (1688-1689). Gerakan revolusi yang menyebar di masyarakat menunjukkan adanya kehendak masyarakat untuk melakukan perubahan dalam memenuhi nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan baru. Gerakan semacam itu tidak cukup dihadapi dengan mengubah susunan hukum negara saja, tetapi menghendaki penelitian yang mendalam mengenai manusia dan masyarakat.

Adat kebiasaan mengatur hidup rukun di desa dan pemerintah desa mengatur hubungan kota dan negara, seolah-olah sejalan dengan tujuan negara Barat pada umumnya, di mana pemerintah tidak banyak otoriter mencampuri kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemerintah demikian rupanya lebih disukai di negara Barat yang merdeka, "*The less government is the best government*", merupakan suatu hasil perjuangan rakyat yang menghentikan terlampau banyak intervensi pemerintah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari pada masa lalu.

Sebagaimana sejarah berbeda dalam perkembangannya bagi tiap bangsa maka corak kemasyarakatan yang tidak lain daripada buah sejarah bangsa, masing-masing berbeda satu sama lain. Tiap masyarakat hidup dan bergerak bebas, tidak tergantung pada masyarakat lainnya sekalipun tetap memengaruhi baik secara nasional maupun internasional melewati

lain, seperti: sosiologi pedesaan (*rural sociology*), sosiologi perkotaan (*urban sociology*), sosiologi kebudayaan (*cultural sociology*), dan lainnya. Dalam ilmu agama juga memiliki bidang lainnya, seperti: *Fiqh, Tarikh, Lughoh, Muamalah, Tarbiyah, dan Siyash.*

media-massa, radio, televisi, koran majalah, buku, film, dan lain-lain. Tugas sosiologi umum adalah mendapatkan unsur-unsur umum yang berlaku bagi masyarakat mana pun agar dapat memenuhi panggilan sosiologi sebagai ilmu. Studi sosiologi bertalian dengan bentuk, serta pertumbuhan dan perkembangan masyarakat menurut coraknya masing-masing.

Kehadiran sosiologi, pada dasarnya, relevan dengan pertumbuhan zaman. Sosiologi sebagai ilmu, menjadi lapangan studi dan tujuan sendiri sejak abad ke-19, sesudah Revolusi Prancis. Sedangkan pemikiran mengenai kehidupan masyarakat sudah terjadi sejak manusia dilahirkan dan ditakdirkan untuk mencari hidup sendiri dengan usahanya sendiri.²

Plato (327-347), seorang ahli pikir bangsa Yunani, menggambarkan negara idamannya, sebagai negara yang tidak mementingkan kepentingan perseorangan, melindungi dan memenuhi kebutuhan bagi manusia seluruhnya berdasarkan kebaikan akhlak dan peradaban, menjaga dan menegakkan keadilan. Pandangan Plato itu dianggap untuk mengingatkan keadaan dan gambaran masyarakat dan negara Yunani pada zaman itu yang mulai tampak runtuh karena meluasnya sifat individualistik di tengah masyarakat.

Aristoteles (384-422) menguraikan tentang bentuk negara yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam perkembangan peradaban masyarakat. Artinya, dalam negara bagaimana diuraikan bentuknya. Aristoteles berpendapat bahwa segala bentuk negara adalah baik, asalkan memajukan dan meninggikan, bukan merendahkan derajat peradaban dan derajat kebatinan rakyat. Aristoteles adalah ahli pikir dan sarjana bangsa Yunani dari Macedonia dan tulisannya dikenal dan dipelajari sampai ke dunia Barat melalui bahasa Latin, melalui karya Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rusyd.

Dalam sejarah perkembangan Ilmu Sosiologi, terdapat beberapa tokoh besar yang telah meletakkan dasar Ilmu Sosiologi, di antaranya:

²Permasalahan sosial-kemasyarakatan yang dipertimbangkan sejak dahulu, terutama mengenai etika adalah permasalahan untuk meninggikan *akhlak* manusia dalam kehidupan bersama berdasarkan pertimbangan baik-buruk menurut masyarakat ketika itu, pertanyaan yang juga ditujukan kepada hubungan serta bentuk-bentuk dalam kehidupan bersama yang timbul dari permasalahan tersebut.

1. August Comte (1798-1857M)

August Comte menjelaskan bahwa fenomena sosial dapat dipelajari sebagai entitas lain dengan memakai metode ilmu pengetahuan yang hasilnya bisa sama akuratnya dengan hasil penelitian ilmiah. Begitu para ilmuwan dapat memahami hukum tentang perilaku manusia, mereka dapat meramalkan atau mengendalikan kejadian atau peristiwa sosial. Dikatakan Comte, dalam memahami masyarakat, perlu mengetahui sumber keutuhan, kestabilan dan kesinambungan masyarakat, di samping sumber perubahan masyarakat. Kendatipun Comte berjasa dalam meletakkan dasar sosiologi, beliau tidak terlalu berpengaruh terhadap pemikiran para ilmuwan sosiologi yang muncul kemudian.

2. Herbert Spencer (1820-1903)

Spencer adalah salah seorang filosof Inggris. Beliau berpendapat bahwa sebagaimana kehidupan alamiah, kehidupan sosial berkembang secara evolusi, sesuai dengan teori di dalam biologi. Spencer melihat masyarakat sebagai suatu organisme yang besar sekali. Sebagaimana jantung, hati, paru-paru dan bagian lain dari tubuh manusia, semua bagian bekerja secara teratur sesuai fungsinya masing-masing untuk membuat manusia tetap hidup. Demikian juga halnya dengan manusia, tiap bagian di dalamnya akan bekerja menurut fungsinya tersendiri agar manusia tetap utuh dan stabil.

Bagi Spencer, masyarakat baru dapat dipahami bila masyarakat itu dikaitkan dengan lingkungan. Masyarakat selalu berupaya mengadaptasikan diri dengan lingkungan. Untuk memahami suatu masyarakat, perlu memusatkan perhatian kepada proses pertumbuhan dan perubahan sosial. Bila lingkungan di sekitarnya berubah, masyarakat bersangkutan akan berubah. Hal lain yang menjadi perhatian Spencer adalah bertalian dengan pemakaian metode ilmiah. Spencer menyadari bahwa objektivitas dan netralitas moral perlu diutamakan di dalam upaya penelitian sosial, atau sedang mengkaji realitas sosial atau bersosiologi.

3. Karl Marx (1818-1883)

Karl Marx, seorang keturunan Yahudi, kelahiran Jerman, adalah seorang filosof, ahli ekonomi, dan seorang aktivis masyarakat. Pada umur 23 tahun, Marx mendapatkan gelar doktor filsafat, namun Marx muda

tidak mendapatkan tempat mengajar di perguruan tinggi di "kampung halamannya," karena pandangan-pandangannya dipandang radikal. Marx bahkan sering keluar masuk penjara. Marx merasa bosan melihat kemiskinan dan ketidakadilan sebagai salah satu karakteristik atau produk dari abad kesembilan belas. Marx tak percaya bahwa kemiskinan dan ketidakadilan sebagai suatu kondisi alamiah atau sebagai takdir. Bagi Marx kemiskinan dan ketidakadilan merupakan suatu kondisi diciptakan kapitalisme, di mana sepanjang hayatnya, Marx berusaha memahami dan berjuang untuk menghilangkan kapitalisme.

Dalam karyanya tentang *Ekonomi dan Masyarakat*, Marx menekankan betapa pentingnya faktor ekonomi dalam menentukan kehidupan sosial. Marx menekankan bahwa sistem ekonomi yang cenderung kapitalisme menjadi sebab adanya ketidakadilan dan kesenjangan struktur kelas-kelas dalam masyarakat.

4. Emile Durkheim (1857-1917)

Emile Durkheim, anak seorang *rabbi* (pendeta Yahudi), lahir di Prancis bagian Utara, memperoleh pendidikan tinggi dalam bidang ekonomi, *folklor*, dan antropologi budaya di Jerman. Ketika kembali ke Prancis Durkheim menjadi dosen terkenal di Universitas Bourdeaux. Durkheim meneliti kasus (fenomena) pada satu kondisi sosial yang tak lagi mempunyai aturan (hukum) yang tepat, yaitu peristiwa "bunuh diri". Hasil studi tersebut, *suicide* pada 1897 merupakan satu studi yang cermat tentang fenomena "bunuh diri" dari berbagai kawasan di Eropa Barat. Studi ini menghasilkan satu teori baru, bahwa "bunuh diri terjadi di dalam tiga macam kondisi sosial yang berbeda:"

Pertama, bahwa seorang cenderung bunuh diri bila dia tidak lagi mendapatkan dukungan (*support*, pengakuan) dari masyarakat atau kelompoknya. Durkheim memperlihatkan bahwa orang yang hidup melajang, misalnya cenderung lebih banyak bunuh diri daripada orang yang sudah berkeluarga. Orang yang kawin dan mempunyai anak kecil cenderung untuk bunuh diri.

Kedua, bila suatu kondisi sosial sudah mapan tergantung apabila kalau gangguan itu datangnya mendadak, kecenderungan bunuh diri itu akan lebih mudah terjadi. Beliau melihat depresi, revolusi, perang dan bahkan bila suatu masyarakat tiba-tiba menjadi makmur, dapat meningkatkan jumlah orang yang bunuh diri.

Ketiga, bahwa dalam berbagai masyarakat yang kondisi kehidupannya masih tradisional (masyarakat praindustri) orang sering dianjurkan bunuh diri untuk menghilangkan aib.

5. Max Weber (1864-1920M)

Max Weber mempunyai pengaruh yang luas di dunia sosiologi modern. Teori-teori yang dikembangkannya masih banyak yang diikuti para ahli sosiologi sekarang. Sumbangannya pada dunia sosiologi mencakup pemahaman tentang birokrasi politik dan organisasi politik, kasta dan kelas, kegiatan ekonomi dan masalah perkotaan.

Salah satu sumbangan Weber yang amat besar pada dunia sosiologi adalah prinsip *verstehen*. Konsep ini menunjuk pada upaya memahami suatu gejala atau perilaku dengan mencoba menjelaskan fenomena sosial untuk menangkap hubungan antara perasaan dan pikiran seorang dengan tindakannya. Prinsip ini merupakan salah satu upaya untuk memanusiaawikan sosiologi. *Verstehen* merupakan upaya yang menekankan bahwa perasaan dan motif orang melakukan sesuatu pun harus dapat diteliti, bukan hanya perilaku yang kelihatan saja. Kontribusi lain dari Weber adalah pernyataan dan karya-karyanya yang bertumpu kepada sosiologi yang bebas nilai.³ Weber bekerja menurut tradisi filsafat Kant, yang antara lain, Weber cenderung berpikir dalam hubungan sebab-akibat. Cara berpikir ini lebih dapat diterima sosiologi yang umumnya tidak menyukai logika dialektika yang dibahas dalam karya Mark.⁴

B. Sejarah Sosiologi Pendidikan

Sosiologi pendidikan berawal dari ilmu sosiologi umum atau sosiologi mikro (*micro sociology*) yang muncul pada abad ke-18. Ilmu sosiologi mulai melepaskan diri dari ilmu filsafat dan berdiri sendiri sejak abad ke-19. Istilah sosiologi pertama kali digunakan August Comte (1798-1857) dalam bukunya *Cour de Phillosophie Positive*. Sosiologi berasal dari kata "*socious*" dan "*logos*". *Socious* berasal dari bahasa Latin yang artinya "teman", sedangkan *logos* berasal dari bahasa Yunani yang artinya "kata, perkataan atau pembicaraan". Jadi sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan

³Abdullah Idi, "Bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan S1 & S2," Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang., 2010, hlm. 12.

⁴George Ritzer-Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Penerjemah Alimandan. (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 41-42.

yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antarmanusia yang menguasai kehidupan.

Pada awalnya sosiologi berada dalam ilmu filsafat yang dipandang sebagai satu-satunya ilmu untuk pengetahuan umum. Namun, ketika ada masalah yang terdapat dalam masyarakat yang ternyata tidak bisa dipecahkan dalam ilmu filsafat maupun ilmu-ilmu lainnya, maka kebiasaan untuk memisahkan sosiologi dari ilmu lainnya tampak dan terasa pada masa Revolusi di Eropa yang mengganas dalam Revolusi Prancis (1789-1799M).

Masyarakat mengalami perubahan sosial yang cepat. Perubahan sosial menimbulkan *cultural lag*. *Cultural lag* merupakan "sumber" masalah-masalah sosial yang dialami dunia pendidikan. Para ahli sosiologi menyumbangkan pemikirannya untuk memecahkan masalah itu, hingga lahirlah sosiologi pendidikan. Perubahan sosial yang cepat meliputi berbagai bidang kehidupan dan merupakan masalah *institute social* seperti: industri, agama, perekonomian, pemerintahan, keluarga, perkumpulan, dan pendidikan.

Ditinjau dari segi etimologi istilah sosiologi pendidikan terdiri dari dua kata yaitu Sosiologi dan Pendidikan. Sepintas jelas bahwa dalam sosiologi, karena situasi pendidikan adalah situasi hubungan dan pergaulan sosial, yaitu hubungan dan pergaulan sosial antara pendidik dengan anak didik, pendidik dengan pendidik, anak-anak dengan anak-anak, pegawai dengan pendidik, pegawai dengan anak-anak. Hubungan dan pergaulan sosial ini secara totalitas, merupakan suatu bentuk keluarga ialah keluarga sekolah, di mana dapat tumbuh dan berkembang di masyarakat. Jadi, dalam keluarga sekolah itu terdapat hubungan pergaulan sosial yang timbal balik satu sama lain, saling pengaruh-mempengaruhi, dan terjadi interaksi sosial. Dalam sosiologi pendidikan, berlaku dan bekerja sama antara prinsip sosiologi dan prinsip pedagogik beserta ilmu bantuan lainnya, misalnya psikologi (psikologi pendidikan). Dalam sosiologi pendidikan terdapat sosiologi dan pendidikan, yang merupakan ilmu baru yang menggunakan prinsip sosiologi dalam seluruh proses pendidikan meliputi metode, organisasi sekolah, evaluasi pelajaran, dan kegiatannya.

Di lembaga-lembaga, kelompok-kelompok sosial, proses sosial, terdapat hubungan-hubungan sosial (*social relationship*), secara teknis, hubungan tersebut dinamakan interaksi sosial, yang mana dalam suatu interaksi sosial, individu memperoleh dan mengorganisasi pengalaman-pengalamannya. Inilah yang merupakan aspek-aspek atau prinsip-prinsip sosiologisnya.

Jadi bukan saja pada anak, tetapi juga pada orang dewasa, kelompok-kelompok sosial, bahkan pada proses sosial, bahwa interaksi sosial yang berbentuk tingkah laku manusia, secara tertentu dianggap sebagai sistem pendidikan yang berkembang terus. Artinya, setiap kali didapati kondisi dan situasi baru, haruslah ada interaksi sosial yang baru dan seolah-olah individu belajar berinteraksi sosial. Inilah yang merupakan prinsip pedagogiknya. Jadi, sosiologi pendidikan adalah cabang ilmu pengetahuan yang membahas proses interaksi sosial anak-anak melalui keluarga, masa sekolah sampai dewasa serta dengan kondisi-kondisi sosio-kultural yang terdapat di dalam masyarakat dan negara.

Sosiologi pendidikan berbeda dengan teknologi pendidikan, walaupun dapat membantu untuk lebih memahami masalah pendidikan. Para pendidik diharapkan dapat mengenal sosiologi dan memanfaatkannya dalam pekerjaannya, akan tetapi dia bukanlah ahli sosiologi yang meneliti hubungan sosial di dalam lingkungan sekolah. Sosiologi pendidikan adalah analisis ilmiah atas proses sosial dan pola-pola sosial yang terdapat dalam sistem pendidikan. Sosiologi memiliki alat-alat dan teknik ilmiah untuk mempelajari pendidikan dan dapat memberikan sumbangan berharga kepada sistem pendidikan dalam masyarakat. Menganalisis hubungan dan interaksi manusia dalam pendidikan diharapkan memperoleh prinsip-prinsip dan generalisasi tentang hubungan manusia dalam sistem pendidikan.

Dalam pemikiran masyarakat dan perkembangannya melahirkan dua hal, yaitu perkembangan realitas sosial masyarakat itu sendiri dan perkembangan pemikiran ilmiah. Karena pengetahuan yang paling tua adalah filsafat, dalam filsafat pastikan dibicarakan tentang masyarakat. Awal perkembangan sosiologi mendapat sumbangan dari ilmu-ilmu lain, terutama ilmu filsafat (pada dasarnya ilmu sosial lahir dari ilmu filsafat). Sumbangan dari ilmu-ilmu lain untuk perkembangan sosiologi sangat besar pengaruhnya. Ilmu filsafat misalnya banyak para ahli filsafat membicarakan tentang sosiologi secara umum dan menimbulkan berbagai teori sosial yang merupakan kajian dari ilmu sosiologi.

Sosiologi banyak memberikan sumbangan pada pendidikan. Kita juga perlu meninjau apa yang ditawarkan pendidikan bagi sosiologi. Kalau sosiologi akan berkembang sebagai ilmu yang asli, maka sosiologi harus menjadi lebih "eksperimental". Sistem pendidikan menawarkan keadaan yang memungkinkan adanya eksperimen tanpa menyinggung nilai-nilai tentang manusia. Dengan demikian, sistem pendidikan memberikan

kesempatan kepada sosiologi untuk menghadapi tantangan (sebagai syarat mutlak dari ilmu), kemampuan meramalkan dan mengurus perubahan sosial. Penelitian sosiologi dalam pendidikan tidak lain adalah sosiologi eksperimental atau bersifat pengamatan.

Sejak awal perkembangannya, pada awal abad ke-19, hingga dewasa ini, ilmu sosiologi telah mengalami perubahan yang terus-menerus ilmu yang oleh Auguste Comte disebut dengan "*social physics*" yang kemudian dikenal dengan sosiologi (*sociology*). Sosiologi terus berkembang seiring dengan perubahan yang timbul di masyarakat. Pada awalnya ahli pendidikan sosial memandang pendidikan sosial sebagai bidang studi yang memberikan dasar bagi kemajuan sosial dan pemecahan masalah sosial. Pendidikan dianggap sebagai badan yang sanggup memperbaiki masyarakat. Pendidikan dijadikan alat kontrol sosial yang membawa kebudayaan ke puncak yang lebih tinggi.⁵

Perkembangan sosiologi umum tersebut seiring pula dengan perkembangan sosiologi pendidikan yang sudah merupakan kajian khusus dalam ilmu pendidikan. Sosiologi pendidikan selanjutnya sudah tidak bisa dipisahkan dari sejumlah jenis ilmu yang terkait dengan pendidikan, karena sosiologi pendidikan merupakan awal perkembangan ilmu pendidikan. Meskipun wilayah sosiologi pendidikan baru terbatas sekali segi-seginya yang telah dianalisis, dan baru sedikit (karena ada) yang dapat menopang generalisasi tersedia, namun telah meningkat secara pesat jumlah kontribusi terhadap suatu analisis ilmiah yang mengenai sistem sosial pendidikan. Sudah banyak tersedia hasil analisis ilmiah tentang sistem sosial pendidikan, tentunya bisa banyak bermanfaat bagi upaya pengelolaan organisasi-organisasi dan administrasi sistem pendidikan. Hal ini merupakan tantangan bagi para ahli sosiologi yang benar-benar tertarik untuk mengalih kesanggupan dan perhatiannya kepada hubungan-hubungan sosial yang berlangsung dalam proses pendidikan.

Ditinjau dari perspektif sebab lahirnya sosiologi pendidikan adalah dikarenakan adanya perkembangan masyarakat yang cepat dan berakibat pada merosotnya peran pendidik, dan perubahan interaksi antarmanusia. Dikarenakan manusia tumbuh dan berkembang bukan di sekolah melainkan di masyarakat.

John Dewey (1859-1952), lahir dari keluarga kelas menengah di

⁵Abdullah Idi, "Bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan S1 & S2", *op.cit.*, hlm. 11.

Burlington, Vermont, seorang ahli pendidikan, merupakan tokoh pertama yang memandang begitu esensialnya hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat. Hasil pengamatan Dewey menunjukkan bahwa terlihat nyata adanya perubahan struktur masyarakat dari bentuk semula yang masih bersahaja. Dalam arus perubahan begitu nyata, John Dewey melihat betapa kecil, dan bahkan tidak ada sama sekali "peranan penyiapan" anak didik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan supaya mereka (anak didik) bisa menyadari "masyarakat baru" yang tumbuh di sekitarnya. Dewey melukiskan kehidupan anak-anak kota yang tampak "acuh" dan "buta" terhadap "produk" yang keberadaannya dimanfaatkan sehari-hari, seperti pakaian dan sebagainya. Produk tersebut mereka tinggal memakainya, tanpa mengenal dan bahkan acuh terhadap bagaimana proses serta "cerita menjadinya" produk-produk tadi, mereka tidak mau lagi menghayati konteks kehidupan sosialnya yang semakin kompleks. Hal itu, seharusnya dijembatani lembaga pendidikan.

Atas dasar itu, Dewey bermaksud memperbaikinya, melalui sekolah percobaannya, *Laboratory School* yang dibuka pada 1896 di Chicago. Pada abad selanjutnya program Dewey tersebut (sekarang disebut *Department of Education*) menjadi komprehensif dan paling inovatif. Dewey berupaya mengembangkan pengalaman belajar di kelas dan di sekolah sebagai suatu bentuk kehidupan yang bisa menumbuhkan semangat sosial, semangat saling membantu dan bergotong royong. Untuk itu, beberapa upaya harus dilakukan supaya sekolah menjadi lebih dekat hubungannya, baik di lingkungan anak-anak maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya. Bagi Dewey, bersekolah dalam hubungannya dengan masyarakat merupakan cerminan masyarakat di sekitarnya dan sekaligus perbaikan bagi masyarakat.⁶

Dengan teori-teori pendidikannya, hal serupa juga dilakukan Emile Durkheim (1858-1917) yang memandang pendidikan sebagai suatu "*social thing*". Dia mengatakan bahwa, masyarakat secara keseluruhan beserta masing-masing lingkungan sosial di dalamnya, merupakan sumber penentu cita-cita yang dilaksanakan lembaga pendidikan. Suatu masyarakat bisa bertahan hidup, hanya jika terdapat suatu tingkat homogenitas yang memadai bagi warganya. Keseragaman esensial yang dituntut dalam kehidupan bersama tersebut, oleh upaya pendidikan diperkekal dan diperkuat penanamannya sejak dini pada anak-anak.

⁶Greg Ditmitriadis and George Kamberelis, *Theory for Education*, Routledge, New York, USA, 2006, p. 4.

Tetapi dibalik itu suatu kerja sama apa pun tentu tidak mungkin tanpa adanya keanekaragaman, yaitu upaya pendidikan dijamin dengan jalan pengadaan pendidikan yang beraneka ragam jenjang dan spesialisasi.

Bertolak dari pandangannya tentang pendidikan sebagai "ikhtiar sosial" (*social thing*), akhirnya menuntun Durkheim untuk berpendapat bahwa pendidikan bukanlah hanya satu bentuk, dalam artian ideal dan aktual, tetapi bermacam-macam. Masyarakat secara keseluruhan beserta masing-masing lingkungan khususnya, akan menentukan tipe-tipe yang diselenggarakan.

Selama 40 tahun perkembangan sosiologi pendidikan (pada mulanya dinamakan *Educational Sociology* dan belakangan ini menjadi *Sociology of Education*) memang berjalan lambat, tetapi berlangsung kokoh dan pasti. Sejumlah buku teks bermunculan, seperti *An Introduction to Educational Sociology* (E. G. Smith, W. R. Houghton Mifflin, 1917, edisi revisinya 1929), *Foundations of Educational Sociology*, (Peters, C. C, Macmillan, NY, 1924, edisi revisinya 1930), *The Sociology of Teaching* (Willard W. Waller, J. Willey, NY, 1932, dicetak kembali oleh Russell and Russell pada 1961) dan masih terdapat yang lainnya.

Perkembangan Sosiologi Pendidikan di Inggris telah dimulai dengan diangkatnya Sir Fred Clarke sebagai Direktur *London University Institute of Education*, 1937. Clarke menyadari kontribusi yang mungkin dan dapat diberikan sosiologi kepada pengembangan pemikiran pendidikan. Terutama Clarke, begitu yakin bahwa pendidikan harus direncanakan sebagaimana terdapat pada bukunya yang berjudul *Education and Social Change*. Begitu juga, Mannheim menetap di London dan menjadi dosen sosiologi pada Fakultas Ekonomi London. Seperti halnya Durkheim, Mannheim juga sangat tertarik pada dunia sosiologi, dan dia memasuki dunia pendidikan sebagai seorang ahli sosiologi. Akibatnya dia melihat pendidikan sebagai salah satu elemen dinamis dalam sosiologi. Merupakan suatu teknik sosial, dan alat pengendalian sosial. Dalam hal ini Mannheim mengatakan "ahli sosiologi tidak memandang pendidikan semata-mata sebagai alat merealisasikan cita-cita abstrak suatu kebudayaan (seperti humanisme) atau sebagai alat pengalih spesialisasi teknis, tetapi sebagai suatu bagian dalam proses memengaruhi manusia. Pendidikan hanya dapat dipahami dengan mengetahui untuk masyarakat apa dan untuk posisi sosial apa sesungguhnya murid-murid dididik."

Selama tahun 1943-1945, *London University Institute of Education* menyelenggarakan sejumlah konferensi mengenai sosiologi dan pendidikan.

Pada konferensi-konferensi dimaksud, Mannheim dan Clarke sama-sama memberikan andil yang berarti. Selama beberapa tahun sisanya dekade itu, muncul begitu banyak buku-buku pendidikan yang berpijak dan diwarnai sudut pandang sosiologi. Pada 1948, setelah setahun wafatnya Mannheim, Clarke menerbitkan bukunya yang berjudul *Freedom in the Educative Society*. Pada bukunya itu, secara lebih jauh dikembangkan tema perencanaan itu yang diperbandingkan dengan masyarakat pendidikan zaman Plato. Suatu masyarakat pendidikan (Lembaga Pendidikan), menurut Clarke tujuan pokoknya untuk mencetak corak warga negara ke arah yang lebih baik. Untuk itu masyarakat pendidikan perlu secara sadar mengarahkan sejumlah aktivitasnya dan mengorganisasikan sejumlah departemennya, sebagai suatu pandangan guna mengembangkan corak dan watak warga negara.

Dalam pertumbuhan sosiologi pendidikan pada 1960-an terdapat sejumlah faktor penunjang yang dapat dirinci sebagai berikut: *Pertama*, sifat pendidikan guru yang mulai berubah-ubah mulai dengan diperkenalkannya program pendidikan tahap pertama selama tiga tahun di *college-college* pada 1962. *Kedua*, merangsang perkembangan studi "akademik" pendidikan dan selanjutnya telah merangsang pertumbuhan ilmu-ilmu sosial dasar yang menopangnya, seperti sosiologi, psikologi, filsafat, dan sejarah.

Perluasan pendidikan guru merangsang pertumbuhan sosiologi pendidikan yang pada mulanya memperoleh materi dari perspektif fungsionalisme teoretis yang dominan. Kegagalan kebijaksanaan pembaruan tahun 1960-an, bersamaan dengan semakin meningkatnya permintaan akan sumbangan sosiologi dalam pendidikan guru telah melahirkan suatu pergeseran perspektif dari "teori ketertiban" ke arah "teori kontrol", suatu pergeseran yang oleh Floed (1978) digambarkan sebagai digesernya manusia sosiologis yang tidak manusiawi, yang terlalu disosialisasikan dan yang amoral oleh manusia sosiologis yang otonom, kreatif dan mempunyai tanggung jawab moral.

Pada 1950, W.A.C Stewart menulis sebuah artikel yang dimuat pada *Sociological Review*. Artikel mengenai filsafat dan sosiologi pada pendidikan guru yang berjudul: *Philosophy and Sociology in the Training of Teachers*. Stewart juga mengemukakan tentang masalah mata kuliah guru, yang dulu juga disarankan Mannheim. Ada tiga mata kuliah untuk dikuliahkan pada lembaga pendidikan guru, di antaranya: *Sosiologi Guru*, meliputi: (1) sifat manusia dan tata sosial; (2) dampak kelompok sosial terhadap individu; dan (3) struktur sosial; *Sosiologi Pendidikan* meliputi: (1) sekolah

dan masyarakat; (2) sosiologi pendidikan dalam aspek historisnya; dan (3) sekolah dan tata sosial; dan *Sosiologi Mengajar* yang meliputi: (1) interpretasi sosiologi terhadap kehidupan sekolah; (2) hubungan guru dan murid; dan (3) masalah organisasi sekolah.

Pada pembahasan mengenai "asal mula dan perkembangan sosiologi pendidikan" baik *Educational Sociology* maupun *Sociology of Education* keduanya sama-sama digunakan untuk menunjukkan kepada disiplin ilmu dalam pembahasan ini. Ketika W.A.C. Stewart menulis artikelnya pada 1950, dia menggunakan tiga istilah: *Sociology Approach to Education*, *Educational Sociology*, dan *Sociology of Education*. Kemudian, pada 1962, ketika Stewart memublikasikan buah pikiran Mannheim mengenai pandangan pendidikannya, diberinya judul *An Introduction to the Sociology of Education*. Dalam uraian yang termuat dalam buku tersebut, ternyata tampak bervariasi dalam menggunakan istilah *Sociology of Education* dan *A Sociological Approach to Education*, serta tidak menggunakan istilah *Educational Sociology* sama sekali. Pada mulanya, memang ada kecenderungan pada jurusan pendidikan di berbagai perguruan tinggi menggunakan istilah *Educational Sociology*, sedangkan belakangan lebih sering menggunakan istilah *Sociology of Education*. W. Taylor menyarankan agar tetap menggunakan kedua istilah tersebut, dalam pengertian yang sedikit berbeda antara satu dan lainnya.

Menurut W. Taylor (1977), *Educational Sociology*, tekanannya terletak pada beberapa pertanyaan kependidikan dan sosial. *Sociology of Education*, tekanannya pada permasalahan sosiologis. Perbedaannya mirip dengan apa yang dinyatakan R.J. Stalcup (1968) di dalam bukunya *Sociology and Education*, di mana dia juga menggunakan istilah *The Social Foundations of Education*. Stalcup mendefinisikan ketiga istilah dimaksud sebagai berikut: (1) Sosiologi Pendidikan merupakan aplikasi prinsip-prinsip umum dan penemuan-penemuan sosiologi bagi administrasi dan proses pendidikan. Pendekatan ini berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip sosiologi pada lembaga pendidikan sebagai suatu unit sosial tersendiri. (2) Sosiologi Pendidikan merupakan suatu analisis terhadap proses sosiologis yang berlangsung dalam lembaga pendidikan. Tekanan dan wilayah telaahnya pada lembaga pendidikan itu sendiri. *Social Foundations of Education*: merupakan suatu bidang telaah yang lazimnya mencakup sejarah, filsafat, sosiologi pendidikan, dan pendidikan komparasi. Jelas bidang ini lebih luas baik dari *Sociology of Education* maupun *Educational Sociology*.⁷

⁷Sanapiah Faisal, *Sosiologi Pendidikan*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1985), hlm. 39-40.

Dalam bukunya *Educational Sociology*, G.E. Jensen (1965) membahas perbedaan antara kedua istilah tadi. Menurut Jensen, problematika yang ditelaah *Educational Sociology* diangkat dari bidang pendidikan. Problematikanya *Sociology of Educational* diangkat dari bidang sosiologi. Jensen berpendapat bahwa sosiologi merupakan suatu bidang telaah praktis, memerhatikan segi-segi sosiologis maupun sosial psikologis yang relevan dan berkaitan secara logis dengan permasalahan pendidikan. Dalam hubungan ini *Sociology of Education*, perhatian utamanya pada upaya menemukan aspek-aspek sosiologis dari fenomena dan institusi pendidikan. Masalah-masalah tersebut dikaji dan dipandanginya sebagai masalah esensial sosiologi, dan bukan merupakan masalah praktis pendidikan.⁸

Selanjutnya, kedua istilah diperdebatkan tadi, sama-sama memantapkan adanya satu disiplin ilmu yaitu Sosiologi Pendidikan. Istilah yang digunakan ialah *Sociology of Education*. Dikatakan Olive Banks, *Sociology of Education* telah lazim digunakan daripada memakai terminologi lama yaitu *Educational Sociology*. Secara totalitas, perkembangan tersebut, dikarenakan ahli sosiologi itu sendiri yang mulai menaruh perhatian terhadap dunia pendidikan sebagai suatu telahannya. Banks menyarankan disiplin ilmu ini sebagai cabang sosiologi dan bukan cabang ilmu pendidikan. Masa depan disiplin ilmu ini, menurut para penulis belakangan, akan banyak bergantung pada keeratan kerja sama antara ahli sosiologi dalam aktivitas atau penanganan pendidikan (dengan pengalaman praktis di depan kelas atau pada segi-segi lain penyelenggaraan sistem pendidikan). Ahli-ahli pendidikan yang tertarik pada pendekatan sosiologis, misalnya diberikan latihan dasar mengenai disiplin ilmu sosiologi. Hal ini pada kenyataan sudah terjadi, sebab beberapa dosen dan guru besar sosiologi sudah mulai ikut selaku asisten dalam perkuliahan kependidikan. Beberapa ahli pendidikan juga sudah mulai mengembangkan kariernya selaku ahli sosiologi yang berkualitas. Mobilitas profesional semacam itu, dan penyuburan silang semakin dibutuhkan kedua pihak (ahli sosiologi dan ahli pendidikan) kesemuanya itu untuk kebaikan disiplin sosiologi dan pendidikan. Dalam hubungan ini patut diingat seperti dikatakan Stewart yaitu "kalau ada suatu telaah yang interdisipliner, itulah pendidikan". Dengan begitu, sosiologi pendidikan bukan lagi "milik pribadi" sosiologi dan sama halnya dengan filsafat pendidikan atau psikologi pendidikan.⁹

⁸Sanapiah Faisal, *op.cit.*, hlm. 39.

⁹*Ibid.*, hlm. 40.

Sama halnya, dalam dunia akademik, banyak ditemukan penelaahan yang interdisipliner. Begitu muncul pertanyaan mengenai "hak paten" disiplin keilmuan, berarti kita kembali lagi ke tempat *start* (melakukan pengepingan-pengepingan baik terhadap ilmu maupun tugas penelitian). Bagi para pemain sepak bola, mungkin pantas menyerahkan bulat-bulat "sosiologi persepakbolaan" kepada ahli sosiologi. Para pecandu judi, juga memasrahkan "sosiologi perjudian" kepada ahli sosiologi. Orang-orang kampung di pedesaan tidak memperdebatkan "hak paten" kewenangan ahli-ahli sosiologi dalam telaah "sosiologi pedesaan". Dalam hal sosiologi pendidikan, sama-sama menjadi perhatian telaahnya, baik oleh ahli pendidikan maupun ahli sosiologi. Sosiologi pendidikan merupakan suatu disiplin yang menjadi perhatian, baik ahli sosiologi maupun ahli pendidikan, dan keduanya telah memberikan kontribusi berarti. Ada beberapa wilayah permasalahan yang diteliti ahli sosiologi. Ada juga wilayah permasalahan lain yang ditelaah ahli pendidikan atau tenaga kependidikan. Yang penting, pada keadaan dan tingkat mana pun, semua upaya penelitian dilakukan secara terarah dan terkendali, dan dengan menggunakan metodologi akurat.

Keseluruhan yang ditelaah sosiologi pendidikan hanya satu, di mana ahli sosiologi dan ahli pendidikan bisa bekerja sama. Dalam hubungan ini, selaku orang yang berpengalaman pendidikan, baik tentang sosiologi maupun ilmu pendidikan, D.F. Swift (t.t.) mengatakan perkembangan sesuatu disiplin ilmu (begitu pula kegunaannya bagi masyarakat) berlangsung mengikuti hubungan saling rangsang antara teori yang ada dengan upaya pengumpulan informasi. Keberartiannya masing-masing sama-sama, bergantung antara satu dengan lainnya. Tidak ada artinya membedakan latar belakang motivasi di antara para peneliti. Yang menjadi masalah adalah kemampuan teori yang melandasi informasi yang akan dicari, dan ketepatan metode yang digunakan dalam pengumpulan informasi. Karenanya, sosiologi dan pendidikan, dalam banyak hal saling membantu antara satu dengan lainnya.¹⁰

Dari masa ke masa, sosiologi mengalami perkembangan sebagaimana sejak awal abad ke-20, sosiologi mempunyai peranan penting dalam pemikiran pendidikan, sehingga munculnya sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan mempunyai peranan komplementer bagi pemikiran pendidikan. Sosiologi pendidikan memandang segala pendidikan dari sudut struktur sosial masyarakat. Tugas pendidik menurut sosiologi

¹⁰Sanapiah Faisal, *op.cit.*, hlm. 43.

pendidikan sebagai pemelihara kehidupan dan mendorong kemajuan masyarakat. Pada umumnya kaum pendidik memandang tujuan akhir pendidikan lebih bersifat sosialis daripada individualistis.

Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat mengalami perubahan sosial (*social change*) yang cepat, maju dan memperlihatkan gejala disintegratif. Perubahan sosial yang cepat meliputi berbagai bidang kehidupan dan merupakan masalah bagi semua institusi sosial, seperti: industri, agama, ekonomi, pemerintah, keluarga, perkumpulan, dan pendidikan. Masalah sosial dalam masyarakat dirasakan oleh dunia pendidikan. Masalah pendidikan dalam keluarga, pendidikan di sekolah, dan pendidikan di masyarakat merupakan refleksi masalah sosial dan masyarakat.

Gejala-gejala seperti penderitaan rakyat, kegelisahan sosial dan disintegrasi sosial (konflik) antarras/etnis, konflik politik, konflik antaragama, pemogokan perang dan sebagainya, merupakan gejala umum yang terdapat pada berbagai masyarakat. Krisis yang dialami Indonesia pada 1998 adalah krisis dalam hubungan antarmanusia, tata sosial, ekonomi, politik, dan krisis kepercayaan.

Masyarakat pada hakikatnya merupakan sistem hubungan antara satu dengan yang lain. Tiap masyarakat mengalami perubahan dan kontinuitas (kelangsungan), integrasi dan disintegrasi, kerja sama dan konflik. Dasar ikatan masyarakat ialah adanya kepentingan dan nilai-nilai umum yang diterima anggotanya. Program yang berlawanan dari kelompok masyarakat dan menyebabkan berkurangnya kesetiaan terhadap nilai umum itu. Jika hal itu terjadi, masyarakat jelas akan mengalami disintegrasi.

Ralph Linton (1936) dalam bukunya *The Study of Man: An Introduction* berpendapat bahwa nilai-nilai dalam masyarakat dapat digolongkan menjadi dua golongan: (1) nilai-nilai inti (*universals*); dan (2) nilai-nilai periferi (*alternatives*). Universal itu bersifat kuat, *integrated*, stabil dan diterima sebagian besar anggota masyarakat, bahkan menjadi dasar daripada tata sosial masyarakat. Sedangkan *alternatives* sifatnya tidak stabil, kurang *integrated* dan hanya diterima sebagian anggota masyarakat. Dasar *alternatives* ialah adanya kekhususan pada individu.

Apabila masyarakat berubah cepat, maka alternatif akan tumbuh banyak, hal itu dapat mengakibatkan *universals*, isi nilai-nilai inti menjadi berkurang. Akibatnya kebudayaan menjadi kehilangan pola dan kesatuannya. Tanpa adanya ide-ide dan kebiasaan bersama yang meluas di kalangan masyarakat, anggota masyarakat tidak akan bertindak sebagai kesatuan dalam menghadapi stimuli, mereka tidak dapat bekerja sama secara efektif.

Tendensi dalam masyarakat yang bersifat dinamik, ialah adanya gerakan menjauhi nilai-nilai inti, dan timbulnya *alternatives* yang menggantikan fungsi nilai-nilai inti. Hilangnya nilai-nilai inti berarti disintegrasi sosial, sumber daripadanya ialah perubahan sosial yang cepat, terutama dalam bentuk urbanisasi.

Hubungan yang mula-mula didasari dengan ikhlas berubah menjadi hubungan pamrih. Pergeseran itulah yang merupakan sumber berbagai masalah sosial. Institusi pendidikan tidak mampu mengejar perubahan sosial yang cepat itu, yang disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menimbulkan berbagai *cultural lag*. Karena itu ahli-ahli sosiologi kemudian menyumbangkan pemikiran-pemikiran untuk turut memecahkan masalah pendidikan yang kemudian telah melahirkan suatu disiplin baru yang disebut sosiologi pendidikan.

Perkembangan disiplin sosiologi pendidikan dimulai dari Lester F. Ward yang dianggap sebagai pencetus gagasan timbulnya studi baru ini. Sedangkan pelopor sosiologi pendidikan dalam arti formal ialah John Dewey yang menerbitkan buku *School and Society* (1899). Dalam buku ini beliau menekankan pendapatnya mengenai sekolah sebagai institusi sosial. Lebih-lebih karyanya yang terkenal yaitu: *Democracy and Educational* (1916), lebih mendorong timbulnya sosiologi pendidikan. Pada 1920, F.R. Clow, Dawid Snedden, Ross Finney, C.C. Peters, C.L. Robbins, E.R. Groves, dan lain-lain meneruskan jalan pikiran tersebut dan menekankan kepentingan nilai sosial pendidikan.

Sosiologi pendidikan sebagai mata kuliah pertama kali diberikan oleh Henry Suzzalo (1910) di *Teacher College*, Universitas Columbia. Baru pada 1917 terbit *textbook* Sosiologi Pendidikan yang pertama kali karya Walter R. Smith dengan judul *Introduction to Educational Sociology*. Pada 1916 di Universitas New York dan Columbia didirikan Jurusan Sosiologi Pendidikan. Himpunan untuk studi sosiologi pendidikan dibentuk pada kongres himpunan sosiologi Amerika (1923), dan selanjutnya diterbitkan buku tahunan sosiologi pendidikan. Pada 1928, diterbitkan *The Journal of Educational Sociology* di bawah pimpinan E. George Payne. Majalah *Social Educational* mulai terbit pada 1936. Sejak 1940 dalam *Review of Educational Research* dimuat pula sejumlah artikel yang mempunyai hubungan dengan sosiologi pendidikan.¹¹

¹¹Abdullah Idi, "Bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan S1 & S2", *op.cit.*, hlm. 15.

Di Indonesia, pada 1967, sosiologi pendidikan diberikan pertama kali di IKIP Negeri Yogyakarta Jurusan Didaktik Kurikulum. Ditinjau dari usianya, lapangan penelitiannya serta struktur dan prosesnya, sosiologi pendidikan merupakan disiplin yang masih sangat muda. Ilmu ini makin lama makin berkembang menuju kepada statusnya yang lebih pasti dan memiliki lapangan penelitian tersendiri.

Sosiologi Pendidikan terdiri dari dua kata: sosiologi dan pendidikan. Kedua istilah ini dari segi etimologi berbeda maksudnya, namun sejarah hidup dan kehidupan serta budaya manusia, kedua istilah ini menjadi satu kesatuan tak terpisahkan. Terutama dalam sistem pemberdayaan manusia, di mana sampai saat ini memanfaatkan pendidikan sebagai instrumen pemberdayaan tersebut.

Sejarah pendidikan di Amerika Serikat dikenal dengan kemampuannya mengembangkan ilmu-ilmu kontemporer, di lembaga pendidikan dan tenaga kependidikannya, dikenal pengelompokan mata kuliah yang disebut dengan *Standard for Academic and Professional Instruction in Foundations of Education, Educational Studies and Educational Policy Studies*, dinyatakan bahwa *Foundations of Education* merujuk kepada bidang kajian yang tersusun secara luas yang mendapatkan karakteristik dan teori-teori dasarnya dari sejumlah disiplin ilmu dan bidang kajian lain. Tampak bahwa sosiologi dan pendidikan merupakan suatu kajian yang bersifat integral dalam ilmu pendidikan dan kajian tentang usaha-usaha pencapaian pendidikan secara universal.

H.P Fairchild (1962) dalam bukunya *Dictionary of Sociology*, mengatakan bahwa sosiologi pendidikan merupakan sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah pendidikan yang fundamental. Ada beberapa pendapat tentang definisi sosiologi pendidikan: (1) ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik; (2) ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antara pokok-pokok masalah antara proses pendidikan dan proses sosial; (3) ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang proses belajar mengajar dan mempelajari antara orang satu dengan orang lain; (4) studi komprehensif segala aspek pendidikan dari segi sosiologi yang diterapkan; (5) ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian agar lebih baik.

Beberapa pemikiran pakar mengenai sosiologi pendidikan. George Payne (1928), yang kerap disebut sebagai bapak sosiologi pendidikan,

mengemukakan secara konseptual yang dimaksud dengan sosiologi pendidikan adalah:

... by educational sociology we means the science which describes and explains the institution, social group, and social process, that is the special relationships in which or through which the individual gains and organizes experiences.¹²

Payne menegaskan bahwa, di lembaga sosial, kelompok sosial, proses sosial, terdapat apa yang dinamakan bahwa individu memperoleh dan mengorganisasikan pengalamannya. Hal inilah yang merupakan aspek atau prinsip sosiologisnya.

Charles A. Ellwod (t.t.) mengemukakan bahwa "*educational sociology is the science aims to reveal the connection at all points between the educative process and the social*" (sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari menuju untuk melahirkan maksud hubungan antara semua pokok-pokok masalah antara proses pendidikan dan proses sosial). Menurut E.B Reuter (t.t.), sosiologi pendidikan mempunyai kewajiban untuk menganalisis evolusi dari lembaga-lembaga pendidikan dalam hubungannya dengan perkembangan manusia, dan dibatasi oleh pengaruh dari lembaga pendidikan yang menentukan kepribadian sosial dari individu. Jadi prinsipnya antara individu dengan lembaga-lembaga sosial saling memengaruhi (*process social interaction*).

F. G. Robbins dan Brown (1961) mengatakan bahwa sosiologi pendidikan sebagai ilmu yang membicarakan dan menjelaskan hubungan sosial yang memengaruhi individu untuk mendapatkan dan mengorganisasikan pengalamannya. Sosiologi pendidikan mempelajari kelakuan sosial serta prinsip-prinsip mengontrolnya. E. G Payne (1928) secara spesifik memandang sosiologi pendidikan sebagai studi yang komprehensif tentang segala aspek pendidikan dari segi ilmu yang diterapkan. Bagi Payne sosiologi pendidikan tidak hanya meliputi segala sesuatu dalam bidang sosiologi yang dapat dikenakan analisis sosiologis. Tujuan utamanya adalah memberikan para pendidik/guru-guru, para peneliti, dan orang lain yang menaruh perhatian terhadap pendidikan latihan yang serasi dan efektif dalam sosiologi yang dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih mendalam tentang pendidikan.

¹²Seperti dikutip Abdullah Idi, "Bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan S1 & S2", *op.cit.*, hlm. 9.

S. Nasution (2009) menuturkan bahwa sosiologi pendidikan ialah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik. Ditinjau dari segi etimologinya, istilah sosiologi pendidikan terdiri atas dua perkataan yaitu sosiologi dan pendidikan. Maka jelas bahwa dalam sosiologi pendidikan yang menjadi masalah sentralnya adalah aspek sosiologi dalam pendidikan. Dalam pendidikan terdapat aspek-aspek sosiologis karena situasi pendidikan adalah situasi hubungan dan pergaulan sosial, yaitu hubungan sosial antara pendidik dengan anak didik, pendidik dengan pendidik, anak-anak dengan anak-anak, tenaga administrasi dengan pendidik, dan tenaga administrasi dengan anak-anak.¹³

Hubungan sosial ini secara totalitas, merupakan suatu unit keluarga yakni keluarga sekolah. Keluarga sekolah di mana dapat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jadi, dalam keluarga sekolah terdapat hubungan dan pergaulan sosial yang timbal balik satu sama lain, saling memengaruhi, dan terjadi interaksi sosial.

Jelaslah di dalam sosiologi pendidikan berlaku dan bekerja sama antara prinsip sosiologis dan prinsip pedagogis beserta ilmu bantuannya, misalnya psikologi (ilmu psikologi pendidikan). Atau secara konkret, bahwa dalam sosiologi pendidikan bukan saja terdapat sosiologi atau pendidikan, tetapi merupakan suatu ilmu yang baru ialah kerja sama antara keduanya, dengan mempergunakan prinsip-prinsip sosiologi di dalam seluruh proses pendidikan meliputi metode, organisasi sekolah, evaluasi pelajaran dan kegiatannya.

Dengan sosiologi pendidikan diartikan sebagai ilmu yang mendeskripsikan dan menjelaskan tentang lembaga-lembaga, kelompok-kelompok sosial, proses sosial, di mana terdapat suatu hubungan sosial (*social relationship*) di mana dengan interaksi sosial individu memperoleh dan mengorganisasikan pengalamannya. Inilah yang merupakan aspek atau prinsip-prinsip sosiologinya. Payne dalam Abu Ahmad mengatakan:

The social interdependencies include not only those in which the individual gains and organizes his experiences as a child, but also those social groups and process in which he must function in adult life. These social relationships are for therefore regarded particularly in relation to the educational system in its evolution and changing function.¹⁴

¹³S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 4.

¹⁴E. George, "*Principles...*", *op.cit.*, hlm. 26.

Jadi, bukan saja pada anak-anak, tetapi juga pada orang dewasa, kelompok-kelompok sosial, bahkan pada proses sosial, bahwa interaksi sosial yang dapat membentuk tingkah laku manusia yang dianggap sebagai sistem pendidikan yang berkembang terus. Artinya setiap kali didapati kondisi dan situasi baru, haruslah ada interaksi sosial yang baru dan individu belajar berinteraksi sosial. Inilah yang merupakan prinsip pedagogiknya. W. Dodson menegaskan bahwa:

Education sociology is interested in the impact of the total cultural milieu in which and through which experience is acquired and organized. It is interested in the school but recognizes it as a small part of the total. Education sociology is particularly interested in finding out how to manipulate the educational process (social control) to achieve better personality development.¹⁵

Jelasnya di sini, bahwa Dodson berpendapat bahwa sosiologi pendidikan mempersoalkan pertemuan dan percampuran daripada lingkungan sekitar kebudayaan secara totalitas, di mana dengan begitu terbentuklah tingkah laku. Sekolah dianggap sebagai *total cultural milieu*, sedangkan sosiologi pendidikan memperbincangkan dan berusaha menentukan bagaimana memanipulasikan proses pendidikan dalam upaya mengembangkan kepribadian.

Studi sosiologi pendidikan yang memadai harus mencakup pengertian tentang individu dan lingkungan sosialnya, di mana individu dan lingkungan sosial tidak berdiri sendiri, tetapi terjalin hubungan timbal-balik antara keduanya. Hal ini dikarenakan bahwa tingkah laku individu semenjak lahir sampai meninggal dunia terus-menerus dikondisikan oleh kebudayaan masyarakat, di mana sosiologi pendidikan pun harus menyelidikinya. Sosiologi pendidikan tidak hanya terfokus pada lembaga pendidikan formal, sekolah, tetapi harus meliputi juga lembaga lain, misalnya keluarga kelompok permainan, lembaga agama (gereja, masjid, biara) dan media-media lain, bahkan sejauh *mores* dan cerita-cerita rakyat atau *folkways*. Memang hal ini adalah menarik dan merupakan hal penting yang menentukan pola kebudayaan, menentukan pola keluarga. Tetapi para ahli sosiologi pendidikan keluarga dari kenyataan-kenyataan yang lain telah membahas medan pergaulan atau hubungan sosial dalam keluarga, di sekolah dan masyarakat. Yang dibahas ialah proses interaksi sosial anak-anak dalam keluarga di mana kepribadian anak dibina untuk pertama kali.

¹⁵Francis J. Brown, *Educational Sociology*, Second Ed, Modern Asia Education, Charles E. Tuttle Company, Tokyo: 1961, hlm. 40.

Jadi, proses interaksi sosial yang diselidiki itu mulai dari bayi dalam keluarga, masa kanak-kanak dan prasekolah lengkap dengan kelompok permainannya. Masa sekolah di sini meliputi masa lengkap dengan faktor sosio-kultural yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kepribadian, termasuk kepribadian nasional. Bagi kita bangsa Indonesia, tidak lain, tujuan dari sistem pendidikan nasional adalah untuk merealisasi cita-cita negara Pancasila. Secara singkat, sosiologi pendidikan merupakan tinjauan sosiologis terhadap proses pendidikan dan pengajaran.

Untuk mendapatkan deskripsi yang konkret mengenai tujuan sosiologi pendidikan, George S. Herrington (1974) mengemukakan lima jenis tujuan sosiologi pendidikan:

- To understand the role of the teacher in the community and the school as an instrument of social progress and social factors affecting school;*
- To understand the democratic ideologies, our culture and economic and social trends in relation to both formal and informal educational agencies;*
- To understand social forces and their effects upon individuals;*
- To socialize the curriculum; and*
- To use techniques of research and critical thinking to achieve these aims.¹⁶*

Kelima jenis tujuan pendidikan inilah yang menjadi tujuan spesifik daripada sosiologi pendidikan di Amerika Serikat, yang berlainan dengan tujuan sosiologi pendidikan di negara lain, termasuk di Indonesia. Adapun tujuan sosiologi pendidikan di Indonesia adalah: (1) berusaha memahami peranan sosiologi daripada kegiatan sekolah terhadap masyarakat, terutama apabila sekolah ditinjau dari segi kegiatan intelektual. Dengan begitu, sekolah harus bisa menjadi suri teladan di dalam masyarakat sekitarnya dan lebih luas lagi, atau dengan singkat mengadakan sosialisasi intelektual untuk memajukan kehidupan di dalam masyarakat; (2) untuk memahami seberapa jauhkah guru dapat membina kegiatan sosial anak didiknya untuk mengembangkan kepribadian anak; (3) untuk mengetahui pembinaan ideologi Pancasila dan kebudayaan nasional Indonesia di lingkungan pendidikan dan pengajaran; (4) untuk mengadakan integrasi kurikulum pendidikan dengan masyarakat sekitarnya agar pendidikan mempunyai kegunaan praktis di dalam masyarakat dan negara seluruhnya; (5) untuk menyelidiki faktor-faktor kekuatan masyarakat, yang bisa menstimulus pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak; (6) memberi sumbangan yang positif terhadap perkembangan ilmu pendidikan; (7)

¹⁶George S.Herrington, *An Analysis of Courses in Educational Sociology with Proposal Changes*, November 1974, hlm. 129-130.

memberi pegangan terhadap penggunaan prinsip-prinsip sosiologi untuk mengadakan sosiologi perilaku dan kepribadian anak didik.¹⁷

Hubungan antara sosiologi pendidikan dan psikologi pendidikan adalah keduanya memiliki masalah pokok yang sama, yakni masalah pertumbuhan dan perkembangan kepribadian. Sosiologi pendidikan memiliki pendekatan sosiologi pendidikan dan psikologi pendidikan memiliki pendekatan *psychopedagogis*. Ada kecenderungan bahwa para ahli psikologi mengakui adanya pengaruh nilai-nilai sosial terhadap pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak, di mana sebelumnya mereka menekankan pada aspek individual. Hal ini ternyata dengan adanya perkembangan konsepsi psikologi pendidikan, misalnya: "*psychology deals with responses to any every kind of situation that life present. Educational psychology deals with the behaviour of human beings in educational situation.*"

Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi masalah pokoknya adalah bertalian dengan prinsip belajar dengan memerhatikan semua faktor yang memengaruhinya. Semua kondisi yang memengaruhi, baik kondisi/faktor internal maupun eksternal memberi sumbangan terhadap perbaikan proses pembelajaran. Francis J. Brown menuturkan: "*the subject matter of education systematized results of relevant contributions from all other sources, such as educational biology, educational sociology-antropology, psychology and psychiatry.*" Di sisi lain, psikologi pendidikan mempersoalkan teknik kebiasaan baru (perilaku baru) kepada anak-anak. Sedangkan sosiologi pendidikan, tertarik pada implikasinya, mengingat bahwa sekolah dengan segala kegiatannya, termasuk kurikulum dan teknik/metode pengajarnya merupakan lembaga sosial dan bagian dari lembaga sosial yang lebih luas, misalnya masyarakat. Lebih lanjut, Payne dalam Abu Ahmadi (1991) mengemukakan perbedaan antara psikologi pendidikan dan sosiologi pendidikan:

Educational psychology is an applied science and lies in the field of applied psychology. It is concerned primarily with the laws of psychology applied to the acquisition, organization and evaluation of experience or learning. It seeks to answer the question: "Has is the optimum condition for learning and how can this best be realized? Educational sociology, on the other hand is likewise an applied science in the filed of sociology. It is concerned not with the method of acquisition and organization of experience, but with the effect of learning upon group life, and the effect of smaller group life upon the large society. It seeks to explain how education is a social processes my under optimum

¹⁷Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 11.

*conditions, eliminate social defects, perpetuate desirable institutions, group activities, group forms and practices, and attain for society the ideals and practices, and attain for society the ideals and stands it aims to achieve.*¹⁸

Jadi, psikologi pendidikan dengan mempergunakan hukum-hukum psikologi berusaha menentukan syarat optimal belajar dan bagaimana merealisasikannya. Beda hanya dengan sosiologi pendidikan, dengan melihat sejauh mana pengaruh belajar kepada kehidupan kelompok dan pengaruh kelompok kecil terhadap yang lebih luas terhadap masyarakat. Sosiologi pendidikan berusaha membahas tentang pendidikan sebagai proses sosial dengan kondisi-kondisi yang optimal dapat mengurangi permasalahan dalam masyarakat untuk mencapai tata masyarakat yang lebih baik.

Jelaslah bahwa sosiologi pendidikan merupakan spesialisasi daripada psikologi pendidikan di dalam situasi sosial, dalam kondisi kelompok. Atau, dapat dikatakan bahwa sosiologi pendidikan mempersoalkan perilaku atau kepribadian yang ditentukan oleh kebudayaan. Sebagai *the science of social control*, psikologi pendidikan mempersoalkan proses belajar, *as between the situation response mechanism*. Seterusnya bahwa sosiologi pendidikan dan psikologi pendidikan sebagai *complementair* dalam usaha menelaah pertumbuhan dan perkembangan anak didik ke arah pembinaan kepribadian yang dicita-citakan pada tujuan pendidikan. Sosiologi pendidikan juga merupakan perpaduan antara psikologi pendidikan yang banyak menggunakan prinsip psikologi sosial dengan implikasi psikologi pendidikan dalam kehidupan kelompok.

C. Ruang Lingkup Sosiologi Pendidikan

Perubahan tatanan sosial kehidupan masyarakat pada awal abad ke-20 menyebabkan keberadaan sosiologi menjadi penting dalam mengontrol proses pendidikan di Eropa. Perubahan tersebut sebagai efek dari revolusi sosial di berbagai wilayah Eropa yang memicu akselerasi perubahan arah perkembangan masyarakat Eropa. Era transisi perubahan sosial tersebut menimbulkan konsekuensi logis tak terduga kedatangannya, antara lain merebaknya keraguan terhadap nilai dan tatanan normatif yang telah mapan mengalami erosi jika tidak dilakukan penguatan orientasi.

Kontribusi ilmu sosiologi dengan segala komponen konseptualnya mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan sosial melalui pendi-

¹⁸Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, *op.cit.*, hlm. 6.

pedagogis, bahwa seluruh individu dan masyarakat dari anak-anak sampai orang dewasa, kelompok sosial dan proses sosialnya, berlangsung di sekitar sistem pendidikan yang selalu bergerak dinamis.

Francis Brown (1961) mengemukakan bahwa sosiologi pendidikan memerhatikan pengaruh keseluruhan lingkungan budaya sebagai tempat dan cara individu memperoleh dan mengorganisasi pengalamannya. S. Nasution (2009) mengatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk memperoleh perkembangan kepribadian individu. Dari beberapa pengertian telah dikemukakan dapat disebutkan beberapa konsep tentang tujuan sosiologi pendidikan.

Pertama, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis proses sosialisasi anak, baik dalam keluarga, sekolah maupun dalam masyarakat. Dalam hal ini, harus diperhatikan pengaruh lingkungan dan kebudayaan masyarakat terhadap perkembangan pribadi anak. Misalnya, anak yang terdidik dengan baik dalam keluarga yang religius, setelah dewasa/tua akan cenderung menjadi manusia yang religius. Anak yang terdidik dalam keluarga intelektual akan cenderung memilih/mengutamakan jalur intelektual, dan sebagainya.

Kedua, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Banyak pakar beranggapan bahwa pendidikan memberikan kemungkinan yang besar bagi kemajuan masyarakat, karena dengan memiliki ijazah yang semakin tinggi akan lebih mampu menduduki jabatan yang lebih tinggi pula (serta penghasilan yang lebih tinggi, guna menambah kesejahteraan sosial). Dengan pengetahuan dan keterampilan yang banyak dapat mengembangkan aktivitas serta kreativitas sosial.

Ketiga, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis status pendidikan dalam masyarakat. Berdirinya suatu lembaga pendidikan dalam masyarakat sering disesuaikan dengan tingkatan daerah di mana lembaga pendidikan berada. Misalnya, perguruan tinggi bisa didirikan di tingkat provinsi atau minimal kabupaten yang cukup dengan adanya animo mahasiswa serta tersedianya dosen berkualitas.

Keempat, sosiologi pendidikan bertujuan menganalisis partisipasi orang terdidik/berpendidikan dalam kegiatan sosial. Peranan/aktivitas warga yang berpendidikan/intelektual sering menjadi ukuran tentang maju dan berkembang kehidupan masyarakat. Sebaiknya warga yang berpendidikan tidak segan-segan berpartisipasi aktif dalam kegiatan

sosial, terutama dalam memajukan masyarakat, yakni sebagai motor penggerak dari peningkatan taraf hidup sosial.

Kelima, sosiologi pendidikan bertujuan membantu menentukan tujuan pendidikan. Sejumlah pakar berpendapat bahwa tujuan pendidikan nasional harus bertolak dan dapat dipulangkan kepada filsafat hidup bangsa. Di Indonesia, Pancasila sebagai filsafat hidup dan kepribadian bangsa Indonesia harus menjadi dasar untuk menentukan tujuan pendidikan nasional serta tujuan pendidikan lain.

Keenam, sosiologi pendidikan bertujuan memberi kepada pendidik (termasuk para peneliti dan mereka yang terkait dalam bidang pendidikan) dengan latihan yang efektif dalam bidang sosiologi sehingga dapat memberikan sumbangan solusi kepada masalah pendidikan. Menurut pendapatnya, sosiologi pendidikan tidak hanya berkenaan dengan proses belajar dan sosialisasi terkait dengan sosiologi saja, tetapi juga segala sesuatu dalam bidang pendidikan yang dapat dianalisis sosiologi. Seperti sosiologi yang digunakan untuk meningkatkan teknik mengajar yaitu metode sosiodrama, bermain peranan (*role playing*), dan sebagainya. Dengan demikian, sosiologi pendidikan bermanfaat bagi pendidik, selain berharga untuk menganalisis pendidikan, bermanfaat untuk memahami hubungan antara manusia di sekolah serta struktur masyarakat. Sosiologi pendidikan tidak hanya mempelajari masalah sosial dalam pendidikan, melainkan masalah lain, seperti tujuan pendidikan, kurikulum, strategi belajar, sarana belajar, dan sebagainya. Sosiologi pendidikan sebagai suatu analisis ilmiah atas proses sosial dan pola-pola sosial yang terdapat dalam sistem pendidikan.

Pada zaman peradaban Yunani pada masa Plato (427-327), pendidikan lebih mengutamakan penciptaan manusia sebagai pemikir, kesatria dan penguasa. Pada zaman Romawi, seperti pada masa kehidupan Cicero (106-43), pendidikan mengutamakan penciptaan manusia yang humanistik. Pada Abad Pertengahan, pendidikan bertujuan menjadikan manusia sebagai pengabdian kepada Sang Khalik (baik dalam versi Islam maupun versi Kristen). Pada Abad Pertengahan (1600-1800-an), telah melahirkan teori Nativisme oleh J.J. Rousseau (1712-1778), Empirisme oleh John Locke (1632-1704) dan Konvergensi oleh Stern (1871-1939). Hal ini semua cenderung kepada nilai individu anak sebagai manusia yang memiliki karakteristik yang unik.²⁰

²⁰Abdullah Idi, "Bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan S1 & S2", *op.cit.*, hlm. 19.

Diungkapkan S. Nasution (2009) bahwa ada beberapa konsep tentang tujuan sosiologi pendidikan: (1) analisis proses sosiologi; (2) analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat; (3) analisis interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat; alat kemajuan dan perkembangan sosial; (4) dasar untuk menentukan tujuan pendidikan; (5) sosiologi terapan; dan (6) latihan bagi petugas pendidikan.²¹

Konsep tentang tujuan sosiologi pendidikan di atas menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dalam pendidikan merupakan sebuah proses sehingga pendidikan dapat dijadikan instrumen dalam berinteraksi, berkomunikasi dalam masyarakat. Pada sisi lain, sosiologi pendidikan memberikan penjelasan yang relevan dengan kondisi kekinian masyarakat, sehingga setiap individu sebagai anggota masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan berbagai fenomena yang muncul dalam masyarakat.

Tujuan sosiologi pendidikan, pada dasarnya untuk mempercepat dan meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan. Karena itu, sosiologi pendidikan tidak menyimpang dari upaya-upaya agar pencapaian tujuan dan fungsi pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia. Itulah sebabnya sistem pendidikan nasional menurut UUSPN No. 2/1989 Pasal 3 adalah "untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional." Jelas bahwa pendidikan diselenggarakan untuk: 1) mengembangkan kemampuan manusia Indonesia; (2) meningkatkan mutu kehidupan manusia Indonesia; (3) meningkatkan martabat manusia Indonesia; dan (4) mewujudkan tujuan nasional melalui manusia Indonesia.

Pendidikan diselenggarakan untuk manusia Indonesia, sehingga manusia Indonesia memiliki kemampuan mengembangkan diri, meningkatkan mutu kehidupan, meningkatkan martabat dalam rangka mencapai tujuan nasional. Upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional adalah untuk menciptakan masyarakat madani, yaitu suatu masyarakat yang berperadaban yang menunjang tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang sadar akan hak dan kewajibannya, demokratis, bertanggung jawab, berdisiplin, menguasai sumber informasi dalam bidang iptek dan seni, budaya dan agama. Proses pendidikan yang berlangsung haruslah

²¹S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan, op.cit.*, hlm. 2-4.

menciptakan arah yang sejalan dengan upaya pencapaian masyarakat madani. Dampak dari proses perubahan dunia yang cepat berdampak pada perubahan nilai dan menciptakan perbedaan dalam melihat berbagai nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Perubahan nilai-nilai dalam masyarakat bukan berarti tidak diperhatikan masyarakat. Dalam memerhatikan nilai-nilai yang berkembang, arah yang menjadi anutan antara satu masyarakat dengan masyarakat lain tidak sama. Tidak semua masyarakat secara terarah memahami arah dan tujuan hidup secara benar, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yang mengedepankan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi (Iptek) dan ilmu agama (Imtak).

Sampai saat ini pendidikan dianggap dapat dijadikan sebagai sarana yang efektif dalam menyadarkan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota komunitas dan masyarakat. Pada satu sisi, pendidikan akan mengembangkan kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan; pada sisi lain, agama semakin populer dan terinternalisasi dalam diri setiap pemeluknya, jika diberikan melalui pendidikan.

Dengan demikian, sosiologi pendidikan bertujuan dan berusaha memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan analisis atau pendekatan sosiologis. Adapun secara universal, tujuan dan fungsi pendidikan adalah memanusiakan manusia yang bertujuan menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Sejumlah pakar beranggapan, bahwa pendidikan memberikan kemungkinan yang besar bagi kemajuan masyarakat, karena dengan memiliki ijazah tertentu yang lebih mampu memperoleh pekerjaan tertentu dan penghasilan lebih baik, dalam menuju terpenuhinya kebutuhan keluarga.

Konsep tentang tujuan sosiologi pendidikan di atas menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dalam pendidikan merupakan sebuah proses sehingga pendidikan dapat dijadikan instrumen oleh individu untuk berinteraksi secara tepat di komunitas dan masyarakatnya. Sejumlah masalah yang menjadi ruang lingkup kajian sosiologi pendidikan, antara lain: (1) hubungan sistem pendidikan dengan aspek lain dalam masyarakat, seperti: hubungan pendidikan dengan sistem sosial atau struktur sosial; hubungan antarsistem pendidikan dengan proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan; fungsi pendidikan dalam kebudayaan; fungsi pendidikan dalam proses perubahan sosial dan kultural atau usaha mempertahankan *status quo*; dan fungsi sistem pendidikan formal bertalian dengan kelompok rasial, kultural dan sebagainya; (2) hubungan antarmanusia di sekolah, di mana

cenderung menganalisis struktur sosial di sekolah yang memiliki karakter berbeda dengan relasi sosial di dalam masyarakat luar sekolah, antara lain: hakikat kebudayaan sekolah dan perbedaannya dengan kebudayaan di luar sekolah; dan pola interaksi sosial dan struktur masyarakat sekolah, yang meliputi berbagai hubungan kekuasaan, stratifikasi sosial dan pola kepemimpinan informal yang terdapat dalam *clique* serta kelompok murid lainnya; (3) pengaruh sekolah terhadap perilaku dan kepribadian semua pihak di sekolah/lembaga pendidikan, seperti: peranan sosial guru-guru/pendidik, hakikat kepribadian guru/pendidik, pengaruh kepribadian guru/tenaga pendidik terhadap kelakuan anak didik, dan fungsi sekolah/lembaga pendidikan dalam sosialisasi anak didik; dan (4) lembaga pendidikan dalam masyarakat.²²

Di sini dianalisis pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain dalam masyarakat di sekitar sekolah. Hal yang termasuk dalam wilayah ini yaitu: pengaruh masyarakat atau organisasi sekolah, analisis proses pendidikan yang terdapat dalam sistem sosial dalam masyarakat luar sekolah, hubungan antarsekolah dan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan, dan faktor demografi dan ekologi dalam masyarakat berkaitan dengan organisasi sekolah, yang perlu untuk memahami sistem pendidikan dalam masyarakat serta integrasinya di dalam kehidupan masyarakat.

Menurut perkembangan sosio-historis, manusia tidak pernah berhenti dari kesibukannya, baik kesibukan dalam menghadapi dunia luar atau lingkungan sekitar dan dirinya. Setiap harinya, anak-anak, orang-orang dewasa dan orang tua sibuk dengan pekerjaannya. Dalam kesibukan di mana akan terjalin suatu hubungan timbal balik dalam usaha mencapai dan memenuhi kebutuhan manusia. Ada anak-anak yang sibuk bermain atau bekerja untuk membantu orang tua, orang tua bekerja untuk anak-anak dan orang-orang lain, buruh-buruh pergi ke perusahaan, mahasiswa pergi kuliah, dokter menyembuhkan pasien, tukang kedai melayani para tamunya, dan sebagainya.

Kesibukan dalam pekerjaan dan sebagainya mempunyai hubungan timbal balik satu sama lain (*mutual-symbiosis*), misalnya kesibukan perusahaan, buruh rajin dan sibuk bekerja agar produksi perusahaan dapat berlipat ganda, dapat diperdagangkan kepada pelanggan dan masyarakat. Sebaliknya, buruh-buruh berharap mendapat upah yang cukup untuk kepentingan keluarganya. Pendidik atau guru-guru di sekolah

²²Abdullah Idi, "Bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan S1 & S2", *op.cit.*, hlm. 23.

sibuk mengajar muridnya agar pandai, sebaliknya dia sendiri berharap gajinya dapat mencukupi belanja keluarga. Hal itu mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara perseorangan maupun secara kelompok sosial. Pemenuhan kebutuhan di mana tidak dilakukan diri sendiri, tetapi oleh adanya kerja sama antarmanusia di masyarakat. Kesibukan manusia, di mana manusia sendiri yang dimanifestasikan dalam perilakunya, baik perilaku yang terlihat maupun tidak tampak.

Manusia, dengan segala perilakunya dalam menghadapi lingkungan sekitarnya menimbulkan usaha untuk mengetahui dan akhirnya memanipulasikan lingkungan sekitar manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, perilaku manusia dalam memanipulasikan tanah dengan berbagai ramuan dapat membuat batu merah, dan dari batu merah biji logam besi dapat dibuat beraneka ragam alat-alat pemerah biji logam besi dapat dibuat beraneka ragam alat-alat perlengkapan, dari mekanik burung terbang dapat dibuat pesawat jet supersonik, dari mekanik ikan dapat dibangun kapal selam, dan seterusnya. Dari sini, tampak bahwa manusia ingin tahu kepada lingkungan sekitar, ingin menguasai dan menggunakannya. Kegiatan manusia dalam mengetahui, menguasai dan menggunakan alam sekitarnya telah menimbulkan berbagai cabang ilmu pengetahuan teknik yang terus meningkatkan teknologi canggih.

Dalam kegiatan manusia sebagai makhluk sosial menimbulkan berbagai ilmu pengetahuan, sebagai upaya kegiatan manusia untuk mendidik generasi mudanya, kepada anak cucunya. Dalam kegiatan mendidik inilah manusia berusaha untuk mengetahui bagaimanakah proses pendidikan dilihat dari segi sosialnya, ditinjau dari konstelasi sosial, di mana terjalin kegiatan mendidik, sehingga munculnya ilmu sosiologi pendidikan.

Bab 2

ILMU PENGETAHUAN DAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN

Pada dasarnya, sosiologi pendidikan merupakan cabang ilmu sosiologi, atau yang dikategorikan sebagai sosiologi mikro (*micro sociology*). Sebagai ilmu sosial yang mempelajari hubungan pendidikan dan masyarakat, sosiologi pendidikan pun, sebagaimana ilmu pengetahuan lainnya, dipandang memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian sosiologi pendidikan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan sosial (*social sciences*). Peran sosiologi pendidikan, terutama lebih tampak pada kegiatan penelitian sosiologi pendidikan dalam berbagai bidang penelitiannya.

A. Sumber Ilmu Pengetahuan

Untuk mencapai suatu kebenaran ilmu pengetahuan, yang lazim disebut kebenaran keilmuan atau kebenaran ilmiah, manusia berusaha memperoleh pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang bertujuan mencapai kebenaran ilmiah tentang objek tertentu yang diperoleh melalui pendekatan atau cara pandang (*approach*), metode (*method*), dan sistem tertentu. Jadi, pengetahuan tentang yang benar tidak bisa dicapai secara langsung dan bersifat khusus. Ilmu pengetahuan diciptakan manusia karena didorong rasa ingin tahu manusia yang tidak berkesudahan terhadap objek, pikiran, atau akal budi yang menyangsikan kesaksian indra, karena indra dianggap sering menipu. Kesangsian akal budi lalu diikuti dengan pertanyaan: apakah sesuatu itu? Mengapa sesuatu

itu ada? Bagaimana keberadaannya?; dan apa tujuan keberadaannya?
Masing-masing pertanyaan itu akan menghasilkan:

Ilmu pengetahuan *filosofis* yang mempersoalkan hakikat atau esensi sesuatu (pengetahuan universal);
Ilmu pengetahuan *kausalistik*, artinya selalu mencari sebab musabab keberadaannya (pengetahuan umum bagi suatu jenis benda);
Ilmu pengetahuan yang bersifat deskriptif-analitik, yakni mencoba menjelaskan sifat-sifat umum yang dimiliki oleh suatu jenis objek;
Ilmu pengetahuan yang bersifat normatif, yaitu yang mencoba memahami norma suatu objek yang dari sana akan tergambar tujuan dan manfaat dari objek tersebut.¹

Objek ilmu pengetahuan itu ada yang bersifat materi (objek materi) dan ada yang berupa bentuk (objek forma). *Objek materi* adalah sasaran materiil suatu penyelidikan, pemikiran, atau penelitian keilmuan, bisa berupa benda-benda materiil maupun yang nonmateriil, bisa pula berupa hal-hal, masalah-masalah, ide-ide, dan konsep-konsep. Objek materi tidak terbatas pada apakah ada dalam realitas konkret atau dalam realitas abstrak. Objek materi, yang materiil maupun yang nonmateriil, sebenarnya merupakan suatu substansi yang tidak begitu saja dengan mudah diketahui. Lebih-lebih yang nonmateriil, sedang yang materiil pun sebagai suatu substansi mempunyai segi yang sulit dihitung dan ditentukan jumlahnya.

Kenyataan tersebut mempersulit memahami maknanya. Dalam upaya mengetahui maknanya, orang selalu melakukan pendekatan-pendekatan secara cermat dan bertahap berdasarkan segi-segi yang dimiliki objek materi itu, dan tentu saja berdasarkan kemampuan seseorang. Cara pendekatan inilah yang selanjutnya dikenal sebagai *objek forma* atau *cara pandang*. Cara pandang ini berkonsentrasi pada satu segi saja, sehingga menurut aspek yang satu ini kemudian tergambarlah lingkup suatu pengetahuan mengenai sesuatu hal menurut segi tertentu. Dengan kata lain, *tujuan* pengetahuan sudah ditentukan. Manusia sebagai objek materi, dari segi kejiwaan, keragaan, keindividuan, kesosialan, dan dari segi dirinya sebagai makhluk Tuhan, masing-masing menentukan lingkup dan wawasannya sendiri yang berbeda. Karenanya, suatu hal yang wajar bila pengetahuan yang diperoleh manusia juga berlainan. Bagi ilmu pengetahuan, perbedaan pengetahuan yang dihasilkan masing-masing segi itu

¹Soetrisno & Srdm Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), hlm. 12-13.

justro harus seperti itu, karena dengan demikian pengetahuan tentang manusia tadi bisa semakin lengkap dan jelas. Jika tinjauannya berbeda, tetapi hasilnya sama, ini menunjukkan bahwa cara menentukan hal itu tidak benar, dan ini akan memengaruhi tahapan-tahapan selanjutnya. Dalam keadaan demikian, terjadi *overlapping* yang akan membuat kerancuan. *Overlapping* bukan tidak perlu sama sekali, tetapi jika harus dilakukan maka seharusnya diposisikan sekadar sebagai referensi saja. Suatu pendekatan menurut segi tertentu seharusnya dilakukan secara sistematis dan konsisten sesuai dengan "benang merah" lingkupannya. Menurut objek formanya, ilmu pengetahuan itu berbeda-beda dan banyak jenis serta sifatnya. Ada yang tergolong ilmu *pengetahuan fisis* (ilmu pengetahuan alam), ilmu *pengetahuan nonfisis* (ilmu pengetahuan sosial dan humaniora serta ilmu pengetahuan fisis termasuk ilmu pengetahuan yang bersifat kuantitatif, sementara ilmu pengetahuan nonfisis merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat kualitatif).²

Kebenaran ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang jelas dari suatu objek materi yang dicapai menurut objek forma (cara pandang) tertentu dengan metode yang sesuai dan ditunjang oleh suatu sistem yang relevan. Pengetahuan yang demikian tahan uji, baik dari verifikasi empiris maupun yang rasional, karena cara pandang, metode, dan sistem yang digunakan bersifat empiris dan rasional secara silih berganti.³ Dalam bahasan selanjutnya akan dibahas tentang sejumlah hal, antara lain: sumber pengetahuan; ilmu pengetahuan; dan rancangan penelitian sosial-pendidikan.

Beberapa sumber pengetahuan yang dianggap mampu memberikan informasi untuk pembentukan ilmu pengetahuan:

Pertama, intuisi, merupakan suatu kemampuan atau daya naluriah atau firasat yang dapat menghasilkan imajinasi cemerlang tentang suatu kejadian yang akan terjadi secara cepat. Seorang memiliki daya intuitif yang kuat secara mengesankan dapat meramalkan dan memprediksi sesuatu yang terjadi secara tepat. Akan tetapi, daya atau kemampuan memprediksi itu sulit menjadi atau dijadikan sumber pengetahuan/kebenaran karena terhadap hasil suatu putusan intuitif tidak dapat dilakukan pada saat dikemukakan.

²Soetrisno & Srdm Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, op.cit., hlm. 14

³ibid., hlm. 15-16.

Kedua, kitab-kitab suci. Di samping intuisi, kitab suci juga diperlakukan sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran bagi pengikutnya. Dalam kebenaran kitab-kitab suci, tiap manusia mempunyai suatu agama yang diyakini. Kitab suci diharapkan dapat membimbing dari jalan kesesatan dan kenistaan. Dadang Kahmad (2006) mengatakan bahwa pemahaman manusia, memiliki dua segi membedakan dari perwujudannya:

Segi kejiwaan yaitu suatu kondisi subjektif atau kondisi dalam jiwa manusia, berkenaan dengan apa yang dirasakan oleh penganut agama; dan

Segi objektif, keadaannya muncul ketika agama dinyatakan oleh penganutnya dalam berbagai ekspresi, baik ekspresi teologi, ritual maupun persekutuan.⁴

Kebenaran pengetahuan tidak terletak pada hasil pengujian dan pemeriksaan ilmiah terhadapnya, melainkan karena diterima berdasarkan kepercayaan sebagai wahyu ilahi.

Ketiga, tradisi, merupakan sumber yang paling menonjol dan berpengaruh. Hal ini disebabkan karena anggapan, bahwa tradisi mengandung pengetahuan yang arief dan bijaksana. Karena itu, biasanya anggota masyarakat terus diminta untuk memelihara dan meneruskan tradisi.

Keempat, common sense, merupakan pengetahuan yang dimiliki secara umum oleh masyarakat, namun dasar dan sumbernya tidak diketahui. Pengetahuan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, namun terus diterima sebagai suatu kebenaran yang tidak perlu dibuktikan. *Common sense* sangat memengaruhi perilaku individual dan sosial seseorang.

Kelima, ilmu pengetahuan ilmiah. Metode ilmiah dijadikan cara umum yang digunakan dalam mencapai jawaban tentang fenomena yang ada di alam ini. Ternyata dengan cara ini, ilmu dengan metodenya mampu menguraikan dan menjelaskan lebih banyak rahasia fenomena alam yang terpendam. M. Cholil Mansyur (1997)⁵ mengatakan bahwa masyarakat merupakan kebulatan daripada perhubungan dalam hidup bermasyarakat. Masyarakat dalam pengertian sempit adalah suatu kelompok manusia, yang menjadi ajang hidup bermasyarakat, tidak semua aspek-aspek, tetapi dalam berbagai aspeknya, yang konfigurasiya tidak menentu.

⁴Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 14.

⁵M. Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota-Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1997), hlm. 32.

Pada setiap abad, corak kehidupan bermasyarakat dan keilmuannya sangat berbeda. Pada zaman Yunani Kuno muncullah Plato dan Aristoteles yang menyusun ilmu pengetahuan sistematis, yang kemudian menjadi sendi dari bangunan filsafat umum. Pada abad XII muncul ilmu ekonomi, sedangkan pada abad XIX mulai muncul Ilmu Sosiologi. Perbedaan ini dikarenakan karena berbedanya pemikiran para ahli pada abad berbeda. Cara berpikir juga memengaruhi ilmu pengetahuan orang telah mengemukakan betapa pentingnya naluri bergaul sebagai suatu keharusan hayati.

Sejumlah ilmuwan memiliki pendapat berbeda, bahwa "ilmu" selalu tersusun dari pengetahuan secara teratur, yang diperoleh dalam pangkal tujuan (objek) tertentu dengan sistematis, metodis, rasional/logis, empiris, umum, dan akumulatif. Dalam konteks pengertian "pengetahuan", Bacon dan David Hume dalam Abu Ahmadi (1991)⁶ mengatakan bahwa "pengetahuan sebagai pengalaman indra dan batin." Immanuel Kant mengatakan bahwa "pengetahuan merupakan persatuan antara budi dan pengalaman," sedang Teori Piaget menjelaskan bahwa "tidak ada kepastian dalam pengetahuan." Dalam hal ini, ilmuwan memperoleh sumber-sumber pengetahuan, yakni ide, kenyataan, kegiatan akal budi, pengalaman atau meragukan karena tidak adanya sarana untuk mencapai pengetahuan yang pasti. Secara umum, dapat diketahui bahwa pengetahuan merupakan kesan dalam pemikiran manusia sebagai hasil penggunaan pancaindranya yang berbeda sekali dengan kepercayaan, dan keterangan-keterangan yang keliru.

Mohammad Hatta sejak lama mengemukakan bahwa "tiap-tiap ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal dalam satu golongan masalah yang sama tabiatnya, maupun menurut kedudukannya tampak dari luar, maupun menurut bangunannya dari dalam. Ralph Ross dan Ernest van Den Haag (1957) menulis: "*sciences is empirical, rational, general and cumulative; and it is all four at once.*" Ilmu pengetahuan, dalam hal ini, merupakan suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing, mengenai suatu lapangan pengalaman tertentu yang disusun sedemikian rupa berdasarkan asas-asas tertentu, sehingga menjadi kesatuan; suatu sistem dari berbagai pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan memakai metode tertentu (induksi, deduksi).⁷

⁶Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, op.cit., hlm. 23.

⁷Abdullah Idi, "Bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan S1 & S2", op.cit., hlm. 17.

Wila Huki (1986)⁸ menuturkan bahwa ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui penggunaan metode ilmiah mempunyai beberapa ciri. *Pertama*, hasil yang dapat diperiksa dan diuji. Pengetahuan ilmiah didasarkan pada data yang dapat diuji dan diperiksa. Metode yang digunakan dalam pengumpulan dan pengkajian data yang masuk serta proses kesimpulan/konklusi, secara terbuka dapat dilihat, ditimbang, diukur, dihitung, dan diperiksa ketetapanannya oleh peneliti lain. Oleh karena ilmu didasarkan pada data yang dapat diuji dan diperiksa serta menggunakan metode yang tepat, ilmu hanya mengaitkan diri dengan masalah dan jawabannya dapat diperiksa dan diuji.

Kedua, netralis etis, di mana ilmu adalah pengetahuan yang selanjutnya dapat digunakan untuk beraneka ragam kebutuhan. Setiap penggunaan pengetahuan ilmiah mengharuskan pemakaiannya untuk memilih sejumlah nilai, yaitu apa yang dianggap paling penting dan baik. *Ketiga*, universalisme, di mana ilmu merupakan salah satu ciri ilmu yang menuntut agar yang dicapai melalui usaha-usaha ilmiah secara sah, haruslah berlaku di mana saja dalam konteks yang sama. Hal ini berarti bahwa keabsahan ilmiah tidak ditentukan oleh kepentingan ras, kelompok maupun kepentingan ideologi politik.

Keempat, individualisme, di mana nilai ini menuntut kepada peneliti dan para pengabdian ilmu senantiasa melandaskan diri pada batasan-batasan ilmu dan tidak bersembunyi di balik otoritas kemasyhuran seorang atau pandangan mayoritas.

1. Masyarakat

Masyarakat adalah di mana sekelompok orang/manusia yang hidup bersama yang mempunyai tempat/daerah tertentu untuk jangka waktu yang lama di mana masing-masing anggotanya saling berinteraksi. Interaksi yang dimaksudkan berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Segala tingkah laku dan perbuatan tersebut diatur dalam suatu tata tertib/undang-undang/peraturan tertentu, yang disebut hukum adat.

P.J. Bouman (1976)⁹ mengungkapkan bahwa "masyarakat merupakan pergaulan hidup yang akrab antara manusia, dipersatukan dengan cara

⁸Wila Huki, *Pengantar Sosiologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 15-16.

⁹B.J. Bouman, *Ilmu Masyarakat Umum: Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: PT Pembangunan, 1976), hlm. 32.

tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan mereka." Masyarakat dapat dikatakan pula sebagai suatu hubungan antara kekuatan-kekuatan dari bentuk-bentuk masyarakat dan dengan kehidupan individu. Kehidupan bermasyarakat pada umumnya sangat berbeda antara yang satu dengan masyarakat lain, perbedaan di mana disebabkan struktur masyarakat tersebut dan juga faktor tempat yang mempunyai peranan penting di dalamnya, di samping faktor lain yang memengaruhi masyarakat. Sehingga jelas sekali perbedaan yang ada, apakah masyarakat itu termasuk golongan tinggi, menengah, kota, pedesaan, dan sebagainya.

Horton & Hunt dalam Abdullah Idi (2010)¹⁰ mengatakan bahwa ilmu dapat didefinisikan dengan dua cara. *Pertama*, ilmu pengetahuan merupakan suatu kerangka atau badan dari pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan yang dapat diperiksa dan diuji. *Kedua*, ilmu merupakan suatu metode studi (*methode of study*) yang menghasilkan suatu kerangka pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan dapat diuji serta diperiksa.

Dari definisi di atas, dapat diintisarikan bahwa ternyata keduanya mengarah pada hal yang sama, yaitu ilmu pengetahuan. Kendatipun demikian, harus diakui bahwa definisi pertama lebih menekankan pada produknya, yaitu dalam usaha pengembangan kerangka atau bangunan pengetahuan yang teruji kebenarannya secara ilmiah. Sedangkan definisi kedua lebih menekankan pada prosesnya, yaitu penggunaan metode ilmiah dalam proses mengembangkan kerangka atau bangunan ilmu pengetahuan ilmiah.

Sosiologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan berkenaan dengan masyarakat atau yang berobjek masyarakat manusia. Masing-masing ilmu pengetahuan masyarakat melihat suatu aspek dari kegiatan manusia dalam masyarakat dengan sendi-sendi, metode-metode, dan cara-cara lain yang berbeda. Misalnya masalah pengangguran, di mana dilihat dari aspek ekonomi, masalah pengangguran merupakan suatu yang tidak asing lagi bagi negara berkembang, yang ada kaitannya dengan masalah produksi, berapa jumlah uang yang disediakan pemerintah sebagai tunjangan bagi para penganggur dan usaha apa yang harus dilakukan untuk mereduksi angka pengangguran. Sosiologi akan menyelidiki, adakah dan sejauh mana pengaruh pengangguran terhadap masyarakat, misalnya menimbulkan perilaku kejahatan, pencurian, dan lain-lain; dan

¹⁰Abdullah Idi, "Bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan S1 & S2", *op.cit.*, hlm. 19.

sejauh manakah pengangguran mempunyai dampak terhadap kehidupan keluarga si penganggur, terutama terhadap anak dan istri.

Dilihat dari aspek perkembangannya, sosiologi merupakan salah satu ilmu termuda dari cabang ilmu sosial. Seperti telah diungkapkan sebelumnya bahwa istilah sosiologi sendiri muncul pertama kali dalam buku karangan Auguste Comte (1798-1857) yang berjudul *Positive Philosophy*, yang terbit pada 1842. Menurut Comte, dunia manusia secara sosial dapat diteliti dan dikaji dengan menggunakan metode ilmiah yang sebelumnya hanya digunakan dalam mempelajari fenomena alam.

Ide Comte itu dikembangkan Herbert Spencer yang menerbitkan bukunya yang berjudul *Principle of Sociology*, pada 1876. Spencer menerapkan Teori Evolusi dalam menganalisis masyarakat manusia yang kemudian menghasilkan suatu teori agung tentang evolusi sosial. Teori ini sangat membantu pengembangan sosiologi sebagai suatu bidang studi ilmiah. Pada 1883, seorang kebangsaan Amerika, Rester F. Ward menerbitkan buku yang berjudul *Dynamic Sociology*, di mana Ward mengemukakan bahwa pembangunan sosial (*social progress*) terjadi melalui tindak sosial yang akurat dan di mana para ahli sosiologi berperan sebagai pembimbing.

Sosiologi terus diusahakan pengembangannya oleh kalangan tertentu, dengan caranya sendiri. Dari *Jurnal Sosiologi* yang terbit di Amerika pada 1895 yang sangat membantu usaha memperkenalkan sosiologi, dan pada 1905 terbentuklah *The American Society*. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa pada umumnya orang melihat sosiologi sebagai pembimbing dan pengarah dengan dasar-dasar ilmiah bagi kemajuan dan pengembangan sosial. Tidak mengherankan bila pada awal penerbitan jurnal sosiologi di Amerika tersebut, banyak rekomendasi tentang pemecahan masalah sosial yang dimuat dan diberitakan.

Adapun generasi kedua perintis sosiologi, antara lain: Emile Durkheim, Simmel, Cooley, Weber, Park, dan Thomas, telah membangun dasar-dasar yang telah diletakkan para perintis terdahulu. Sejak 1930, sudah terbit beberapa jurnal sosiologi dengan kualitas isinya yang lebih baik, termasuk artikel-artikel yang didasarkan pada penelitian. Selanjutnya, sosiologi telah menjadi suatu kerangka atau bangunan pengetahuan ilmiah dengan teori didasarkan pada observasi ilmiah.

Penjelasan mengenai ilmu pengetahuan sebagai pranata sosial¹¹ tampak bahwa: (1) pranata sama dengan institusi (*institution*); (2) institusi sosial merupakan suatu sistem peran dan norma sosial saling berkaitan dan terorganisasi di sekitar pemenuhan kebutuhan atau fungsi sosial yang penting; (3) pranata sosial termasuk peralatan dan manusia yang melaksanakan peran; (4) kehidupan sebagai sebuah sistem meliputi jenis-jenis pranata sosial yang merupakan subsistem kehidupan, yaitu keluarga, ekonomi, pendidikan, politik, militer, kesenian, agama, dan rekreasi. Subsistem tersebut pada gilirannya dipandang dan berperan sebagai sistem yang terdiri atas sejumlah subsistem yang bertalian erat satu sama lain; (5) sosialisasi merupakan proses mempelajari dan menghayati norma serta perilaku yang selaras dengan peran-peran sosial yang berlaku dalam masyarakat; (6) proses sosialisasi merupakan proses penyesuaian diri atau adaptasi seorang ke dalam masyarakat atau kehidupan kelompok tempat di mana seorang hidup dan bergaul; (7) hubungan fungsional antara ilmu pengetahuan sebagai sebuah subsistem kehidupan dengan subsistem lain, bahkan dengan kehidupan masyarakat sebagai sistem yang melingkupinya. Di satu pihak, ilmu pengetahuan berperan dalam masyarakat dan kebudayaan; di pihak lain, terdapat giliran masyarakat dan kebudayaan justru memberi arti kepada ilmu pengetahuan.

Hubungan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial (*social change*)¹² dapat dilihat bahwa: (1) perubahan tidak dapat dihindari, di mana tiap masyarakat mengalami perubahan, baik pada struktur sosial maupun dalam interaksi antarwarga; (2) struktur sosial meliputi pola pengaturan status dan peran yang berkaitan satu sama lain. Sedangkan interaksi sosial merupakan proses saling berhubungan dan saling memengaruhi yang terjadi antara warga suatu masyarakat atau komunitas. Perubahan dalam kedua segi inilah yang dinamakan perubahan sosial; (3) perubahan sosial dapat dianalisis melalui perubahan distribusi status dalam masyarakat dan perubahan dalam peran-peran yang meliputi hak dan kewajiban, serta perubahan dalam norma-norma yang mengatur interaksi antarwarga suatu masyarakat; (4) kecepatan perubahan sosial tergantung pada kemajuan masyarakat dalam bidang ilmu baik teknologi, komunikasi, maupun sektor kehidupan materi. Jika salah satu sektor kehidupan mengalami perubahan, sektor lainnya turut berubah; (5) faktor pemicu terjadinya perubahan sosial antara lain pertumbuhan penduduk,

¹¹Abdullah Idi, "Bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan S1 & S2", *op.cit.*, hlm. 19.

¹²*Ibid.*, hlm. 21.

penemuan dan penerapan teknologi baru (inovasi), kontak dengan budaya luar, dan pariwisata alam; (6) peran ganda ilmu/ilmu pengetahuan yakni: *pertama* mewariskan budaya, melalui ilmu sistem nilai dan kepercayaan, pengetahuan dan norma-norma serta adat kebiasaan dan berbagai perilaku yang telah membudaya diwariskan dari generasi berikutnya. *Kedua*, ilmu berperan sebagai pembawa atau pelaku perubahan, apabila ada unsur budaya baru yang dipandang tidak cocok lagi atau unsur budaya yang dipandang tidak cocok lagi perlu dimasukkan ilmu untuk melakukan perannya; (7) bidang teknologi, fungsi ilmu dalam perubahan sosial dimulai dengan mengajarkan teknologi baru kepada anak-anak didik dan orang dewasa, melalui pengembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan perubahan struktur dan pola interaksi sosial; dan (8) penemuan Alex Inkeles, studinya di Asia, Afrika dan Amerika Latin, menggambarkan karakteristik kepribadian manusia modern sebagai berikut: (a) bersedia menerima ide-ide dan pengalaman baru dan terbuka untuk perubahan dan pembaruan; (b) mempunyai kemampuan untuk membentuk pendapat mengenai persoalan yang dihadapi orang lain. Ia tidak tunduk saja kepada pendapat orang lain termasuk tokoh-tokoh tradisional; (c) percaya kepada kemampuan ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan modern, tidak tinggal pasif dan menyerah kepada nasib dalam menghadapi persoalan hidup; (d) mempunyai ambisi bagi dirinya dan bagi anak-anaknya untuk memiliki lapangan kerja dan pendidikan yang lebih baik; (e) memiliki ketetapan waktu dan menyusun rencana kerja untuk waktu yang akan datang; (f) memperlihatkan perhatian yang kuat akan dan ambil bagian dalam urusan sosial; dan (g) berusaha untuk selalu dapat mengikuti berita-berita internasional dan nasional.

Uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara ilmu pengetahuan sosial, dalam hal ini sosiologi pendidikan, dengan kemajuan masyarakat atau perubahan sosial. Kemajuan pendidikan pada masyarakat berdampak terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akhirnya berdampak pada kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sejarah telah menunjukkan kemajuan suatu masyarakat dan negara lebih banyak ditentukan oleh kemajuan pendidikan, seperti kemajuan Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Malaysia. Sudah barang tentu angka kemiskinan pada negara-negara yang pendidikannya maju tersebut dapat diminimalisasi dan tingkat kesejahteraan (ekonomi) akan meningkat, dan disebut negara maju (*developed countries*). Sebaliknya, bila suatu negara di mana tingkat pendidikannya belum maju sangat sulit menjadi negara maju dan dapat

dikategorikan menjadi negara miskin atau negara terbelakang (*under development countries*)¹³ dan negara berkembang (*development countries*). Dengan kemajuan pendidikan dan ekonomi, Malaysia misalnya, telah menargetkan dan siap menjadi suatu negara maju (*developed country*) pada 2020.

Kemiskinan bukanlah suatu yang terjadi dengan sendiri yang terlepas dari aspek lain. Kemiskinan terjadi sebagai hasil interaksi antara berbagai aspek yang ada dalam kehidupan manusia, terutama aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial dapat diartikan bahwa adanya ketidaksamaan sosial di antara sesama warga masyarakat yang bersangkutan, seperti perbedaan suku bangsa/etnis, ras, jenis kelamin, dan usia, yang bersumber dari corak sistem pelapisan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan aspek ekonomi merupakan ketidaksamaan antara sesama warga masyarakat dalam hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pengalokasian sumber-sumber daya ekonomi.

Klasifikasi seorang atau masyarakat dikatakan miskin ditetapkan dengan menggunakan tolok ukur utama: *pertama*, tingkat pendapatan. Misalnya di Indonesia, tingkat pendapatan digunakan ukuran kerja waktu sebulan. Dengan adanya suatu tolok ukur, jumlah dan siapa yang tergolong miskin dapat diketahui. Atau dengan menggunakan batas minimal jumlah kalori dikonsumsi, yang diambil persamaannya dalam kilo gram beras. *Kedua*, kebutuhan relatif per keluarga. Dibuat berdasarkan atas kebutuhan minimal yang harus dipenuhi dalam sebuah keluarga agar dapat melangsungkan kehidupannya secara sederhana, tetapi memadai sebagai warga masyarakat yang pantas.

Jika dikaitkan dengan kemakmuran, ada dua persepsi masyarakat yang kontradiksi satu sama lain. *Pertama*, mereka yang berpikir rasional dan eksak. Bahwa kemakmuran seseorang diukur dengan jumlah serta

¹³Emil Salim menuturkan bahwa status sosial termasuk di dalamnya kemiskinan merupakan salah satu bentuk masalah yang muncul dalam masyarakat, khususnya pada negara-negara yang sedang berkembang. Kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan dalam bidang ekonomi. Dikatakan berada di bawah kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian dan tempat berteduh. Dalam istilah Parsudi Suparlan, adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Lihat pula: (Emil Salim, *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1982, hlm. 37; dan Parsudi Suparlan, *Masyarakat Perkotaan dan Masyarakat Pedesaan*, Bahan Penataran ISD se- Indonesia Timur, Tawang Mangu, Solo, tanggal 1-13 Agustus 1981).

nilai bahan-bahan dan barang-barang yang dimiliki atau dikuasai untuk memelihara dan menikmati hidupnya. Semakin banyak jumlah dan semakin tinggi nilainya, akan semakin tinggi tingkat kemakmuran hidupnya. Kedua, pandangan masyarakat umum, terutama pedesaan yang berpandangan bahwa kemakmuran tidaklah berbeda dengan kebahagiaan. Seseorang akan merasa makmur bila sudah ada keserasian antara keinginan dan keadaan materiil atau sosial yang dimiliki atau dikuasainya. Karenanya mereka selalu berusaha untuk menyeimbangkan antara keinginan dan keadaan materi. Jika keinginan mereka berlebih, sementara keadaan materiil mereka tidak mencukupi, mereka harus mengurangi keinginan yang ada, begitulah sebaliknya.

Kemiskinan menurut pendapat umum, diungkapkan Hartono dan Arnicon Aziz (1993) dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Pertama, kemiskinan yang disebabkan badaniah atau mental seseorang. Pada aspek badaniah, biasanya orang tersebut tidak dapat berbuat maksimal sebagaimana manusia lain yang sehat jasmani. Sedangkan aspek mental, biasanya mereka disifati oleh sifat malas bekerja dan berusaha secara wajar, sebagaimana manusia lain. Kedua, kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam. Biasanya pihak pemerintah menempuh dua cara, yaitu memberi pertolongan sementara dengan bantuan secukupnya dan mentransmigrasikan ke tempat hidup yang lebih layak. Ketiga, kemiskinan buatan atau kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah buatan manusia terhadap manusia lain sebagai akibat dari struktur politik, ekonomi, dan teknologi yang cepat mengakibatkan kemiskinan, karena mengakibatkan terjadinya perubahan sosial yang fundamental. Sebab kemiskinan di antaranya disebabkan oleh struktur ekonomi, dalam hal ini pola relasi antara manusia dengan sumber kemakmuran, hasil produksi dan mekanisme pasar. Semua itu merupakan subsistem atau substruktur dari sistem sosial, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain disebabkan keadaan pasrah pada kemiskinan dan memandangnya sebagai nasib dan takdir Tuhan, juga karena struktur ekonomi, sosial, dan politik yang tidak seimbang.¹⁴

Untuk mengurangi kemiskinan dapat dilakukan dengan memberikan pekerjaan yang memberikan pendapatan yang layak kepada orang miskin. Dengan cara ini diharapkan tingkat pendapatan mereka naik dan harga diri mereka sebagai manusia dapat sejajar dengan manusia lain. Dengan

¹⁴Hartono dan Arnicon Aziz, *MKDU Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 317.

lapangan pekerjaan, dapat memberikan kesempatan kepada mereka untuk bekerja dan merangsang berbagai kegiatan di sektor ekonomi lain.

Ilmu pengetahuan, teknologi dan kemiskinan memiliki kaitan struktur yang jelas. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dua struktur yang tak terpisahkan dalam peranannya untuk memenuhi kebutuhan insani. Ilmu pengetahuan digunakan untuk mengetahui "apa" sedangkan teknologi untuk mengetahui "bagaimana". Ilmu pengetahuan sebagai suatu badan pengetahuan sedangkan teknologi sebagai seni yang bertalian dengan proses produksi, bertalian dalam suatu sistem saling berinteraksi. Teknologi merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi mengandung ilmu pengetahuan.

Jika ditelaah lebih jauh, selain sisi positif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam aplikasinya, keduanya menghasilkan suatu kehidupan di dunia, yang mana dapat membawa malapetaka bagi manusia. Padahal manusia dalam pekerjaan ilmiahnya tidak hanya bekerja dengan akal budi, melainkan dengan seluruh eksistensinya. Ketika manusia sudah mampu membedakan ilmu pengetahuan (kebenaran) dengan etika (kebaikan), dia tidak dapat netral dan bersikap netral terhadap penelitian ilmiah. Sehingga dalam penerapan atau pengambilan keputusan terhadap sikap ilmiah dan teknologi, terlebih dahulu mendapat konsideran moral dan ajaran agama.¹⁵ Tanpa konsideran moral, etika, dan norma agama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berdampak negatif bagi umat manusia, yang justru menciptanya. Di sinilah, urgensi pemihakan dan kearifan ilmuwan terhadap perlunya mengedepankan kemajuan sains-teknologi dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan manusia.

Ada tiga teori pokok tentang kebenaran ilmu pengetahuan, seperti diungkapkan Soetrisno & Srdm Rita Hanafie:¹⁶

Pertama, Teori Saling Hubungan (*Coherence Theory*). Sering dinamakan Teori Konsistensi, karena menyatakan bahwa kebenaran itu tergantung pada adanya saling hubungan di antara ide-ide secara tepat, yakni ide-ide yang sebelumnya telah diterima sebagai kebenaran. Bradley mengatakan suatu proposisi itu cenderung benar jika koheren dengan proposisi

¹⁵Seorang ilmuwan atau ahli teknologi diharapkan bersikap memiliki tanggung jawab sosial, yakni tanggung jawab terhadap masyarakat bertalian dengan asas moral mengenai penelitian etis terhadap objek penelitian keilmuan dan penggunaan pengetahuan ilmiah (teknologi) dengan segala akibat sosial.

¹⁶Soetrisno & Srdm. Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu & Metodologi Penelitian*, op.cit., hlm. 16-17.

benar yang lain, atau jika arti yang dikandungnya itu koheren dengan pengalaman. Kaum idealis menandakan bahwa kebenaran merupakan sifat yang dimiliki ide, karena semua hal yang diketahui merupakan ide-ide, bukan barang atau halnya sendiri. Kebenaran terletak pada saling hubungan di antara ide-ide tentang sesuatu yang ditangkap di alam pikiran. Tingkat saling hubungan di antara ide-ide yang makin meluas akan menunjukkan kesahihan kebenaran yang semakin jelas. Dalam dunia pengadilan, misalnya semakin kuat saling hubungan antara seluruh kesaksian, semakin kuat pula adanya kebenaran.¹⁷

Kedua, Teori Persesuaian (Correspondence Theory). Kalau teori koherensi diterima kebanyakan kaum idealis, teori korespondensi lebih dapat diterima kaum realis. Teori korespondensi mengatakan bahwa seluruh pendapat mengenai suatu fakta dikatakan benar jika pendapat itu sendiri disebut fakta yang dimaksud. Dengan kata lain, kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan tentang fakta dengan fakta itu sendiri. Terhadap suatu pendapat yang menyatakan bahwa di luar hawanya dingin misalnya, teori ini menuntut adanya fakta bahwa dingin itu benar adanya atau nyata berada di luar, bukan hanya ide tentang hawa dingin itu saja. Kalau teori koheren bersifat *rasional-aprioris*, teori korespondensi ini bersifat *empiris-aposterioris*. Jika teori koherensi menekankan adanya saling hubungan di antara ide-ide secara tepat, dan sistematis, teori korespondensi menekankan pada apakah ide-ide itu merupakan fakta itu sendiri atau bukan. Persesuaian antara arti yang dikandung di berbagai pendapat dengan apa yang merupakan fakta-faktanya merupakan kriteria bagi teori korespondensi.¹⁸

¹⁷Menghadapi Teori Koherensi, orang mudah untuk menerimanya begitu saja karena memang logis dan dapat diterima akal sehat serta tidak bertentangan. Namun demikian, saling hubungan di antara ide-ide itu secara logis bisa saja palsu atau bohong. Maka perlu disangsikan atas kemampuan implikasi fakta itu sendiri. Bukankah ide tentang fakta itu hanya merupakan sebagian dari fakta itu sendiri? Lebih dari itu, teori ini menekankan pada sifat rasional dan intelektual. Padahal realitas itu ada dalam dirinya sendiri yang memiliki sifat irrasional. Bukankah teori ini gagal dalam memberikan jaminan kepada kehidupan sehari-hari? Mungkin ya, tetapi paling tidak dengan teori ini dapat diperoleh suatu gambaran yang mapan tentang kebenaran menurut segi tertentu, yakni segi yang rasional.

¹⁸Permasalahan yang akan muncul dari pelajaran ini adalah pernyataan tentang fakta itu merupakan suatu ide yang sifatnya psikis. Lalu fakta itu sendiri memiliki sifat yang nonpsikis. Mungkinkah antara yang psikis dan yang nonpsikis itu bisa sesuai? Rogers mengatakan kebenaran itu terletak pada kesesuaian antara esensi atau arti yang diberikan dengan esensi yang terkandung dalam diri hal atau objek itu sendiri. Pendapat ini menjelaskan bahwa yang bersesuaian itu adalah esensi objek atau faktanya sendiri. Russell lebih memperjelasnya dengan mengungkapkan bahwa kebenaran adalah persesuaian antara arti terkandung oleh perkataan-perkataan yang telah ditentukan, dan

Ketiga, Teori Kegunaan (*Pragmatic Theory*). Apa yang diungkapkan teori korespondensi dapat menyelesaikan secara tuntas pekerjaan dalam mencari kebenaran. Tetapi kehidupan sehari-hari menuntut sesuatu yang lebih praktis dan langsung menimbulkan konsekuensi yang menguntungkan. Pragmatisme mewarnai pandangannya. Pada umumnya teori ini memandang masalah kebenaran menurut segi kegunaannya. Kames mengatakan bahwa "Tuhan itu ada" adalah benar bagi seorang yang hidupnya mengalami perubahan. Kepercayaan yang kuat terhadap adanya Tuhan itu dapat memberikan kesejukan hati, sehingga ada kemampuan batin untuk menerima segala bentuk perubahan.

Dewey memberi ilustrasi tentang kebenaran, dimisalkan kita sedang tersesat di tengah hutan. Kepada diri sendiri kita berkata dengan yakin bahwa "jalan keluarnya adalah ke arah kiri." Pernyataan ini akan berarti jika kita akan benar-benar melangkah ke arah kiri. Selanjutnya, pernyataan ini benar jika arah kiri itu pada akhirnya mengakibatkan konsekuensi positif, yaitu benar-benar dapat membawa kita keluar dari hutan. Jadi kebenaran menurut pragmatisme ini bergantung kepada kondisi-kondisi yang berupa manfaat (*utility*), kemungkinan dapat dikerjakan (*workability*) dan konsekuensi yang memuaskan (*satisfactory results*).

B. Desain Penelitian Sosiologi Pendidikan

Penelitian sosiologi pendidikan merupakan proses mengungkapkan kebenaran didasarkan pada penggunaan konsep dasar yang dikenal sebagai sebuah ilmu. Objek penelitian sosiologi adalah masyarakat, dilihat dari aspek hubungan atau interaksi antarmanusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Objek penelitian sosiologi pendidikan adalah masyarakat sekolah dilihat dari aspek interaksi antarmanusia di sekolah, yakni interaksi anak didik dengan pendidik, pendidik dengan anak didik, pendidik dengan pendidik, dan pendidik dengan administrasi, dan anak didik dengan administrasi sekolah.

Sebelum suatu penelitian sosial, seperti sosiologi pendidikan dilaksanakan, terlebih dahulu dipersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penelitian. Rencana penelitian ini dituangkan ke dalam suatu bentuk tulisan yang disebut rancangan penelitian (*research design*). Desain penelitian adalah pokok-pokok desain seluruh penelitian yang tertuang dalam satu kesatuan naskah secara ringkas, jelas, dan utuh.

kesesuaiannya berupa identiknya arti-arti tersebut.

Desain penelitian dibuat dengan tujuan agar pelaksanaan penelitian dijalankan dengan benar, baik dan lancar. Desain penelitian pada umumnya meliputi: judul penelitian, latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dan fungsi penelitian, tinjauan kepustakaan/landasan teoretik, hipotesis (jika diperlukan), definisi konsep, definisi operasional, metodologi penelitian, dan daftar pustaka.

Tanpa rancangan/desain penelitian, setiap penelitian tidak akan dapat dilakukan dengan baik, benar, dan lancar. Manfaat penyusunan format rancangan penelitian: (1) memberikan pegangan yang lebih jelas kepada peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya, bila akan membangun sebuah rumah maka diperlukan terlebih dahulu tentang bentuk, ukuran, bahan-bahan, dan waktu pelaksanaannya, sebagaimana tergambar dalam rancangan bangunan. Dalam rancangan penelitian harus digambarkan pula permasalahan penelitian, seperti populasi yang diteliti, metode penentuan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengambilan kesimpulan; (2) menentukan batas-batas penelitian yang bertalian dengan tujuan penelitian. Rancangan penelitian selalu menjelaskan apa yang menjadi tujuan penelitian. Dengan tujuan yang jelas seperti tercantum dalam desain penelitian, peneliti dapat memusatkan perhatian dan usahanya ke arah yang nyata secara efektif. Tujuan penelitian tentu diserasikan dengan segi-segi lain, seperti faktor ekonomi, kemampuan, tenaga, alokasi waktu, dan lain sebagainya. Jadi, rancangan penelitian berfungsi sebagai petunjuk tentang cara menjawab permasalahan penelitian; dan (3) memberi gambaran yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dan memberi gambaran tentang macam-macam kesulitan yang akan dihadapi pada saat melakukan penelitian, agar mempermudah peneliti untuk mencari cara mengatasi kesulitan dalam penelitian.

Desain penelitian¹⁹ harus memenuhi persyaratan sebagai: (1) *sistematis*, artinya unsur-unsur yang ada dalam desain penelitian harus tersusun dalam urutan yang logis. Misalnya, setiap desain penelitian harus menentukan judul penelitian, menjelaskan apa yang menjadi latar belakang atau alasannya, apa tujuannya, dan lain sebagainya; (2) *konsisten*,

¹⁹Proposal/usulan penelitian adalah rancangan/desain penelitian yang diajukan ke lembaga tertentu atau sponsor untuk disetujui atau ditolak, dengan tujuan mendapatkan dana. Proposal atau usulan penelitian dituangkan dari desain penelitian yang biasanya dilengkapi lagi dengan pembiayaan dan anggaran biaya, jadwal pelaksanaan, dan organisasi peneliti (bila peneliti lebih dari satu orang).

artinya terdapat kesesuaian di antara unsur-unsur tersebut, misalnya antara judul dan tujuan, antara rumusan masalah dengan tujuan, antara rumusan dan metodologi, dan lain sebagainya; (3) *operasional*, artinya dapat menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, seperti apa yang dicari, dijawab/diukur, apa alat digunakan, bagaimana sampel/informan ditetapkan, bagaimana data dianalisis, dan lain sebagainya; dan (4) masalah penelitian memiliki manfaat bagi masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan, memiliki daya tarik, dan secara operasional dapat diteliti.

Jika hendak membuat desain penelitian untuk persiapan melakukan penelitian sosiologi pendidikan perlu memerhatikan beberapa unsur desain penelitian. Adapun unsur-unsur desain penelitian, adalah sebagai berikut.

1. Latar Belakang Masalah

Istilah latar belakang masalah atau latar belakang masalah penelitian sering juga disebut dengan istilah lain, seperti: latar belakang penelitian, latar belakang pemilihan masalah penelitian, alasan pemilihan judul penelitian, dan alasan pemilihan masalah penelitian. Dalam membahas latar belakang masalah, peneliti harus menunjukkan alasan dipilihnya suatu masalah atau topik atau judul yang hendak diteliti.

Seorang peneliti perlu memerhatikan bahwa banyak masalah yang dapat dipertimbangkan menjadi topik, tetapi hanya satu masalah yang dipilih. Sudah barang tentu ada alasan-alasan logis tentang dipilihnya suatu masalah diusulkan untuk diteliti. Alasan pemilihan masalah tentunya akan beragam, tergantung tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian. Peneliti harus memerhatikan hal-hal yang menarik dan pertimbangan praktis dalam menentukan topik penelitian; apakah memiliki arti penting bagi ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari, atau menarik bagi peneliti dan masyarakat. Sejumlah konsideran penting dalam menyusun latar belakang masalah: pentingnya masalah penelitian yang diajukan; alasan-alasan, manfaat, dan keuntungan penelitian; dan fakta dan data yang mendukungnya sehingga alasan-alasan pengambilan masalah itu cukup kuat.²⁰

²⁰William Wiersma, *Research Methods in Education*, Fourth Edition, Allyn & Bacon, USA, 1991, p. 25-45.

2. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah adalah berupa pertanyaan penelitian. Rumusan masalah kadang kala disebut juga pertanyaan penelitian, di mana jawabannya diperoleh setelah melakukan penelitian. Rumusan masalah harus dijabarkan secara operasional dan spesifik dari judul penelitian. Rumusan yang operasional dan spesifik itu hendaknya sejalan dengan arah jawaban yang bakal disajikan dan disimpulkan nanti.

Dari sejumlah pertanyaan penelitian, peneliti dapat dengan mudah mengumpulkan data dari lapangan. Rumusan masalah yang tegas dan jelas digunakan sebagai penuntun atau pedoman untuk menyusun instrumen atau daftar pertanyaan untuk mengumpulkan data. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun rumusan masalah penelitian: masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan; masalah digunakan dalam susunan kalimat yang sederhana dan mengurangi penggunaan istilah yang belum baku; masalah dirumuskan dengan singkat, jelas, dan padat serta tidak menimbulkan kerancuan pengertian; rumusan masalah harus mencerminkan keinginan yang hendak dicari; rumusan masalah tidak mempersulit pencarian data lapangan terutama data langka; rumusan masalah dapat dipakai sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis (jika digunakan); dan rumusan masalah harus direfleksikan ke dalam judul penelitian.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dimaksudkan sebagai jawaban yang ingin ditemukan dari suatu penelitian. Perumusan tujuan penelitian harus sejalan dengan rumusan masalah penelitian. Biasanya tujuan penelitian dirumuskan dalam kalimat pertanyaan, sedangkan rumusan masalah dirumuskan dalam kalimat pernyataan. Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan keinginan peneliti untuk mencapai sesuatu melalui penelitiannya. Sebenarnya pertanyaan isi yang terdapat dalam rumusan tujuan penelitian sama dengan pertanyaan atau isi yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian.

Jumlah tujuan penelitian harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah penelitian. Jika terdapat dua rumusan masalah maka peneliti pun memiliki dua tujuan penelitian. Rumusan masalah dan tujuan penelitian

berkaitan dengan kesimpulan penelitian. Bila rumusan masalah adalah hal yang dipertanyakan dan tujuan penelitian adalah jawaban yang akan dicari, maka kesimpulan adalah jawaban yang diperoleh.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian perlu dikemukakan agar diketahui hasil yang hendak dicapai dari penelitian dan untuk siapa hasil yang hendak dicapai dari penelitian dan untuk siapa hasil penelitian itu digunakan. Manfaat penelitian dapat bersifat praktis, misalnya mempermudah pengambilan kebijakan atau keputusan, dan bersifat teoretis, misalnya memperkaya dan mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan.

4. Studi Kepustakaan/Kerangka Teoretis

Setiap desain penelitian memerlukan telaah pustaka. Kualitas suatu desain penelitian tercermin pula pada tinjauan pustaka. Istilah *kajian pustaka* disebut juga tinjauan kepustakaan atau landasan teoretis atau kerangka konseptual mengandung pengertian yang hampir sama.

Makin banyak sumber bacaan yang dibaca, makin banyak pula pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti. Ada yang berpendapat bahwa lebih dari lima puluh persen kegiatan dalam seluruh proses penelitian adalah membaca. Fungsi studi pustaka dalam penelitian adalah: memperdalam pengetahuan tentang masalah yang diteliti sehingga dapat menguasai masalah dengan baik; menegaskan kerangka teoretis yang dijadikan landasan berpikir dalam menjawab masalah penelitian yang diajukan;²¹ dan untuk menghindari terjadinya suatu pengulangan dari suatu penelitian.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam studi pustaka, antara lain: mempelajari hasil yang diperoleh dari setiap sumber yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan; mempelajari teknik penelitian yang telah digunakan termasuk teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sumber data, satuan ukuran data, dan lain sebagainya. Mengumpulkan data dari sumber lain yang

²¹Peneliti memerlukan teori yang dapat dijadikan landasan bagi penelitian yang akan dilakukan. Landasan teori perlu ditegaskan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekadar tindakan spekulatif. Landasan teori dalam penelitian dapat mendeskripsikan akar penelitian. Lihat: (William Wiersma, *Research Methods in Education*, *op.cit.*, p. 18-20).

berhubungan dengan bidang penelitian yang akan dilakukan; dan mempelajari analisis deduktif²² dari masalah yang telah diteliti.

Peneliti harus bersikap selektif dalam mencari sumber-sumber bacaan. Artinya, tidak semua kepustakaan atau laporan yang ada perlu ditelaah. Rujukan kriteria dalam menelaah kepustakaan, antara lain: prinsip kemutakhiran, yakni sumber itu bersifat tidak ketinggalan zaman (*up to date*); dan prinsip relevansi, artinya sumber tersebut berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Hipotesis

Hipotesis²³ merupakan suatu pendapat yang sifatnya masih sederhana. Hipotesis juga merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Dikatakan pendapat yang masih sederhana karena belum diuji oleh kenyataan di lapangan. Sumber hipotesis erat kaitannya dengan sumber masalah. Suatu hipotesis bisa saja dimunculkan dari teori yang sudah ada. Dalam hal ini, hipotesis merupakan suatu pendapat baru yang dikembangkan dari suatu teori. Suatu hipotesis yang dimunculkan dari teori disebut *hipotesis deduktif*. Sumber teori tersebut berasal dari kepustakaan dan laporan hasil penelitian sebelumnya. Suatu hipotesis bisa pula dimunculkan dari hasil pengamatan, penjagaan atau pengamatan atas sejumlah kejadian di lapangan. Hipotesis yang dimunculkan dari lapangan disebut *hipotesis induktif*.

Suatu penelitian yang bertitik tolak dari hipotesis dimaksudkan untuk menguji hipotesis.²⁴ Sedangkan suatu penelitian yang tidak memakai hipotesis tidak bertujuan menguji hipotesis, tetapi mencari jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam masalah penelitian. Perlu diungkapkan tentang sejumlah syarat dalam merumuskan hipotesis, yakni: hipotesis disusun dalam kalimat berita; jelas dan tidak bermakna ganda; dan

²²Analisis deduktif adalah berpikir dari hal yang abstrak ke hal yang konkret.

²³Istilah *hipotesis* berasal dari bahasa Latin, yaitu *hypo* dan *thesis*. *Hypo* berarti kurang dari, sedangkan *thesis* berarti pendapat. Hipotesis adalah suatu pendapat yang sifatnya masih sederhana.

²⁴Perlu diungkapkan bahwa tidak semua penelitian harus mempunyai hipotesis. Hipotesis diperlukan jika penelitian memperlakukan hubungan antarvariabel (setidaknya memperlakukan hubungan antara dua variabel). Penelitian eksploratif (penelitian yang sifatnya menjelajah) dan penelitian deskriptif (penelitian yang sifatnya mendeskripsikan) tidak menggunakan hipotesis karena tujuannya tidak menguji hipotesis, tetapi menjawab permasalahan penelitian. Penelitian yang menggunakan hipotesis adalah penelitian eksplanatif (penelitian yang bersifat mencari hubungan antarvariabel).

dirumuskan secara operasional sehingga memudahkan pengujiannya. Sedangkan, ciri-ciri hipotesis yang baik, yakni: bisa diterima akal sehat; dapat menjelaskan masalah secara rasional; menyatakan hubungan yang diharapkan di antara variabel yang dipermasalahkan; harus dapat diuji atau ditentukan benar salahnya; dinyatakan sederhana dan sesingkat mungkin; dan konsisten dengan teori atau fakta yang sudah ada.

Dilihat dari isi dan rumusannya yang beragam, hipotesis dapat dibedakan sebagai berikut: (1) *Hipotesis Alternatif atau Kerja atau Asli (Ha)*. Semua hipotesis yang dirumuskan peneliti, baik yang bersifat relasional maupun deskriptif disebut hipotesis kerja, alternatif, atau asli; dan (2) *Hipotesis Nol (Ho)*. Agar dapat diuji secara statistik, diperlukan sesuatu untuk membandingkan hipotesis kerja tadi, yaitu hipotesis nol. *Hipotesis nol* merupakan formulasi terbalik dari hipotesis kerja atau ingkaran dari hipotesis alternatif.

6. Batasan Konsep/Batasan Masalah

Istilah batasan konsep, kadang kala dikatakan dengan istilah lain: batasan masalah, penegasan masalah, batasan judul, atau penegasan istilah. Dalam desain penelitian, peneliti perlu memberikan batasan pengertian dari setiap istilah, konsep, atau variabel yang digunakan dalam judul penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian.

Kegunaan batasan konsep dalam suatu penelitian adalah: mempermudah pembaca memahami masalah yang akan diteliti; menghindari timbulnya kesalahpahaman antara penyusun desain penelitian dengan orang lain; menjadi pedoman bagi peneliti dalam menyusun instrumen atau alat penelitian; mengurutkan variabel-variabel yang hendak diteliti; menetapkan populasi dan sampel/informan; dan menginterpretasikan hasil penelitian; dan membatasi ruang lingkup masalah.

Patut dijelaskan tentang beberapa pedoman dalam menyusun batasan konsep, yakni: tentukan istilah-istilah pokok atau kata-kata kunci dari judul atau rumusan, atau tujuan yang akan didefinisikan; cari definisi konseptual atau penjelasan-penjelasan tentang istilah tersebut; definisikan konsep, istilah atau variabel penelitian dan hal-hal yang bertalian dengannya; dan susun batasan-batasan tersebut secara sistematis, ringkas tetapi merangkum semua masalah.

7. Metodologi Penelitian

Setelah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi pustaka, hipotesis, dan batasan konsep disusun, langkah selanjutnya adalah menentukan metodologi penelitian. Aspek metodologi penelitian meliputi subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan alat pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

a. Subjek Penelitian

Memilih subjek penelitian sangat penting dilakukan dalam desain penelitian karena data yang akan dikumpulkan, diolah, dan dianalisis berasal dari subjek penelitian. Subjek penelitian adalah sumber tempat peneliti memperoleh keterangan atau data penelitian. Sumber memperoleh keterangan dan data beraneka ragam bentuk maupun jenisnya. Dari keanekaragaman ini peneliti dapat memilih subjek mana yang digunakan sebagai sumber data yang diperlukan. Memilih subjek penelitian harus sesuai dengan objek penelitian. Objek penelitian adalah topik penelitian. Dari objek atau topik penelitian, seorang peneliti dapat menetapkan subjek mana yang akan dipilih sebagai sumber data.

b. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik atau metode pengumpulan data yang lazim digunakan antara lain teknik kuesioner atau angket (*questionnaire*), teknik wawancara (*interview*), teknik observasi (*observation*), dan teknik dokumenter (*secondary sources*).

Untuk mengumpulkan data dengan menggunakan teknik-teknik tersebut, diperlukan alat bantu atau instrumen. Instrumen-instrumen yang digunakan untuk setiap teknik/metode, antara lain: Instrumen untuk teknik kuesioner atau angket adalah kuesioner atau angket; instrumen untuk teknik wawancara adalah pedoman wawancara; instrumen untuk teknik observasi adalah pedoman observasi atau *check list*; instrumen untuk teknik dokumenter adalah pedoman dokumenter atau *check list*.

Sedangkan sumber data yang digunakan untuk setiap teknik/metode, yakni: sumber data untuk teknik kuesioner atau angket adalah orang yang disebut responden (petani, karyawan, pemuda, dan lain-

lain); sumber data untuk teknik wawancara adalah orang yang disebut responden/informan (elite masyarakat, pemuda, buruh, karyawan, dan lain-lain); sumber data untuk teknik observasi adalah benda-benda, kondisi/situasi, dan *check list* kejadian, proses, dan perilaku seorang; dan sumber data untuk teknik dokumenter adalah catatan resmi, dokumenter, laporan, dan *check list* penelitian, media massa, dan lain-lain.

Cara Menentukan Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, sebaiknya digunakan lebih dari satu teknik/metode. Maksudnya, agar kelemahan teknik yang satu dapat ditutup oleh teknik yang lainnya. Sama halnya dalam menggunakan alat pengumpulan data. Peneliti harus memilih dan menentukan sejumlah jenis alat pengumpulan data yang relevan digunakan.

Aspek-aspek yang perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan teknik dan alat pengumpulan data adalah:

- 1) Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Hipotesis (bila ada), Batasan Konsep.

Elemen-elemen desain penelitian menjabarkan berbagai permasalahan dan definisi konseptual dan definisi operasional termasuk tujuan yang ingin dicapai dalam setiap penelitian. Oleh karena itu, penentuan teknik dan alat pengumpulan data harus merujuk dari apa yang telah dinyatakan dalam elemen-elemen tersebut.

- 2) Sumber Data dan Sampel.

Sumber data atau sampel dapat menentukan teknik atau alat pengumpulan data. Jika sumber datanya besar maka teknik yang relevan digunakan adalah kuesioner karena teknik wawancara dan observasi agak sulit dilaksanakan. Sedangkan jika sumber data atau sampelnya kecil, lebih baik digunakan teknik wawancara daripada teknik kuesioner. Sebaliknya, jika sumber datanya adalah catatan-catatan maka teknik yang digunakan adalah dokumenter.

- 3) Lokasi

Jika lokasi penelitian termasuk wilayah yang luas maka sebaiknya dapat menggunakan teknik kuesioner daripada teknik wawancara atau observasi.

4) **Pelaksana**

Jika pelaksana atau tenaga pengumpul data banyak, sedangkan respondenya tidak begitu banyak maka sangat mungkin menggunakan teknik wawancara atau observasi. Jika sebaliknya, teknik kuesioner atau angket lebih tepat digunakan.

5) **Biaya dan Waktu.**

Jika dana dan waktu tampak terbatas maka sebaiknya peneliti menggunakan metode kuesioner/angket daripada menggunakan teknik wawancara dan observasi.

6) **Kedalaman Data**

Jika peneliti ingin mengetahui data lebih dalam maka lebih baik peneliti menggunakan wawancara dibandingkan menggunakan teknik kuesioner atau observasi.

c. **Cara Mengadakan Alat Pengumpulan Data dan Instrumen**

Untuk mengadakan instrumen, diperlukan sejumlah cara, yakni: merencanakan instrumen berdasarkan rincian data yang diperlukan. Data ini bertitik tolak dari definisi konseptual dan definisi operasional yang termuat dalam batasan konsep; menyusun butir-butir soal atau item kuesioner, pedoman, atau format *check list*; melengkapi instrumen dengan petunjuk pengerjaan, surat pengantar, dan lain-lain yang diperlukan; melakukan uji coba instrumen dalam skala kecil maupun besar; melakukan analisis atas uji coba yang telah dilakukan; mengadakan revisi terhadap butir-butir soal maupun pedoman atau *check list* yang dianggap kurang baik berdasarkan uji coba yang telah dilakukan.

d. **Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Setiap masalah penelitian perlu dijawab berdasarkan data yang dikumpulkan. Agar data dapat digunakan dalam menyusun jawaban atas masalah penelitian, data yang terkumpul perlu diolah dan dianalisis. Data yang akan dikelompokkan, diorganisasikan, dianalisis, diinterpretasikan diperlukan perencanaan sejak awal. Teknik pengolahan dan analisis data yang akan digunakan perlu disesuaikan dengan topik atau masalah penelitian, tujuan penelitian, dan hipotesis (bila ada). Pengolahan dan analisis dapat dilakukan secara kuantitatif dan dapat pula secara

kualitatif, tergantung pada jenis data dikumpulkan.²⁵ Setelah data dianalisis dan diinterpretasikan, langkah selanjutnya adalah penulisan laporan penelitian.²⁶

²⁵Jika penelitian bersifat kuantitatif maka pengolahan dan analisis datanya dapat dilakukan dengan statistik. Jika penelitian bersifat kualitatif maka pengolahan datanya dilakukan dengan pengolahan dan analisis nonstatistik atau pengolahan dan analisis kualitatif.

²⁶*Outline* laporan penelitian adalah: (1) *Bagian Pembukaan*: Judul Penelitian, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel (jika ada), Daftar Gambar/Illustrasi/Diagram (jika ada); (2) *Bagian Isi*: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Kepustakaan, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian, Bab V Pembahasan Hasil Penelitian, Bab VI Kesimpulan dan Saran; dan (3) *Bagian Penutup*: Daftar Pustaka, Lampiran (jika ada), dan Indeks (jika perlu). Lihat pula: (L.R.Gay, *Educational Research, Competencies for Analysis and Application*, Fourth Edition, Macmillan Publishing Company, New York, 1992, terutama hlm. 34-72).

Bab 3

PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT

Antara pendidikan di sekolah, keluarga, dan masyarakat terdapat saling keterkaitan. Di satu sisi, karena pendidikan adalah bagian dari kehidupan yang dituntut mampu mengikuti perkembangan di dalamnya. Di pihak lain, karena misi yang diemban pendidikan tidak larut dalam pengaruh lingkungan sekitarnya. Pendidikan, dalam hal ini, tidak diharapkan hanya menjadi buih karena gelombang perkembangan zaman. Berdasarkan nilai-nilai yang diidealkan, pendidikan akan selalu berupaya menjalani kehidupan.

A. Pendidikan dan Sumber Daya Manusia

Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia, bukanlah *taken for granted*, tetapi jauh sebelumnya telah mengalami suatu proses yang panjang yakni melalui "belajar", "pendidikan", dan "pengalaman" tersendiri berdasarkan zamannya. Mereka mungkin tidak sekolah secara "formal" di sekolah, tetapi mereka belajar dari pengalaman. Proses belajar dan pendidikan yang dialami mereka dalam zaman yang berbeda tersebut telah menjadikan manusia mampu memenuhi kebutuhan, menjalani kehidupan hingga memasuki zaman peradaban seperti sekarang ini. Penelitian yang dilakukan Lenki et al. (1995) yang memfokuskan pada judul penelitian: *Sociocultural Revolution: the process of change that results from a society's gaining new information, particularly technology*, setidaknya dapat dideskripsikan lima tipe umum dari suatu masyarakat yang berbeda

dalam teknologinya: *hunting and gathering societies, horticultural and pastoral societies, agrarian societies, industrial societies, and post-industrial societies.*¹ Tentang ringkasan hasil penelitian Lenki et al. tersebut, dapat dilihat pada lampiran 1.²

Adanya tarik-menarik antara dua kekuatan di atas cenderung terlupakan, ketika dibicarakan tentang pendidikan, dan juga tentang perkembangan zaman dengan semua tantangannya. Terhadap permasalahan pendidikan, sering kali hanya mengartikannya secara sempit, dan belum mengangkatnya ke dalam cakupan yang lebih luas. Padahal tanpa memerhatikan dimensi makro-- seperti kekuatan ekonomi, politik dan birokrasi--yang berkembang, masalah besar yang sifatnya mendasar dalam proses pendidikan sulit tersentuh. Bertalian dengan tantangan perkembangan zaman pada masyarakat modern, sumber daya manusia (*human power*) sering diabaikan yang seharusnya dipersiapkan. Padahal SDM yang unggul terbukti lebih menentukan kemajuan suatu masyarakat.³

Antara pendidikan dan perkembangan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kemajuan suatu masyarakat dan suatu bangsa sangat ditentukan pembangunan sektor pendidikan dalam penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sumber Daya Manusia bangsa Indonesia ke depan tidak terlepas dari fungsi pendidikan nasional. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁴

¹John J. Machionis & Linda M. Gerber, *Sociology*, Updated Fourth Canadian Edition, Prentice Hall, USA, 2002, p. 87-94.

²Lihat: (*Lampiran 1: Lenkis' Work: Sociocultural Evolution: A Summary*).

³Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, *Memelihara Tradisi, Merayakan Inovasi, 25 Tahun Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Penyunting Maudjahid AK dan Achmad Syahid, Jakarta, 2003, hlm. 57-58.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II, Pasal 3.

Program pendidikan didasarkan kepada tujuan umum pengajaran yang diturunkan dari tiga sumber: masyarakat, siswa, dan bidang studi. Yang diturunkan dari masyarakat mencakup konsep luas seperti membentuk manusia, menjadikan manusia pembangunan, manusia berkepribadian, manusia bertanggung jawab, dan sebagainya. Tujuan umum ini menyangkut pertimbangan filsafat dan etika yang diturunkan dari harapan masyarakat, seperti apa yang tercantum dalam falsafah bangsa, tujuan pendidikan nasional, sifat lembaga pendidikan, nilai-nilai keagamaan, ideologi, dan sebagainya.

Tujuan pendidikan, sebagaimana diungkapkan oleh A. Tresna Sastrawijaya (1991),⁵ adalah mencakup kesiapan jabatan, keterampilan memecahkan masalah, penggunaan waktu senggang secara membangun, dan sebagainya karena tiap siswa/anak mempunyai harapan yang berbeda. Sementara itu, tujuan pendidikan berkaitan dengan bidang studi dapat dinyatakan lebih spesifik. Misalnya dalam pelajaran bahasa untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara mahir secara lisan dan tulisan. Tujuan pendidikan secara umum seperti itu menyangkut kemampuan luas yang akan membantu siswa untuk berpartisipasi dalam masyarakat.

S. Nasution (2009) mengatakan bahwa pada dasarnya setiap sekolah mendidik anak agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Namun, pendidikan di sekolah sering kurang relevan dengan kehidupan masyarakat. Kurikulum kebanyakan berpusat pada bidang studi yang tersusun secara logis dan sistematis yang tidak nyata hubungannya dengan kehidupan sehari-hari anak didik. Apa yang dipelajari anak didik tampaknya hanya memenuhi kepentingan sekolah untuk ujian, bukan untuk membantu totalitas anak didik agar hidup lebih efektif dalam masyarakat.⁶

Ferdinand Tönnies dalam J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2007) mengungkapkan masyarakat terbagi atas dua tipe yaitu: *pertama*, *gemeinschaft* (hubungan primer), merupakan bentuk kehidupan bersama. Antara anggotanya mempunyai hubungan batin murni yang sifatnya alamiah dan kekal. Dasar hubungannya adalah rasa cinta dan persatuan batin yang nyata dan organis. Ditemukan dalam kehidupan masyarakat desa, keluarga dan kerabat. *Kedua*, *gesellschaft* (hubungan sekunder),

⁵A. Tresna Sastrawijaya, *Pengembangan Program Pengajaran*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 26.

⁶S. Nasution., *Sosiologi Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 148.

merupakan bentuk kehidupan bersama yang anggotanya mempunyai hubungan sifat pamrih dan dalam jangka waktu yang pendek, bersifat mekanis. Ditemukan dalam hubungan perjanjian yang berdasarkan ikatan timbal balik.⁷

Di samping itu, masyarakat mempunyai perbedaan lain, seperti masyarakat pada kota industri berbeda dengan daerah pertambangan atau kampung nelayan, kota universitas berbeda dengan kampung pertanian, daerah pertokoan berbeda dengan daerah pemukiman, dan sebagainya. Fungsi kota atau masyarakat turut menentukan sistem sosialnya. Untuk memahami suatu masyarakat hal-hal yang perlu diketahui adalah sistem nilai struktur kekuasaannya.

Pada setiap masyarakat mempunyai suatu sistem nilai sendiri yang coraknya berbeda dengan masyarakat lain. Dalam sistem nilai itu senantiasa terjalin nilai-nilai kebudayaan nasional dengan nilai-nilai lokal yang unik. Nilai-nilai itu terdapat jenjang prioritas, ada nilai yang dianggap lebih tinggi daripada yang lain, dan dapat berbeda menurut pendirian individual. Masyarakat kota yang mempunyai universitas dan penduduk yang intelektual memiliki sifat lebih terbuka bagi modernisasi dan pendirian atau kelakuan yang baru, lain dari yang lain, seperti pola pikiran, moral, pakaian, pergaulan. Masyarakat desa memiliki tradisi yang kuat dan lebih taat kepada agama, sikap pikiran orangnya lebih homogen. Penyimpangan dari kebiasaan akan segera mendapat sorotan, kelakuan setiap orang seakan diawasi dan diatur orang sekitarnya.

Kedua tipe masyarakat di atas mempunyai persamaan, yakni mereka semua adalah anggota suatu bangsa yang mempunyai kebudayaan nasional yang sama baik dari segi falsafah, bahasa, sejarah, dan budaya. Meskipun ada beberapa daerah mempunyai ciri yang khas. Tiap sekolah, seorang guru harus mengenal lingkungan sosial tempat mereka berada agar dapat memahami latar belakang kultural anak didik. Hindari berbuat atau mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma yang dianut masyarakat. Dalam suatu masyarakat mungkin pula terdapat perbedaan pendirian tentang nilai mana yang dominan. Golongan pengusaha mungkin lebih progresif, golongan dapat mengutamakan tradisi dan cenderung menentang perubahan atau lebih hati-hati/curiga terhadap pembaruan. Golongan agama juga cenderung konservatif dalam mengambil keputusan

⁷J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2007), hlm. 33.

menyangkut kepentingan umum, termasuk pendidikan akan terdapat kesulitan untuk mempertemukan perbedaan norma-norma yang ada.

Perlu diungkapkan bahwa setiap masyarakat memiliki sistem kekuasaan. Setiap masyarakat memiliki tokoh atau kelompok berkuasa dalam mengambil keputusan dan melaksanakannya berdasarkan otoritas yang ada padanya. Kekuasaan seorang atau kelompok nyata dari kemampuan untuk mengendalikan orang lain dan memaksanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab ditugaskan. Kekuasaan digunakan untuk mengendalikan orang agar diperoleh ketertiban dan pengawasan atas tindakan seorang. Tentu saja kekuasaan itu dapat digunakan baik untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Jika kekuasaan jatuh pada orang yang tidak bertanggung jawab tentu sangat merugikan masyarakat.

Suatu masyarakat tidak dapat dipahami tanpa mengetahui sumber-sumber kekuasaan di dalamnya. Suatu kekuasaan itu dapat dipegang oleh pemerintah, bank, industri, pengusaha, universitas, keluarga kaya, golongan agama, ketua adat, dan lain sebagainya. Dalam masyarakat Minang (Bukit Tinggi dan Padang umumnya), kekuasaan dipegang oleh para *ulama'*, meskipun dalam praktiknya pemerintah (*umara'*) yang menjalankan roda pemerintahan. Masyarakat Batak dominan dikendalikan oleh para pemangku adat. Pemberian hukuman terhadap pelanggaran kebiasaan turun-temurun oleh pemangku adat lebih disegani daripada aparat setempat.

Untuk memajukan pendidikan perlu diusahakan bantuan dari mereka yang memegang kekuasaan dalam masyarakat. Untuk mempelajari suatu masyarakat lebih jauh kita dapat mempelajari berbagai aspek di antaranya sebagai berikut: (1) demografi: statistik penduduk, komposisi menurut suku bangsa, agama; (2) ekologi: geografis, penyebaran penduduk; (3) sejarah: perkembangan kehidupan sosial; (4) kegiatan-kegiatan: mata pencaharian, keluarga, pendidikan, rekreasi, agama, keamanan, politik; (5) sistem nilai agama dan adat istiadat; (6) pengaruh kebudayaan daerah dan nasional; dan (7) tokoh-tokoh yang menarik.⁴

Hingga kini dapat dikatakan bahwa hubungan pendidikan di sekolah dan masyarakat masih sangat minim/rendah karena pendidikan di sekolah dipandang terutama sebagai persiapan untuk kelanjutan pelajaran. Kurikulum sekolah bersifat akademis dan dapat dijalankan berdasarkan buku pelajaran tanpa menggunakan sumber-sumber masyarakat. Masyarakat umumnya masih memandang sekolah lebih dominan bertujuan

⁴S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan, op.cit.*, hlm. 152.

mengajarkan anak-anak mereka dalam aspek akademik lebih dominan. John I. Goodlad (1984) mengatakan:

Society in general and parents as a group.... assume that the primary function of schools—whatever the other functions may be—is to teach academics, which they define, correctly if incompletely, as a few subjects and a set of communicating and thinking skills, starting with reading, writing, and arithmetic, that point toward goals of intellectual development.⁹

Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, setelah merdeka, sekolah-sekolah dimasuki anak-anak dari segala lapisan sosial, mulai dari tingkat SD/MI hingga ke SMP/MTs dan selanjutnya pada tingkat universitas/perguruan tinggi (PT). Walaupun murid-murid berpartisipasi masuk ke perguruan tinggi, namun dalam kenyataannya hanya sebagian saja dari mereka yang berhasil mewujudkan cita-cita itu. Sebagian besar dari anak-anak yang memasuki SD berhenti sekolah di tengah jalan dan harus memasuki lapangan kerja. Maka kurikulum akademis sebagai persiapan untuk perguruan tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan banyak siswa. Akibatnya timbul usaha untuk menyesuaikan kurikulum dengan kehidupan dalam masyarakat. Dituntut agar kurikulum relevan dengan kebutuhan masyarakat, anak-anak perlu dipersiapkan agar hidup efektif dalam masyarakat. Salah satu usaha yang agak radikal ialah diciptakannya *community school*. Kendatipun sekolah banyak yang mempertahankan kurikulum *subject centered*, kemungkinan mengadakan hubungan dengan masyarakat sangat diharapkan.

Bertalian dengan masyarakat sebagai sumber, usaha penting dapat dilakukan sekolah adalah menghubungkannya dengan masyarakat, dan menjadikan masyarakat sebagai sumber pelajaran. Bila diperhatikan lingkungan sekolah dengan radius 1 km², maka akan ditemukan banyak hal yang dapat dilakukan dengan pelajaran, bahkan dijadikan masalah pokok pelajaran. Sampai saat ini sangat sedikit institusi sekolah memanfaatkan masyarakat di daerahnya untuk mengembangkan lembaga dan kurikulum pendidikan. Padahal banyak sekali kondisi geografi, ekonomi, budaya, dan peristiwa yang ada di lingkungan sekitarnya sangat membantu berkembangnya kecerdasan siswa. Meningkatkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah faktual di lapangan, mengembangkan kreativitas di waktu senggangnya. Tanpa meninggalkan

⁹John I. Goodlad, *A Place Called School, Prospects for The Future*, (New York: McGraw-Hill Paperbacks, 1984), hlm. 61.

kurikulum sekolah yang bersifat akademis berdasarkan buku pelajaran untuk menjawab soal-soal ujian yang bersifat *textbook*.

Secara geografis, adanya kolam ikan, sawah, tanaman hortikultural, perkebunan, gunung, lembah dapat dijadikan *in-put* pelajaran ilmu alam dan sekitarnya. Adanya pelabuhan udara, dermaga, stasiun kereta api, kantor pos, bank, dan sebagainya menjadi wacana siswa tentang daerahnya. Jika dicermati masyarakat dan lingkungannya sangat kaya informasi yang dapat mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Dikatakan John I. Goodlad (1984) bahwa harapan masyarakat dan generasi muda (anak didik) di Amerika Serikat, diharapkan banyak orang dapat memperoleh pendidikan yang memadai, seperti diungkapkannya, sebagai berikut:

Reduce inequality among individuals and groups by eliminating illiteracy and cultural deprivation;

Improve the economy and economic opportunity by raising the nation's supply of intelligence and skill;

Spread capacity for personal fulfillment by developing talents, skills, and creating the fruits of liberal education;

Prove to be an uplifting influence in the nation's cultural life by broadly diffusing the fruits of liberal education;

Reduce alienation and mistrust while building a new sense of community among people of similar education and similar values;

Reduce prejudice and misunderstanding by fostering contact among diverse groups; and

Improve the quality of civic and political life.¹⁰

Dapat dijelaskan, seperti diungkapkan Goodlad bahwa masyarakat AS memiliki harapan yang banyak terhadap pendidikan di sekolah. Harapan-harapan terhadap masa depan yang lebih baik dalam kehidupannya, mereduksi sejumlah ketimpangan sosial pendidikan, bertalian dengan peningkatan literasi dan derivasi budaya. Sekolah juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan peluang ekonomi dengan meningkatnya kontribusi intelektual dan keterampilan yang dihasilkan sekolah. Meluasnya kapasitas kelengkapan personal dengan mengembangkan talen, keterampilan, dan menuju pendidikan liberal.

Mereduksi keterasingan dan rasa ketidakpercayaan ketika pembangunan suatu rasa memiliki komunitas baru di antara nilai-nilai dan pendidikan yang sama. Selanjutnya, mengurangi prasangka dan salah pengertian

¹⁰John I. Goodlad, *A Place Called School, Prospects for the Future*, *op.cit.*, hlm. 9-10.

dengan memotret kontak pada kelompok-kelompok berbeda. Juga untuk meningkatkan kualitas kehidupan politik dan masyarakat demokrasi.

B. Sekolah dan Masyarakat

Usaha yang dapat dilakukan sekolah ialah menghubungkannya dengan masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai sumber pelajaran. Pada umumnya untuk memanfaatkan sumber-sumber itu, masyarakat dapat dibawa ke dalam kelas, misalnya mengundang narasumber ke sekolah. Atau, sekolah dibawa ke dalam masyarakat melalui karyawisata, praktik lapangan, atau kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa pada perguruan tinggi/universitas.¹¹

Jika dilihat dari sisi maknanya, hubungan sekolah dan masyarakat memiliki pengertian yang sangat luas. Sehingga, masing-masing ahli memiliki persepsi yang berbeda, seperti diungkapkan Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia bahwa: "hubungan masyarakat dan sekolah merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerja sama serta pemenuhan kepentingan bersama."¹²

Dikatakan E.Mulyasa (2009)¹³ bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kesenjangan antara sekolah dan masyarakat adalah minimnya informasi yang bertalian dengan pendidikan di sekolah dan kurang kuatnya hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk memperoleh dukungan yang lebih luas dari masyarakat perlu dilakukan upaya sosialisasi yang bertujuan memperkenalkan beragam hal tentang implementasi kurikulum dan kondisi objektifnya. Hal ini bertujuan agar dapat menarik berbagai perhatian dari berbagai elemen yang berhubungan dengan manajemen sekolah, agar terdorong untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.

Maksud hubungan sekolah dengan masyarakat, dikatakan Sutisna dalam Mulyasa (2009)¹⁴ yakni untuk mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan saran-saran dari sekolah; untuk menilai

¹¹S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, *op.cit.*, hlm. 154.

¹²Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 278.

¹³H.E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 114.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 115.

program sekolah; untuk mempersatukan orang tua murid dan guru dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak didik; untuk mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan; untuk membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sekolah; untuk memberitahukan masyarakat tentang pekerjaan sekolah; dan untuk mengerahkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah.

Joyce L. Epstein (2009) mengungkapkan bahwa cara sekolah membina anak didik direfleksikan dalam cara sekolah memperlakukan keluarga anak didik. Seperti dikatakan Epstein:

If educators view children simply as students, they are likely to see the family as separate from the school. That is, the family is expected to do its job and leave the education of children to the schools. If educators view students as children, they are likely to see both the family and the community as partners with the school in children's education and development. Partners recognize their shared interests in and responsibilities for children, and they work together to create better programs and opportunities for students.¹⁵

Dapat dijelaskan bahwa jika pendidik/guru memandang anak didik sebagai terdidik (*students*), kecenderungan akan terjadi mereka melihat sekolah terpisah dari keluarga anak didik. Keluarga cenderung melakukan pekerjaannya tanpa peduli dengan pendidikan anak-anaknya. Jika pendidik memandang anak sebagai anak-anaknya (*children*), mereka akan memandang keluarga dan masyarakat sebagai tim kerja sama (*partners*) dengan sekolah dalam mendidik dan mengembangkan pendidikan anak didik. Ketiga pihak (sekolah, keluarga/orang tua, dan masyarakat) bekerja sama dalam menciptakan program dan peluang yang lebih baik bagi anak didik. Tentang hak dan kewajiban orang tua dalam memajukan pendidikan (nasional), terlihat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 berikut:

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.¹⁶

¹⁵Joyce L. Epstein and Associates, "School, Family, and Community Partnerships: Caring for the Children We Share", *School, Family, and Community Partnerships, Your Handbook for Action*, Third Edition, Corwin Press, USA, 2009, p. 9.

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bagian Kedua: Hak dan Kewajiban Orang tua, Bab IV, Bagian Kedua, Pasal 7.

Hak dan kewajiban masyarakat dalam pendidikan:

Masyarakat berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya (Pasal 8).

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan (Pasal 9).¹⁷

Peran serta masyarakat dalam pendidikan terlihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XV, Bagian Kesatu, Pasal 54, Ayat 1, 2, dan 3.:

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan;
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan;
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹⁸

Ada banyak alasan tentang pentingnya kerja sama (*partnerships*) dalam pengembangan pendidikan, di mana perlunya peran dan kerja sama sekolah, keluarga, dan masyarakat. Joyce L. Epstein (2009) mengungkapkan:

Partnerships can improve school programs and school climate, provide family services and support, increase parents' skills and leadership, connect families

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bagian Ketiga, Pasal 8 dan 9.

¹⁸Sebagai bentuk adanya peran masyarakat dalam pendidikan, terlihat pada penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat, yakni: (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat; (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan; (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Lihat: (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Bab XV Bagian Kedua, Pasal 55 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Lebih detail lihat: Lampiran 1).

with others in the school and in the community, and help teachers with their work. However, the main reason to create such partnerships is to help all youngsters succeed in school and in later life. When parents, teachers, students, and others view one another as partners in education, a caring community forms around students and begins its work.¹⁹

Dapat diungkapkan dengan sederhana bahwa kerja sama sekolah, keluarga, dan komunitas-masyarakat dapat mengembangkan iklim dan program-program sekolah, memberikan pelayanan kepada keluarga/orang tua (anak didik), meningkatkan keterampilan dan kepemimpinan bagi orang tua, menghubungkan keluarga dengan lainnya di sekolah dan di masyarakat, dan membantu pendidik/guru dalam tugasnya. Akan tetapi, alasan utama untuk menciptakan sejenis kerja sama adalah untuk membantu semua anak didik untuk sukses di sekolah dan kehidupan kemudian hari. Ketika sekolah, orang tua/keluarga, masyarakat, dan pihak lainnya mementingkan kerja sama dalam pendidikan, sebagai bentuk-bentuk kepedulian terhadap anak didik dengan memulainya.

Sekolah juga banyak menggunakan masyarakat sebagai sumber pelajaran memberikan kesempatan luas dalam mengenal kehidupan masyarakat. Diharapkan agar anak didik dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, lebih mengenal lingkungan sosial, dapat berinteraksi dengan orang lain dengan latar belakang keluarga berbeda, seperti: sosial-ekonomi, agama, budaya, dan etnis. Apa yang dipelajari di sekolah hendaknya berguna bagi kehidupan anak di masyarakat dan didasarkan atas masalah masyarakat. Anak diharapkan pula lebih serasi dipersiapkan sebagai warga masyarakat.

Pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk dan menciptakan masyarakat sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya pendidikan, apa yang dicita-citakan masyarakat dapat diwujudkan melalui anak didik sebagai generasi masa depan. Salah satu peranan pendidikan dalam masyarakat adalah dalam fungsi sosial, yakni sekolah merupakan salah satu sarana pendidikan yang diharapkan masyarakat.

Sekolah dalam menanamkan nilai-nilai dan totalitas terhadap tatanan tradisional masyarakat berfungsi sebagai lembaga pelayanan sekolah untuk melakukan mekanisme kontrol sosial (*social control*). Bertalian dengan proses konservasi nilai-nilai budaya daerah ini memiliki fungsi yakni sekolah digunakan sebagai salah satu lembaga masyarakat untuk

¹⁹Joyce L. Epstein, "School, Family, and Community Partnerships: Caring for the Children We Share", *op.cit.*, p. 9.

mempertahankan nilai-nilai tradisional dari suatu masyarakat. Pada masa proses industrialisasi dan modernisasi pendidikan telah mengajarkan nilai-nilai serta kebiasaan-kebiasaan baru, seperti orientasi ekonomi, orientasi kemandirian, mekanisme kompetisi sehat, sikap kerja keras, kesadaran akan kehidupan keluarga kecil, di mana nilai-nilai tersebut semuanya sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi sosial suatu bangsa.

Pendekatan sistemik terhadap pengembangan masyarakat melalui pendidikan adalah pendekatan di mana masyarakat tradisional sebagai input dan pendidikan sebagai suatu lembaga pendidikan masyarakat sebagai pelaksana proses pengembangan masyarakat yang dicitakan, sebagai output yang dikehendaki. KI. Hajar Dewantoro pernah mengatakan ada tiga lingkungan pendidikan: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sejak awal, dalam Tap MPR No. 1/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah mencantumkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab: orang tua, pemerintah dan masyarakat. Tampak dalam Undang-Undang No. 2/2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikatakan pula bahwa bentuk pendidikan juga dibagi menjadi tiga: pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal.²⁰

Lebih lanjut, dalam pelaksanaannya ketiga bentuk pendidikan tersebut dapat dilakukan pada lembaga: pemerintah, keluarga, keagamaan, dan pendidikan lain. Lembaga keluarga menyelenggarakan pendidikan informal, lembaga pemerintah, lembaga agama, dan lembaga pendidikan lain menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal. Bentuk-bentuk pendidikan nonformal cukup banyak jenisnya, seperti kursus keterampilan yang mempersiapkan tenaga terampil: kursus menjahit, kursus komputer, kursus montir, dan kursus bahasa asing.

Pada umumnya, bentuk pendidikan formal yang berjalan ini terdiri dari empat jenjang: Sekolah Dasar/Ibtidaiyyah (SD/MI), Sekolah Lanjutan Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SLTP/MTs), Sekolah Lanjutan Atas/Madrasah Aliyah (SLTA/MA), dan Perguruan Tinggi (PT), seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2/1999.

²⁰Pendidikan formal dilaksanakan di sekolah, pendidikan informal di keluarga, dan pendidikan nonformal di masyarakat. Ketiganya saling keterkaitan dan memengaruhi dalam membentuk anak didik yang siap hidup pada zamannya, seperti yang diharapkan pada tujuan pendidikan nasional.

Proses pendidikan dari tiga bentuk pendidikan di atas dipengaruhi oleh sistem politik dan ekonomi. Dengan adanya beragam jenis politik dan beragam kondisi ekonomi, arah proses pendidikan akan beragam pula untuk setiap bentuk pendidikan yang diselenggarakan keluarga, pemerintah, lembaga keagamaan dan lembaga non-keagamaan. Sebagai contoh, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas pendidik, maka Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, dengan melakukan program sertifikasi. Adanya program sertifikasi ini berarti berkorelasi positif terhadap tingkat pendapatan (*salary/take home pay*) pendidik/guru dan dosen yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas profesional dalam mendidik. Jika para pendidik menjadi profesional dalam menjalankan tugasnya, kualitas pembelajaran di kelas dan akhirnya kualitas pendidikan nasional akan menjadi lebih baik. Ada korelasi positif antara tingkat kesejahteraan ekonomi para pendidik (guru dan dosen) dengan proses peningkatan kualitas profesional sebagai pendidik.

Masyarakat modern umumnya memandang pendidikan sebagai peranan penting dalam mencapai tujuan sosial. Pemerintah bersama orang tua menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan untuk kemajuan pendidikan, sosial dan pembangunan bangsa, sebagai upaya mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan. Seperti: rasa hormat kepada orang tua dan pemimpin, kewajiban mematuhi aturan dan norma-norma berlaku, dan meningkatkan jiwa patriotisme.

Pendidikan juga diharapkan untuk memupuk iman dan takwa kepada Allah Swt., meningkatkan kemajuan dan pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam hal ini, pendidikan diharapkan dapat mengembangkan wawasan anak terhadap ideologi, politik, agama, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan secara tepat dan benar, sehingga dapat membawa kemajuan individu, masyarakat dan negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Pemahaman terhadap aspek-aspek demikian tidak boleh menyimpang dari kerangka tujuan dan program pembangunan nasional. Jika, tujuan pembangunan nasional adalah menciptakan manusia Indonesia yang berilmu pengetahuan-berteknologi dan beriman-bertakwa (Iptek-Imtak), proses pendidikan pun harus berupaya menuju ke arah tujuan pembangunan nasional tersebut.

Lebih jauh, ada sejumlah fungsi dan peranan pendidikan bagi suatu masyarakat, seperti diungkapkan Wuradji: (1) fungsi sosialisasi; (2) fungsi kontrol sosial; (3) fungsi pelestarian budaya masyarakat; (4) fungsi latihan dan pengembangan tenaga kerja; (5) fungsi seleksi dan alokasi, (6) fungsi pendidikan dan perubahan sosial; (7) fungsi reproduksi budaya; (8) fungsi difusi kultural; (9) fungsi pendidikan sosial; dan (10) fungsi modifikasi sosial. (Wuradji, 1988: 31-42). Jeanne H. Ballantine (1983) menyatakan bahwa fungsi pendidikan dalam suatu masyarakat, sebagai berikut: (1) fungsi sosialisasi, (2) fungsi seleksi, latihan dan alokasi, (3) fungsi inovasi dan perubahan sosial, (4) fungsi pengembangan pribadi, dan sosial.²¹

Dari beragam pendapat di atas, pada prinsipnya, tidak ada perbedaan substantif tentang fungsi pendidikan di masyarakat, di mana antara ahli yang satu dengan yang lain saling melengkapi. Suatu hal pasti bahwa fungsi pendidikan di masyarakat sangat krusial dalam menjaga dan melanjutkan fungsi pendidikan di sekolah dan keluarga, di mana satu sama lain tidak dapat dipisahkan, tetapi integral dalam membentuk suatu sistem pendidikan yang memberdayakan anak didik dalam pengertian sesungguhnya. Beberapa pengertian dan pemahaman tentang fungsi pendidikan di masyarakat selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, fungsi sosialisasi. Di dalam masyarakat praindustri, generasi baru belajar mengikuti pola perilaku generasi sebelumnya tidak melalui lembaga-lembaga sekolah seperti sekarang ini. Pada masyarakat pra industri, anak belajar dengan jalan mengikuti atau melibatkan diri dalam aktivitas orang yang lebih dewasa. Anak-anak mengamati apa yang mereka lakukan, kemudian menirunya dan anak-anak belajar dengan berbuat atau melakukan sesuatu sebagaimana dilakukan oleh orang dewasa. Untuk keperluan tersebut anak-anak belajar bahasa atau simbol-simbol yang berlaku pada generasi tua, menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang berlaku, mengikuti pandangannya dan memperoleh keterampilan tertentu yang semuanya diperoleh lewat budaya masyarakatnya.

Dalam situasi demikian, semua orang dewasa merupakan guru, tempat di mana anak-anak meniru, mengikuti dan berbuat seperti apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Sejak awal, anak-anak telah dibiasakan dengan hal-hal yang dilakukan oleh orang tua atau generasi

²¹ Seperti dikutip Abdullah Idi, "Bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan S1 & S2", *op.cit.* hlm. 32.

tua. Hal itu merupakan bagian dari perjuangan hidupnya. Segala sesuatu dipelajari adalah berguna dan berefek langsung dari kehidupannya sehari-hari. Hal ini semua bisa terjadi oleh karena budaya yang berlaku dalam masyarakat, di mana anak menjadi anggotanya, adalah stabil, tidak berubah dari waktu ke waktu, yang bersifat statis.

Dengan semakin majunya suatu masyarakat, ditandai dengan adanya pola budaya menjadi lebih kompleks dan memiliki diferensi antara kelompok masyarakat satu dengan yang lain, antara dianut individu satu dengan individu lain. Masyarakat tersebut telah mengalami perubahan sosial (*social change*). Ketentuan-ketentuan untuk berubah ini sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, mengakibatkan terjadinya setiap transmisi budaya dan satu generasi ke generasi berikutnya selalu menjumpai permasalahan baru. Di dalam suatu masyarakat sekolah telah melembaga demikian kuat, maka sekolah menjadi sangat diperlukan bagi upaya menciptakan/melahirkan nilai-nilai budaya baru (*cultural reproduction*).

Proses reproduksi budaya dimaksudkan upaya mendidik anak-anak untuk mencintai dan menghormati tatanan lembaga sosial dan tradisi yang sudah mapan adalah menjadi tugas sekolah. Yang termasuk di dalam lembaga-lembaga sosial adalah keluarga, lembaga keagamaan, lembaga pemerintahan, dan lembaga ekonomi. Di dalam permulaan masa-masa pendidikannya, merupakan masa sangat penting bagi pembentukan dan pengembangan serta pengadopsian nilai-nilai ini. Masa-masa pembentukan dan pembangunan upaya pengadopsian nilai dilakukan sebelum anak-anak mampu memiliki kemampuan kritik dan evaluasi secara rasional.

Sekolah-sekolah menjanjikan kepada anak-anak deskripsi tentang apa yang dicita-citakan lembaga sosialnya. Anak-anak didorong, dibimbing dan diarahkan untuk mengikuti pola-pola perilaku orang dewasa melalui cara ritual tertentu, drama, tarian, nyayian, dan lain sebagainya, yang semuanya merupakan wujud nyata dari budaya masyarakat yang berlaku. Melalui cara seperti itu anak-anak dibiasakan untuk berlaku sopan terhadap orang tua, hormat dan patuh terhadap norma-norma berlaku. Lembaga-lembaga agama mengajarkan bagaimana penganutnya berbakti kepada Tuhan berdasarkan tata cara tertentu.

Lembaga-lembaga pemerintahan mengajarkan bagaimana anak kelak apabila telah menjadi warga negara sesungguhnya, dengan memenuhi

kewajiban-kewajiban negara, memiliki jiwa patriotik dan memiliki kesadaran berwarga negara. Semua ajaran dan pembiasaan tersebut pada permulaannya berlangsung melalui proses emosional, bukan melalui proses kognitif.

Dalam proses belajar untuk mengikuti pola acuan bagi tatanan masyarakat yang telah mapan dan melembaga, anak-anak belajar untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tradisional di mana institusi tradisional tersebut dibangun. Totalitas proses di mana anak-anak belajar mengikuti pola-pola dan nilai-nilai budaya yang berlaku tersebut dinamakan proses sosialisasi. Proses sosialisasi selanjutnya harus berjalan dengan wajar dan mulus karena pentingnya masa-masa permulaan proses sosialisasi. Orang tua dan keluarga berharap sekolah dapat melaksanakan proses sosialisasi bagi anak-anak dengan baik.

Pada lembaga-lembaga sosial tersebut, guru di sekolah dipandang sebagai model dan dianggap dapat mengemban amanat orang tua (keluarga dan masyarakat) agar anak-anak memahami dan kemudian mengadopsi nilai-nilai budaya masyarakatnya. Dalam hubungan ini sekolah dianggap, terutama di daerah pedesaan, sebagai museum yang menyimpan tentang nilai-nilai kebajikan (*museum of virtue*) (Pardius and Parelius, 1978: 24). Dengan anggapan demikian, masyarakat menginginkan sekolah beserta staf pengajarnya harus mampu mengajarkan nilai-nilai kebajikan dari masyarakatnya (*the old virtue*) atau keseluruhan nilai-nilai yang diyakini dan menjadi panutan dan pandangan masyarakatnya.

Untuk memberikan pendidikan mengenai kedisiplinan, rasa hormat dan patuh kepada pemimpin, kemauan kerja keras, kehidupan bernegara dan kehidupan demokrasi, menghormati, nilai-nilai perjuangan bangsa, rasa keadilan dan persamaan, aturan-aturan hukum dan perundang-undangan dan sebagainya, kiranya lembaga utama yang paling berkompeten adalah lembaga pendidikan. Sekolah mengemban tugas untuk melaksanakan upaya-upaya mengalihkan nilai-nilai budaya masyarakat dengan mengajarkan nilai-nilai yang menjadi *a way of life* masyarakat dan bangsanya. Untuk memenuhi fungsi dan tugasnya tersebut sekolah menetapkan program dan kurikulum pendidikan, beserta metode dan teknikya secara pedagogis, agar proses transmisi nilai-nilai tersebut berjalan lancar dan mulus.

Dalam hubungannya dengan transmisi nilai-nilai, terdapat beragam budaya antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, dan

antara negara satu dengan negara yang lain. Sekolah-sekolah keguruan di Uni Soviet misalnya, para guru harus mengajarkan rasa solidaritas dan rasa tanggung jawab untuk menyatu dengan kelompoknya dengan mengembangkan sistem kompetisi di mana mereka. Sekolah-sekolah di Amerika Serikat, guru harus mengembangkan kemampuan untuk hidup mandiri dan kemampuan bersaing dengan melakukan upaya-upaya kompetisi penuh di antara siswa.

Kedua, fungsi kontrol sosial. Sekolah dalam menanamkan nilai-nilai dan loyalitas terhadap tatanan tradisional masyarakat harus berfungsi sebagai lembaga pelayanan sekolah untuk melakukan mekanisme kontrol sosial. Durkheim menjelaskan bahwa pendidikan moral dapat dipergunakan untuk menahan atau mengurangi sifat-sifat egoisme pada anak-anak menjadi pribadi yang merupakan bagian masyarakat terintegral di mana anak harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial, dalam Jeanne H. Ballantine (1983: 8). Melalui pendidikan demikian, sebagai individu mengadopsi nilai-nilai sosial dan melakukan interaksi nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya sebagai anggota masyarakat, individu dituntut untuk memberi dukungan dan berusaha mempertahankan tatanan sosial yang berlaku.

Sekolah sebagai lembaga berfungsi mempertahankan dan mengembangkan tatanan sosial dan kontrol sosial mempergunakan program-program asimilasi dan nilai-nilai sub-grup beraneka ragam, ke dalam nilai-nilai dominan yang memiliki dan menjadi pola panutan bagi sebagian masyarakat. Sekolah berfungsi untuk mempersatukan nilai-nilai dan pandangan hidup etnik yang beraneka ragam menjadi satu pandangan yang dapat diterima seluruh etnik. Dapat dikatakan bahwa sekolah berfungsi sebagai alat pemersatu dari segala aliran dan pandangan hidup yang dianut para siswa. Di Indonesia, sekolah harus menanamkan nilai-nilai Pancasila yang dianut oleh bangsa dan negara kepada anak-anak di sekolah.

Ketiga, fungsi pelestarian budaya. Sekolah di samping mempunyai tugas mempersatu budaya-budaya etnik yang beraneka ragam juga perlu melestarikan nilai-nilai budaya daerah yang masih layak dipertahankan. Seperti bahasa daerah, kesenian daerah, budi pekerti dan suatu upaya mendayagunakan sumber daya lokal bagi kepentingan sekolah dan sebagainya. Fungsi sekolah berkaitan dengan konservasi nilai-nilai budaya daerah, setidaknya ada dua fungsi: (1) sekolah digunakan sebagai salah satu lembaga masyarakat untuk mempertahankan

nilai-nilai tradisional masyarakat dari suatu masyarakat pada suatu daerah tertentu. Misalnya, sekolah di Jawa Tengah, digunakan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya Jawa Tengah, sekolah di Jawa Barat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya Sunda, sekolah di Sumatera Barat untuk mempertahankan nilai-nilai budaya Minangkabau, sekolah di Sumatera untuk mempertahankan nilai-nilai Sumatera Selatan, dan sekolah di Bangka Belitung untuk mempertahankan nilai-nilai budaya Bangka Belitung; (2) sekolah mempunyai tugas mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa dengan mempersatukan nilai-nilai yang beragam demi kepentingan nasional.

Untuk memenuhi dua tuntutan tersebut maka perlu disusun kurikulum yang baku yang berlaku untuk semua daerah dan kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi dan nilai-nilai daerah tertentu. Dalam hal ini, sekolah harus menanamkan nilai-nilai yang dapat menjadikan anak-anak tersebut menjadi generasi yang mencintai daerah, bangsa, dan tanah air.

Keempat, fungsi seleksi, latihan dan pengembangan tenaga kerja. Jika kita amati apa yang terjadi dalam masyarakat dalam rangka menyiapkan tenaga kerja untuk suatu jabatan tertentu, maka di sana setidaknya terdapat tiga kegiatan, yaitu kegiatan seleksi, latihan untuk suatu jabatan, dan pengembangan tenaga kerja tertentu. Proses seleksi ini terjadi di segala bidang baik untuk masuk sekolah maupun untuk masuk pada jabatan tertentu. Untuk masuk sekolah tertentu harus mengikuti testing kecakapan tertentu. Sebagai contoh, untuk dapat masuk pada suatu sekolah menengah tertentu harus menyerahkan Nilai EBTA Murni (NEM). Dan nilai NEM yang masuk dipilih nilai NEM yang tinggi dari nilai tertentu sampai nilai terendah. Jika bukan nilai yang menjadi persyaratan yang ketat, tetapi biaya sekolah yang tak terjangkau untuk masuk sekolah tertentu. Oleh karena itu, anak yang nilainya rendah dan ekonominya lemah tidak kebagian sekolah yang mutunya tinggi. Demikian pula untuk memangku jabatan pada pekerjaan tertentu, mereka yang diharuskan mengikuti seleksi dengan berbagai cara yang tujuannya untuk memperoleh tenaga kerja yang cakap dan terampil sesuai dengan jabatan yang akan dipangkunya.

Sekolah sebagai lembaga yang berfungsi untuk latihan dan pengembangan tenaga kerja mempunyai dua hal, yakni: (1) sekolah digunakan untuk menyiapkan tenaga kerja profesional dalam bidang spesialisasi tertentu. Untuk memenuhi ini berbagai bidang studi dibuka untuk menyiapkan tenaga ahli yang terampil dan berkemampuan yang tinggi

dalam bidangnya; (2) sekolah digunakan untuk memotivasi para pekerja agar memiliki tanggung jawab terhadap karier dan pekerjaan ditekuninya.

Sekolah mengajarkan bagaimana menjadi seorang yang akan memangku jabatan tertentu, patuh terhadap pimpinan, rasa tanggung jawab akan tugas, disiplin mengerjakan tugas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sekolah juga mendidik agar seorang dapat menghargai harkat dan martabat manusia, memperlakukan manusia sebagai manusia, dengan memerhatikan segala bakat yang dimilikinya demi keberhasilan dalam tugasnya.

Sekolah mempunyai fungsi pengajaran, latihan dan pendidikan. Fungsi pengajaran untuk menyiapkan tenaga kerja yang cakap dalam bidang keahlian yang ditekuninya. Fungsi latihan untuk mendapatkan tenaga kerja yang terampil sesuai dengan bidangnya, sedang fungsi pendidikan untuk menyiapkan seorang pribadi yang baik untuk menjadi seorang pekerja sesuai dengan bidangnya. Jadi fungsi pendidikan ini merupakan pengembangan pribadi sosial seorang individu.

Kelima, fungsi pendidikan dan perubahan sosial. Pendidikan mempunyai fungsi untuk mengadakan perubahan sosial memiliki beberapa fungsi, yakni: (1) melakukan reproduksi budaya; (2) difusi budaya; (3) mengembangkan analisis kultur terhadap kelembagaan-kelembagaan tradisional; (4) melakukan perubahan-perubahan atau modifikasi tingkat ekonomi sosial tradisional; dan (5) melakukan perubahan yang lebih mendasar terhadap institusi-institusi tradisional yang telah ketinggalan.

Sekolah berfungsi sebagai reproduksi dan modernisasi pendidikan telah mengajarkan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan baru, seperti orientasi ekonomi, orientasi kemandirian, mekanisme kompetisi sehat, sikap kerja keras, kesadaran akan kehidupan keluarga kecil, di mana nilai-nilai tersebut semuanya sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi sosial suatu bangsa. Usaha-usaha sekolah untuk mengajarkan sistem nilai dan perspektif ilmiah dan rasional sebagai lawan dan nilai-nilai dan pandangan hidup lama, pasrah dan menyerah pada nasib, ketiadaan menanggung risiko, semua itu telah diajarkan oleh sekolah-sekolah sejak proses modernisasi dari perubahan sosial dengan menggunakan cara berpikir ilmiah, cara analisis dan pertimbangan rasional serta dengan kemampuan evaluasi yang kritis orang akan cenderung berpikir objektif dan lebih berhasil dalam menguasai alam sekitarnya.

Lembaga pendidikan di samping berfungsi sebagai penghasil nilai-nilai budaya baru juga berfungsi sebagai difusi budaya (*cultural diffusion*). Kebijakan-kebijaksanaan sosial yang kemudian diambil tertentu berdasarkan pada hasil budaya dan difusi budaya. Sekolah-sekolah tersebut baru, tetapi juga menanamkan sikap-sikap, nilai-nilai dan pandangan hidup baru yang semuanya itu dapat memberikan kemudahan serta memberikan dorongan bagi terjadinya perubahan sosial berkesinambungan.

Keenam, fungsi sekolah dan masyarakat. Di muka telah dibicarakan tentang adanya tiga bentuk pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal. Pendidikan formal disebut sekolah. Sekolah bukan satu-satunya lembaga yang menyelenggarakan pendidikan, tetapi masih ada lembaga-lembaga lain yang juga menyelenggarakan pendidikan. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan mempunyai dua fungsi yaitu: (1) sebagai *partner* masyarakat; (2) sebagai penghasil tenaga kerja.

Sekolah sebagai *partner* masyarakat akan dipengaruhi oleh corak pengalaman seorang di dalam lingkungan masyarakat. Pengalaman pada berbagai kelompok masyarakat, jenis bacaan, tontonan serta aktivitas lainnya dalam masyarakat dapat memengaruhi fungsi pendidikan yang selaras dengan sekolah. Sekolah berkepentingan pula terhadap perubahan lingkungan seorang anak didik dalam masyarakat. Perubahan lingkungan tersebut, antara lain dapat dilakukan melalui fungsi layanan bimbingan, penyediaan forum komunikasi antara sekolah dengan lembaga sosial lain dalam masyarakat. Sebaliknya partisipasi sadar seorang anak didik untuk selalu belajar dari lingkungan masyarakat, sedikit banyak juga dipengaruhi oleh tugas-tugas belajar serta pengarahan belajar yang dilaksanakan di sekolah.

Fungsi sekolah sebagai *partner* masyarakat akan dipengaruhi pula oleh sedikit banyaknya serta fungsional tidaknya pendayagunaan sumber-sumber belajar di masyarakat. Kekayaan sumber belajar dalam masyarakat, seperti adanya orang-orang, sumber, perpustakaan, museum, surat kabar, majalah, komputer, internet, dan lain sebagainya dapat digunakan oleh sekolah dalam menunaikan fungsi pendidikan.

Kebutuhan pendidikan di sekolah dan masyarakat memiliki ikatan hubungan rasional antarkeduanya, yakni: (1) adanya kesesuaian antara fungsi pendidikan yang selaras dan positif terhadap sekolah, dengan

apa yang dibutuhkan masyarakat; (2) ketepatan sasaran atau target pendidikan yang ditangani oleh lembaga prasekolah akan ditentukan oleh kejelasan perumusan komitmen antara sekolah selaku pelayan dengan masyarakat selaku pemesan; (3) keberhasilan pelaksanaan fungsi sekolah sebagai layanan pesanan masyarakat akan dipengaruhi oleh ikatan objektif di antara keduanya. Ikatan objektif yang dimaksudkan dapat berupa perhatian, penghargaan dan tunjangan tertentu, seperti dana, fasilitas dan jaminan objektif lain yang memberikan makna penting bagi eksistensi dan produk sekolah.

Hubungan timbal balik pendidikan di sekolah dan masyarakat sangat besar manfaat dan artinya bagi kepentingan pembinaan dukungan moral, materiil, dan pemanfaatan masyarakat sebagai sumber belajar. Bagi masyarakat, dapat mengetahui beragam hal tentang sekolah dan inovasi-inovasi yang dihasilkan, menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan, melakukan tekanan, dan tuntutan terhadap sekolah. Beragam teknik dan media dapat dilakukan dalam konteks ini, seperti melakukan rapat dan pertemuan, surat menyurat, buku penghubung, buletin sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan anak didik dan orang tua. Hubungan sekolah dan masyarakat merupakan sarana yang berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi anak didik di sekolah. Sekolah, dalam konteks ini, sebagai sistem sosial yang merupakan bagian integral dari sistem yang lebih besar, yakni masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang lebih erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan dengan efektif dan efisien. Sekolah juga harus menunjang proses pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Sekolah perlu memberi penerangan tentang tujuan-tujuan, terutama terhadap sekolah. Dengan kata lain, program-program, kebutuhan, serta keadaan masyarakat. Sekolah juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat, terutama terhadap sekolah. Dengan singkat, antara sekolah dan masyarakat perlu dibina dan dikembangkan suatu hubungan yang harmonis.²²

Dalam mengembangkan hubungan sekolah dan masyarakat, maka elemen-elemen sekolah, terutama kepala sekolah dan guru-guru, merupakan kunci keberhasilan yang harus memerhatikan kebutuhan anak didik, orang tua, dan masyarakat. Kepala sekolah, dituntut berupaya membina dan mengembangkan hubungan kerja sama konstruktif antara

²²H.E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan*, op.cit., hlm. 116.

Bab 4

ANAK DIDIK DAN KONTAK SOSIAL-EDUKATIF

Park, seorang ahli sosiologi Amerika Serikat, mengemukakan bahwa kontak antarkelompok dengan teratur melalui tahapan-tahapan hubungan ras mempunyai bentuk: kontak (*contact*), persaingan/kompetisi (*competition*), akomodasi (*accommodation*), dan asimilasi (*assimilation*).¹ Tahapan-tahapan hubungan tersebut dinamakan interaksi sosial (*social interaction*).² D. Hendropuspeto (1989), bahwa interaksi sosial merupakan hubungan sosial dinamis menyangkut hubungan antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, dan antara individu dengan kelompok.³

¹Asimilasi (*assimilation*) dipandang sebagai proses sosial tahap lanjut yang ditandai adanya upaya-upaya mengurangi perbedaan-perbedaan antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia, yang meliputi upaya mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memerhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Jika individu melakukan asimilasi dalam suatu kelompok masyarakat, berarti individu-individu kelompok itu telah melebur kebudayaannya, kemudian melahirkan satu kebudayaan baru. Biasanya akan terjadi pertukaran unsur-unsur budaya, namun hal itu terjadi apabila suatu kelompok menyerap kebudayaannya ke kelompok lainnya. Lihat: (Molten M. Gordon, *Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion, and National Origins*, Free Press, New York, 1970, hlm. 132-159).

²Feagin, J.R. dan Feagin, C.B., *Racial and Ethnic Relation*, (New Jersey: Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1993), hlm. 27-28.

³D. Hendropuspeto, *Sosiologi Sistematis*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1989), hlm. 233.

A. Kontak Sosial Anak Didik

Interaksi sosial bersifat positif dapat menciptakan terjadinya kerja sama yang pada akhirnya mempermudah terjadinya asimilasi (pembauran). Proses sosial adalah aspek dinamis dari kehidupan masyarakat, di dalamnya terdapat suatu proses hubungan antara manusia satu dengan lainnya. Proses hubungan tersebut berupa interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara terus-menerus. Interaksi sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara dua belah pihak, antara individu dengan individu atau kelompok lainnya dalam mencapai suatu tujuan. Proses sosial merupakan siklus perkembangan struktur sosial yang menunjukkan bagaimana prasangka (*prejudice*) dan diskriminasi (*discrimination*) dapat dieliminasi sedemikian rupa dan konflik nilai (*value conflict*) dapat menjaga dalam batasan yang dapat dikerjakan pada suatu masyarakat di mana bagian masyarakat (*subsocieties*) menjaga hubungan kelompok primer di antara individu-individu dengan beragam latar belakang.⁴

Matthew J. Hornsey dan Michael A. Hogg (2000) membedakan asimilasi dan multikulturalisme terletak pada perbedaan asumsi berkaitan dengan konsekuensi persamaan dan perbedaan hubungan antarkelompok. Seperti dikatakan Hornsey dan Hogg:

*Assimilation argue that preserving and reinforcing ethnic boundaries promotes separatism and division and that harmonious group relations can best be achieved by promoting intergroup similarity. In contrast, multiculturalists hypothesize that only when individuals feel secure in their cultural identity can they feel generous and tolerant toward other cultures.*⁵

Pendapat Hornsey dan Hogg di atas tentang hubungan antarkelompok, terutama asimilasi (pembauran) sejalan dengan hipotesis Byrne (1971) tentang *similarity-attraction* yang sering diasumsikan dan digeneralisasikan terhadap konteks antarkelompok (Roceack, 1960, 1968, 1980). Multikulturalis berpandangan bahwa persepsi tentang perbedaan antarkelompok merupakan suatu prakondisi sehat terhadap hubungan antarkelompok yang positif.⁶

Dalam dunia pendidikan/sekolah, kontak sosial merupakan salah satu sarana mencapai hasil pendidikan yang diharapkan. Kontak sosial,

⁴Lihat: (D. Hendropuspeto, *Sosiologi Sistematis*, *op.cit.*, hlm. 233).

⁵Matthew J. Hornsey & Michael A. Hogg, "Intergroup Similarity and Subgroup Relations: Some Implications for Assimilation", *Journal PSPB*, Vol. 26 No. 8, August 2000, hlm. 948.

⁶*Ibid.*, hlm. 948.

disebut juga *pergaulan sosial*, antara pendidik dan anak didik yang memungkinkan timbulnya rasa senang dan cinta anak didik dari pendidik atau sebaliknya. Kontak sosial memungkinkan menimbulkan pengertian yang mendalam antara tugas pendidik, yang wajib mendidik anak didik, yang meminta pertolongan atau pendidikan, sehingga menimbulkan sikap yang wajar dan objektif pada keduanya. Dalam kontak sosial, pendidik dapat melakukan observasi terhadap anak didik secara langsung, untuk memunculkan potensi yang ada pada anak didik; sedangkan anak didik melalui kontak sosial tersebut dapat mengetahui secara langsung apa yang ada pada pendidik, kecintaannya, rasa sosialnya, dedikasinya, dan sebaliknya. Saling mengetahui karena kontak sosial tersebut dapat memudahkan usaha bimbingan dan pertolongan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kesempatan kontak sosial wajib diadakan dan dipergunakan sebaik-baiknya, karena kontak langsung menimbulkan interaksi yang wajar antara kekuasaan pendidik dan ketaatan anak didik. Pendidikan yang sebenarnya itu berlaku di dalam interaksi sosial antara orang dewasa dengan anak. Di dalam kenyataannya pergaulan tersebut ada yang bersifat edukatif dan ada pula nonedukatif. Suruhan/perintah disebut bersifat mendidik, misalnya, apabila seorang tokoh agama atau tokoh masyarakat tersebut dengan mengajar, caranya agar yang disuruh mampu melaksanakan perintahnya.

Di dalam mendidik atau proses pendidikan seorang pendidik harus mempunyai kewibawaan dan kinerja yang profesional sehingga lulusan (*output*) yang dihasilkan memang benar-benar berkompeten sesuai dengan apa yang diharapkan atau apa yang menjadi tujuannya.

Pergaulan adalah kontak langsung antara individu dengan individu lain, atau antara pendidik dan anak didik. Pergaulan juga memungkinkan menimbulkan pengertian yang mendalam antara tugas pendidik, yang wajib mendidik dan tugas anak didik yang wajib belajar. Saling mengetahui karena pergaulan tersebut dapat memudahkan usaha bimbingan dan pertolongan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kesempatan bergaul wajib diadakan dan dipergunakan sebaik-baiknya, karena kontak langsung tersebut menimbulkan hubungan yang wajar antara kekuasaan pendidik dan ketaatan anak didik. Pada beberapa abad lalu, pendidikan sangat berkuasa, pendidik menentukan segala sesuatunya, pendidik juga bersikap otoriter atau *despotis*, anak didik harus menurut dan menaati segala perintah atau larangan dari pendidik.

Jika anak didik tidak menaati segala aturan atau perintah pendidik, kekerasan dan hukuman akan digunakan pendidik untuk memaksakan kehendaknya. Sehingga, anak didik akan melaksanakannya, kemudian taat, patuh karena rasa takut yang disertai rasa benci dan dendam.

Dengan pelaksanaan pendidikan yang demikian, hubungan cinta mencintai antara pendidik dan anak didik tidak ada, sehingga terjadi pergaulan yang tidak wajar. Akibatnya, anak didik akan tertekan, tidak berani mengeluarkan suasana isi hatinya, merasa dirinya kecil, tidak berdaya, sehingga dapat menimbulkan rasa harga diri kurang atau minder.

Pada akhir abad ke-19, keadaan proses pembelajaran otoriter mulai berubah sama sekali. Anak didiklah seakan-akan memegang dan menentukan arah. Pendidik tinggal menuruti kehendak anak, pembawaan anak, dan hal ini adalah pendidikan lunak, pendidik hanya membiarkan anak didik berkembang sendiri, anak dimanjakan, segala kesulitan yang dihadapi anak diatasi pengasuhnya, anak menjadi canggung. Sikap pendidik yang demikian disebut *Laissez Faire*, dan dapat juga cara tidak langsung menimbulkan harga diri menjadi kurang, sebab dalam pergaulan anak yang dimanjakan merasa canggung, selalu kalah dalam ketangkasan dibanding dengan anak lain. Pendidikan lunak ini mengalihkan kekuasaan dari pendidik ke tangan anak didik, dan ketaatan dari anak didik pindah kepada seorang pendidik. Cinta berlebihan akan timbul antara anak didik dan pendidik.

Aliran pendidikan lunak yang dianut M. Montessori itu, dengan semboyannya: *Alles von künde aus*, semua keluar dari diri anak. Kedua jenis hubungan pergaulan keras dan lunak tersebut tidak tepat semuanya. Seorang pendidik wajib memajukan atau mengadakan konversi dari keduanya. Pendidikan wajib mempunyai kekuasaan, yang ditimbulkan karena keunggulannya dalam segala hal, kekuasaan, pendidik bukan seperti kekuasaan polisi, yang wajib menjalankannya sesuai dengan hukum negara. Kekuasaan pendidik dan menimbulkan apa yang kita kenal dengan kewibawaan.

Pergaulan dapat dibedakan dalam berbagai dasar. *Pertama*, menurut siapa yang terlibat dalam pergaulan itu maka dibedakan menjadi: Pergaulan anak dengan anak; pergaulan anak dengan orang dewasa; dan pergaulan orang dewasa dengan orang dewasa. *Kedua*, dipandang dari bidangnya, maka dibedakan menjadi: Pergaulan yang bersifat ekonomis; pergaulan yang bersifat seni; dan pergaulan yang bersifat pedagogis.

Ketiga, ditinjau dari pergaulan tersebut, dapat digunakan rentangan-rentangan untuk membedakannya menjadi: Pergaulan ekonomis yang tidak ekonomis; pergaulan seni bukan seni; dan pergaulan pedagogis dan bukan pedagogis.

Di dalam hal pergaulan yang tidak pedagogis dapat dibedakan menjadi dua yaitu *pergaulan biasa* dan *pergaulan pedagogis*. *Pergaulan biasa* merupakan pergaulan yang dapat diubah menjadi *pergaulan pedagogis*. Hanya cara mengubah pergaulan biasa menjadi pergaulan edukatif-pedagogik harus dengan berlahan-lahan, agar jangan memberi kesan kepada anak didik sebagai suatu perubahan yang sekaligus. Sebab bila terjadi hal yang demikian oleh anak dirasakan sebagai suatu paksaan terhadap pribadinya. Hal ini mengakibatkan timbulnya protes dari pihak anak, dan memberi kemungkinan anak mengambil sikap yang menjauhkan dirinya dari seorang pendidik. Namun demikian, perlu pula diperhatikan keadaan pada suatu waktu tertentu. Sebab mungkin saja pada saat-saat tertentu pendidik harus mengambil sikap yang agak tegas, sehingga cara mengalihkan pergaulan biasa menjadi pergaulan edukatif berlangsung secara sekaligus. Hal ini dapat diberikan bilamana dikehendaki agar anjuran atau larangan seorang pendidik memberikan kesan yang sangat nyata.

Menurut M.J. Langeveld (t.t), pergaulan tersebut merupakan "ladang" atau "lapangan" yang memungkinkan terjadinya pendidikan. Dalam pergaulan yang bagaimanakah atau dalam pergaulan di antara siapakah muncul proses edukatif-pendidikan? Tentunya, pendidikan hanya akan terjadi di dalam pergaulan antara orang dewasa dengan yang belum dewasa. Akan tetapi, dalam pergaulan orang dewasa dengan orang dewasa yang lain dapat saja memungkinkan terjadinya pendidikan. Hal ini karena hanya dalam pendidikan yang timbul di antara orang dewasa tersebut letak tanggung jawab tidak terletak pada orang yang memberi nasihat, larangan, atau saran; akan tetapi, tanggung jawab terletak pada orang dewasa yang menerima atau yang diberi.⁷

Perlu memahami tentang perbedaan antara pergaulan anak didik dengan sesama anak didik, dan pergaulan anak didik dengan orang dewasa. Perbedaan tersebut tidak disebabkan karena pergaulan antara sesama anak sama sekali tidak mempunyai kontribusi bagi pendidikan, karena pergaulan antara sesama anak tidak mempunyai sumbangan bagi perkembangan

⁷Abdullah Idi, "Bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan S1 & S2", *op.cit.*, hlm. 32.

rohani anak didik. Lebih penting lagi, perbedaan tersebut terletak pada pergaulan antara sesama anak adalah tetap biasa tidak mungkin berubah menjadi pergaulan pendidikan. Karena, anak yang satu masih belum bertanggung jawab dan juga anak yang lain, sesama anak masih saling tergantung, dan anak yang satu tidak mempunyai wibawa terhadap yang lain.

Dengan adanya wibawa ini, berarti diharapkan terjadinya suatu bimbingan aktif, dan orang yang mempunyai wibawa, dalam hal ini adalah pendidik atau orang dewasa. Karena, perlu diingat bahwa walaupun pada diri anak didik tersebut terdapat potensi untuk berkembang sendiri, tetapi pada diri anak juga terdapat keinginan memperoleh perlindungan, baik secara jasmani maupun rohani, bersifat (kodrat) anak yang membutuhkan pertolongan.

Pergaulan mempunyai peranan penting dalam pembentukan pribadi anak didik. Sejumlah manfaat pergaulan adalah: (1) pergaulan memungkinkan terjadinya pendidikan. Karena dengan pergaulan memberi dasar pertama kepada anak didik, memberi pengenalan yang pertama tentang cara menghadapi sesamanya. Melalui pergaulan itulah dapat diterima dan kemudian ditirukan anak mengenai bermacam-macam hal, baik secara sengaja atau tidak sengaja diberikan orang dewasa di sekitar anak didik, yang kemudian ditirunya; (2) pergaulan merupakan sarana untuk wawasan diri. Di dalam pergaulan, setiap anak mendapatkan pengalaman bermacam-macam. Anak yang semula merasa satu dengan lingkungannya, lama kelamaan melepaskan diri dari lingkungannya, maka mulailah anak tersebut mengadakan perbandingan antara dirinya sendiri dan orang yang terdapat di sekitarnya. Setiap kali pula anak bertanya, apakah itu ada pada dirinya; (3) pergaulan menimbulkan cita-cita. Dalam ajaran Freud tentang ilmu jiwa, dikatakan bahwa pada tiap-tiap individu terdapat apa yang disebut ego-ideal; adanya keinginan untuk menjadi dokter, polisi, presiden, ahli pidato, dan lain-lain ini adalah berkat adanya kekaguman terhadap orang dewasa yang ada di sekitarnya yang dijumpainya dalam pergaulan selanjutnya; (4) pergaulan itu memberi pengaruh secara diam-diam. Anak mempunyai sikap suka dan gampang meniru. Apa saja yang dia temukan, dia lihat, dia dengar di dalam pergaulan entah itu baik atau buruk, seakan-akan secara spontan akan menirunya. Kemungkinan anak didik memperoleh pengaruh dari pendidik, pengaruh itu diterima anak didik atas pilihannya sendiri, tidak dengan secara paksa. Itulah sebabnya pergaulan anak itu harus terus-

menerus dikontrol, tujuan melakukan pengontrolan itu adalah untuk menjaga agar tidak mendapatkan pengaruh yang jelek dari pergaulannya. Pengontrolan itu hendaknya dilakukan dengan bijaksana, supaya tidak mendapatkan akibat sampingan yang kurang diperhitungkan.

Dalam hal ini, hubungan saling percaya memercayai antara pendidik dengan anak didik sangat penting. Sebaliknya, bila pengawasan berlangsung dengan baik pengaruh positif akan didapat dari pergaulan, seperti: lewat pergaulan anak-anak belajar mengekang diri menghargai orang lain, toleransi dan dapat menempatkan diri serta mampu berperan serta dalam bekerja sama. Dapat diungkapkan selanjutnya bahwa pergaulan dengan proses pendidikan terdapat pendidikan. Kata "proses" memberikan ilustrasi kepada kita tentang hal-hal yang menyangkut langkah/sistematika/urutan/jalannya suatu kegiatan. Pendidikan adalah usaha sadar orang dewasa dan disengaja serta bertanggung jawab untuk mendewasakan anak yang belum dewasa berlangsung secara terus-menerus.

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa: (1) *usaha sadar*, berarti terjadi situasi pendidikan dilaksanakan atas kesadaran pendidik; (2) *orang dewasa*, berarti pelaksanaan pendidikan haruslah orang yang sudah dewasa. Pergaulan anak dengan anak bukan situasi pendidikan meskipun ada unsur pendidikan di dalamnya. Unsur pendidikan di situ termasuk faktor pendidikan yaitu unsur yang berpengaruh terhadap pendidikan anak; (3) *disengaja*, berarti bahwa proses pendidikan memang disengaja direncanakan secara sistematis dan matang; (4) *bertanggung jawab*, semua tindakan pendidikan harus dipertanggungjawabkan secara moral berdasarkan kaidah-kaidah atau norma-norma berlaku; (5) *dewasa sebagai tujuan*, baik psikis maupun fisik yang diwarnai oleh nilai-nilai bangsanya untuk itu di Indonesia yang harus diwarnai Pancasila dan UUD 1945; (6) *terus-menerus*, yakni (a) pendidikan dilaksanakan secara berkesinambungan; (b) pendidikan itu tidak ada hentinya (pendidikan seumur hidup).⁸

Dari definisi di atas dapat dijelaskan kesimpulan dalam proses pendidikan ada unsur-unsur yang saling memengaruhi yaitu guru, murid, tujuan, metode, ikutan kegiatan dan penilaian yang diatur dengan baik agar peranannya berfungsi baik dan utuh.⁹

⁸Abdullah Idi, "Bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan S1 & S2", *op.cit.*, hlm. 33.

⁹Tim Dosen Universitas Negeri Surakarta (UNS), 1984, hlm. 23.

Pergaulan sehari-hari yang dilakukan seorang dengan orang lain adakalanya setaraf usianya, ilmu pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya. Adakalanya kawan sepergaulan lebih rendah atau lebih tinggi di bidang tertentu. Di dalam pergaulan sehari-hari tentunya terjadi interaksi sosial antara individu yang satu dengan yang lain; atau interaksi individu dengan kelompok; atau interaksi kelompok dengan kelompok. Dalam interaksi antarkelompok itu tentunya tidak lepas adanya saling memengaruhi.

Interaksi sosial yang kelihatannya sederhana itu sebenarnya merupakan suatu proses yang cukup kompleks, yang didasari berbagai faktor psikologik antara lain:

1. *Faktor imitasi* adalah dorongan untuk meniru orang lain. G. Tarde menyatakan bahwa imitasi ini merupakan faktor satu-satunya yang melandasi interaksi sosial.
2. *Faktor sugesti* adalah dorongan bagi seseorang untuk melakukan atau bersikap seperti apa yang diharapkan oleh pemberi sugesti. Dalam sugesti, orang dengan sengaja secara aktif memberikan pandangan, pendapat, saran, norma, dan sebagainya, agar orang lain dapat menerima dan melakukan apa yang diberikan.
3. *Faktor identifikasi* adalah faktor yang mendorong untuk menjadi identik (sama) dengan orang lain. Orang cenderung untuk identik terhadap orang lain yang dihormati bernilai tinggi, dikagumi, dan sebagainya.
4. *Faktor simpati* adalah faktor perasaan rasa tertarik kepada orang lain. Simpati tersebut berkembang dalam hubungannya terhadap orang lain. Dengan adanya simpati, maka akan terjalin saling pengertian yang mendalam atau menimbulkan rasa sosial bagi yang simpati.

M. J. Langeveld dalam pergaulan menyatakan "tiap-tiap pergaulan antara orang dewasa (orang tua) dengan anak adalah lapangan atau suatu tempat di mana pekerjaan mendidik berlangsung." Dengan cara pergaulan sehari-hari, anak merasa dirinya dibawa kepada kedewasaan oleh orang dewasa dan keadaan seperti itu merupakan gejala-gejala pendidikan, baik di dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Pergaulan semacam itu disebut pergaulan pedagogis. Syarat pergaulan pedagogis adalah: (a) pergaulan antara anak dengan orang dewasa; (b) di dalam pergaulan ada pengaruh; dan (c) ada maksud dan tujuan secara sadar untuk anak ke arah kedewasaannya.

Manusia adalah makhluk dwitunggal yang terdiri atas jasmaniah dan rohaniah. Unsur rohaniahnya masih mencakup dua segi kejiwaan lagi, yaitu hakikat sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Dan satu hakikat lagi, yang membedakan manusia dengan makhluk lain ialah hakikat sebagai makhluk susila, makhluk berketuhanan. Berdasarkan hakikat manusia itu, maka diperoleh berbagai segi aspek pendidikan antara lain:

1. *Pendidikan Budi Pekerti.* Budi pekerti atau akhlak adalah satu-satunya aspek yang sangat fundamental dalam kehidupan. Baik bagi kehidupan sebagai orang-orang maupun bagi kehidupan masyarakat. Tujuan dari pendidikan budi pekerti ialah mendidik anak agar dapat membedakan antara baik dan buruk, sopan dan tidak sopan, sifat terpuji dan tercela, serta sebagainya.
2. *Pendidikan Kecerdasan.* Pendidikan kecerdasan adalah tugas pokok dari sekolah. Tujuan dari pendidikan kecerdasan ialah mendidik anak agar dapat berpikir secara kritis, logis, dan kreatif. Berpikir secara kritis berarti, bahwa dengan cepat anak dapat melihat hal-hal yang benar dan hal-hal yang tidak benar. Berpikir secara logis berarti, bahwa dengan cepat anak dapat melihat hubungan masalah yang satu dengan masalah yang lain. Dapat menghubungkan dari beberapa masalah, membandingkan dan menarik kesimpulan. Berpikir secara kreatif berarti, bahwa dari apa yang telah diselidiki, atau dari percobaan yang dilakukan, dapat menemukan suatu yang dianggap baru.
3. *Pendidikan Sosial.* Manusia pada kenyataannya tidak dapat hidup sendiri, ia tidak dapat berpisah dengan manusia lain dalam pergaulan sehari-hari. Manusia senantiasa hidup dalam kelompok-kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar. Untuk dapat hidup bersama dengan orang lain dalam kelompok-kelompok itu, orang harus dapat menyesuaikan diri. Yang dimaksud dengan menyesuaikan diri adalah menyamakan dirinya atau menganggap dirinya sebagai orang lain. Atau dengan kata lain, dapat menempatkan dirinya dalam diri orang lain. Dalam bahasa Jawa disebut *tepo seliro*, artinya menganggap orang lain sebagai dirinya sendiri. Tujuan dari pendidikan sosial adalah mendidik anak agar dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan bersama dan ikut ambil bagian secara aktif dalam kehidupan bersama tersebut.

4. *Pendidikan Kewarganegaraan.* Pendidikan kewarganegaraan tidak berarti, bahwa sudah cukup apabila anak-anak telah memiliki pengetahuan tentang warga negara, tentang pemerintah dan sebagainya. Tetapi pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mendidik anak kelak menjadi warga negara yang baik dan sempurna, berguna bagi masyarakat dan negara.
5. *Pendidikan Keindahan dan Estetika.* Tujuan pendidikan keindahan ini tidaklah bermaksud untuk mendidik anak agar menjadi seniman dan seniwati dalam berbagai lapangan kesenian. Tetapi bertujuan agar semua anak mempunyai rasa keharuan terhadap keindahan. Mempunyai selera terhadap keindahan dan selanjutnya dapat menghargai dan menikmati keindahan.
6. *Pendidikan Jasmani.* Pendidikan jasmani dalam arti sebenarnya adalah tidak sama dengan olah raga. Tidak berupa latihan jasmani saja, juga bertujuan memperkuat urat, daging, mempertinggi koordinasi dan menuju kesehatan tubuh, juga bertujuan untuk pembentukan watak. Melalui pendidikan jasmani dapat dibina dan dikembangkan sifat-sifat dan tabiat-tabiat yang baik, seperti jujur, sportif, disiplin, bertanggung jawab, kerja sama, dan sebagainya. Dengan demikian, pendidikan jasmani tidak hanya bertujuan untuk membuat sehat jasmani saja, melainkan bertujuan untuk membuat sehat rohaninya.
7. *Pendidikan Agama.* Di Indonesia, mula-mula pendidikan agama pelaksanaannya diserahkan kepada pihak swasta pemerintah tidak mencantumkan pendidikan agama itu ke dalam kurikulum dari sekolah-sekolah negeri. Baru setelah timbulnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 Pasal 20, ditentukan pengaturan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri.
8. *Pendidikan Kesejahteraan Keluarga.* Pendidikan Kesejahteraan Keluarga sebenarnya mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, dari yang bersifat pandangan hidup, sampai ke masalah-masalah yang praktis atau masalah-masalah yang sepele semua termasuk di dalamnya. Kesemuanya tidak boleh diabaikan begitu saja, demi kelancaran dan keselarasan kehidupan dalam keluarga. Tujuan pendidikan kesejahteraan keluarga secara luas ialah untuk meningkatkan taraf kehidupan dan penghidupan keluarga untuk mencapai terwujudnya keluarga sejahtera seluruhnya. Sedangkan tujuan pendidikan kesejahteraan keluarga di sekolah adalah memperdalam kesadaran anak akan perlunya

hidup rukun dan damai, hemat cermat, sehat sejahtera dalam ikatan keluarga, dan menimbulkan minat untuk ikut serta berpartisipasi mengurus kehidupan keluarga. Dikatakan Abu Ahmadi (1991) bahwa suatu hal yang perlu mendapat perhatian selanjutnya ialah bahwa anak-anak harus ditanamkan sikap untuk tidak memandang rendah kepada pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Anak harus diubah sikapnya untuk tidak merasa malu dan segan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, demi kesejahteraan bersama.¹⁰

B. Jenis Kontak Sosial: Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat

Jenis kontak sosial anak didik terdiri dari tiga macam, yakni: kontak sosial di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kontak sosial *pertama* adalah di keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak masing-masing saling memengaruhi, saling membutuhkan, semua meladeni seorang, dan seorang meladeni semua. Anak membutuhkan makanan, pakaian, bimbingan, dan sebagainya dari orang tua dan orang tua membutuhkan rasa kebahagiaan dengan kelahiran anak.

Selama anak belum dewasa, orang tua mempunyai peranan pertama atau utama bagi anak-anaknya. Untuk membawa anak kepada kedewasaan, orang tua harus memberi contoh yang baik karena anak suka mengimitasi kepada orang tuanya. Dalam memberikan sugesti kepada anak diharapkan tidak menggunakan cara otoriter, melainkan dengan sistem pergaulan sehingga dengan senang akan melaksanakannya. Anak paling suka untuk identik dengan orang tuanya, seperti anak laki-laki terhadap ayahnya anak perempuan dengan ibunya.

Kontak sosial *kedua* adalah di sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, terdiri dari guru (pendidik) dan murid-murid (anak-anak didik). Antara mereka sudah barang tentu terjadi adanya saling hubungan, baik antara guru/pendidik dengan murid-muridnya maupun antara murid dengan murid. Para guru sebagai pendidik, dengan wibawanya dalam pergaulan membawa murid sebagai anak didik ke arah kedewasaan. Memanfaatkan/menggunakan pergaulan sehari-hari dalam pendidikan adalah cara yang paling baik dan efektif dalam pembentukan pribadi dan dengan cara ini pula maka hilanglah jurang pemisah antara guru dengan murid.

¹⁰Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan, op.cit.*, hlm. 55.

Kontak sosial antara murid dengan murid juga menunjukkan suasana edukatif. Sesama murid saling berkawan, berolah raga bersama dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, saling mengajak dan diajak, saling bercerita, saling berdisiplin diri agar tidak menyinggung perasaan temannya.

Kontak sosial ketiga adalah di masyarakat. Masyarakat merupakan tempat pergaulan sesama manusia dan merupakan lapangan pendidikan yang luas dan meluas, yaitu adanya hubungan antara dua orang atau lebih tak terbatas.

Tonnis membedakan pergaulan dalam: (1) *gemeinschaft* (persekutuan) yaitu hubungan yang dibentuk oleh kodrat seperti hubungan antara seseorang dengan orang tua, dengan tokoh masyarakat, dengan pejabat, dengan tokoh agama, dan sebagainya; dan (2) *gesellschaft* (perbuatan) yaitu hubungan yang dibentuk oleh ikatan organisasi seperti hubungan seseorang dengan pimpinan organisasi massa, organisasi kelembagaan, organisasi politik, organisasi koperasi, dan sebagainya.

Dengan demikian, dalam pergaulan sehari-hari antara seseorang dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat mengandung gejala-gejala pendidikan, karena para tokoh tersebut dalam pergaulannya mengarah kepada pengaruh positif, menuju kepada tujuan yang mencakup nilai yang tinggi dan luhur.

Tegasnya, pendidikan itu secara mutlak merupakan tujuan yang mencakup sesuatu nilai yang tertinggi, mencakup nilai kesusilaan, mencakup nilai yang membimbing anak dalam menunaikan tugas hidupnya, mencakup nilai yang kerohanian pada anak. M. J. Langeveld (t.t.) mengatakan pendidikan adalah usaha dari pihak orang dewasa untuk membantu mendewasakan anak-anak yang belum dewasa. Ngalim Purwanto (1985) mendefinisikan dengan menyatakan bahwa pendidikan ialah segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan.

Di dalam proses pendidikan, dikatakan Ngalim Purwanto bahwa kewibawaan adalah syarat bagi pendidik dan digunakan kewibawaan untuk membawa anak didik ke kedewasaan, maka kewibawaan termasuk alat pendidik. Langeveld mengatakan bahwa pendidikan yang sungguh-sungguh baru dapat diberikan setelah anak itu mengenal akan kewibawaan, kira-kira anak berumur 3 tahun. Sebelum umur 3 tahun anak seperti

diberi semacam paksaan.¹¹ Sutari Imam Barnadib (1984) mengatakan bahwa paksaan-paksaan yang diberikan kepada anak yang masih sangat kecil itu ditujukan kepada kedewasaan anak. Maka paksaan yang diberikan kepada anak yang masih kecil itu disebut dengan pendidikan pendahuluan bukan *dressuur* (paksaan).¹²

Tentang hubungan sekolah dan masyarakat, dapat dijelaskan bahwa masyarakat adalah kelompok sosial antarmanusia yang tinggal di suatu tempat, mempunyai tujuan tertentu, serta mempunyai norma disepakati bersama. Unsur-unsur pokok dalam suatu masyarakat adalah: (1) adanya unsur kelompok manusia yang bertempat tinggal di daerah tertentu; (2) mempunyai tujuan yang sama; (3) mempunyai nilai-nilai dan norma-norma ditaati bersama; (4) mempunyai perasaan baik suka maupun duka; dan (5) mempunyai organisasi yang ditaati.

Adapun jenis-jenis kelompok masyarakat yang terorganisasi adalah: *civics* (kelompok kewargaan); *cultural* (kelompok budaya); *economics* (kelompok ekonomi); *religious* (kelompok ketuhanan); *welfare* (kelompok kesejahteraan); *youth* (kelompok kepemudaan); dan *professional* (kelompok ahli).

Bertalian dengan peranan sekolah terhadap masyarakat, dapat dijelaskan bahwa sekolah merupakan salah satu lembaga masyarakat. Di dalamnya terdapat reaksi dan interaksi antarwarganya. Warga sekolah adalah guru, murid, tenaga administrasi serta petugas sekolah lainnya, misalnya dokter sekolah, pelayan/penjaga sekolah, warung sekolah, dan lain-lain.

Sebagai salah satu lembaga masyarakat, untuk dapat menjalankan tugasnya sekolah perlu memerhatikan:

1. menyesuaikan kurikulum sekolah dengan kebutuhan masyarakat;
2. metode yang digunakan harus mampu merangsang murid untuk lebih mengenal kehidupan riil dalam masyarakat;
3. menumbuhkan sikap pada murid untuk belajar dan bekerja dari kehidupan sekitarnya;
4. sekolah harus selalu berinteraksi dengan kehidupan masyarakat, sehingga kebutuhan kedua pihak akan terpenuhi;

¹¹Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan: Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Remaja Karya, 1985), hlm. 11.

¹²Sutari Imam Barnadib, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, Fakultas Ilmu Pendidikan, IKIP Yogyakarta, 1984, hlm. 33.

5. sekolah seharusnya dapat mengembangkan masyarakat dengan cara mengadakan pembaruan tata kehidupan masyarakat.

Sementara itu, terdapat empat macam yang bisa diperankan sekolah terhadap masyarakat: (1) mencerdaskan kehidupan bangsa; (2) membawa virus pembaruan bagi perkembangan masyarakat; (3) melahirkan warga masyarakat yang siap dan terbekali bagi kepentingan kerja di lingkungan masyarakat; (4) melahirkan sikap positif dan konstruktif bagi warga masyarakat. Sehingga tercipta integrasi sosial yang harmonis di tengah-tengah masyarakat.¹³

Pada Tap MPR No. IV/MPR/1978 ditegaskan bahwa pendidikan berdasarkan Pancasila dan bertujuan:

- Meningkatkan: Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kecerdasan, dan Keterampilan;
- Mempertinggi budi pekerti;
- Memperkuat kepribadian; dan
- Mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Berdasarkan rumusan di atas maka fungsi dan peranan sekolah terhadap masyarakat:

- Meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- Meningkatkan kecerdasan;
- Meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan tenaga terampil, serta dapat meningkatkan produksi kerja;
- Membentuk pribadi dan budi pekerti;
- Melestarikan nilai-nilai yang terpuji dalam masyarakat;
- Mengembangkan nilai baru yang dianggap serasi oleh masyarakat dalam menghadapi tantangan perkembangan ilmu, teknologi dan modernisasi;
- Menanamkan dan mempertebal semangat kebangsaan;
- Menghasilkan penemuan-penemuan sebagai bahan atau konsep-konsep pembangunan (pembaruan masyarakat).

¹³Abdullah Idi, "Bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan S1 & S2", *op.cit.*, hlm. 45.

Selain itu, terdapat pengaruh dan peranan masyarakat terhadap sekolah. Selain masyarakat selalu tumbuh dan berkembang, ia memiliki identitas atau karakteristik tersendiri sesuai dengan sosial budaya dan latar belakang sosial ekonominya. Identitas dan perkembangan masyarakat tersebut sedikit banyak akan berpengaruh terhadap sekolah. Pengaruh tersebut baik dalam orientasi dan tujuan pendidikan maupun proses pendidikan itu sendiri.

Dalam orientasi dan tujuan pendidikan jelas sedikit banyak akan diwarnai oleh masyarakat mengingat sekolah merupakan lembaga masyarakat, sekolah berada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, wajar bila kurikulum sering diadakan perubahan dan tujuan rumusannya mengalami perubahan mengingat keadaan memang berkembang dan berubah pula.

Tim Dosen Universitas Negeri Surakarta (UNS) menjelaskan bahwa peranan masyarakat terhadap sekolah:

- Sebagai arah menentukan tujuan
- Sebagai masukan dalam menentukan proses belajar mengajar
- Sebagai sumber belajar
- Sebagai pemberi dana dan fasilitas lainnya
- Sebagai laboratorium guna pengembangan dan penelitian sekolah.¹⁴

Peserta didik juga disebut anak didik atau terdidik. Peserta didik sebagai individu/pribadi (manusia seutuhnya): individu diartikan orang seorang yang tidak tergantung dari orang lain, dalam arti benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, mempunyai sifat-sifat dan keinginan sendiri. Untuk itu peserta didik harus dipandang secara filosofis yaitu menerima kehadiran keakuannya, ke individuannya, sebagaimana mestinya ia ada (eksistensinya). Inilah prinsip dasar peserta pendidikan untuk peserta didik sehingga proses pendidikan dapat berjalan wajar, dan peserta didik harus dipandang sebagai subjek.

Karena peserta didik dipandang keakuannya, maka dalam hal ini pendidik tetap memegang peranan tidak membenarkan tindakan peserta didik itu, melainkan tetap membantu, memberi pertolongan melayani sesuai dengan eksistensinya agar menuju perkembangan yang dewasa sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Ciri-ciri tersebut

¹⁴Tim Dosen Universitas Negeri Surakarta (UNS), *op.cit.*, hlm. 114.

adalah: (1) kelemahan dan ketakberdayaan; (2) berkemauan keras untuk berkembang; dan (3) ingin menjadi diri sendiri. Sedangkan jenis peserta didik dapat dilihat dari: (1) peserta didik menurut tahap perkembangan umur; dan (2) peserta didik menurut status dan tingkat kemampuan. Secara pedagogis, pendidik dapat dijelaskan: (1) secara adil kodrati pendidik adalah orang tua peserta didik masing-masing; dan (2) pendidik lain ialah orang yang diserahi tugas mendidik peserta didik, misal di lembaga pendidikan.

Agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik dan lancar maka seorang pendidik mempunyai ciri pertama, yaitu memiliki wibawa atau kewibawaan. Kewibawaan yaitu pengaruh positif normatif yang diberikan kepada orang lain atau anak didik dengan tujuan agar yang bersangkutan dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. Pendidik adalah orang tua kedua setelah orang tuanya sendiri, karena berfungsi sebagai pendidik maka di dalam melaksanakan tugasnya ia seorang yang harus profesional.

Ciri kedua, yaitu pendidik harus mengenal secara pribadi anak/peserta didik yang secara otomatis hafal nama asuhannya (terutama untuk pendidik anak luar biasa). Ciri ke tiga, pendidik harus mau membantu peserta didik dalam arti peserta didik terus-menerus dibantu melainkan pendidik harus mengetahui anak didik atau peserta didik adalah "aku" yang berkepribadian dan ingin bertanggung jawab dan ingin menentukan diri sendiri. Seperti dikatakan oleh Tracey Tokuhama dan Espinosa (2001):

*Personality is an influential component of whether or not a child is a successful polygot. Personal characteristics can either compensate for or dilute ones's abilities to learn any new activity.... A child with great aptitude can certainly become fluent, even if he is shy and slow to jump into the arena to try new things. Aptitude, personality, and personal characteristics all play role, as does the physical structure of the brain.*¹⁵

Dalam memahami proses kontak sosial di sekolah, sangat ditentukan oleh peranan pendidik (guru), di mana hal ini merupakan harapan bagi orang tua anak didik. Seperti dikatakan lebih lanjut oleh Tracey Tokuhama dan Espinosa (2001)¹⁶ bahwa "Most parents feel strongly about the role of their child's teacher. If the child feels secure and accepted in the classroom, and then he can be free to focus on higher level tasks....".

¹⁵Tracey Tokuhama dan Espinosa, *Raising Multilingual Children*, Foreign Language Acquisition and Children, Birgin & Garvey Publisher, London, 2001, p. 12.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 124.

Kontak sosial seorang anak didik dengan seorang anak didik, seorang anak didik dengan kelompok anak didik, dan kelompok anak didik dengan kelompok anak didik/kelompok orang lain di sekolah, sedapat mungkin memperlihatkan suatu kondisi kontak sosial yang edukatif. Untuk menimbulkan kontak sosial edukatif bagi anak didik, seorang guru memiliki peranan penting dalam proses perwujudannya, seperti halnya peran elemen warga sekolah lainnya: orang tua, staf administrasi, penjaga sekolah (*security*), dan tenaga kebersihan dan keamanan, dan lain sebagainya, tidak kalah pula perannya dalam menciptakan para anak didik yang dapat memiliki suatu kondisi kontak sosial yang edukatif di sekolah. Hal ini, dikarenakan bahwa sekolah merupakan suatu sistem, sehingga kontak sosial yang edukatif tergantung pada bagaimana kondisi kinerja sistem sekolah/madrasah. Jika, setiap elemen sistem sekolah/madrasah tersebut dapat berjalan dan berfungsi dengan baik dan optimal, kontak sosial anak didik pun akan memungkinkan tumbuh dan berkembang dalam suatu proses pembentukan iklim edukatif bagi anak didik.

Almost always denotes the process whereby individuals learn to behave willingly in accordance with the prevailing standards of their culture; although occasionally used synonymously with learning, usually reserved for the type of learning that bears on future role performance and that particularly involves group appraisal.²

Definisi sosiologi pendidikan, seperti disimpulkan Abu Ahmadi (1991),³ menunjukkan: (1) proses sosialisasi merupakan proses belajar, yakni suatu proses akomodasi di mana individu menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya; (2) dalam proses sosialisasi, individu mempelajari kebiasaan, sikap idea-idea, pola-pola nilai dan tingkah laku, dalam masyarakat di mana dia hidup; dan (3) semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkannya sebagai suatu kesatuan sistem dalam diri pribadi.

S. Nasution (2009) menuturkan bahwa sosialisasi merupakan proses bimbingan individu ke dalam dunia sosial. Sosialisasi dilakukan dengan mendidik individu tentang kebudayaan yang harus dimiliki dan diikutinya, agar ia menjadi anggota yang baik dalam masyarakat dan dalam berbagai kelompok khusus, sosialisasi dapat dianggap sama dengan pendidikan.⁴

Sosialisasi menunjukkan pada semua faktor dan proses yang membuat setiap manusia menjadi selaras dalam hidupnya di tengah-tengah orang lain. Setiap orang akan memperoleh proses belajar tentang kemasyarakatan yang di dalamnya terdapat beragam aturan, norma dan tradisi. Proses ini bertujuan agar seorang dapat menjalani hidup di tengah masyarakat secara layak. Seorang, dalam hal ini, perlu memperoleh beragam pengetahuan tentang masyarakat melalui proses pembelajaran sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dapat diartikan sebagai suatu proses belajar atau pembelajaran bagi setiap orang tentang segala sesuatu di dalam masyarakat agar nanti dapat hidup dengan layak di tengah masyarakat.

Untuk mencapai semua itu, individu perlu memperoleh bimbingan dari pelaku sosialisasi: orang tua, pendidik/guru, dan masyarakat. Dengan sosialisasi dengan baik, individu diharapkan dapat beradaptasi dengan

²Lihat: (Thomas Ford Hout dalam Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 154-155).

³*Ibid.*, hlm. 155.

⁴S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 126.

orang lain di mana individu itu berada. Hendi Suhendi (2001) dan proses sosialisasi dilakukan dalam menghayati norma-norma kelompok tempat individu berada sehingga menjadi bagian dari kelompoknya. Individu mengalami proses bermasyarakat dengan memahami nilai-nilai yang ada. Individu diharapkan dapat menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat.

Segala sesuatu yang dipelajari individu harus dipelajari dari anggota masyarakat lain. Secara sadar apa yang diajarkan orang tua, saudara-saudara, anggota keluarga, dan sekolah kebanyakan oleh gurunya. Secara tidak sadar individu belajar dengan mendapatkan informasi secara insidental dalam berbagai situasi sambil mengamati kelakuan orang lain, seperti membaca buku, menonton TV, mendengar percakapan orang, menyerap kebiasaan-kebiasaan dalam lingkungannya. Seluruh proses sosialisasi terjadi dalam bentuk interaksi individu dengan lingkungan, yakni beragam interaksi dengan orang lain dalam lingkungan keluarga.

Sosialisasi terjadi melalui kondisi lingkungan yang menyebabkan individu mempelajari pola kebudayaan fundamental. Pola kebudayaan fundamental (*fundamental culture*), seperti berbahasa, cara berjalan, duduk makan, apa yang dimakan, berkelakuan sopan, mengembangkan sikap yang dianut dalam masyarakat seperti sikap terhadap agama, seks, orang yang lebih tahu, pekerjaan, rekreasi, dan segala sesuatu yang perlu bagi warga masyarakat yang baik. Belajar norma-norma kebudayaan pada awalnya banyak terjadi di rumah dan sekitarnya, selanjutnya di sekolah, bioskop, TV, dan lingkungan lain. Proses sosialisasi tidak selalu berjalan lancar karena sejumlah kesulitan dihadapi anak didik, antara lain: adanya kesulitan komunikasi dan pola kelakuan berbeda atau bertentangan.⁵

Sosialisasi identik dengan makna penyesuaian diri (*adjustment*). Konsep penyesuaian diri berasal dari biologi, dan merupakan konsep dasar dalam Teori Evolusi Darwin. Dalam biologi, istilah yang digunakan adalah adaptasi. Menurut teori tersebut hanya organisme yang paling berhasil menyesuaikan diri terhadap lingkungan fisiknya sajalah yang dapat bertahan hidup. Tingkah laku manusia itu dapat diterangkan sebagai reaksi-reaksi terhadap tuntutan atau tekanan dari lingkungannya. Manusia dalam hidup di masyarakat, tingkah lakunya tidak saja merupakan penyesuaian diri terhadap tuntutan fisik lingkungannya, melainkan juga penyesuaian diri terhadap tuntutan dan tekanan sosial orang lain. Proses

⁵S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, *op.cit.*, hlm. 127.

penyesuaian itu merupakan reaksi terhadap sejumlah tuntutan terhadap dirinya. Tuntutan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tuntutan internal dan eksternal. Tuntutan internal adalah tuntutan yang berupa dorongan atau kebutuhan yang timbul dari dalam, baik yang bersifat fisik maupun sosial. Misalnya, kebutuhan akan makanan, minuman, seks, penghargaan, sosial, persahabatan, kecintaan, dan sebagainya.

Adanya sejumlah tuntutan ini, sering kali menimbulkan kondisi konflik. Ada tiga pola konflik yang lazim terjadi: *Pertama*, konflik antara tuntutan internal yang satu dengan tuntutan eksternal lain. Misalnya, untuk mendapatkan status sosial atau *social prestige* seorang harus bersaing atau bertentangan dengan teman-teman sendiri. *Kedua*, konflik antara tuntutan eksternal yang satu dengan tuntutan eksternal lain. Misalnya, seorang anak laki-laki mendapatkan tuntutan dari ayahnya agar dia memiliki sifat-sifat kelakian dan menjadi olahragawan, sedangkan ibunya menuntut agar memiliki sifat-sifat yang halus sebagai seniman. *Ketiga*, konflik antara tuntutan internal dengan tuntutan eksternal. Misalnya konflik antara dorongan seksual di satu pihak dengan tuntutan masyarakat agar dorongan itu disalurkan dalam bentuk-bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat misalnya melalui perkawinan yang sah menurut norma-norma adat dan agama.⁶

Proses penyesuaian diri dapat dipandang dari dua perspektif. *Pertama*, kualitas atau efisiensinya. *Kedua*, proses berlangsungnya. Jika proses penyesuaian diri ditinjau dari sudut kualitas atau efisiensinya, berarti kita menilai proses itu untuk menilai berhasil atau tidaknya proses penyesuaian diri itu ada empat kriteria yang dapat digunakan: (1) *kepuasan psikis*: penyesuaian diri yang berhasil akan menimbulkan rasa tidak puas yang menjelma dalam bentuk perasaan kecewa, gelisah, lesu, depresi, dan lainnya; (2) *efisiensi kerja*: penyesuaian diri yang berhasil akan menampak dalam kerja atau kegiatan yang efisien, sedangkan yang gagal menampak dalam kerja atau kegiatan yang tidak efisien; (3) *gejala fisik*: penyesuaian diri yang gagal akan tampak dalam gejala fisik; (4) *penerimaan sosial*: penyesuaian diri yang berhasil akan menimbulkan reaksi setuju dari masyarakat, sedangkan yang gagal akan mendapatkan reaksi tidak setuju masyarakat.

Jika penyesuaian ditinjau dari sudut prosesnya, yang dipandang yakni berlangsungnya proses penyesuaian diri. Proses penyesuaian diri

⁶Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, op.cit., hlm. 18.

merupakan suatu proses progresif yang memungkinkan individu makin menguasai impuls-impuls dan lingkungannya. Proses penyesuaian diri memiliki dua tipe: (1) dalam rangka penyesuaian diri itu individu mengubah atau menahan impuls-impuls dalam dirinya; dan (2) dalam rangka penyesuaian diri itu individu mengubah tuntutan atau kondisi-kondisi lingkungannya. Proses penyesuaian tipe pertama, seperti diungkapkan J. Piaget sebagai proses akomodasi; sedangkan proses tipe kedua disebut proses asimilasi. Melalui proses akomodasi dan asimilasi itu, individu mengatasi konflik tuntutan-tuntutan, baik tuntutan internal maupun eksternal, baik tuntutan fisik maupun tuntutan sosial terhadap dirinya.

Proses sosialisasi juga merupakan proses belajar individu dalam berperilaku sesuai dengan standar dalam kebudayaan masyarakat. Proses sosialisasi juga dipandang sebagai proses akomodasi, dengan nama individu menghambat atau mengubah impuls-impuls sesuai dengan tekanan lingkungan dan mengembangkan pola-pola nilai tingkah laku yang baru sesuai dengan kebudayaan masyarakat. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa: (1) proses sosialisasi adalah proses belajar, yaitu suatu proses akomodasi di mana individu menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil alih cara hidup atau kebudayaan masyarakat; (2) dalam proses sosialisasi, individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola nilai dan tingkah laku, dan standar tingkah laku dalam masyarakat di mana dia hidup; dan (3) semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem dalam diri pribadi.⁷

Seperti diketahui bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya antara satu dengan lain saling membutuhkan, adanya hubungan timbal balik yang saling memerlukan maka membuat kehidupan manusia saling berinteraksi, atau yang lebih dikenal dengan interaksi sosial. Adanya sebutan manusia sebagai "makhluk sosial" akan sangat tampak dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam hal pemenuhan kebutuhan. Seorang petani perlu dengan pedagang dan seorang pedagang perlu dengan pembeli. Saling memerlukan semacam ini merupakan hal yang terjadi dalam keseharian manusia. Dalam hal sekecil apa pun tetap manusia saling memerlukan, misalnya tertawa. Untuk tertawa tentu ada hal atau objek yang membuat tertawa atau tersenyum. Seseorang

⁷Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, *op.cit.*, hlm. 157.

akan tertawa jika melihat acara lawak di TV atau mendengar humor dari seorang penceramah, dan lain-lain. Itu adalah suatu hal yang semestinya alias wajar, akan menjadi hal yang tidak wajar jika seseorang tertawa sendiri tanpa interaksi dengan sesuatu atau tanpa sebab.

Mengingat kehidupan manusia saling membutuhkan dan saling keterkaitan, diperlukan suatu proses sosial. Interaksi sosial di masyarakat merupakan perwujudan dari kehidupan sosial dari setiap individu. Hal ini disebabkan karena manusia memiliki keperluan dan kebutuhan sosial. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan proses sosial. Proses sosial dapat diartikan sebagai pengaruh proses sosial dapat diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai kehidupan bersama. Misalnya, pengaruh memengaruhi antara sosial dengan politik, politik dengan ekonomi, ekonomi dengan hukum, dan seterusnya.

Sebagai makhluk sosial manusia akan mengalami proses sosial. Proses tersebut merupakan bentuk hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antara yang satu dengan yang lain. Dalam hubungan ini tentu pengaruh positif atau yang baik akan menimbulkan kehidupan sosial yang baik pula. Dalam hal hubungan timbal balik ini, proses sosial sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama.

B. Sosialisasi Anak Didik

Proses sosial pada masyarakat pada dasarnya akan mengarahkan juga pada masalah proses sosialisasi pada usia anak. Hal ini cukup beralasan karena anak merupakan bagian dari masyarakat dan sebagai objek penting dalam proses sosialisasi. Sebagai bagian dari masyarakat anak dituntut dapat hidup bermasyarakat secara baik, dan sebagai proses sosialisasi, anak merupakan individu yang perlu mendapatkan proses belajar bermasyarakat. Anak sebagai objek penting dalam proses pembelajaran mempunyai kedudukan penting dalam proses sosialisasi. Dilihat dari segi umur atau usia anak dapat dipahami dari interval usia: usia bayi: 1-1 tahun; usia anak: 1-12 tahun; usia remaja: 12-15 tahun; usia pemuda: 15-30 tahun; dan usia dewasa: 30 tahun ke atas. Dilihat dari segi budaya, istilah: anak : 0-12 tahun; remaja: 13-18 tahun; dan dewasa: 18-21 tahun ke atas.⁸

⁸Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 105.

Dilihat dari interval usia di atas, yang dimaksudkan anak adalah individu yang berusia 1-12 tahun. Bila dikaitkan dengan usia sekolah, anak yang dimaksudkan adalah anak-anak dan anak usia sekolah dasar. Terlepas dari aspek usia yang lebih penting adalah bagaimana proses sosialisasi pada anak itu sendiri. Karena sosialisasi manusia tetap berlangsung terus selama manusia masih hidup. Tapi, usia anak merupakan usia terpenting dalam sosialisasi. Di keluarga atau rumah tangga, orang berkewajiban mengajarkan anak-anaknya tentang banyak hal, sebagai bentuk peran orang tua dalam sosialisasi. Keluarga, dalam hal ini, sebagai sumber nilai, norma dan sikap.

Di keluarga, anak berinteraksi dengan ayah, ibu, dan anggota keluarga lain, di mana anak memperoleh pendidikan informal berupa kebiasaan. Kebiasaan tersebut bermacam-macam, misalnya tentang cara makan, bertutur kata, bangun pagi dan shalat shubuh, kebiasaan berpuasa, kebiasaan bersedekah, kebiasaan salam sebelum berangkat sekolah, gosok gigi, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum bepergian, dan lain-lain. Pendidikan informal dalam keluarga sangat membantu anak dalam proses pembentukan kepribadiannya.

Sebagai fungsi sosial, selain fungsi biologis, ekonomi dan agama, keluarga memiliki peran sangat krusial dalam proses sosialisasi. Orang tua hendaknya memberi teladan yang terbaik bagi anak-anak tentang banyak hal dalam konteks proses sosialisasi. Sosialisasi anak diharapkan sebagai bekal ke depan agar anak dapat beradaptasi dan berkiprah secara positif di tengah masyarakat. Bila orang tua mengharapkan anaknya berakhlak sesuai dengan tuntutan agamanya, misalnya akhlak Islami, anak-anak perlu diberi contoh oleh orang tua tentang beragam akhlak mulia dan Islami. Keluarga sebagai salah satu dari pusat pendidikan bertugas membentuk kebiasaan-kebiasaan positif sebagai fondasi yang kuat dalam pendidikan informal. Anak akan menuruti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang tua, baik positif maupun negatif.

Anak selanjutnya bersosialisasi pada pendidikan formal di sekolah di mana mereka menuntut ilmu pengetahuan. Setelah masuk sekolah, anak diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi serta aturan-aturan sekolah yang berlaku. Ketika pada masa awal masuk sekolah anak kemungkinan ada yang menangis dan tidak betah di sekolah bila tidak diantar atau didampingi orang tua. Hal ini merupakan suatu proses adaptasi atau menyesuaikan diri anak terhadap lingkungan sekolah yang berbeda dengan lingkungan keluarga di rumah. Di sekolah, anak

berinteraksi dengan pendidik, staf karyawan, teman sejawat. Anak di sekolah memperoleh pendidikan formal berupa nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan dan sikap terhadap mata pelajaran. Dari proses sosialisasi di sekolah anak akan membentuk kepribadian untuk tekun dan rajin belajar, memiliki cita-cita, dan lain-lain. Selain itu anak juga dapat berinteraksi dengan teman sejawat yang berkonotasi negatif, misalnya suka bolos, sikap melawan guru, berkelahi, berbohong, malas, boros uang belanja, sehingga akhirnya dapat berdampak pada prestasi akademik anak. Elemen sekolah (kepala sekolah, guru, karyawan, penjaga sekolah) sudah barang tentu memiliki tanggung jawab penuh dalam menempatkan proses sosialisasi yang positif pada anak didik di sekolah.

Sosialisasi sebagai proses belajar dan beradaptasi, di mana anak didik memerlukan kekayaan personal (*personal system properties*) seperti: pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, kebutuhan, motivasi, kognitif, afektif, dan pola konatif. Pada kemudian hari, mereka dapat beradaptasi (pada aspek: psikologis, sosial, dan budaya), tumbuh dan berkembang dengan baik, dan menjadi mandiri dalam kehidupannya. Gary R. Lee (1982) mengatakan:

From the sociological point of view, socialization refers to the process whereby individuals acquire the personal system properties—the knowledge, skill, attitude, values, needs and motivation, cognitive, affective, and conative patterns—which shape their adaptation to the physical and socio-cultural setting in which they live... The critical test of the success of socialization process lies in the ability of the individual to perform well in the statuses—that is, to play the roles—in which he may later find himself.⁹

Kendatipun demikian, ketika anak sudah masuk sekolah bukan berarti tugas orang tua sudah berakhir membimbing dan mendidik anaknya. Sekolah pada dasarnya lebih banyak berfokus pada aspek pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Untuk aspek kejiwaan atau afektif tidak menjadi fokus utama di sekolah. Ahmad Tafsir (1994)¹⁰ mengatakan bahwa kurangnya perhatian sekolah terhadap aspek afektif dikarenakan memang sekolah tidak memungkinkan dapat melakukannya, kendatipun tugas pendidik tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik.

⁹Gary R. Lee, *Family Structure and Interaction: A Comparative Analysis*, Second Edition, Revised, USA, 1982, p. 247.

¹⁰Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 185.

Bagi orang tua, memasukkan anaknya ke sekolah memiliki motivasi-motivasi tertentu. Motivasi-motivasi itu dapat berupa harapan-harapan masa depan sebagai antisipasi bagi kehidupan yang berbeda dengan kehidupan orang tuanya. Dikatakan Zakiyah Daradjat (1992)¹¹ bahwa di sekolah, pendidik/guru merasa bertanggung jawab terutama terhadap pendidikan otak/intelektual anak didik kendatipun guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik. Ary H. Gunawan (2005)¹² mengatakan bahwa sejumlah peranan sekolah: (a) memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan; membentuk kader pemimpin; sebagai tempat mengantisipasi mobilitas sosial; membantu memecahkan masalah sosial; sebagai agen penerus dan pengembangan kebudayaan; dan membantu kesejahteraan keluarga.

Sebagai proses sosialisasi anak, sekolah memiliki peranan sebagai: (a) *transmisi kebudayaan*, termasuk norma-norma, nilai-nilai dan informasi melalui pengajaran secara langsung, misalnya dengan sifat-sifat warga negara yang baik; (b) *mengadakan kumpulan sosial*, seperti perkumpulan sekolah, pramuka, olah raga dan sebagainya yang memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mempelajari dan mempraktikkan berbagai keterampilan sosial; (c) *memperkenalkan anak dengan toko teladan*, dalam hal ini pendidik (guru) dan pemimpin sekolah memegang peranan yang penting; dan (d) menggunakan tindakan positif, seperti pujian, hadiah, dan sebagainya. Tindakan negatif seperti hukuman, celaan, dan lain-lain. Untuk mengharuskan murid mengikuti kelakuan yang layak dalam bimbingan sosial.

Di masyarakat anak mendapatkan pendidikan berupa pengalaman hidup. Setiap masyarakat meneruskan kebudayaannya kepada generasi penerus melalui interaksi sosial. Interaksi sosial yang berjalan dengan baik berarti proses sosialisasi terjadi dengan baik. Lingkungan sekitar tempat tinggal anak sangat memengaruhi perkembangan pribadi anak. Di situlah anak memperoleh pengalaman bergaul dengan teman-teman di luar rumah dan sekolah lingkungan sekitar rumah memberikan pengaruh sosial pertama kepada anak di luar keluarga. Di sinilah anak mengenal lingkungan sosial baru yang berbeda dengan di rumah. Jika di rumah ia akan merengek untuk mendapatkan sesuatu, namun di luar rumah ia akan tahu bahwa cara-cara seperti itu akan mendapatkan

¹¹Zakiyah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 1992), hlm. 72.

¹²Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, *op.cit.*, hlm. 65-70.

ejekan. Dalam lingkungan masyarakat anak akan mempelajari hal-hal yang baik, sebaliknya anak juga dapat mempelajari hal-hal yang buruk. Kelakuan sosial anak serta norma-norma lingkungan tempat anak bergaul tercermin pada kelakuan anak-anak. Di sinilah peran seluruh anggota masyarakat menjadi sangat penting.

Masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses sosialisasi anak, terutama para pemimpin masyarakat atau penguasa yang ada di dalamnya. Elit masyarakat Muslim misalnya, tentu menghendaki anak menjadi orang yang taat dalam menjalankan agamanya, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Apabila anak telah besar diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

Dalam proses sosialisasi anak, setidaknya terdapat beberapa faktor yang memengaruhinya. *Pertama*, keteladanan orang tua. Seorang anak akan cenderung bersikap sopan, santun, patuh, kerja keras, disiplin, religius, dan lain-lain, bila orang tua memiliki keteladanan tentang hal demikian. Seorang pendidik yang kompeten, rajin, jujur, disiplin dan sejenisnya akan mudah diteladani anak didiknya tentang sikap serupa. Seorang pemimpin umat, seperti *kyai, ulama, da'i* yang berdakwah dan berceramah tentang sikap saling membantu dan pemurah apabila mereka memang memiliki sikap pemurah atau suka memberi atau darmawan. Maka, materi dakwah tadi diharapkan akan mudah diterima dan dituruti para jamaah.

Kedua, lingkungan pergaulan. Pergaulan anak berpengaruh terhadap proses pembentukan kepribadian anak. Hal lingkungan anak berarti memengaruhi proses sosialisasi anak. Anak sedapat mungkin memiliki lingkungan pergaulan yang positif terhadap proses pertumbuhan kepribadian. Lingkungan pergaulan (tempat tinggal, sekolah, dan masyarakat) yang positif akan mendukung proses perkembangan akhlak, perilaku, moral dan kepribadian yang baik bagi anak. Anak yang hidup dalam lingkungan yang religius diharapkan akan menumbuhkan sikap dan perilaku religius bagi anak. Anak yang hidup dalam lingkungan akademis atau berpendidikan akan menumbuhkan sikap dan perilaku yang senang belajar.

F.G. Robins dalam Abu Ahmadi (1991) mengungkapkan ada lima faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi anak didik. Kelima faktor yang menjadi dasar perkembangan kepribadian anak didik itu adalah: (1) sifat dasar, merupakan keseluruhan potensi-potensi yang diwarisi oleh seseorang dari ayah dan ibunya; (2) lingkungan prenatal adalah lingkungan dalam kandungan ibu; (3) perbedaan individual, perbedaan

perorangan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi proses sosialisasi; (4) lingkungan alam ialah kondisi-kondisi di sekitar individu yang memengaruhi proses sosialisasinya; dan (5) motivasi-motivasi adalah kekuatan-kekuatan dari dalam diri individu yang menggerakkan individu untuk berbuat.¹³

Perkembangan manusia tampak pada dua aspek: (1) aspek biologi: makanan, minuman, dan perlindungan telah mengubah bayi menjadi manusia yang dewasa jasmaniah; dan (2) aspek personal-sosial: pengalaman dan pengaruh manusia lain telah mengubah anak menjadi pribadi sosial, warga masyarakat bertanggung jawab. Sementara itu, terdapat dua dasar proses sosialisasi manusia, yaitu: (1) sifat tergantung manusia lain, bayi itu dilahirkan dalam keadaan sangat tergantung kepada orang tuanya, baik secara biologi maupun sosial; dan (2) sifat adaptabilitas dan inteligensi manusia karena sifat adaptabilitas dan inteligensi itu manusia mampu mempelajari bermacam-macam bentuk tingkah laku, memanfaatkan pengalamannya, dan mengubah tingkah lakunya. Proses belajar sosial ini merupakan proses yang berlangsung sepanjang hidup, bermula sejak lahir hingga mati. Dalam proses sosialisasi ini, individu mendapatkan pengawasan, pembatasan, dan hambatan dari orang lain atau masyarakat. Individu juga mendapatkan bimbingan, dorongan, simulasi, dan motivasi dari orang lain atau masyarakat. Jadi, dalam proses sosialisasi itu individu bersikap reseptif maupun kreatif terhadap pengaruh individu lain atau masyarakatnya. Proses sosialisasi itu terjadi dalam kelompok atau institusi sosial dalam masyarakat.

Proses belajar sosial berarti individu mempelajari beragam peranan sosial. Peranan sosial merupakan fungsi atau tingkah laku yang diharapkan dari seseorang oleh kelompok atau kebudayaan. Peranan sosial merupakan pola-pola tingkah laku mana ditentukan yang umum dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai posisi sosial yang sama, pola-pola tingkah laku mana diharapkan oleh anggota masyarakat yang lain. Perkembangan sosial anak itu sendiri terjadi melalui interaksi sosial dengan orang-orang di sekitarnya, baik orang dewasa maupun teman sebaya. Perkembangan sosial melalui kelompok ini terjadi karena partisipasi dan peranan sosial anak dalam kelompok sebaya.

Sebagai suatu proses, sosialisasi memiliki beberapa metode yang digunakan dalam memengaruhi sosialisasi anak.

¹³Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, op. cit., hlm. 23.

Pertama, metode ganjaran dan hukuman. Dalam proses sosialisasi, hukuman diberikan kepada anak yang bertingkah laku salah, tidak baik, kurang pantas, atau tidak diterima oleh masyarakat. Hukuman dapat berupa fisik atau hukuman sosial. Pemberian hukuman dimaksudkan agar anak menyadari kesalahannya. Sedangkan ganjaran diberikan kepada anak yang berperilaku baik. Ganjaran dapat bersifat materiil dan nonmateriil. Dengan ganjaran diharapkan anak termotivasi untuk selalu berbuat baik.

Kedua, metode didactic teaching. Metode ini mengutamakan pengajaran kepada anak tentang berbagai macam pengetahuan dan keterampilan. Metode ini biasanya digunakan dalam pendidikan sekolah, pendidikan agama, dan sebagainya.

Ketiga, metode pemberian contoh. Anak-anak cenderung mencontoh semua tingkah laku orang yang ada di sekitarnya. Dengan memberikan contoh akan terjadi proses imitasi (peniruan), yang terjadi secara sadar maupun tidak disadari.¹⁴

Proses sosialisasi di sekolah pada dasarnya tidak berbeda dengan proses sosialisasi di masyarakat dan di keluarga, yakni menanamkan dan mewariskan kebudayaan kepada anak didik. Sekolah merupakan salah satu institusi sosial yang memengaruhi proses sosialisasi dan berfungsi mewariskan kebudayaan masyarakat kepada anak. Sebagai institusi sosial, seharusnya sekolah memberi perhatian yang cukup terhadap proses sosialisasi anak, terutama pada anak didik di sekolah dasar. Dalam hal ini, sekolah merupakan lembaga yang memegang peranan penting bagi sosialisasi anak didik. Dalam lembaga pendidikan akan terdapat berbagai karakter anak didik sesuai dengan keadaan lingkungan keluarga dan masyarakat serta kedudukan anak dalam keluarga. Perbedaan karakter individu tersebut, sedapat mungkin dapat diakomodasi dengan suatu sistem yang utuh dan integral yang dikenal dengan tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah, merupakan norma yang sedapat mungkin ditaati oleh setiap warga sekolah termasuk anak didik tanpa membedakan status dan golongan sosial anak didik.

Hendi S dan Ramdani Wahyu (2001) mengungkapkan bahwa proses sosialisasi sangat berperan dalam pembentukan kepribadian, interaksi anak didik dengan lingkungan sosial akan berpengaruh terhadap

¹⁴Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan, op.cit.*, hlm. 162-163.

pertumbuhan dan perkembangan anak.¹⁵ Pembentukan kepribadian dipengaruhi beberapa faktor:

Pertama, keteladanan orang tua. Kehadiran orang tua atau orang dewasa dalam keluarga memiliki fungsi pendidikan yang pertama dan utama. Proses sosialisasi oleh anak didik yang dilakukan dengan cara meniru tingkah laku dan tutur kata orang dewasa yang berada dalam lingkungan terdekatnya. *Kedua*, warisan biologis orang tua. Setiap manusia normal memiliki persamaan biologis tertentu. Persamaan biologis ini membantu menjelaskan beberapa persamaan dalam kepribadian dan perilaku seorang. Karakter, seperti ketekunan, kejujuran, dan ambisi. *Ketiga*, lingkungan fisik. Perbedaan perilaku kelompok, sebagian besar disebabkan oleh perbedaan iklim, topografi, dan sumber lain. *Keempat*, lingkungan pergaulan. Kepribadian seorang ditentukan juga oleh hubungan dengan orang lain. Citra diri dan harga diri seorang sangat bergantung pada pilihan pribadi yang bernilai dalam berinteraksi sosial. *Kelima*, keyakinan terhadap agama. Agama memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang. Hal ini dikarenakan agama mengajarkan cara berperilaku, sehingga orang yang taat beragama akan menampilkan perilaku yang baik. *Keenam*, kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah juga berpengaruh terhadap kehidupan dan perilaku seorang walaupun hal itu jarang disadari.

Diungkapkan Abu Ahmadi (2007), sebagai pendewasaan sosialisasi dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: (1) *sifat dasar*, yang merupakan keseluruhan potensi yang diwariskan oleh seorang dari orang tuanya. Sifat dasar ini akan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak; (2) *lingkungan prenatal*, yang merupakan lingkungan dalam kandungan ibu. Dalam periode prenatal ini, individu mendapat pengaruh tidak langsung dari ibu. Pengaruh-pengaruh itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori;¹⁶ (3) *perbedaan individual*,

¹⁵Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, op.cit., hlm. 97.

¹⁶Kategori-kategori dimaksudkan: (a) beberapa jenis penyakit, seperti diabetes, kanker, syphilis, penyakit-penyakit tersebut berpengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan mental, penglihatan, pendengaran bayi dalam kandungan; (b) gangguan endoktrin dapat mengakibatkan keterbelakangan mental dan emosional; (c) struktur tubuh ibu (daerah pinggul) merupakan kondisi yang memengaruhi pertumbuhan bayi dalam kandungan, beberapa ahli berpendapat bahwa cacat pada kaki, kidal berhubungan dengan posisi anak dalam kandungan; dan (d) *shock* pada saat kelahiran, luka pada saat kelahiran dapat merupakan kondisi yang dapat menyebabkan berbagai kelainan, seperti *celebral, falsy*, lemah pikiran.

di mana perbedaan individu merupakan salah satu faktor yang memengaruhi proses sosialisasi. Sejak saat dilahirkan anak tumbuh dan berkembang sebagai individu yang unik yang berbeda dari individu yang lain. Perbedaan perorangan ini meliputi: perbedaan dalam ciri-ciri fisik (bentuk badan, warna kulit, warna mata, rambut, dan lain-lain); ciri-ciri fisiologis (berfungsinya sistem *endoktrin*); ciri-ciri mental dan emosional; ciri-ciri personal dan sosial.

Elizabeth Vagg (1990) mengatakan bahwa perubahan dan perkembangan fisik anak didik berdampak pada sosialisasi dan cara belajar anak didik yang cenderung tidak konstan, terutama bagi anak dewasa. Perubahan fisik anak didik terjadi pada usia remaja (*adolescence*) dan dewasa (*adulthood*), di mana Vagg mengatakan:

Since adult reached physical maturation, there may be a tendency to dismiss the aspect as having little significance for learning. However, physical changes do occur, energy levels, hormonal levels and appearance factors (hair, skin, weight) can affect learning directly, or indirectly through loss of self esteem and confidence.¹⁷

Keempat, berupa lingkungan, yang meliputi: lingkungan alam, yakni keadaan tanah, iklim flora dan fauna di sekitar individu; *kebudayaan*, yakni cara hidup masyarakat di mana individu hidup; dan *manusia lain dan masyarakat* di sekitar individu, pengaruh manusia lain dan masyarakat dapat memberi stimulasi atau membatasi proses sosialisasi.

Kelima, berupa motivasi, yang merupakan kekuatan-kekuatan dari dalam diri individu yang menggerakkan untuk berbuat. Motivasi ini dibedakan menjadi dorongan dan kebutuhan. Dorongan adalah keadaan ketidakseimbangan dalam diri individu, karena pengaruh dari dalam atau dari luar dirinya. Kebutuhan adalah dorongan yang telah ditentukan secara personal, sosial, dan kultural.¹⁸

Selanjutnya, dalam sosialisasi anak didik, terdapat sejumlah media sosialisasi,¹⁹ yakni:

- (a) *keluarga*, yang merupakan orang pertama yang mengajarkan hal-hal yang berguna bagi perkembangan dan kemajuan hidup manusia adalah anggota keluarga. Orang tua atau keluarga harus menjalankan fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi merupakan suatu fungsi

¹⁷Elizabeth Vagg, "An Exploration of Adult Learning Theory", *Dissertation*, Unpublished, School of Education, University of Tasmania, Australia, 1990, p.50.

¹⁸Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, *op.cit.*, hlm. 160.

¹⁹Lihat: Hendi S. dan Ramdani Wahyu, *op.cit.*, hlm. 100-101.

yang berupa peranan orang tua dalam pembentukan kepribadian anak. Fungsi sosialisasi menunjukkan pada peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Melalui fungsi ini, keluarga berusaha mempersiapkan bekal selengkap-lengkapinya dengan memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, serta mempelajari peranan yang diharapkan akan dijalankan mereka kelak;

- (b) *teman sepermainan dan sekolah*, yang merupakan lingkungan sosial kedua bagi anak setelah keluarga, dalam kelompok ini anak akan menemukan berbagai nilai dan norma yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut dalam keluarga. Melalui lingkungan sekolah dan teman sebaya anak mulai mengenal harga diri, citra diri, dan hasrat pribadi;
- (c) *lingkungan kerja*, yang merupakan proses sosialisasi lanjutan. Tempat kerja seorang mulai berorganisasi secara nyata dalam suatu sistem. Sejumlah hal yang perlu dipelajari dalam lingkungan kerja, misalnya bagaimana menyelesaikan pekerjaan, bagaimana bekerja sama dengan bagian lain, dan bagaimana beradaptasi dengan rekan kerja; dan
- (d) *media massa*, yang merupakan sarana dalam proses sosialisasi karena media banyak memberikan informasi yang dapat menambah wawasan untuk memahami keberadaan manusia dan berbagai permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Media massa merupakan sarana yang efektif dan efisien untuk mendapatkan informasi, melalui media, seorang dapat mengetahui keadaan dan keberadaan lingkungan dan kebudayaan, sehingga dengan informasi tersebut dapat menambah wawasan seseorang.

Dunn and Dunn, et al. (1984) mengatakan bahwa faktor lingkungan memengaruhi belajar (sosialisasi) anak didik. Suara, cahaya, temperatur, dan desain sekolah memengaruhi anak belajar.²⁰ C.O. Houle (1976) menyatakan hal yang sama, bahwa seorang desainer perlu mempertimbangkan faktor internal sekolah yang berdampak positif maupun negatif.²¹ Faktor lingkungan dapat diklasifikasikan ke dalam aspek fisik (*physical*) dan nonfisik (*non-physical*). Aspek fisik terdiri dari

²⁰Dunn and Dunn, et al. (1984), "Learning Style Researchers Define Differences Differently", *Journal of the Association for Supervision and Curriculum Development*, Vol.38, No.5, p. 372-375.

²¹C.O. Houle, *The Design of Education*, Jossey-Bass, London, 2007, p. 3.

bangunan sekolah, ruangan kelas, dan areal halaman sekolah. Aspek non-fisik meliputi keluarga, masyarakat/komunitas, dan lain sebagainya.

Jadi, sosialisasi merupakan suatu proses pembimbingan dan pembinaan bagi individu terhadap tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan yang meliputi kebudayaan, kebiasaan, sikap, ide-ide, dan norma-norma yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat dengan tujuan agar individu tersebut diterima dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Sekolah merupakan salah satu institusi sosial yang memengaruhi proses sosialisasi dan berfungsi mewariskan kebudayaan masyarakat kepada anak. Proses sosialisasi berperan dalam membentuk kepribadian, interaksi anak dengan lingkungan sosial berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.

Di sekolah, seorang pendidik sedapat mungkin dapat memahami dan mendorong proses sosialisasi anak didik seoptimal mungkin dengan berbagai latar belakang sosial anak didik. Jika seorang pendidik berperan optimal dan efektif dalam membina dan mendorong proses sosialisasi anak didik, akan memungkinkan anak didik akan mudah beradaptasi dengan anak-anak didik lainnya dan akan mempermudah proses pembelajaran di kelas dan berinteraksi edukatif di luar kelas, di keluarga, dan di masyarakat. Prinsipnya, bahwa proses sosialisasi anak didik membutuhkan perhatian dan bimbingan semua elemen institusi pendidikan di sekolah maupun luar sekolah (keluarga dan masyarakat).

Daniel Linden Duke (1990) mengungkapkan bahwa para ahli sosiologi telah memberikan catatan yang panjang anak didik yang berasal dari latar belakang kelas pekerja (*working class background*) sedikit yang memiliki pengalaman sukses di sekolah daripada mereka yang berasal dari kelas menengah (*middle class background*). Sejumlah ahli sosiologi menulis bahwa anak didik yang berlatar belakang dari *working class* tidak tersosialisasikan dengan baik tentang bagaimana menjadikan dan memperoleh pengalaman terbaik dari sekolah. Sebagian ahli sosiologi lainnya, mensinyalir bahwa problem *working class background* dari anak didik keterkaitan dengan terma-terma dari ekspektasi dari pendidik/guru terhadap anak didiknya. Banyak pendidik berharap terhadap anak didiknya dari latar belakang terma keluarga kelas pekerja (*working class family*) daripada mereka melakukannya dari terma anak didik dari latar belakang keluarga kelas menengah (*middle class students*).²²

²²Daniel Linden Duke, *Teaching: Introduction*, Mac Graw-Hill Publishing Company, London, 1990, p. 55.

Anak-anak berasal dari keluarga berpunya (*richer families*), pada umumnya, lebih sukses dalam pendidikan daripada mereka yang berasal dari keluarga miskin (*poor families*). Secara historis, suatu alasan yang paling penting untuk disparitas ini bahwa keluarga kaya menikmati kondisi dan sumber-sumber (*resources*) materi yang lebih baik, termasuk kelas-kelas yang lebih kecil dan lamanya kehidupan sekolah, untuk kebanyakan anak didik, yang akan mereduksi disparitas daripada prestasi pendidikan yang berhubungan dengan perbedaan dalam keluarga dan faktor lainnya. Untuk sejumlah kelompok masyarakat, mudah membedakan disparitas pendapatan orang tua dan level pendidikan orang tua. Misalnya, orang tua yang bekerja di sektor pertambangan lebih besar pendapatannya daripada pendapatan seorang pendidik/guru. Tetapi, pendidikan guru lebih tinggi daripada mereka yang bekerja di pertambangan, dan pencapaian pendidikan bagi anak-anaknya lebih tinggi pula. Para pendidik/guru di Australia tidak khawatir tentang pencapaian level pendidikan, tetapi mereka bermasalah dengan perbedaan pendapatan (*income*). Alan R. Barcan & Patrick O'Flaherty (1995) selanjutnya mengungkapkan:

The failure of increased expenditure on education to reduce disparities in the average educational achievement of different types family underlines the importance of the fact that disparities are even wider between the children of richer and poorer parents. With some groups it is easy to distinguish between disparities of parental income and parental educational level. For example, coal miners in Australia have higher average earnings than schoolteachers, but teachers are more highly educated and their children have on average educational achievement than miners' children.... Provided that standard increases, such increased disparities should not worry sensible educators, but they do trouble those whose main concern is with equality of outcomes.²³

Dapat dijelaskan di sini bahwa proses sosialisasi anak didik dapat menentukan perkembangan kepribadian anak didik dengan wajar. Seorang pendidik bertanggung jawab terhadap pentingnya memahami beragam latar belakang sosial anak didik yang sedapat mungkin menghindari, baik sengaja maupun tidak sengaja, terhadap perlakuan diskriminasi atau mengabaikan potensi anak didik yang berlatar belakang sosial ekonomi, budaya, agama, etnis, dan politik dari keluarga anak didik. Anak didik, tanpa kecuali, didorong dan dibimbing dengan optimal agar mereka memiliki kesempatan yang sama dan optimal dalam proses pembelajaran.

²³Alan R. Barcan & Patrick O'Flaherty (Eds.), *Family, Education and Society: The Australian Perspectives*, Academy Press, Australia, 1995, p. 11.

Orang tua bertanggung jawab terhadap pembentukan dasar sosialisasi anak didik dengan norma-norma agama dan budaya yang berlaku di keluarga. Orang tua berupaya mensosialisasikan anak-anaknya sesuai dengan apa yang telah diperoleh menjadi penting dan berguna dalam membimbing perilaku mereka sendiri. Perilaku ekonomi tampak menjadi penting dalam sosialisasi anak.

Dalam sosialisasi anak, peranan moral dan budaya keluarga turut menentukan dalam proses sosialisasi. Salah satu teori yang paling destruktif, bahkan hingga kini, bahwa "*cultural capital*" dari keluarga begitu kondusif terhadap suksesnya pendidikan adalah agaknya sebagai *arbitrary construction* dari kekuasaan (*power*) dan kekayaan (*wealthy*) untuk menjaga *the lower orders at bay*. Seorang ahli sosiologi radikal Francis, Pierre Boudieu dalam Alan R. Barcan & Patrick O'Flaherty (1995), mengatakan bahwa budaya merupakan suatu mekanisme untuk reproduksi kelas sosial (*social classes*). Sekolah diperlukan untuk mentransmisikan modal (*capital*) daripada *consecrated cultural signs*, dan keinginan itu, dalam pandangan dunia, adalah tidak lebih daripada kompetensi *in perceiving and deciphering clues which may, at the most elementary level, be totally extrinsic*.²⁴

²⁴Alan R. Barcan & Patrick O'Flaherty (Eds.), *Family, Education, and Society. The Australian perspective*, Academy Press, Australia, 1995, p. 12.

Bab 6

INTERAKSI EDUKATIF DI SEKOLAH

Secara sosiologis, istilah kelompok (*groups*) mempunyai pengertian sebagai suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain, di mana dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama. Interaksi sosial anak didik di sekolah, baik berupa interaksi antarindividu (anak didik), individu dengan kelompok (anak didik), dan kelompok dengan kelompok di sekolah, diharapkan akan mengarah pada interaksi edukatif.

A. Definisi Kelompok (*Group*)

Beberapa definisi kelompok, antara lain, diungkapkan Joseph S. Roucek bahwa suatu kelompok meliputi dua atau lebih manusia yang di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami para anggotanya atau orang lain secara keseluruhan. Mayor Polak mengatakan bahwa kelompok sosial adalah suatu *group*, yaitu sejumlah orang yang ada hubungan antara satu dengan yang lain dan hubungan itu bersifat sebagai sebuah struktur. Wila Huki (1986) menuturkan bahwa kelompok merupakan suatu unit yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang saling berinteraksi atau saling berkomunikasi.¹

Jadi, dapat diungkapkan bahwa kelompok (*group*) menurut perspektif sosiologi adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi

¹Abdullah Idi, "Bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan S1 & S2", *op.cit.*, hlm.7-9.

dan terjadi hubungan timbal balik di mana mereka merasa menjadi bagian dari kelompok tersebut. Kelompok sosial (*social groups*) dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk. Hal ini sangat bergantung dari sudut pandang ahli yang bersangkutan. Ada ahli yang memandang dari proses terbentuknya, ada pula yang memandang dari tinjauan kekuatan ikatan emosional yang terbentuk. Ada juga yang membagi kelompok sosial menjadi kelompok kekerabatan, kelompok primer dan kelompok sekunder, *gemeinschaft* dan *gesellschaft*, kelompok formal dan nonformal, dan *membership group*, dan *reference group*.²

Kamanto Sunarto (2004) menyebutkan berbagai klasifikasi kelompok sosial dari beberapa pakar. Biersted membedakan empat jenis kelompok sosial berdasarkan ada tidaknya organisasi, hubungan sosial di antara anggota kelompok, dan kesadaran jenis, yaitu kelompok statistik, kelompok kemasyarakatan, kelompok sosial, dan kelompok asosiasi. Merton mengungkapkan kelompok merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan, sedangkan *kollektiva* merupakan orang yang mempunyai rasa solidaritas karena berbagai nilai bersama dan yang telah memiliki rasa kewajiban moral untuk menjalankan harapan peran. Konsep lain yang diajukan Merton ialah konsep kategori sosial.³

Durkheim membedakan antara kelompok yang didasarkan pada *solidaritas mekanik* dan kelompok yang didasarkan pada *solidaritas organik*. Solidaritas mekanik merupakan ciri yang menandai masyarakat yang masih sederhana, sedangkan solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas yang sangat kompleks yang telah kenal pembagian kerja yang rinci dan dipersatukan oleh kesalingtergantungan antara bagian. Tönnies mengadakan perbedaan antara dua jenis kelompok, yang dinamakan *gemeinschaft* dan *gesellschaft*. *Gemeinschaft* digambarkan sebagai kehidupan bersama yang intim, pribadi, dan eksklusif, yakni suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir. Kelompok ini dibagi ke dalam tiga jenis: *gemeinschaft by blood*, *gemeinschaft of place*, dan *gemeinschaft of mind*. *Gesellschaft* merupakan kehidupan publik, yang terdiri atas orang yang kebetulan hadir bersama, tetapi masing-masing tetap mandiri dan bersifat sementara dan semu.⁴

²Abul Syani, *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 105.

³Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi, Edisi Revisi*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm. 137.

⁴*Ibid.*, hlm. 137.

Cooley memperkenalkan konsep kelompok primer. Sebagai lawannya, sejumlah ahli sosiologi menciptakan kelompok sekunder. Suatu klasifikasi lain, yaitu pembedaan antara kelompok dalam dan kelompok luar, didasarkan pada pemikiran Summer. Summer mengemukakan bahwa di kalangan antara anggota kelompok dalam dijumpai persahabatan, kerja sama, keteraturan, dan kedamaian. Sedangkan interaksi antara kelompok dalam dan kelompok luar cenderung ditandai kebencian, permusuhan, perang, dan perampokan. Merton mengamati bahwa kadang-kadang perilaku seorang tidak mengacu pada kelompoknya yang di dalamnya di mana yang bersangkutan menjadi anggota, melainkan pada kelompok lain. Dikala seorang berubah keanggotaan kelompok, ia sebelumnya dapat menjalani perubahan orientasi. Proses ini, Merton kemudian memberikannya dengan nama *sosialisasi antisipatoris*. Parsons memperkenalkan perangkat variabel pola. Menurut Parsons variabel pola merupakan seperangkat dilema universal yang dihadapi dan harus dipecahkan seorang pelaku dalam setiap situasi sosial.

Suatu klasifikasi yang diungkapkan Geertz dari masyarakat Jawa ialah pembedaan antara sub-tradisi abangan, santri, dan priyayi. Menurut Geertz pembagian masyarakat yang ditelitinya ke dalam tiga tipe budaya ini didasarkan atas perbedaan pandangan di antara mereka. Menurut Weber dalam masyarakat modern kita jumpai suatu sistem jabatan yang dinamakan birokrasi. Organisasi birokrasi yang oleh Weber mengandung sejumlah prinsip. Prinsip tersebut hanya dijumpai pada birokrasi yang oleh Weber disebut tipe ideal, yang tidak akan kita jumpai dalam masyarakat.

Secara umum organisasi dapat didefinisikan sebagai kelompok manusia yang berkumpul dalam suatu wadah yang mempunyai tujuan sama, dan bekerja untuk mencapai tujuan itu. Organisasi merupakan unit sosial yang dengan sengaja diciptakan dalam arti bahwa pada saat tertentu telah diambil suatu keputusan untuk mendirikan sebuah sekolah guna memudahkan pengajaran sejumlah mata pelajaran yang beraneka ragam.

Sekolah juga dibentuk kembali, dalam arti bahwa setiap orang-orang berhubungan satu sama lain dalam konteks sekolah; ada yang mengajar, ada yang bersusah payah untuk belajar, dan ada yang membersihkan ruangan, menyediakan makanan atau melakukan berbagai sekolah, Philip Robinson (1987: 238), mengungkapkan sekolah sebagai suatu organisasi. Meskipun sekolah merupakan benda yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, *college-college* bagi orang banyak, kemampuan kita untuk menjelaskan dan menggeneralisasikan cara kerjanya dengan cara agak mendalam masih dibatasi oleh kekurangan-kekurangan dalam analisis.

Lebih lanjut, Robinson (1987) mengatakan bahwa organisasi itu sendiri oleh kelangkaan telaah empiris yang layak dalam bidang pendidikan. Berlangsungnya terus ketiadaan suatu teori yang koheren dan dapat diterima secara umum mengenai sekolah sebagai organisasi mungkin merupakan petunjuk bahwa hal ini hanya berhadapan suatu khayalan sosiologi belaka. Kompleksitas lembaga-lembaga pendidikan adalah demikian rupa sehingga tidak ada teori umum yang dapat menggambarkan nuansa dan kekhasan lembaga-lembaga yang unik tanpa menimbulkan kesan dangkal dan sepele. Yang telah dikembangkan adalah berbagai cara memandang sekolah, perspektif-perspektif yang menerangi beberapa aspek dan mengaburkan aspek lainnya. Seperti akan kita lihat, yang terbaik dibangun sekitar telaah khusus, pembahasan mengenai lembaga-lembaga yang spesifik, dan dengan itu diusahakan untuk menghubungkan biografi dan struktur dengan suatu konteks historis.

Kemajuan suatu negara tidak terlepas dari kualitas pendidikan pada negara itu. Suatu bangsa yang terbelakang dalam kualitas pendidikan merupakan salah satu faktor kendala untuk bangkit dari kemiskinan. Pengalaman dari banyak negara maju di dunia, ternyata pembangunan sektor pendidikan menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan. Dengan kata lain, jika suatu negara ingin menjadi diperhitungkan keberadaan di tengah masyarakat global, pendidikan haruslah menjadi perhitungan dalam program pembangunan.

B. Interaksi Edukatif Anak Didik

Dalam perspektif pedagogik, anak didik memiliki sejumlah potensi yang perlu dikembangkan melalui proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Kebutuhan anak didik atas pendidikan disebut *homo educandum*. Potensi anak didik yang bersifat laten tersebut perlu diaktualisasikan agar anak didik tidak disebut lagi sebagai *animal educabile*, sejenis binatang yang memungkinkan dididik, tetapi harus dianggap sebagai manusia secara mutlak, karena anak didik memang manusia. Sebagai manusia, anak didik memiliki potensi akal yang harus dikembangkan agar menjadi kekuatan sebagai manusia yang bersusila dan berkecakapan sebagai modal kehidupan nyata.

Sebagai manusia, anak didik memiliki karakteristik, seperti dikatakan Imam Barnadib, et.al. dalam Djamarah (2005), anak didik memiliki sejumlah karakteristik: belum memiliki pribadi dewasa susila sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik; masih menyempurnakan aspek

tertentu dari kedewasaannya, sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik; memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang secara terpadu, yaitu kebutuhan biologis, rohani, sosial, inteligensi, emosi, kemampuan berbicara, anggota tubuh untuk bekerja (kaki, tangan, dan jari), latar belakang biologis (warna kulit, bentuk tubuh, dan lain sebagainya), serta perbedaan individual.⁵

Bertalian dengan psikologis anak didik ini, Davidman (1981) menekankan bahwa cara belajar anak adalah cara anak didik mengatur lingkungan yang mereka tertarik.⁶ R. Dunn and K. Dunn (1981)⁷ mengungkapkan identifikasi pembelajaran yang efektif bagi sejumlah anak didik dan efektif bagi lainnya; karena itu, Davidman (1981) menganjurkan bahwa para pendidik mengajar anak didik berdasarkan cara mereka belajar bukan berdasarkan cara pendidik.⁸

Beda halnya dengan Knowles (1990) yang menekankan periode perkembangan anak didik, di mana cara belajar anak didik berbeda antara periode itu. Untuk periode *infancy* dan *adolescence* dengan pendekatan pedagogik lebih tepat. Tetapi, untuk periode *adulthood* (18-ke atas), *andragogy* lebih tepat daripada pedagogik karena anak didik pada usia dewasa (*adulthood*) karena usia ini anak mulai belajar di perguruan tinggi.⁹ Bertalian dengan pada periode dewasa (*adult*), J.B. Bigg & P.J. Moore (1993) mengatakan:

Adults are motivated to learn particular topics because their life situation has defined a need to know, or because they have developed an interest in a topic;

What adults learn is thus based on current experience;

Adults come to a topic with a background of experience in the area, often considerable, and often a high degree of success;

Adults are strongly oriented toward self-direction in their learning; and

Individual differences between learners, in their knowledge, styles and competences, increase with age ...¹⁰

⁵Lihat: (Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik...*, *op.cit.*, hlm.51-52).

⁶L. Davidman, "The Learning Style: The Myth, The Pancea, The Wisdom", *Phi Delta Kappan*, 1981, Vol. 62, No. 9, p. 377.

⁷R. Dunn & K. Dunn, *Teaching Secondary Education Students Through Their Individual Learning Styles*, Allyn & Bacon, USA, 1993, p.5.

⁸Lihat: (L. Davidman, "The Learning Style...", *op.cit.*, p. 377).

⁹M. Knowles, *The Adult Learner: A Neglected Species*, Fourth Edition, Gulf, Houston, 1990, p. 56.

¹⁰J.B. Bigg & P.J. Moore, *Process of Learning*, Third Edition, Prince Hall, Australia, 1993, p. 57-58.

Dari pendapat Bigg dan Moore di atas, dapat dijelaskan bahwa anak usia dewasa (*adult*) termotivasi untuk belajar pada topik tertentu karena situasi kehidupan mereka yang membutuhkan suatu yang ingin diketahui, dan mereka mengembangkan suatu topik yang dianggap menarik. Apa yang dipelajari anak pada usia ini adalah berdasarkan pengalaman sekarang. Anak usia dewasa memilih suatu topik berdasarkan latar belakang pengalaman pada suatu bidang, yang sering kali menjadi pertimbangan untuk sukses. Anak usia ini juga sering kali berorientasi pada petunjuk sendiri (*self-direction*) dalam belajar. Perbedaan individu antara anak didik (*learners*), dalam pengetahuan mereka, cara dan kompetensi, meningkat dengan umur.

Karenanya, dalam melaksanakan interaksi edukatif dalam pembelajaran, seorang pendidik perlu memahami karakteristik anak didik. Kegagalan menciptakan interaksi edukatif yang kondusif, berawal dari munculnya pemahaman pendidik terhadap karakteristik anak didik. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam proses pembelajaran tidak akan berlangsung sempurna bila minimnya pemahaman pendidik tentang karakteristik anak didik.

Perbedaan karakteristik anak didik yang perlu diketahui pendidik, dengan melihat ciri tertentu sebagai individu, baik dari segi fisik maupun psikis dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Setidaknya ada tiga aspek tentang karakteristik anak didik. *Pertama*, perbedaan biologis, di mana anak didik memiliki jasmani yang tidak sama kendatipun dari satu keturunan yang sama. Anak didik memiliki ciri individu, seperti jenis kelamin, bentuk tubuh, warna rambut, warna kulit, mata, dan lain sebagainya. Aspek lainnya, adalah bertalian dengan kesehatan anak didik, misalnya bertalian dengan kesehatan telinga dan mata. Bila mata sakit rabun,¹¹ anak didik akan kesulitan melihat, karenanya karakteristik ini harus dipahami pendidik.

¹¹Cacat mata, misalnya *myopi* (rabun jauh), *hypermetropi* (rabun dekat), *presbyopi* (mata tua), *xerophthalmis* (rabun malam), *trachoma* (penyakit mata virus), juling, *conjungtive* (peradangan selaput mata karena infeksi debu atau kotoran lain, sering terjadi pada musim kemarau), buta warna (tidak dapat membedakan warna merah dengan hijau, biru dengan hijau atau tidak dapat melihat warna sama sekali), katarak (karena lensa mata mengapur). Bertalian dengan gangguan pendengaran, seperti saluran liang telinga yang tersumbat oleh minyak telinga (seruman), ketegangan pada gendang telinga, tulang-tulang pendengaran terganggu, dan lain-lain. Penyakit lainnya, seperti batuk, influenza, malaria, sakit mata, sakit kepala, bisul, hipertensi, anemia (darah renclah), semua berpengaruh terhadap pengelolaan kelas dan pembelajaran. Aspek biologis ini juga penting bagi pengaturan tempat duduk, pengelompokan anak didik di kelas, dan lain sebagainya. Baik aspek kondusif, dan untuk menghindari suasana belajar Lihat: (Tuti dan Liliek dalam Djamarah, "Guru dan Anak Didik... yang kaku, gaduh dan merugikan anak didik.", *op.cit.*, hlm. 56).

Kedua, perbedaan intelektual, yang merupakan salah satu aspek yang selalu aktual untuk dibicarakan karena ikut menentukan keberhasilan pembelajaran. Whiterington (1984) mengatakan bahwa seseorang dikatakan inteligen bila yang bersangkutan memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan cepat tanpa mengalami suatu masalah. Seorang yang sulit beradaptasi dikatakan tidak inteligen.¹² Jadi, inteligensi adalah kemampuan memahami dan beradaptasi dengan situasi yang baru dengan cepat dan efektif, kemampuan menggunakan konsep yang abstrak dengan efektif, dan kemampuan memahami hubungan dan mempelajarinya dengan cepat. Untuk memahami tinggi rendahnya inteligensi, digunakan instrumen tes inteligensi. Gambaran hasil tes inteligensi dinamakan *intelligence quotient* (IQ).

Perbedaan individual pada aspek inteligensi ini perlu dipahami pendidik, terutama bertalian dengan pengelompokan anak didik di kelas. Anak yang kurang cerdas jangan dikelompokkan pada anak yang level cerdasnya sama dengannya, agar yang bersangkutan terpacu untuk kreatif dalam belajar. Pendidik juga, dengan cara ini, diharapkan lebih mudah memberikan bimbingan tentang cara belajar yang baik.

Ketiga, perbedaan psikologis, di mana setiap anak didik berbeda secara lahir dan batin. Di sekolah juga adanya perbedaan psikologis anak didik tidak dapat dihindari, terutama bertalian dengan minat, bakat, dan motivasi anak didik terhadap materi pembelajaran. Seorang pendidik juga perlu menyadari, bahwa anak didik juga memiliki bisa saja berbeda dalam memerhatikan pendidik dalam penyampaian materi pembelajaran di kelas. Untuk memahami anak didik, seorang pendidik dapat melakukan pendekatan secara individual. Dengan memerhatikan kebutuhan anak didik, seorang pendidik dapat melakukan bimbingan dengan baik dan tepat guna memberi motivasi anak dalam belajar.¹³ Pemahaman terhadap perbedaan anak didik ini bertujuan agar seorang pendidik memiliki taktik dan strategi dalam proses pembelajaran edukatif.

Sukses tidaknya dalam proses pendidikan dan pembelajaran edukatif di sekolah, salah satunya, sangat ditentukan pendidik. Diungkapkan

¹²Whiterington, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1984), hlm. 57.

¹³Perhatian penting dalam interaksi edukatif, seorang pendidik (guru) dapat melakukan cara menyuruh anak agar memerhatikan papan tulis, gambar, guru, buku, tulisan di papan tulis, mendengar apa yang diucapkan guru, bukan melihat keluar jendela. Untuk memupuk anak didik atau anak kecil dianjurkan menggunakan *reinforcement* berupa gula-gula dan ganjaran simbolis: pujian, angka yang baik, acungan jempol, dan lain-lain.

Ahmad Rizali, dkk. (2009)¹⁴ bahwa pendidik (guru) adalah manusia biasa karenanya terdapat bermacam ragam cara dan kreativitasnya dalam melaksanakan tugas dalam mencerdaskan generasi masa depan. Lingkungan pergaulan pendidik dan suasana keluarganya setidaknya akan memengaruhinya dalam menjalankan tugas mulia sebagai pendidik. Jika, masa lalu, sosok pendidik menjadi panutan anak didik maupun orang tua dan masyarakat, kini bisa sebaliknya, sosok pendidik tidak selalu menjadi panutan lagi, akibat perubahan zaman yang tidak selalu mendukung kualitas profesi guru. Saat ini, kualitas pendidik di tanah air berbeda jauh dengan zaman sebelumnya, katakanlah dengan zaman Orde Baru, pendidik dihormati karena kualitas, kompetensi, komitmen, dan ketulusan dalam bidangnya.

Agaknya, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi di dunia global yang begitu cepat misalnya, tidak selalu diikuti dengan pengetahuan pendidik terhadap produk teknologi. Akibatnya, tugas profesional sebagai pendidik sering dilakukan sebagai rutinitas belaka dan kurang mengedepankan kualitas dan keikhlasan atau ketulusan. Padahal, elemen-elemen tersebut sebagai modal dasar dalam melaksanakan tugas yang diharapkan semua pihak, orang tua, anak didik, dan masyarakat. Interaksi sosial-edukatif pun agak sulit diciptakan, yang sebetulnya menjadi indikasi keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah, karena sekolah sebagai sistem sosial yang elemen-elemennya saling keterkaitan dan fungsional. Ketika salah satu elemen kurang berfungsi dengan baik, katakanlah elemen pendidik, maka proses pendidikan di sekolah itu mengalami kepincangan dan kualitas pembelajaran pun sulit tercipta dengan optimal.

Seperti diketahui, bahwa pendidikan dapat dikatakan sebagai upaya sadar, terencana dan sistematis dalam upaya memanusiakan manusia. Sosiologi pendidikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari seluruh aspek pendidikan, baik berupa struktur, dinamika, masalah pendidikan, dan aspek lainnya secara mendalam melalui analisis atau pendekatan sosiologis. Salah satu aspek pokok pembahasan sosiologi pendidikan, adalah hubungan antarmanusia di sekolah. Di dalamnya tercakup pola interaksi sosial dan struktur masyarakat di sekolah yang keterkaitan antara pendidikan dan interaksi antarkelompok (*intergroups' interaction*). Keilmuan dan kearifan individu melalui tempaan pendidikan akan dapat memecahkan masalah yang timbul dalam interaksi antarkelompok.

¹⁴Ahmad Rizali, dkk., *Dari Konvensional Menuju Guru Profesional*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 59.

Pendidikan, secara sederhana, dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau *paedagogie* berarti membimbing atau pertolongan diberikan dengan sengaja dilakukan orang dewasa agar anak didik menjadi dewasa. Pendidikan diartikan pula sebagai usaha yang dijalankan orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai hidup atau penghidupan lebih tinggi dalam arti mental. Hasbullah (2005)¹⁵ mengatakan bahwa terdapat beberapa pengertian pendidikan yang diberikan para ahli pendidikan, antara lain:

1. Langeveld, mengatakan bahwa pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan anak kepada anak yang tertuju kepada pendewasaan anak, atau lebih tepatnya sebagai upaya membantu anak agar bisa cakap melakukan tugas hidupnya sendiri;
2. John Dewey (2006), mengatakan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia;
3. Driyakara mengungkapkan pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf insani;
4. Ahmad D. Marimba (1981), menuturkan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian utama;
5. Ki Hajar Dewantara, mengekspresikan bahwa pendidikan yaitu tuntunan dalam hidup dengan tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang optimal;
6. Dalam UU No. 2/1989, bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang;
7. Dalam UU No.20/2003, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

¹⁵Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 2.

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keterampilan, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari beberapa definisi pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang terencana dan tersistematis dalam memanusiakan manusia.

Perlu dijelaskan selanjutnya bahwa salah satu aspek yang sering terlupakan sekolah adalah memupuk interaksi sosial-edukatif di kalangan murid-murid/anak didik. Biasanya sekolah terlalu fokus pada peningkatan kualitas akademik saja. Program pendidikan antarmurid, antargolongan ini bergantung pada struktur sosial murid-murid. Ada tidaknya golongan minoritas di kalangan mereka memengaruhi hubungan kelompok-kelompok itu. Kebanyakan negara mempunyai penduduk yang multirasial, menganut agama yang berbeda, dan mengikuti adat-kebiasaan yang berlainan. Perbedaan golongan dapat juga disebabkan oleh perbedaan kedudukan sosial dan ekonomi.

Murid-murid di sekolah sering menunjukkan perbedaan asal kesukuan/etnis, agama, adat istiadat, dan kedudukan sosial. Berdasarkan perbedaan itu mungkin timbul golongan minoritas di kalangan murid-murid, yang tersembunyi ataupun yang nyata. Kelompok dalam sekolah dapat dikategorikan berdasarkan:

Pertama, status sosial orang tua murid. Status sosial orang tua sangat memengaruhi pergaulan siswa. Tidak dapat dipungkiri, seorang siswa merupakan anak pejabat akan cenderung bergaul dengan teman yang selevel. Hal ini dapat terjadi pada pergaulan di dalam maupun di luar sekolah. Anak pejabat enggan bergaul dengan anak buruh. Jikalau ada jumlahnya pun sangat sedikit.

Kedua, hobi/minat/kegemaran. Kesamaan/minat/hobi mendorong timbulnya rasa kebersamaan di antara mereka. Anak-anak yang suka olah raga sepak bola cenderung intensif bergaul dengan teman se-klub mereka. Biasanya di sekolah terdapat beberapa jenis kegiatan ekstrakurikuler, seperti KIR (Kelompok Ilmiah Remaja), Rohis, Kelompok Seni, Pramuka, PMR, dan Olah Raga. Masing-masing membentuk ikatan emosional di antara anggotanya.

Ketiga, intelektualitas. Ada peluang terjadi kelompok berdasarkan tingkatan intelektualitas mereka, meskipun ini tidak dominan. Orang pintar karena biasanya suka membaca lebih sering berada di perpustakaan

daripada di kantin. Kehidupan mereka di sekolah benar-benar padat dengan kegiatan akademis.

Keempat, jenjang kelas. Perbedaan jenjang kelas ini merupakan faktor dominan yang sering terjadi di sekolah. Biasanya anak kelas tiga yang merasa lebih tua sering berbuat sesuka hati kepada adik kelasnya. Anak-anak kelas satu karena takut dengan seniornya lebih nyaman bergaul dengan teman-teman satu tingkatnya. Hal ini menyebabkan pergaulan mereka menjadi terkotak-kotak dan kurang harmonis.

Kelima, agama. Ada pula peluang terbentuknya kelompok karena persamaan agama. Kegiatan perayaan dan peribadatan yang mereka anut sering mempertemukan mereka dalam kebersamaan dan kepemilikan. Namun demikian, ini bukanlah faktor dominan di kalangan anak sekolah.

Keenam, asal daerah. Kesamaan asal daerah selanjutnya memberikan peluang bagi terbentuknya kelompok di sekolah, namun bukan juga merupakan faktor dominan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar siswa di sekolah tersebut berasal dari daerah yang sama. Berbeda dengan kehidupan di kampus yang nuansa kedaerahannya sangat kental, di sekolah biasanya murid cenderung lebih menaruh minat dan hobi ketimbang regionalitas.

Bertalian dengan interaksi antarkelompok di sekolah dapat dijelaskan bahwa sebagai sebuah komunitas sosial sekolah juga tidak akan luput dari masalah dalam interaksi antarkelompok. Masalah tersebut antara lain adalah *gap* atau kesenjangan antarkelompok. Stigma kelompok minoritas sering muncul di permukaan, di mana kelompok dalam kuantitas yang sedikit cenderung diabaikan baik secara fisik maupun kebijakan. Kecemburuan dan persaingan tidak sehat antarkelompok juga dapat memicu timbulnya masalah antarkelompok di sekolah. Istilah *gang* menjadi *trend* anak sekolah saat ini. *Geng* adalah representasi dari kekuatan siswa dalam lingkungan pergaulannya di sekolah. Ikatan psikologis emosional sering menyebabkan terjadi perkelahian antarpelajar, meskipun hanya karena persoalan sepele. Hal ini dapat dimaklumi dari tinjauan psikologis di mana perkembangan peserta didik di masa itu merupakan babak pencarian jati diri sehingga cenderung tidak stabil, emosional, dan mau menang sendiri.

Pada sebuah sekolah, tentunya sering atau pernah terjadi kesalahpahaman antara orang-orang di dalamnya. Hal itu biasa terjadi antara

murid kelas yang satu dengan kelas lainnya. Siswa dari daerah satu dengan yang lainnya, banyak motif yang dapat memicu hal ini, terlebih lagi jika ada golongan minoritas. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan pendidik atau sekolah untuk mengatasi masalah yang muncul dalam interaksi antarkelompok, di antaranya, sebagai berikut:

Pertama, pemberian informasi, diskusi kelompok, hubungan pribadi, dan sebagainya. Guru dapat memberikan informasi tentang hakikat dan perbedaan rasial dan kultural dengan menekankan bahwa perbedaan di kalangan manusia bukanlah disebabkan oleh pembawa biologis, melainkan karena dipelajari oleh lingkungan kebudayaan masing-masing. Informasi semacam ini juga dapat diperoleh dalam pelajaran biologi dan ilmu-ilmu sosial. Memberikan informasi tentang sumbangan minoritas kepada kelompok.

Kedua, guru dapat menceritakan bagaimana setiap kelompok itu sangat berpengaruh terhadap kelompok lain. Orang Arab, Yahudi, dan India memberikan sumbangan berarti bagi seluruh masyarakat di dunia. Hal yang sama juga dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil yang berusaha meraih kemerdekaan di tanah air, sumbangan mereka merupakan salah satu sebab merdekanya Indonesia.

Ketiga, menanamkan nilai-nilai toleransi antarsiswa. Nilai toleransi ini sangat penting. Jika mereka mempunyai sikap murid-murid lain ke arah toleransi yang lebih besar. Guru dapat memobilisasi tenaga-tenaga ini untuk memupuk sikap yang sehat di kalangan murid-murid.

Keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya untuk mengadakan interaksi sosial atau pergaulan antara murid-murid dari berbagai golongan. Jika mereka dapat saling berkunjung dan menghadiri kegiatan atau upacara dalam keluarga masing-masing, diharapkan lahirnya saling pengertian lebih mendalam dan toleransi yang lebih besar.

Kelima, menggunakan teknik bermain peranan atau sosiodrama. Peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dapat dimainkan dalam kelas dalam bentuk sosiodrama dengan menyuruh golongan mayoritas memainkan peranan golongan minoritas. Tujuannya adalah agar lebih memahami persamaan golongan minoritas dan dapat mengidentifikasi diri dengan keadaan mereka.

Keenam, menggunakan kegiatan ekstra-kurikuler. Kegiatan ekstra-kurikuler bisa melibatkan banyak orang dengan berbagai latar belakang murid yang berbeda. Keseringan komunikasi dan kerja sama di antara

mereka menumbuhkan kebersamaan yang mendalam. Hal ini dapat memecah sekaligus meredakan masalah-masalah seputar gap antara kelompok sosial. William L. Greene (2002)¹⁶ mengatakan:

...the ability of minority group members to achieve a positive and secure self-concept is linked to the way they come to understand their ethnic group membership within the larger society. Furthermore, the grouping numbers of ethnicity mixed, individuals raise questions as to the importance and effect ethnic identification will have on their internalization of values and attitudes towards school.

Dari ungkapan Greene di atas dapat dijelaskan bahwa kemampuan anggota kelompok minoritas untuk memperoleh suatu hal positif dan memiliki konsep diri (*self-concept*) adalah bertalian dengan cara mereka mengerti anggota kelompok etnis mereka sendiri dalam masyarakat lebih luas. Lebih jauh, sejumlah besar anggota etnis berbaur, individu-individu kelompok pun merasakan betapa pentingnya, seperti pentingnya efek dari identifikasi etnis yang diperoleh pada internalisasi nilai-nilai dan sikap terhadap sekolah.

Sebagai implikasi dari pemahaman terhadap perbedaan latar belakang anak didik di sekolah, bagi seorang pendidik, diungkapkan selanjutnya oleh Greene:

... student need to have opportunities to explore personal and societal dimensions of ethnic identification. At a time their lives when cognitive development allows adolescents to make statements about their personhood challenges that might impede or subvert academic opportunity.¹⁷

Dapat dijelaskan bahwa anak didik perlu memiliki peluang untuk mengeksplorasi dimensi personal dan sosial dari identifikasi etnis. Pada suatu waktu peninggalan mereka ketika pengembangan kognitif membolehkan usia dewasa untuk membuat pernyataan-pernyataan tentang kepribadian mereka, mereka juga harus menghadapi konsekuensi-konsekuensi dari tantangan-tantangan yang tidak teruji yang mungkin bagian dari peluang akademik. Dalam hal ini, dikatakan Cohen dalam Greene bahwa sekolah diharapkan dapat mentransmisikan pengetahuan tentang kelompok kultural (*cultural groups*) untuk belajar ras, gender, dan kelas secara dinamik, interaksi konstruksi sosial. Pendidikan

¹⁶William L. Greene, *Ethnic Identity and the Sociocultural Playing Field Choices Made by Ethnicity Mixed Adolescent in Hawaii, Sociocultural Influences on Motivation and Learning*, Edited by Dennies M. McInerney and Shawn van Etten, Volume 2, Information Age Publishing, USA, 2002, p. 24.

¹⁷*Ibid.*, p. 24.

dapat mendorong anak didik untuk membangun pengetahuan kultural yang diharapkan dapat mempercepat: pengalaman hidup, mendesain pendidikan mereka sendiri dengan kesadaran sendiri, dan membangun masyarakat-dunia di mana mereka tinggal.¹⁸

Interaksi edukatif dapat diartikan sebagai suatu aktivitas relasi berbagai elemen edukatif, baik pendidik, staf administrasi, maupun anak didik. Mereka dengan bersama-sama memiliki kesadaran dalam menciptakan suatu iklim pendidikan dan pembelajaran di sekolah, untuk menghasilkan sumber daya manusia (anak didik) yang berkualitas dan handal sesuai perkembangan zaman. Abu Ahmadi dan Shuyadi (1985) dalam Syaiful Bahri Djamarah (2005)¹⁹ mendefinisikan "interaksi edukatif adalah suatu gambaran hubungan antara pendidik (guru) dan anak didik yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan."

Dikatakan Made Pidarta (1997)²⁰ bahwa pendidik memiliki dua pengertian, yakni dalam pengertian luas dan sempit. Pendidik dalam pengertian luas, adalah semua orang yang berkewajiban membina anak didik. Secara natural, semua anak didik, sebelum mereka dewasa menerima pembinaan dari orang dewasa agar mereka dapat berkembang dan tumbuh dengan wajar. Secara alamiah pula, anak didik membutuhkan bimbingan karena mereka memiliki insting sedikit sekali untuk dapat bertahan dalam hidupnya. Pada awalnya, orang yang paling tepat untuk mendidik dan membina anak didik adalah orang tua mereka masing-masing, warga masyarakat dan elitnya. Sedangkan pengertian pendidik dalam arti sempit, yakni orang-orang yang disiapkan secara sadar untuk menjadi pendidik (bisa guru dan dosen). Kedua jenis pendidik ini diberi pengetahuan tentang pendidikan dalam waktu yang relatif lama agar menguasai ilmu kependidikan dan mampu mengaplikasikannya dalam praktik di lapangan.

Menjadi pendidik (guru) berarti harus terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial-masyarakat, agar dapat meningkatkan kualitas profesional yang dimiliki sebagai pendidik. Prinsip *long life education* menjadi relevan sekali ketika seseorang

¹⁸Cohen dalam William L. Greene, *Ethnic Identity and the Sociocultural Playing....*, op.cit., p. 25.

¹⁹Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik, Dalam Interaksi Edukatif: Suatu Pendekatan Teoretis Psikologi*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 11.

²⁰Made Pidarta, *Landasan Kependidikan*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1997), hlm. 264.

memilih profesi sebagai pendidik dan berharap menjadi kompeten dan profesional. Seperti dikatakan S. Nasution (2010)²¹ bahwa kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat akan berdampak pada cepatnya ilmu menjadi usang. Karenanya, diperlukan lebih banyak terhadap penekanan konsep-konsep dan prinsip-prinsip kemampuan berpikir dan keterampilan dalam memecahkan masalah, atau dalam menghadapi masalah yang kompleks perlu diberikan kemampuan untuk melihat esensinya dalam bentuk yang lebih sederhana. Masalah yang paling sulit dihadapi adalah masalah nilai-nilai dalam dunia yang senantiasa berubah drastis.

Perubahan yang begitu dinamis dan drastis itu memerlukan adaptasi para pendidik dengan bekal pengetahuan dan keterampilan serta memiliki nilai-nilai dunia, termasuk nilai-nilai yang bersumber dari agama, tradisi, dan budaya yang positif dan relevan yang dapat mendukung profesi pendidik. Peran pendidik (guru dan dosen), dikatakan Abuddin Nata (2003), terkadang sering dipertanyakan sejauh mana eksistensinya secara fungsional. Hal ini dikarenakan munculnya sebuah fenomena para pendidik (guru) lulusan pendidikan secara moral cenderung mengalami kemerosotan. Secara intelektual-akademik lebih buruk lagi, banyak pendidik (guru) yang tidak siap memasuki dunia kerja. Jika pandangan demikian benar adanya, maka akan berdampak pada peranan mereka sebagai pendidik. Untuk mendidik para siswa agar menjadi moral dan akhlak yang baik, seorang pendidik tentunya diharapkan sebagai teladan bagi anak didiknya.

Tugas dan peranan seorang pendidik sesungguhnya begitu kompleks yang tidak terbatas pada saat berlangsungnya interaksi edukatif di kelas, dalam proses pembelajaran. Seorang pendidik juga berfungsi sebagai administrator, evaluator, konselor, fasilitator, motivator, komunikator, dan lain sebagainya.²² Dikatakan Muhammad Surya (1997)²³ bahwa peranan

²¹S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 158.

²²B. Suryosubroto, *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 3.

²³Peran pendidik yang profesional memiliki tugas utama dan mulia yakni mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi anak didik. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan profesional secara terus-menerus bagi pendidik itu sendiri. Apalagi, dengan sistem perbaikan yang berkesinambungan terhadap kurikulum dalam rangka menjawab tantangan zaman yang senantiasa berubah, sekolah seharusnya juga memiliki para pendidik yang berfungsi sebagai pendidik di samping sebagai pendidik/guru. Hal ini, diharapkan para pendidik dapat senantiasa mampu mengadopsikan strategi baru dan cara baru dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pencapaian tujuannya.

seorang pendidik berarti totalitas tingkah laku yang harus dilakukannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik (guru). Pendidik memiliki peranan yang komprehensif, baik di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Di sekolah, pendidik berperan sebagai perancang pengajaran, pengelola pengajaran, penilai hasil pembelajaran murid, pengarah pembelajaran, dan sebagai pembimbing murid. Di keluarga, pendidik berperan sebagai pendidik/guru dalam keluarga (*family educator*). Di masyarakat, pendidik berperan sebagai pembina masyarakat (*social developer*), pendorong masyarakat (*social motivator*), inovasi masyarakat (*social inovator*), dan agen masyarakat (*social agent*). Seorang pendidik (guru) yang baik dan efektif diharapkan dapat memainkan semua peranan (*roles*) itu dengan baik.

Kemampuan pendidik berperan signifikan dalam mencerdaskan anak bangsa inilah yang akan memberikan corak kehidupan generasi masa depan. Pendidik (guru dan dosen) secara formal merupakan pejabat profesional. Tetapi, masih banyak masyarakat yang belum mengakui keprofesionalan mereka. Hal ini, dapat dilihat dari kenyataan bahwa banyak pendidik itu dalam tugasnya belum memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan optimal. Sebagian masyarakat lainnya, ada pula yang berpendapat bahwa mendidik dapat dilakukan oleh siapa saja. Padahal tugas mengajar dan mendidik merupakan tugas profesional, sudah barang tentu tidak semua orang bisa melakukannya. Made Pidarta (1997)²⁴ memandang bahwa yang dikatakan profesional bila hanya pejabat/orang bersangkutan yang dapat melaksanakan tugas itu.

Peranan pendidik dalam kaitannya dengan anak didik, tampak bermacam-macam berdasarkan situasi interaksi sosial-edukatif dihadapinya. Interaksi sosial-edukatif dimaksudkan seperti situasi formal dalam proses pembelajaran di kelas maupun dalam situasi informal di luar kelas. Dalam situasi formal, yakni dalam usaha guru mendidik dan mengajar anak didik dalam kelas, pendidik diharapkan dapat memperlihatkan kewibawaan dan otoritasnya, di mana pendidik harus dapat mengendalikan, mengatur, dan mengontrol perilaku anak didik. Jika diperlukan, seorang pendidik dapat menggunakan kekuasaannya untuk memaksa anak didik belajar, melakukan tugasnya, dan mematuhi peraturan. Dengan kewibawaan dalam menegakkan disiplin demi

seperti yang diharapkan anak didik, orang tua dan masyarakat. Lihat: (Muhammad Surya, *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*, IKIP Bandung, 1997, hlm. 108).

²⁴Lihat: (Made Pidarta, *Landasan Kependidikan*, *op.cit.*, hlm. 265).

kelancaran dan ketertiban proses belajar-mengajar. Dalam pendidikan kewibawaan merupakan syarat mutlak harus dimiliki pendidik. Mendidik merupakan upaya membimbing anak didik dalam perkembangannya ke arah tujuan pendidikan. Bimbingan atau pendidikan hanya mungkin terjadi bila adanya kepatuhan anak didik, dan kepatuhan diperoleh bila pendidik memiliki kewibawaan. Kewibawaan dan kepatuhan merupakan dua hal yang komplementer dalam menjamin adanya disiplin.

Adanya suatu kemajuan proses interaksi edukatif antara pendidik dan anak didik, lebih ditentukan kompetensi pendidik dalam proses pembelajaran. Pendidik sebagai pengembang kurikulum (*curriculum developer*) di kelas, memiliki peranan terdepan terhadap pelaksanaan pembelajaran di kelas. Interaksi edukatif antara pendidik dan anak didik ditunjukkan pula adanya interaksi timbal balik (*mutual symbiosis*) antara keduanya. Thomas Gordon (1997)²⁵ menuturkan bahwa keterampilan-keterampilan berkomunikasi yang diperlukan pendidik agar lebih efektif dalam berinteraksi edukatif, dalam menciptakan mata rantai, dan dalam membangun jembatan penghubung antara pendidik dan anak didik. Keterampilan berkomunikasi yang diperlukan tidak terlalu kompleks dan tidak sulit bagi pendidik untuk mengerti, kendatipun memerlukan latihan dan adanya motivasi ingin maju dan sukses dalam keterampilan berkomunikasi.

Interaksi edukatif antara pendidik dan anak didik yang diharapkan dapat tercapai dengan optimal apabila adanya kesadaran pendidik bahwa tugas mulia dalam mengajar dan mendidik anak didik itu sifatnya komprehensif. Melaksanakan tugas sebagai pendidik haruslah dipahami sebagai tugas mencerdaskan anak didik yang memerlukan keteladanan baik di dalam maupun di luar sekolah.

Menjadi seorang pendidik yang efektif dalam proses pembelajaran yang mengedepan interaksi edukatif, diperlukan cara-cara membangun berdasarkan kegiatan edukatif fundamental dalam rutinitas proses pembelajaran. Hal ini dimaksudkan, seorang pendidik perlu menyadari atas pentingnya ketekunan, keikhlasan, dan ketabahan dalam menjalankan tugas dan meniti karier sebagai pendidik. Produk final dari interaksi edukatif di sekolah (formal) dan di luar sekolah (informal) adalah menginginkan keberhasilan anak didiknya. Sukses tidaknya anak didik lebih ditentukan oleh kualitas seorang pendidik.

²⁵Thomas Gordon, *Menjadi Guru Efektif*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 3.

Seorang pendidik akan berbahagia dan merasa memiliki kepuasan jika anak didiknya berhasil. Seperti diungkapkan Thomas Gordon (1997),²⁶ bahwa orang dewasa banyak menyediakan waktunya untuk mengajar anak-anak muda. Sebagian waktu yang digunakan ini sering kali memberikan kepuasan tersendiri bagi orang dewasa, sebab membantu anak muda (semua umur) untuk mempelajari kemampuan baru atau untuk mendapatkan wawasan baru, bagi orang dewasa merupakan pengalaman yang membahagiakan. Hal ini membuat orang tua, guru, pemimpin generasi muda merasa bahagia karena dapat memberi andil dalam pertumbuhan generasi muda, karena mereka merasa telah memberikan sebagian dari dirinya untuk memperkaya hidup orang lain atau anak muda dengan bekal pengetahuan dan keterampilan.

Salah satu elemen lain dari pendidik yang dapat menentukan keberhasilannya dalam mendidik adalah kepribadian. Muhammad Surya (1997), menulis bahwa "secara umum kepribadian dapat diartikan sebagai keseluruhan kualitas tingkah laku individu yang merupakan cirinya yang khas dalam berinteraksi dengan lingkungannya."²⁷ Pentingnya kepribadian pendidik dalam interaksi edukatif, dikarenakan pendidik memiliki sifat-sifat sebagai manusia. Hal ini kadang-kadang dapat memengaruhi kelancaran dalam melaksanakan tugas mendidik. Untuk mencapai keberhasilan dalam mendidik, elemen kepribadian tidak dapat diabaikan begitu saja. Kepribadian yang mendukung proses pembelajaran dimaksudkan adalah kepribadian yang mendukung profesinya sebagai pendidik, seperti memiliki akhlak mulia: suka menolong, tidak sombong, disiplin, jujur, peramah, berpakaian rapi, hemat, tidak kikir, bertanggung jawab, mengendalikan diri, dan suka kerja keras.

Karena seorang pendidik merupakan manusia biasa, sejumlah contoh perilaku akhlak mulia dari pendidik di atas memerlukan kesadaran dan motivasi dan upaya ekstra agar menjadi pendidik berkualitas dan berkepribadian. Seorang pendidik akan terus tertantang apakah akan dapat menjadi seorang teladan, berkepribadian, dan identitas diri yang kuat di tengah derasnya perubahan sosial dalam masyarakat modern yang senantiasa memerlukan penyeimbang pengetahuan, keterampilan, dan keteladanan *akhlakul karimah*.

²⁶Lihat: (Thomas Gordon, *Menjadi Guru Efektif*, *op.cit.*, 1997, hlm. 3).

²⁷Lihat: (Muhammad Surya, *Psikologi Pembelajaran*, 1997, *op.cit.*, hlm. 113).

Selanjutnya, elemen yang dapat menentukan kualitas pembelajaran edukatif adalah dengan terus belajar untuk meraih ilmu pengetahuan yang senantiasa berkembang cepat dan dinamis. Seorang pendidik diharapkan tidak cepat puas dengan ilmu diperoleh akan tetapi terus belajar. Abuddin Nata (2002)²⁸ mengatakan suatu pekerjaan yang dilakukan tanpa dukungan ilmu pengetahuan, keahlian, dan keterampilan dianggap kurang tepat, dan bahkan akan mendatangkan kehancuran. Dalam ajaran Islam, seorang berilmu diwajibkan untuk mengamalkan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Saw. menegaskan, bahwa "jika suatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang tidak memiliki keahlian, maka tunggulah kehancurannya."

Seorang pendidik, dalam hal ini, dituntut untuk memiliki pengetahuan terkait dalam proses pembelajaran terciptanya interaksi edukatif yang mampu mencerdaskan anak didik dalam arti sebenarnya. Seorang pendidik juga memerlukan ketulusan dan keikhlasan dalam mentransfer ilmu pengetahuan dimiliki kepada anak didik. Dalam sebuah hadis, Ibnu Ruslan mengutip Al-Zubaid, dikatakan pula bahwa "orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa sebelum orang-orang menyembah berhala." Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah [9]: 122:

Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Dalam proses interaksi edukatif setidaknya ada dua kegiatan, kegiatan pendidik pada satu sisi; kegiatan anak didik pada sisi lain. Pendidik mengajar dengan gayanya tersendiri dan anak didik belajar dengan gayanya tersendiri pula. Pendidik tidak hanya mengajar, tetapi juga mempelajari psikologis anak didik dan iklim kelas. Suatu interaksi yang harmonis terjadi dengan baik apabila dalam prosesnya ada keselarasan, keseimbangan, keserasian antara pendidik dan anak didik. Pendidik juga mendorong anak didiknya agar dalam proses pembelajaran lebih aktif dan kreatif.

²⁸Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 37.

137 Dalam upaya mendorong proses pembelajaran edukatif dengan optimal, ada sejumlah prinsip interaksi edukatif²⁹ yang perlu diketahui pendidik, yaitu:

Pertama, prinsip motivasi, di mana seorang pendidik perlu memahami tingkat motivasi anak didik berbeda satu sama lainnya. Pendidik diharapkan dapat memotivasi mereka agar dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif dan kreatif agar diperoleh hasil yang optimal.

Kedua, prinsip berawal dari persepsi yang dimiliki. Pendidik diharapkan menyadari atas anak didik yang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Dalam pembelajaran, pendidik harus meletakkan pengalaman anak didik yang harus dihadapinya dari lingkungan sehari-hari, untuk tujuan kepentingan interaksi edukatif yang maksimal.

Ketiga, prinsip mengarah pada fokus tertentu, bahwa pelajaran yang direncanakan dalam suatu bentuk dan pola tertentu dengan terfokus diharapkan akan mampu menghubungkan bagian-bagian terpisah dalam kegiatan pembelajaran. Fokus itu dapat dilihat dari cara merumuskan masalah yang akan dipecahkan, merumuskan pertanyaan yang akan dijawab, atau merumuskan konsep yang akan ditemukan. Misalnya, manfaat bagi kehidupan manusia, dapat dilihat dari kebutuhan sehari-hari masyarakat di lingkungan anak didik, air untuk kebutuhan tumbuhan serta hewan yang bermanfaat bagi manusia, untuk listrik dengan tenaga air.

Keempat, prinsip keterpaduan, di mana salah satu kontribusi pendidik dalam pembelajaran adalah menghubungkan suatu pokok bahasan dengan pokok-pokok bahasan lain mata pelajaran berbeda. Misalnya, menjelaskan tentang pelajaran moral pada PKN dihubungkan dengan akhlak dalam pelajaran agama. Adanya keterpaduan dalam penjelasan ini akan membantu anak didik dalam mengorganisaikan dan memadukan bahan belajar dalam interaksi edukatif.

Kelima, prinsip pemecahan masalah. Masalah perlu dipecahkan, tetapi masalah bukan dicari. Dalam interaksi edukatif, masalah diciptakan untuk mendorong anak didik agar pandai dalam memecahkan suatu masalah, terutama suatu masalah bertalian dengan kebutuhan anak didik itu sendiri. Pendidik menciptakan masalah dalam pokok bahasan

²⁹Lihat: (Syarif Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik, Dalam Interaksi Edukatif, op.cit.*, hlm. 62-69).

tertentu dalam interaksi edukatif agar anak didik dapat belajar mencari solusinya.

Keenam, prinsip mencari, menemukan, dan mengembangkan. Anak didik memiliki potensi untuk mencari dan mengembangkan dirinya. Iklim pembelajaran diharapkan dapat mendorong anak didik agar dapat mencari dan menemukan informasi secara mandiri. Pendidik, selain sebagai edukator, manajer, berposisi pula sebagai pendorong dan fasilitator dalam pembelajaran, di mana ruang/kesempatan perlu diberikan kepada anak didik untuk mencari, menemukan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan agar menjadi pribadi mandiri.

Ketujuh, prinsip belajar sambil bekerja. Konsep belajar sambil bekerja (*learning by doing*), bertujuan agar pelajaran yang diperoleh mudah diresapi dan bertahan lama bagi anak didik. Misalnya, pelajaran shalat akan lebih bermakna bila tata cara dan hafalan ayat-ayat Al-Qur'an dalam shalat dapat dipraktikkan dalam pelajaran praktik (*doing*) shalat.

Kedelapan, prinsip hubungan sosial, di mana anak didik dilatih untuk terbiasa bekerja sama dengan anak-anak lain dalam kelas. Kerja sama akan bermanfaat bagi anak didik agar lebih bergairah belajar karena dilibatkan dalam kelompok. Kerja sama dimaksudkan bukanlah pada kerja sama yang berkonotasi negatif, katakanlah misalnya menyontek, tetapi kerja sama yang positif dalam memperjelas pemahaman mereka tentang materi pelajaran berdasarkan adanya hubungan sosial dalam kelompok tadi.

Kesembilan, prinsip perbedaan individual, di mana anak didik memiliki perbedaan satu sama lain, baik dari biologis, intelektual, dan psikologis. Pendidik diharapkan dapat memahami perbedaan anak didik itu agar dapat memilih pendekatan yang tepat dalam proses pembelajaran.

Prinsip-prinsip interaksi edukatif dalam pembelajaran di atas, akan membantu pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Sudah barang tentu, prinsip-prinsip ini hanya dapat dilaksanakan oleh pendidik yang senantiasa aktif, kreatif, dan memiliki motivasi serta mencintai profesinya sebagai pendidik. Seorang pendidik profesional dipastikan dapat memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip interaksi-edukatif dengan optimal.

Dalam upaya terbentuknya suatu interaksi edukatif dalam proses implementasi pembelajaran di kelas, seorang pendidik diharapkan memiliki tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberikan

fasilitas agar anak didik dapat mencapai tujuannya. Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono (2004),³⁰ tugas pendidik meliputi: mendidik anak didik dengan titik berat pada motivasi pencapaian tujuan, baik jangka pendek maupun jangka panjang; memberikan fasilitas pencapaian melalui pengalaman belajar yang optimal; dan membantu perkembangan aspek pribadi, seperti sikap, nilai-nilai, dan penyesuaian diri.

Sebagai pembimbing dalam belajar, pendidik diharapkan dapat: mengenal dan memahami anak didik baik secara individual maupun kelompok; memberikan penerangan kepada murid mengenai hal-hal yang diperlukan dalam proses belajar; memberikan kesempatan yang memadai agar anak didik dapat belajar sesuai dengan kemampuannya; membantu anak didik dalam mengatasi masalah pribadi yang dihadapinya; dan menilai keberhasilan setiap langkah kegiatan bimbingan yang telah dilaksanakan.³¹

Interaksi-edukatif, terlihat dalam pelaksanaan proses pembelajaran atau tahap-tahap pembelajaran yang dilakukan seorang pendidik. Interaksi-edukatif dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), setidaknya akan terlihat dalam perencanaan/persiapan, pelaksanaan, dan penutupan. Interaksi edukatif juga menuntut pendidik untuk melaksanakan motivasi dan bimbingan kepada anak didik baik bertalian dengan kesulitan belajar maupun masalah pribadi yang dapat memengaruhi belajar, yang didasarkan pada nilai-nilai etika edukatif.

Seorang pendidik memiliki peranan penting dalam menciptakan interaksi edukatif di sekolah. Sukses tidaknya seorang pendidik sangat tergantung bagaimana anak didik saat dimotivasi oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Paul R. Burden (2003) mengatakan:

... there are four dimension of motivations: interest, relevance, expectancy, and satisfaction. interest refers to hther th students curiosity is aroused and sustained overtime. Relevance refers to whether the students see instruction as satisfying personal needs or goals.... motivation increases when studet percive that a learning activity will satisfy basic motives such as needs for achievement, power, or application. Expectancy refers to whether students

³⁰Dalam memberikan motivasi, seorang pendidik dapat melakukan: membangkitkan dorongan kepada siswa untuk belajar; menjelaskan secara konkret kepada siswa apa yang dapat dilakukan pada akhir pengajaran, memberikan ganjaran terhadap prestasi yang dicapai sehingga dapat merangsang untuk mencapai prestasi yang lebih baik; dan membentuk kebiasaan belajar yang baik. Lihat: (Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar*, Edisi Revisi, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 104-107).

³¹Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar*, *ibid.*, hlm. 107.

*have a casethat they can successful in the lesson through their personal control. Satisfaction refers to the student's intrinsic motivations and their responses to extrinsic rewards.*³²

Dapat dijelaskan bahwa dalam menciptakan suatu interaksi edukatif di sekolah, terutama di kelas, seorang pendidik perlu memahami dimensi sosio-psikologis bertalian dengan motivasi: interes, relevansi, ekspektansi, dan kepuasan. *Interes* bertalian dengan apakah anak didik menyenangi belajar dan dapat bertahan sepanjang waktu (belajar). *Relevansi* bertalian dengan apakah anak didik melihat pelajaran sebagai kepuasan tujuan atau kebutuhan personal. Motivasi akan meningkat ketika anak didik memandang bahwa suatu aktivitas belajar akan memuaskan motif-motif dasar seperti kebutuhan untuk berprestasi (*achievement*), kekuasaan (*power*) atau afiliasi (*affiliation*). *Ekpektansi* merujuk pada apakah anak didik memiliki kasus bahwa mereka dapat menjadi sukses dalam pelajaran melalui kontrol personal. *Kepuasan (satisfaction)* merujuk pada motivasi intrinsik anak didik dan respons-respons mereka pada penghargaan intrinsik.

Jadi, interaksi edukatif hanya dapat tercipta apabila seorang pendidik tidak hanya memiliki kompetensi dan profesional dalam proses pembelajaran. Seorang pendidik juga perlu memahami dimensi sosio-psikologis anak didik di mana akan memengaruhi sukses tidaknya anak didik dalam pembelajaran. Permasalahan intrinsik dan ekstinsik anak didik memerlukan perhatian dan motivasi tulus dan ikhlas dari para pendidik, agar anak didik memiliki semangat atau motivasi unggulan dalam belajar dan meraih proses pencapaian cita-cita yang didambakan.

³²Paul R. Burden, *Classroom Management: Creating a Successful Learning Community*, John Wiley & Sons, Inc., USA, 2003, p. 114.

Bab 7

SEKOLAH SEBAGAI ORGANISASI

Secara sederhana, kajian sosiologi pendidikan bertalian dengan analisis ilmiah tentang proses interaksi sosial yang terkait dengan aktivitas pendidikan, baik di keluarga, kehidupan sosio-kultural masyarakat maupun pada taraf objektif tentang relasi sosial yang menyusun konstruksi total realitas pendidikan di suatu negara. Sampai pada pemahaman tersebut segala bentuk wawasan dan pengetahuan sosiologis guna membedah tubuh pendidikan nasional menjadi perlu dibahas agar proses-proses pembelajaran berlangsung tetap relevan dengan kebutuhan bangsa.

Di sini, kriteria sekolah sebagai salah satu wujud organisasi formal ditinjau dari kaitan unsur-unsur sosial pendukungnya dalam proses mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, akan dikaji tentang interaksi pendidikan di kelas, dan yang terakhir yaitu mengenai tinjauan yang bertolak dari kenyataan bahwa tidak bisa lepas dari hubungan wadah eksternalnya.

Jika perhatian tertuju pada lembaran sejarah perkembangan pendidikan masyarakat Indonesia, produk kemajuan sosial, meningkatnya taraf hidup rakyat, akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan dan penerapan inovasi teknologi merupakan bagian dari prestasi gemilang hasil jerih payah lembaga pendidikan kita dalam upaya memajukan kehidupan bangsa. Meningkatnya jumlah kaum terpelajar telah menjadi bahan bakar lajunya lokomotif kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Akan tetapi, beberapa kendala yang melingkari dunia pendidikan dalam kaitan dengan menurunnya kualitas lulusan (*output*) pendidikan nasional menjadi bukti bahwa wajah pendidikan memerlukan banyak perhatian. Melihat keberadaan sekolah begitu penting bagi eksistensi dan keberlangsungan pendidikan, maka topik ini lebih memfokuskan pada kajian sosiologis tentang hakikat, peran, dan fungsi sekolah sebagai institusi pendidikan.

A. Sekolah: Organisasi

Kata sekolah berasal dari bahasa Latin, yakni *skhole*, *scola*, *scolae* atau *skhola* yang memiliki arti waktu luang atau waktu senggang, di mana ketika itu sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah kegiatan utama mereka, yakni bermain dan menghabiskan waktu menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang adalah mempelajari cara berhitung, cara membaca huruf dan mengenal tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni). Untuk mendampingi dalam kegiatan *scola* anak-anak didampingi oleh orang ahli dan mengerti tentang psikologi anak, sehingga memberikan kesempatan-kesempatan yang sebesar-besarnya kepada anak untuk menciptakan sendiri dunianya melalui berbagai pelajaran di atas.¹

Kini, kata *sekolah*, dikatakan Sunarto (1993), telah berubah berupa bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah, dan kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah, jumlah kepala sekolah bisa berbeda pada tiap sekolahnya, tergantung dengan kebutuhan. Bangunan sekolah disusun meninggi untuk memanfaatkan tanah yang tersedia dan dapat diisi dengan fasilitas yang lain. Ketersediaan sarana pada suatu sekolah memiliki peranan penting dalam terlaksanakannya proses pendidikan.²

Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa (atau murid) di bawah pengawasan pendidik (guru). Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal, yang umumnya wajib, dalam upaya menciptakan anak didik agar mengalami kemajuan setelah melalui proses melalui pembelajaran. Nama-nama untuk sekolah-sekolah ini bervariasi menurut negara, tetapi umumnya termasuk sekolah dasar

¹Lihat: (<http://id.wikipedia.org/wiki/sekolah>, diakses tanggal: 15/10/2010).

²Sunarto, *Pengantar Sosiologi*. (Bandung: LPFE-UI, 1993), hlm. 76-77.

untuk anak-anak muda dan sekolah menengah untuk remaja yang telah menyelesaikan pendidikan dasar.

Selain sekolah inti, anak didik di negara tertentu juga memiliki akses dan mengikuti sekolah, baik sebelum maupun sesudah pendidikan dasar dan menengah. TK atau prasekolah menyediakan sekolah beberapa anak yang masih muda (biasanya umur 3-5 tahun). Universitas, sekolah kejuruan, perguruan tinggi tersedia pula setelah sekolah menengah. Sebuah sekolah mungkin juga didedikasikan untuk satu bidang tertentu, seperti sekolah ekonomi atau sekolah tari. Alternatif sekolah dapat menyediakan kurikulum dan metode nontradisional.

Ada pula sekolah non-pemerintah, yang disebut sekolah swasta (*private schools*). Sekolah swasta mungkin untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus ketika pemerintah tidak bisa memberi sekolah khusus bagi mereka, keagamaan, seperti sekolah Islam (madrasah, pesantren); sekolah Kristen, sekolah Katolik, sekolah Hindu, sekolah Budha, atau sekolah khusus lainnya yang memiliki standar lebih tinggi untuk mempersiapkan prestasi pribadi anak didik. Sekolah untuk orang dewasa meliputi lembaga pelatihan perusahaan; dan pendidikan dan pelatihan militer.

Sekolah sebagai organisasi adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri. Terbentuknya lembaga sosial itu berawal dari norma-norma yang dianggap penting dalam kehidupan bermasyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu yang saling membutuhkan kemudian timbul aturan-aturan yang dinamakan *norma kemasyarakatan*. Lembaga sosial sering pula dinamakan *pranata sosial*.

Sekolah merupakan contoh organisasi formal, di mana pada 1957, Parsons menulis: "banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum kita memiliki sesuatu yang pantas diberi nama teori mengenai organisasi formal. Hal yang sama, dikemukakan Bidwell (1965) dan Davies (1973), yang mengatakan meskipun sekolah merupakan benda yang sudah tidak asing bagi kita dan *college-college* bagi banyak orang, kemampuan kita untuk menjelaskan dan menggeneralisasikan cara kerja dengan mendalam

masih terkendala pada masalah kekurangan dalam analisis organisasi itu sendiri dan kelangkaan telaah empiris dalam pendidikan. Berlangsungnya terus ketiadaan suatu teori yang koheren dan dapat diterima secara umum mengenai sekolah sebagai organisasi mungkin merupakan petunjuk bahwa dalam hal ini kita hanya berhadapan dengan suatu khayalan sosiologis belaka. Kompleksitas lembaga adalah sedemikian rupa sehingga tidak ada teori umum yang dapat menggambarkan nuansa dan kekhasan lembaga-lembaga yang unik tanpa menimbulkan kesan dangkal dan sepele. Yang telah dikembangkan adalah berbagai cara memandang sekolah, perspektif yang menerangi beberapa aspek dan mengaburkan aspek lainnya.³

Orang dapat mengatakan bahwa sebagian besar karya sosiologi organisasi tak lain dari perdebatan dengan Weber dan teorinya tentang birokrasi. Seperti diketahui bahwa Weber melakukan pembedaan antara kekuasaan (*power*), otoritas, wewenang (*authority*), dan bahwa yang disebut belakangan dapat disahkan berdasarkan suatu kepercayaan mengenai tradisi atau kekuatan kharismatik seorang yang terkemuka atau mengenai prosedur-prosedur legal/rasional yang menempatkan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat.⁴

Lee R. Stainer (1960) dalam Abdullah Idi mengatakan bahwa sebuah organisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) *formalitas*, merupakan ciri organisasi sosial yang menunjuk kepada adanya perumusan tertulis daripada peraturan, ketetapan, prosedur, kebijaksanaan, tujuan, strategi, dan lain sebagainya; (2) *hierarki*, merupakan ciri organisasi yang menunjukkan pada suatu pola kekuasaan dan wewenang yang berbentuk piramida. Artinya, ada orang-orang tertentu yang memiliki kedudukan, kekuasaan dan wewenang yang lebih tinggi daripada anggota biasa pada organisasi tersebut; (3) *besarannya dan kompleksnya*, di mana umumnya organisasi sosial memiliki banyak anggota sehingga hubungan sosial antaranggota bersifat tidak langsung (*impersonal*), gejala ini dikenal

³Lihat: Philip Robinson, *Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), hlm. 238.

⁴Birokrasi merupakan perwujudan dari otoritas yang legal/rasional itu. Keuntungan-keuntungan birokrasi adalah mampu mengembangkan efisiensi dan keadilan yang lebih besar, meskipun selalu diintai bahaya, yang oleh Mrx dinamakan "materialisme sendiri. Birokrasi menjadi majikan, bukan pelayan, sehingga kita bukannya menikmati keuntungan-keuntungan dari efisiensi yang lebih besar melainkan menjadi terjerat dalam prosedur birokrasi. Lihat: (Philip Robinson, *Beberapa Perspektif...*, *ibid.*, hlm. 239).

dengan gejala birokrasi; dan (4) lamanya (*duration*), menunjukkan pada diri bahwa eksistensi suatu organisasi lebih lama daripada keanggotaan orang-orang dalam organisasi itu.⁵

Suatu pendapat lain, bahwa sebuah organisasi memiliki ciri-ciri, yakni: (1) rumusan batas-batas operasionalnya (*organisasi*) jelas. Organisasi akan mengutamakan pencapaian tujuan berdasarkan keputusan yang telah disetujui bersama. Kegiatan operasional sebuah organisasi dibatasi oleh ketetapan yang mengikat berdasarkan kepentingan bersama, sekaligus memenuhi aspirasi anggotanya; (2) memiliki identitas yang jelas. Organisasi akan cepat diakui masyarakat sekelilingnya apabila memiliki identitas yang jelas; dan (3) keanggotaan formal, status dan peran. Tiap anggotanya memiliki peran serta tugas masing-masing sesuai dengan batasan yang telah disepakati bersama.⁶

Jelaslah, dari pendapat tentang ciri-ciri organisasi di atas, bahwa akan mudah membedakan mana yang dikatakan organisasi dan mana yang bukan sebuah organisasi. Ary Gunawan (2000) mengatakan bahwa sekelompok orang yang mendirikan sebuah organisasi memiliki alasan-alasan (*reasons*) mendirikan organisasi itu. Seorang memilih organisasi memiliki alasan: (1) alasan sosial (*social reason*), di mana sebagai *zoon politicon*, artinya makhluk yang hidup secara berkelompok, maka manusia akan merasa penting berorganisasi demi pergaulan maupun memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat ditemui pada organisasi-organisasi yang memiliki sasaran intelektual atau ekonomi; dan (2) alasan materi (*materiil reason*), di mana melalui bantuan organisasi manusia dapat melakukan tiga macam yang tidak mungkin dilakukannya sendiri: dapat memperbesar kemampuannya, dapat menghemat waktu yang diperlukan untuk mencapai suatu sasaran, melalui bantuan sebuah organisasi, dapat menarik manfaat dari pengetahuan generasi sebelumnya yang telah terhimpun.⁷

Tampak bahwa pilihan seseorang untuk ikut mendirikan atau bergabung dalam suatu organisasi karena sejumlah alasan yang bermanfaat bagi pengembangan pribadi dan kelompok organisasi sosial. Organisasi sosial, memberi harapan-harapan akan peningkatan kemampuan potensi pribadi dan sosial.

⁵Lee R. Stainner dalam Abdullah Idi, "Bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan," Program SI Fak. Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang, 2010, hlm. 176.

⁶<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/11/arti-penting-organisasi-sosial>, diakses tanggal 12/10/2010.

⁷Ary Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, *op.cit.*, hlm. 28-32.

Pada masa lalu, masyarakat sederhana belum mengenal lembaga-lembaga resmi yang mengatur penyaluran kebutuhan hidup mereka. Contohnya masyarakat Indian yang tidak perlu meminta bantuan lembaga sekolah untuk mengajarkan kepandaian memanah kepada generasi penerusnya. Bagi mereka, cukup dengan uluran tangan dari para ayah dan saudara tuanya maka bisa dipastikan hampir seluruh remaja-remaja muda Indian mampu menguasai teknik memanah dari tingkat dasar sampai kategori mahir.

Sejalan dengan bergulirnya sejarah roda kehidupan, prestasi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh manusia menjadi sedemikian kompleks, sehingga pada fase inilah konsep pengetahuan dan kemampuan gemilangnya telah menjadi penentu arah kehidupan di masa yang akan datang. Beberapa faktor yang telah melatarbelakangi terbentuknya lembaga tertentu untuk mengelola alokasi pemenuhan kebutuhan di antaranya: (1) pertumbuhan jumlah populasi manusia yang memengaruhi tingkat penguasaan dan ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA); (2) kompleksnya pranata kebudayaan dan mekanisme pengetahuan beserta teknologi terapan; dan (3) implikasi tingkat akal budi dan mentalitas manusia yang semakin rasional.

Walaupun wujudnya berbeda pada tiap negara, keberadaan sekolah merupakan salah satu indikasi terwujudnya masyarakat modern. Dalam hal ini para ilmuwan sosial, khususnya ahli sosiologi, telah melakukan upaya ilmiah untuk menentukan taraf evolusi perkembangan masyarakat manusia. Dimulai dari Auguste Comte (1798-1857) dengan karyanya yang berjudul *Course de Philosophie Positive* (1844). Beliau menekankan hukum perkembangan masyarakat yang terdiri dari tiga jenjang, yaitu *pertama*, jenjang teologi, di mana manusia mencoba menjelaskan gejala di sekitarnya dengan mengacu pada hal bersifat adikodrati. Jenjang perkembangan *kedua*, yakni disusul pencapaian manifestasi kemampuan manusia untuk menangkap fenomena lingkungan dengan menyadarkan pada kekuatan metafisik atau abstrak. Jenjang perkembangan *ketiga*, yakni jenjang tinggi atau taraf positif. Iklim kehidupan demikian ditandai dengan prestasi kemampuan manusia untuk menjelaskan gejala alam maupun sosial berdasarkan pada deskripsi ilmiah melalui pemahaman kekuasaan hukum objektif. Dari pengertian tersebut perwujudan manusia positif hanya mampu ditopang oleh orientasi pendidikan yang sudah terlembaga secara mantap melalui aplikasi fungsi sekolah modern.

Tak kalah pentingnya buah pikiran Emile Durkheim (1858-1912) dalam bukunya berjudul *The Division of Labour in Society* (1968) menganalisis kecenderungan masyarakat maju di dalamnya terdapat pembagian kerja dalam pemetaan bidang-bidang ekonomi, hukum, politik, pendidikan, kesenian, dan keluarga. Gejala tersebut merupakan dampak dari penerapan sistem ekonomi industri yang di dalamnya memerlukan spesialisasi peran untuk mengusung keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup para anggotanya. Sekali lagi ilustrasi di atas hanya dapat tercermin pada konteks organisasi lembaga pendidikan yang telah mampu memproduksi manusia profesional dengan spesifikasi keahlian. Sedangkan untuk mewujudkan figur-figur manusia yang diharapkan tersebut hanya mungkin dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan modern.

Dari kedua pernyataan ilmiah ilmuwan sosiologi di atas dapat dikemukakan bahwa keberadaan sekolah yang mewarnai dunia kehidupan manusia saat ini merupakan sebuah keniscayaan peradaban modern yang lekat dengan renik-renik pergulatan ilmu pengetahuan dan aplikasi teknologi mutakhir. Sementara melihat konteks sosial yang terbentuk dapat dijawab pula sekolah juga dapat dikategorikan dalam organisasi umumnya yang mengemban konsekuensi organisatoris. Keberadaan sekolah patut dimasukkan sebagai salah satu organisasi yang memanfaatkan mekanisme birokratis dalam mengelola beragam kerja institusinya.

Weber mengidentifikasi enam prinsip birokrasi, yang juga terdapat di lembaga sekolah antara lain: (1) aturan dan prosedur yang tetap di mana birokrat menyelesaikan tugasnya; (2) hierarki jabatan yang dikaitkan dengan struktur pimpinan; (3) arsip yang mendokumentasikan tindakan yang diambil; (4) pendidikan khusus bagi pelbagai fungsi di dalam birokrasi; (5) struktur karier yang dapat diidentifikasi; dan (6) metode-metode yang tidak bersifat pribadi dalam berurusan dengan pegawai dan klien di dalam birokrasi.⁸

Sekolah memang tidak menggunakan semua prinsip Weber di atas dengan ketat dan linear. Bidwell (1965) dalam Robinson, (1981) berpendapat bahwa sekolah mempunyai ciri "struktur yang longgar". Yang dimaksud dengan "kelonggaran struktural" oleh Bidwell adalah prasyarat mutlak dari kekuatan struktural tidak harus dilaksanakan sepenuhnya

⁸Lihat: (Philip Robinson, *Beberapa Perspektif...*, *op.cit.*, hlm. 240).

oleh pendidik/guru dalam menerapkan metode pembelajaran kepada anak didik. Tiap pendidik mempunyai kebebasan tertentu untuk menentukan bagaimana dapat mengajar di kelas, walaupun perangkat materinya telah ditentukan oleh kurikulum di atasnya. Prinsip-prinsip tipe ideal Weber dapat dilihat pada sebagian besar sekolah⁹. Dalam hal ini, secara spesifik, sekolah sebagai organisasi, memiliki penekanan (*stressing*) dan kekhasan sendiri dalam aplikasi sebagian prinsip yang relevan seperti diungkapkan Weber.

Masih dalam lingkup sekolah sebagai organisasi formal, beberapa ahli telah menyajikan pranata-pranata manajemen yang berbeda dalam menerapkan fungsi manajemen di sekolah (Robinson, 1981) di antaranya adalah:

1. Manajemen ilmiah

Pokok-pokok manajemen ilmiah antara lain: menggunakan alat ukur dan perbandingan yang jelas dan tepat; menganalisis dan membandingkan proses-prosesnya yang telah dicapai, dan menerima hipotesis terkuat yang lulus dari verifikasi serta menggunakannya sebagai kriteria tunggal. Implikasinya jelas, penerapan kriteria tunggal bagi sekolah demi mencapai maksimalisasi hasil-hasil belajar secara efisien dan efektif. Tampak jelas bahwa jenis manajemen ini berkarakter mekanistik, ketat, mengutamakan hasil kuantitatif, serta cenderung mengesampingkan unsur-unsur manusiawi di dalam prosesnya.

2. Sistem sosio-teknis

Sebagai sistem sosio-teknis, sekolah mencakup banyak hal yang menjadi *input* organisasi, namun stafnya akan "mengetahui" sifat *input* nya. Dengan begitu sekolah dapat menentukan instrumen-instrumen pengolahan demi menjamin hasil yang optimal. Sampai di sini definisi sosio-teknis memberikan titik tekan pada pengamatan dan

⁹Ada hierarki jabatan yang diawasi oleh, dan berasal dari jabatan guru kepala, meskipun di banyak sekolah besar peran kepala disebar melalui suatu panitia kecil yang terdiri dari staf pengajar senior. Catatan-catatan tentang kemajuan belajar tetap dipertahankan. Ada pendidikan khusus yang di sekolah menengah cenderung untuk mengikuti pembagian menurut mata pelajaran dan orang dapat mengatakan bahwa guru-guru sekolah dasar, meskipun tidak merupakan spesialis dalam pengertian spesialis di sekolah menengah, bagaimanapun merupakan spesialis dalam sistem pendidikan. Ada jalur-jalur karier, meskipun agak pendek, di mana mula-mula guru menjadi wali kelas/kepala departemen, wakil kepala dan akhirnya guru kepala. (Philip Robinson, *Beberapa Perspektif...., op.cit.*, hlm. 241).

pengelompokan jenis-jenis masukan dalam sekolah lalu ditindaklanjuti dengan cara yang relevan dengan "bahan mentah" tersebut. Manajemen sosio-teknis masih menggunakan prinsip manajemen formal, sehingga beberapa unsur yang melekat pada prinsip manajemen ilmiah juga dimiliki oleh sistem sosio-teknis.

3. Pendekatan sistem

Model pengelolaan yang paling banyak digunakan adalah bentuk Teori Sistem. Ciri khas pendekatan ini adalah pengakuan adanya bagian-bagian suatu sistem yang terkait erat pada keseluruhan. Hubungan timbal balik itu mengisyaratkan detail bagian yang cukup kompleks dan proses interaksi secara keseluruhan dalam sebuah organisasi. Implikasi lain, batas-batas antarbagian harus diketahui dengan tegas dalam mengidentifikasi komponen-komponen lembaga sekolah. Secara internal model teori sistem, mengadopsi penanganan lembaga formal pada umumnya untuk menggerakkan roda organisasi. Akan tetapi, pendekatan ini juga memerhatikan sistem sosial yang bekerja di luar sekolah. Tiap sekolah berusaha untuk menampung tuntutan-tuntutan dari para orang tua siswa, industri setempat, pendapat profesional dan kebijaksanaan pendidikan.

4. Pendekatan individual

Baik pendekatan manajemen maupun pendekatan sistem cenderung "membedakan" organisasi. Organisasi dipandang seakan-akan seperti makhluk besar yang mengatasi dan mengecilkan peran anggotanya (terutama peran murid). Sebagai antitesisnya, maka pendekatan individual mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan dalam organisasi. Akan tetapi, pada perkembangannya pendekatan individual memiliki dua kelompok pandangan yakni:

a. Teori Pasif

Pandangan yang menekankan pengamatan *input* pendidikan secara kolektif. Di mana sudut terpenting yang harus diperhatikan oleh sekolah adalah proses kematangan pribadi para siswa yang harus difasilitasi, diakomodasi kebutuhannya dan bimbingan menuju kedewasaan. Oleh karena itu, proporsi organisasi sekolah yang cenderung mekanistik harus dipola menjadi fleksibel agar para anggotanya bisa berekspresi dengan optimal.

b. Teori Aktif

Konstruksi pendekatan yang mengutamakan kemampuan aktif para siswa untuk menginterpretasikan makna-makna normatif

dan tindakan-tindakan yang diharapkan berdasarkan iklim kesadaran mereka. Menurut Silvermen (1970) proses sosialisasi di sekolah bukanlah imperatif-imperatif moral yang memaksa, akan tetapi justru sekolah menjadi "pembantu" para siswa dalam mendokumentasikan dan memantapkan makna kehidupan yang didapat oleh mereka sendiri. Pendekatan ini sangat kental dengan pengaruh aliran fenomenologis dalam sosiologi. Oleh karena itu, teori aktif termasuk menekankan makna-makna tafsiran budaya yang didapatkan oleh individu-individu di dalam mempersepsikan fungsi sekolah bagi mereka.¹⁰

Berbagai pandangan di atas menandakan aspek-aspek penting yang berperan dan berinteraksi di dalam sekolah. Pada kenyataannya seluruh konsep manajemen yang ditekankan oleh masing-masing ahli tersebut selalu tercantum di dalam sekolah. Tentunya fungsionalisasi masing-masing model manajemen di atas tergantung pada konteks pandangan manusia yang mengamatinya. Apabila pada aspek makro maka dominasi gabungan fungsi manajemen sistem, sosio-teknis dan ilmiah lebih berperan penting dalam membantu kerja penglihatan intelektual kita. Berbeda pada dimensi yang lebih mikro, maka tipe ideal pendekatan individual adalah aspek yang harus diperhatikan dalam menelaah unsur-unsur yang bermain di dalam sekolah.

B. Sekitar Persoalan di Sekolah

Dalam hal ini, pengamatan organisasi lebih ditekankan pada skala makronya. Analisis sosial yang muncul seputar sekolah banyak mengupas konflik-konflik antarperanan yang terjadi di lembaga sekolah. Seperti yang diungkapkan Davies dalam Abdullah Idi (2010) bahwa lembaga pendidikan sering dirasuki oleh nilai-nilai yang terkadang bertentangan antarpihak baik dari para guru, orang tua, staf birokrat, siswa, maupun pihak aparat pimpinan sekolah.¹¹ Dari sini analisis yang bisa disajikan untuk mengamati keberadaan sekolah sebagai lembaga formal dalam aktivitas pendidikannya terbagi menjadi dua persoalan yakni:

¹⁰Philip Robinson, *Beberapa Perspektif....*, op.cit., hlm. 243-254.

¹¹Abdullah Idi, "Bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan," Program S1 Fak. Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang, 2009, hlm. 12-17.

1. Konsep Tujuan Organisasi

Sudah menjadi konsekuensi bagi setiap organisasi untuk menetapkan tujuan lembaga. Berbeda pada organisasi pada umumnya, sekolah memiliki ciri khas yang agak unik, khususnya dari objek yang menjadi tujuannya. Dengan menetapkan posisi peran kelembagaan yang bertugas untuk membekali peserta didik seperangkat pengetahuan dan keterampilan maka sekolah telah mengumandangkan jenis tujuan yang bersifat abstrak. Hal ini tentu saja berbeda dengan lembaga lain yang jelas-jelas memiliki objek tujuan konkret. Contohnya lembaga perusahaan, tentunya bagi siapa saja yang akan jelas memahami arti "mencari keuntungan maksimal" bagi perusahaan. Baik itu manajemen pemasaran, direktur pabrik, buruh angkutan, sopir, sampai tenaga administrasi akan jelas mengartikan definisi tujuan tersebut.

Sementara sekolah memiliki tujuan yang bersifat multi-penafsiran dan agak kabur. Selain itu, dimensi abstrak yang menjadi titik tolak penafsiran para praktisi sekolah dapat memunculkan hambatan besar untuk menyatukan pemahaman makna tujuan pendidikan antarposisi. Berdasarkan struktur organisasi yang terbentuk, guru bertugas sebagai pelaksana pengajar kepada siswa, supervisor berfungsi membina para guru dan tugas formal administrasi sekolah ialah mengoordinasikan dan menentukan berbagai raga aktivitas dalam lingkungan sekolah.

Masing-masing pemegang posisi mempunyai hak dan kewajiban tertentu dalam hubungan dengan posisi lain. Sudah tentu kompleksitas peranan menimbulkan nilai sosial yang berbeda dan apabila ditarik dalam suatu prospek tujuan maka akan melibatkan bermacam-macam penafsiran. Selain objek tujuan yang sarat nilai, posisi-posisi peran yang cukup kompleks di lingkup internal, maka sebuah sekolah akan berharap langsung dengan komponen nilai-nilai lain di luar lingkungannya. Spesifikasi tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah ternyata harus bersinggungan erat dengan alokasi peran pendidikan di luar sekolah, terutama keluarga. Berkaitan dengan hal tersebut, suatu observasi ilmiah yang dilakukan oleh Universitas Havard telah menunjukkan hasil yang cukup dramatis.

Setelah diteliti, para pendidik di sekolah New England memiliki pandangan yang berbeda tentang tujuan pendidikan, begitu juga antar guru dengan kepala sekolahnya, selain itu indikasi serupa ditunjukkan perbedaan nilai antaradministrator dengan badan pertimbangan sekolah. Lebih jauh bukti penelitian juga menunjukkan sumber utama yang melahirkan konflik di kalangan praktisi sosial tentang tujuan dan

program-program sekolah. Dipandang dari sudut tujuannya ternyata lembaga sekolah harus melakukan bermacam-macam proses penyatuan pandangan baik dari wilayah internal maupun asumsi-asumsi publik di lingkup eksternal. Telaah sosiologi telah memberikan sumbangan konseptual untuk membedah objek tujuan sekolah dalam pola-pola hubungannya dengan pihak internal maupun luar lembaga sekolah.

Kompleksitas permasalahan dan pertentangan terjadi di sekolah merupakan derivasi dari perangkat-perangkat manusia yang memiliki beragam peran spesifik di lembaga sekolah. Banyak buku teks yang mengemukakan tentang peranan guru dan administrator pendidikan sekolah-olah harmonis dan serba sinergis. Padahal kenyataan membuktikan, salah satu faktor yang memberatkan kerja organisasi adalah gejala kesalahpahaman untuk memahami kawan sekerja berkenaan dengan hak dan kewajiban yang berbeda sesuai dengan status pekerjaannya. Kecenderungan yang terjadi, hampir semua tanggung jawab dan tugas sekolah berhubungan dengan siswa selalu dilimpahkan kepada seorang pendidik.

Sedangkan pemberian fungsi-fungsi peran yang berbeda baik dari aspek bimbingan konseling, pelayanan birokrasi dan keuangan, serta peran penegak ketertiban dan kedisiplinan tidak pernah tersiar secara utuh kepada para siswa. Dalam analisis sosiologis, konflik peranan di lingkup internal sekolah disebabkan pada rangkaian hak dan kewajiban yang memengaruhi harapan para pemegang status pekerjaan. Ruang-ruang kesadaran peran tersebut telah terpecah belah pada akumulasi integrasi yang terkotak-kotak pada masing-masing kelompok pekerjaan. Dalam waktu yang sama kepala sekolah mengharapkan para guru selalu tertib dalam melaksanakan pengajaran. Sementara guru sendiri selalu berkeinginan memberikan ragam materi yang selengkap-lengkapannya kepada para siswa.

Hal ini tentu bertentangan dengan asumsi umum para siswa yang jelas-jelas berharap agar para guru tidak terlalu banyak menyodorkan materi yang harus mereka hafalkan. Hal tersebut tentunya semakin menjauhkan kesadaran warga sekolah mengenai hakikat mendasar dari fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan. Mereka semakin jauh terjerumus pada labirin-labirin pertentangan seputar ritual-ritual teknis pemenuhan kebutuhan organisasional. Dari sini tujuan awal penerapan administrasi pendidikan untuk mempermudah lembaga sekolah dalam menjalankan fungsi-fungsi edukatif beralih menjadi raksasa permasalahan yang selalu menggelayuti mentalitas warganya.¹²

¹²Lihat: (Abdullah Idi, "Bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan S1 & S2," *op.cit.*, hlm. 17-21).

Tentu saja dalam hal ini sumbangsih teori sosiologi cukup strategis guna memberikan gambaran komprehensif tentang "gurita konflik" yang terbentuk di lingkungan sekolah dalam kaitan pertentangan antarperan. Dengan begitu, para praktisi pendidikan diharapkan memiliki bahan mentah yang lengkap mengenai pola-pola sosial yang tersusun di dunia pendidikan formal beserta varian-varian permasalahannya.

Dapat dijelaskan pula tentang *kelas* sebagai suatu sistem sosial. Pada dasarnya, proses-proses pendidikan yang sesungguhnya adalah interaksi kegiatan yang berlangsung di ruang kelas. Untuk keperluan tersebut pembahasan mengenai kegiatan kelas menempati subtopik tersendiri dalam susunan kajian topik ini. Dari sudut sosiologi beberapa pendekatan telah digunakan sebagai alat analisis untuk mengamati proses-proses yang terjadi di ruang kelas. Dimulai dari pengamatan Parsons yang mengetengahkan argumentasi ilmiahnya tentang kelas sebagai suatu *system social*. Berkaitan dengan fungsi sekolah maka kelas merupakan kepanjangan dari proses sosialisasi anak di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kiprah interaksi di kelas secara khusus berusaha untuk memantapkan penanaman nilai-nilai dari masyarakat.

Di sisi lain, pendekatan interaksionis cenderung menekankan analisis sosio-psikologis untuk melihat ruang kelas. Sejumlah tokoh seperti Delamont, Lewin, Lippit, White dan H.H Anderson adalah figur-figur yang mengeksplorasi aspek interaksi antarguru dan murid. Selaras dengan hal tersebut, Withall (1949), yang memanfaatkan karya-karya pendahulunya mencoba menemukan pengaruh situasi sosial emosional dalam ruang kelas. Ia membedakan antara metode pengajaran yang cenderung *teacher-centred* dengan tipologi pembelajaran *learner-centred*, dengan beranggapan bahwa tipe yang kedua merupakan cara yang paling efektif untuk kegiatan pembelajaran di kelas.

Dalam satu rangkaian penelitian Flanders (1967) memperkuat studi tentang interaksi di kelas. Menurut pendapatnya, semakin besar ketergantungan murid kepada guru, semakin kurang siswa tersebut mengembangkan strategi-strategi belajarnya sendiri. Inti dari penerapan analisis interaksi adalah menganalisis seluruh proses interaksi edukatif di kelas dan pengaruh-pengaruh psikologinya kepada para siswa. Hal ini terkait erat dengan metode pendekatan yang diterapkan oleh guru dalam mengelola pembelajaran di kelas. Model pendekatan interpretatif juga bermanfaat untuk menangkap segala hal yang berpola di dalam

aktivitas ruang kelas. Yang termasuk hasil penelitian di lingkup kategori interpretatif adalah analisis Waller.

Bagi Waller, pendidikan merupakan seni menanamkan definisi-definisi situasi yang berlaku pada kaum muda dan sudah diterima oleh golongan penyelenggara. Dengan demikian, sekolah merupakan satu alat ampuh untuk melakukan kontrol sosial. Inti dari studi tersebut mencoba menerangkan tentang fungsi sekolah yang memengaruhi alam kesadaran para siswa untuk selalu konsekuen mengamalkan kriteria penafsiran nilai yang ditekankan oleh sekolah.

2. Ketergantungan Pendidik dan Anak Didik

Analisis lain juga mengungkap bahwa sumber ketergantungan antarpendidik/guru dan anak didik berasal dari dualisme ketegangan peran pendidik di kelas. Sebagai bawahan kepala sekolah, seorang guru harus menerapkan ketentuan administratif sekolah secara ketat kepada murid-murid, namun di lain pihak tanggung jawab moral sebagai pendidik yang sarat dengan kebijaksanaan akan menghalang-halangi penerapan sanksi kepada siswa tersebut. Sebagai sistem sosial tentunya di dalam kelas telah terbentuk konfigurasi sosial di dunia pergaulan anak didik.

Dari sini tampak bahwa konsep diferensiasi (*differentiation*)¹³ mengacu pada praktik organisasi penentuan penghuni kelas berdasarkan prestasi anak didik. Tentunya implikasi dari pengelompokan ini berakibat terbentuknya *polarisasi* antarkelompok, baik itu kelompok si bodoh, si kaya, si pandai, dan si pemalu. Apabila pendidik mengetahui fakta tersebut dan mampu mengelola interaksi antarkelompok maka proses penangkapan pengetahuan semakin dinamis dan cukup kaya. Sebaliknya bila pendidik cenderung masa bodoh dengan keadaan demikian justru semakin mempertegas potensi disintegrasi antaranak didik.

Umumnya pendidik/guru secara gegabah dan mudah menuruti subjektivitas perasaannya untuk menuruti kelompok anak didik yang

¹³Konsep diferensiasi (*differentiation*) berasal dari konsep diferensiasi sosial (*social differentiation*), suatu proses di mana suatu aktivitas/institusi menjadi terbagi dan lebih terspesialisasi ke dalam satu atau aktivitas kelembagaan yang lebih terpisah. Diferensiasi adalah suatu bentuk (*term*) berasal dari biologi untuk mendeskripsikan spesialisasi dari fungsi dalam suatu proses evolusi. Lihat: (David Jary & Julia Jary, *Dictionary of Sociology*. The Harper Collins, USA, 1991, p. 450).

menyenangkan perasaannya. Jika hal ini yang terjadi maka kecemburuan sosial malah menjadi iklim pergulatan sosial di lingkungan kelas. Patut ditambahkan, analisis sosiologis juga mengungkapkan betapa eratny kaitan antara tingkah laku dan sikap-sikap seseorang dengan latar belakang kelompok aspirasi yang digandrunginya. Kelompok-kelompok atau aspirasi-aspirasi acuan merupakan tempat berlabuh yang harus diperhitungkan di dalam upaya pembinaan tingkah laku siswa. Konsekuensi pentingnya dari hasil analisis di atas, dapat memberikan wawasan sosiologi kelas kepada pengajar agar proses pendidikan dan pembinaan siswa lebih efektif.

Lingkungan eksternal sekolah, dapat dijelaskan bahwa sekolah bernaung dalam suatu wilayah eksternal yang dihuni oleh kumpulan manusia bernama masyarakat. Gejala timbal balik baik dari sekolah kepada masyarakat maupun sebaliknya merupakan realitas keseharian yang akan selalu terjadi. Keberadaan sekolah di lingkungan masyarakat kota akan jelas memengaruhi orientasi pendidikan tersebut dibanding dengan sekolah yang terletak di lereng gunung. Baik dari segi kuantitas peserta didik, maupun kompleksitas kegiatan yang terjadwal pada kegiatan-kegiatan akademik di sekolah.

Tentunya tidak mungkin, sekolah di lereng gunung mengembangkan ekstrakurikuler yang luar biasa padat dan wajib diikuti oleh seluruh siswa. Selain itu, aspek kelas sosial juga memberikan pengaruh evaluasi belajar yang dilakukan oleh seorang guru. Hasil sebuah pengamatan ilmiah menegaskan ada hubungan kuat antara status orang tua siswa dengan prestasi akademik.

Kontribusi berikutnya adalah benturan konflik antarperan tenaga kependidikan dengan posisi lain di masyarakat. Getzel dan Guba¹⁴ menemukan bahwa banyak harapan yang terkait dengan posisi pendidik (guru), pada kenyataannya telah berbenturan dengan harapan posisi lain di luar sekolah. Dampak dari konflik ini kadang mengganggu stabilitas individu atau bisa jadi dapat meluas pada segi-segi materiil di lingkungan sekolah. Seorang guru olah raga yang sedang menjadi wasit pertandingan sepak bola antarkecamatan tentunya akan menghadapi tuntutan masyarakat mengenai kemungkinan diizinkan pengguna fasilitas sekolah. Akan tetapi, dua hari lalu sang guru tersebut baru saja

¹⁴Dikutip oleh Abdullah Idi, "Bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan S1 & S2," *op.cit.*, hlm. 27.

mendapat himbauan keras dari kepala sekolah agar berhati-hati dalam menjaga perlengkapan olah raga milik sekolah. Peringatan tersebut bukan tak beralasan, akan tetapi didukung sebuah fakta tentang peristiwa kehilangan beberapa peralatan seminggu yang lalu.

Pada masyarakat modrem, kehidupan manusia tidak pernah lepas dari pergulatan aktivitasnya dengan organisasi. Secara historis, keberadaan organisasi merupakan cerminan tingkat kemajuan masyarakat yang sudah tinggi. Masyarakat tersebut telah mengembangkan satu bentuk perekat hubungan yang dinamakan solidaritas organik (*organic solidarity*). Jenis solidaritas ini merupakan bentuk solidaritas yang mengikat masyarakat kompleks, masyarakat yang telah mengenal pembagian kerja secara rinci dan dipersatukan oleh rasa ketergantungan antarbagian. Tiap anggota menjalankan peran berbeda dan di antara berbagai peran tersebut menumbuhkan rasa saling tergantung seperti layaknya sistem hubungan antarbagian dalam organisme biologis. Masyarakat modern memanfaatkan fungsi lembaga-lembaga sosialnya dengan pola hubungan dan orientasi sistem jaringan kerja yang sistematis, termekanisasi dalam pola-pola kegiatan yang formal, impersonal, terstruktur dan rasional. Karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari organisasi.

Sebagai organisasi sosial, sekolah menggunakan prinsip-prinsip birokrasi dalam melayani kerja dan agenda-agenda aktivitasnya. Organisasi formal (termasuk sekolah) menggunakan sebuah pola hubungan yang bersifat legal rasional untuk menggerakkan roda organisasi, di mana sistem jabatan ini dinamakan birokrasi (*bureaucracy*) yang berarti pengaturan atau pemerintahan oleh pejabat. Rohidi (1994),¹⁵ secara birokrasi, organisasi sosial sekolah mempunyai beberapa prinsip sasaran: (1) urusan kedinasan dilaksanakan secara berkesinambungan; (2) urusan kedinasan didasarkan pada aturan dalam suatu badan administratif; (3) tanggung jawab dan wewenang tiap pejabat merupakan bagian dari suatu hierarki wewenang; (4) pejabat dan pegawai administrasi tidak memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas; (5) para pemangku jabatan tidak dapat memperjualbelikan jabatan; dan (6) urusan kedinasan dilaksanakan dengan menggunakan dokumentasi tertulis.

¹⁵T. Rohidi, *Pendekatan Sistem Sosial Budaya dalam Pendidikan*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1994), hlm. 23-25.

Sekolah sebagai organisasi sosial sekaligus lembaga pendidikan di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok: sekolah dan luar sekolah. Pembagian jenis sekolah, seperti diungkapkan Omar Hamalik (2005) lebih rinci dibagi menjadi tiga bentuk: informal, formal, dan nonformal. Ketiga klasifikasi dalam pengumpulannya di masyarakat memiliki peran yang berbeda-beda. Lembaga pendidikan pertama, yakni informal (keluarga) lebih banyak diarahkan pada pembentukan karakter, keyakinan dan norma. Lembaga pendidikan kedua, yakni formal (sekolah) lebih diarahkan pada pengembangan intelektual anak didik. Lembaga pendidikan ketiga, yakni nonformal (masyarakat), perannya lebih banyak pada pembentukan karakter sosial.¹⁶

Sebagai lembaga pendidikan, sekolah sebagai organisasi sosial dalam sosiologi, peran dan fungsinya sebagai berikut: (a) *fungsi manifestasi pendidikan*: membantu orang mencari nafkah; menolong mengembangkan potensinya demi pemenuhan kebutuhan hidupnya; melestarikan kebudayaan dengan cara mengajarkannya dari generasi ke generasi berikutnya; merangsang partisipasi demokrasi melalui pengajaran keterampilan berbicara dan mengembangkan cara berpikir rasional; memperkaya kehidupan dengan cara menciptakan kemungkinan untuk berkembangnya cakrawala intelektual dan cinta rasa keindahan; meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri melalui bimbingan pribadi dan berbagai kursus; meningkatkan taraf kesehatan para pemuda bangsa melalui latihan dan olah raga; menciptakan warga negara yang patriotik melalui pelajaran yang menggambarkan kejayaan bangsa; dan membentuk kepribadian yaitu susunan unsur dan jiwa yang menentukan perbedaan tingkah laku atau tindakan dari tiap individu. (b) *fungsi laten lembaga pendidikan*, di mana fungsi ini bertalian dengan fungsi lembaga pendidikan secara tersembunyi yakni menciptakan atau melahirkan kedewasaan anak didik. Atau, fungsi pendidikan yang bertalian dengan fungsi nyata (*manifest*), yakni: mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah; mengembangkan bakat; mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat; melestarikan kebudayaan; menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Sedangkan, fungsi *latent* lembaga pendidikan adalah: (1) mengurangi pengendalian orang tua melalui pendidikan sekolah, di mana orang tua melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik

¹⁶Omar Hamalik, *Perencanaan Pelajaran berdasarkan Pendekatan Sistem*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 23.

anak kepada sekolah; (2) menyediakan sarana untuk pembangkangan di mana sekolah memiliki potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. Hal ini tercermin dengan adanya perbedaan pandangan antara sekolah dan masyarakat tentang suatu hal, misalnya pendidikan seks dan sikap terbuka; (3) mempertahankan sistem kelas sosial, di mana pendidikan sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada anak didik untuk menerima perbedaan *prestige*, *privilege*, dan status yang ada dalam masyarakat.¹⁷

Dikatakan Horton dan Hurt (1996), bahwa ada empat jenis sasaran organisasi sekolah. Tiap sasaran meliputi titik tolak pandangan terhadap organisasi sekolah. Dari empat pandangan itu, diharapkan dapat memahami tentang kompleksitas organisasi sekolah.

Pertama, sasaran formal, di mana ruang lingkup sasaran ini meliputi tujuan formal dari suatu organisasi. Wujud dari sasaran ini tercantum dalam aturan-aturan tertulis, konstitusi dan segala ketentuan formal yang melandasi orientasi organisasi. Sekolah sebagai lembaga pendidikan sudah semestinya mempunyai organisasi yang baik agar tujuannya tercapai. Tuntutan formal organisasi menghendaki agar tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan sekolah untuk mencapai tujuan dibagi secara merata dengan baik sesuai dengan kemampuan, fungsi dan wewenang yang telah ditentukan. Melalui struktur organisasi yang ada, tercermin adanya tugas dan wewenang kepala sekolah, tugas guru dan staf administrasi sekolah.¹⁸

Kedua, sasaran informal, di mana tidak sepenuhnya bekerja sesuai dengan ketentuan formal. Dalam banyak hal, lebih dimodifikasi oleh tiap anggotanya sesuai dengan kapasitas pemaknaan kesadaran mereka tentang organisasi. Di sekolah, seorang kepala sekolah mungkin mendapat tanggung jawab sebagai pemimpin dan penguasa formal tertinggi. Akan tetapi, penerimaan dan pola pikir serta tingkah laku kepala sekolah merupakan konstruksi pemahaman subjektifnya dalam kelangsungan hubungan dengan berbagai pihak di lingkungan sekolahnya. Jadi, sasaran informal merupakan interpretasi dan modifikasi sasaran-sasaran formal dari seluruh anggota yang terlibat langsung pada wadah organisasi. Sasaran ini mencakup pula persepsi masing-masing individu dan menjadi

¹⁷Lihat: (<http://mrpams.multiply.com./journal/item/15>, diakses tanggal 15/10/2010).

¹⁸Horton dan Hurt, *Sosiologi*, Penerjemah: Amiruddin Ram dan Tita Sobari, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996), hlm. 38-54.

tujuan kegiatan pribadi dalam organisasi. Masing-masing siswa tentunya memiliki tujuan yang bervariasi dalam kelangsungan statusnya sebagai pelajar. Mungkin ada yang berharap mendapat prestasi akademik tinggi atau memperoleh ijazah, serta ada pula yang hanya sekadar menjalankan tradisi masyarakat. Seorang pendidik mungkin hanya untuk mencari gaji, tetapi sebagian lainnya masih memiliki loyalitas dan komitmen sebagai pendidik.

Ketiga, sasaran ideologis. Seperti tersirat dalam istilah tersebut, sasaran ideologis bertalian dengan seperangkat sistem eksternal atau sistem nilai yang diyakini bersama. Dalam hal ini, nuansa budaya pada pengertian sebagai suatu sistem pengetahuan, gagasan dan ide yang dimiliki suatu kelompok masyarakat yang berfungsi sebagai landasan pijak dan pedoman bagi masyarakat itu dalam bersikap dan berperilaku dalam lingkungan alam dan sosial tempat mereka bernaung. Hal ini merupakan penjabaran dari pengaruh ideologis terhadap organisasi. Sasaran ini menyoroti pengaruh interaktif kultural-ideologis yang dianut oleh sebagian besar manusia dalam menangkap, menyikapi dan merespons eksistensi organisasi. Suatu bangsa umumnya memiliki semangat yang tinggi untuk meraih prestasi vertikal, sementara sekolah merupakan wadah yang cukup strategis bagi manusia untuk menopang ambisi mobilitas vertikalnya. Maka, bisa diasumsikan hampir sebagian besar warga sekolah maupun masyarakat akan mengarahkan keyakinan kultural tersebut dalam memaknai keberadaan sekolah.

Keempat, sasaran-sasaran lain yang kurang begitu kuat. Penekanan sasaran ini akan menonjol pada suatu proses aktivitas organisasi yang tengah mempertahankan eksistensinya dalam situasi di luar kondisi biasa. Berkurangnya pendaftaran di sekolah-sekolah dan universitas dapat mengubah secara luas peran para pendidik atau organisasi ruang sekolah, termasuk rasio pendidik (guru) terhadap anak didik (siswa) beserta kelas-kelas yang terspesialisasi. Jika tidak, sejumlah pendidik akan menganggur.

Dari pendapat Horton dan Hurt (1996) tentang jenis sasaran sekolah di atas, mengisyaratkan suatu pola pandang berbeda dari pandangan umum tentang sekolah. Sebagai organisasi, sekolah bukan hanya sekadar tumpukan peran-peran struktural yang kaku, statis dan jalur kerja yang serba mekanistik belaka. Mekanisme itu mengalami dinamika aktualisasi melalui aneka ragam interpretasi para anggota yang melatarbelakangi perilaku manusia dalam mengemban peran dan status yang berbeda-beda

di dalam organisasi sekolah. Dari segi wujudnya, sekolah merupakan organisasi yang memiliki komponen-komponen dan memenuhi persyaratan sebagai sebuah organisasi formal. Dari beberapa kriteria organisasi yang dikemukakan di atas, dapat dilihat manifestasi spesifik dalam lembaga sekolah. *Pertama*, seperti halnya suatu organisasi bisnis, sekolah memiliki tujuan kelembagaan yang jelas. *Kedua*, dalam organisasi sekolah terdapat pola jaringan kerja dari sejumlah posisi yang saling bertalian, seperti pendidik (guru), supervisor, dan administrator, dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Jelaslah bahwa sekolah sebagai lembaga/institusi pendidikan merupakan organisasi sosial yang dibentuk dan bekerja secara birokratis. Namun, secara sosiologis, sekolah sebagai organisasi sosial di dalam pengolahannya tetap dipengaruhi kepribadian, sistem tata nilai yang berlaku dan dianut, kultural-ideologis, hubungan interpersonal, dan lain sebagainya. Dalam perkembangan dan pemecahan masalah di sekolah, para *stakeholders*, tidak bisa menggunakan hanya satu pendekatan seperti manajemen. Namun, juga perlu menggunakan pendekatan sosiologis untuk membantu pengembangan dan pemecahan masalah yang muncul di sekolah. Karena yang menggerakkan sekolah adalah manusia cenderung berubah dan berkembang berdasarkan kebutuhan dan lingkungan di mana sekolah berada. Hal ini, terlihat kurikulum pendidikan di sekolah sering mengalami perubahan karena alasan sosiologis.

Bab 8

PENDIDIKAN DAN PRANATA SOSIAL

Teori terakhir tentang pendidikan massal (nasional) adalah teori yang dikembangkan oleh John Meyer, dan kawan-kawannya (Meyer, Ramirez, Rubinson, dan Boli-Bernet, 1977; Meyer, Tyaek, Nagel, dan Gordon, 1979; Boli, Ramirez dan Meyer, 1985). Teori pendidikan itu, dinamakan teori pendidikan sebagai pembangunan bangsa (*nation-building*), dengan ciri-ciri: (1) universal, memiliki standar dan rasional; (2) sangat melembaga pada level dunia; dan (3) diarahkan sebagai sosialisasi individu sebagai satuan sosial primer, yang menghormati pilihan dan tanggung jawab individu.¹

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia merupakan rangkaian upaya manusia untuk mewujudkan manusia seutuhnya, yang meliputi pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan. Pendidikan sebagai pranata sosial memiliki peranan signifikan dalam merencanakan, melaksanakan, menciptakan SDM yang dicita-citakan.

A. Visi dan Misi Pendidikan Nasional

Djaali (2008) mengatakan pembangunan SDM sebagai insan dan sumber daya pembangunan menekankan pada harkat, martabat, hak

¹Stephen K. Sanderson, *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*. Edisi Kedua. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000, hlm. 501.

Keterkaitan dengan hal di atas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu diperbarui dan diganti.⁷

Terkait dengan visi, misi dan strategi pendidikan nasional itu, selanjutnya, telah ditetapkan sejumlah prinsip yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan reformasi pendidikan. Salah satu prinsip tersebut adalah pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, di mana dalam proses tersebut harus ada pendidikan yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan serta mengembangkan potensi dan kreativitas anak didik.

Berdasarkan prinsip tersebut telah menyebabkan adanya pergeseran paradigma proses pendidikan, dari paradigma pengajaran yang telah berlangsung sejak lama yang lebih menitikberatkan peran guru dalam mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Paradigma itu bergeser ke paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada anak didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kekuatan pengetahuan-teknologi, spiritualitas-keagamaan, berakhlak mulia, berkepribadian, cerdas, berestetika, sehat jasmani dan rohani, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Salah satu prinsip itu adalah pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan anak didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam proses tersebut harus ada pendidikan yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas anak didik. Implikasi dari prinsip ini adalah pergeseran paradigma proses pendidikan, dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran tersebut.

Ketika pendidikan dijadikan sebagai sarana pembelajaran bagi anak didik, sesungguhnya pendidikan tersebut mengajarkan kepada anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan senantiasa menaati aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini, dikarenakan anak didik merupakan bagian dari anggota masyarakat di mana mereka terjun dan bergaul dalam masyarakat. Pendidikan sebagai sarana pranata sosial memberikan peranan penting bagi masyarakat yang memiliki peranan dan kontribusi bagi masyarakat.

⁷"Himpunan Perundang-undangan RI...", *ibid.*, hlm. 30.

A. Susanto (2009) mengatakan bahwa pendidikan dalam pengertian luas, berarti sebagai proses pembelajaran kepada anak didik dalam upaya mencerdaskan dan mendewasakan anak didik. Dalam pengertian sempit, pendidikan berarti pembuatan atau proses pembuatan untuk memperoleh pengetahuan.⁸ Sedangkan menurut Ahmad D. Marimba (1981) bahwa pendidikan merupakan suatu bimbingan atau pimpinan dilakukan secara sadar yang dilakukan seorang pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian prima.⁹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan terencana yang dilaksanakan orang dewasa yang memiliki ilmu dan keterampilan guna memberikan kompetensi kepada anak didik sehingga mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang refleksi berpikir dan bertindak demi terciptanya sumber daya manusia yang diinginkan, sebagai *al-insan-al-kamil*.

B. Pendidikan dan Pranata Sosial

Kata *prana* dapat diartikan sebagai seperangkat aturan berkisar kegiatan atau kebutuhan sosial tertentu. *Pranata*, sebagai suatu sistem tingkah laku sosial bersifat resmi serta adat-istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu dan seluruh perlengkapan di berbagai kompleks manusia dalam masyarakat. Pranata dapat pula diartikan sebagai suatu sistem pola sosial yang tersusun rapi dan relatif bersifat permanen serta mengandung perilaku tertentu yang kokoh dan terpadu demi pemuasan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.¹⁰

Istilah pranata sangat relevan dengan istilah sosial, yang dalam perspektif sosiologi ditemukan sejumlah pengertian. Istilah lembaga kemasyarakatan, merupakan terjemahan langsung dari istilah asing: *social-institution*. Akan tetapi, hingga kini belum ada kesepakatan tentang istilah Indonesia yang dengan tepat dapat menggambarkan makna substantif dari sosial institusi. Ada yang menggunakan istilah pranata sosial, tetapi *social institution* menunjukkan pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Untuk memberikannya suatu batasan, dapat dikatakan bahwa lembaga kemasyarakatan merupakan

⁸A. Susanto, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 1.

⁹Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981), hlm. 19.

¹⁰Bruce J. Cohen, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 147.

himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Wujud konkret lembaga kemasyarakatan tersebut adalah asosiasi (*association*).¹¹

Koentjaraningrat (2006)¹² mengatakan bahwa pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan dalam kehidupan masyarakat yang menekankan pada sistem tata kelakuan atau norma untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ary H. Gunawan (2000)¹³ menuturkan pranata sosial merupakan struktur sosial beserta perlengkapannya, yang dengan struktur sosial tersebut masyarakat (manusia) mengatur, mengarahkan, dan melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhannya.

Pada setiap masyarakat, setidaknya terdapat lima lembaga/pranata sosial, yakni keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan pemerintah. Tiap pranata sosial memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Adapun ciri-ciri pranata sosial: (1) memiliki lambang atau simbol; (2) memiliki tata tertib dan tradisi; (3) memiliki satu atau beberapa tujuan; (4) memiliki nilai; (5) memiliki usia lebih lama atau tingkat kekebalan tertentu; dan (6) memiliki alat kelengkapan.¹⁴ Bruce J. Cohen (1992)¹⁵ juga menuturkan bahwa ada sejumlah karakteristik/ciri suatu pranata sosial:

Pertama, tiap pranata sosial memiliki tujuan utama berupa kebutuhan khusus masyarakat. Misalnya, demi tercapainya sasaran lembaga, tiap lembaga memiliki fungsi ganda yang harus dilaksanakan. Keluarga memiliki tanggung jawab terhadap pemeliharaan ketertiban dalam masyarakat, melindungi masyarakat dari serangan luar, dan menetapkan norma/peraturan.

Kedua, keluarga mengandung nilai-nilai utama yang bersumber dari anggotanya. Di Amerika Serikat, nilai-nilai yang dijumpai dalam lembaga pemerintahan meliputi sistem demokrasi pemerintahan, pemilihan umum, perwakilan legislatif, dan persamaan kedudukan di mata hukum.

Ketiga, pranata relatif bersifat permanen, dalam hal pola-pola perilaku yang ditetapkan dalam lembaga menjadi bagian dari tradisi kebudayaan

¹¹Soerjono Soekanto dalam Abdullah Idi, "Bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan" Program S1 & S2 IAIN Raden Fatah Palembang, 2009.

¹²Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*. (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 113.

¹³Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm.3.

¹⁴<http://www.crayonpedia.org>. (di akses 20/10/2010).

¹⁵Lihat: (Bruce J. Cohen, *Sosiologi Suatu Pengantar*, *op.cit.*, hlm. 148).

yang ada. Misalnya, di negara Barat terdapat tradisi monogami yang kuat yaitu suami dengan satu istri.

Keempat, dasar-dasar pranata begitu luas sehingga kegiatan-kegiatan mereka menempati kedudukan sentral dalam masyarakat, perubahan pada satu lembaga kemungkinan besar dapat mengakibatkan perubahan pada lembaga lainnya. Misalnya, semua lembaga dalam masyarakat terpengaruh oleh goncangan keras siklus ekonomi.

Kelima, meskipun semua pranata memiliki semua sifat saling ketergantungan dalam masyarakat, masing-masing lembaga disusun dan diorganisasikan secara sempurna di sekitar rangkaian pola-pola normal, nilai dan perilaku diharapkan. Misalnya, lembaga pendidikan sangat teratur dan telah menjadi sangat teratur dan telah menjadi sangat birokratis. Nilai tinggi diberikan kepada pelajaran dan akumulasi pengetahuan, usaha memperoleh tingkat yang tinggi, kenaikan dari satu kelas ke kelas berikutnya, pengembangan kebiasaan belajar yang efektif dan kerja sama baik dengan pendidik/guru atau sesama anak didik.

Keenam, ide-ide pranata umumnya diterima mayoritas anggota masyarakat, tidak peduli apakah mereka turut berpartisipasi atau tidak dalam lembaga. Misalnya, seorang anggota dalam masyarakat dalam keluarga akan mengakui dan menerima lembaga keluarga dalam hubungannya dengan fungsi yang harus dijalankannya. Meskipun yang bersangkutan menjauhi struktur tradisi keluarga, dia tidak perlu menyarankan tipe organisasi baru untuk menggantikan unit keluarga.

Dari uraian di atas, tampak bahwa peran suatu lembaga dalam kehidupan, tidak hanya melahirkan satu pola aktivitas dari segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya.

Suatu pranata sosial/lembaga sosial juga memiliki sejumlah fungsi, antara lain: (1) memberikan bagi peranan pendidikan; (2) bertindak sebagai pranata transfer warisan kebudayaan; (3) memperkenalkan kepada individu tentang berbagai peran dalam masyarakat; (4) mempersiapkan individu dengan berbagai peranan sosial yang dikehendaki; (5) memberikan landasan bagi penilaian dan pemahaman status relatif; (6) meningkatkan kemajuan melalui pengikutsertaan dalam riset ilmiah; dan (7) memperkuat penyesuaian diri dan mengembangkan hubungan sosial.¹⁶

¹⁶Bruce J. Cohen, *Sosiologi, Suatu Pengantar, op.cit.*, hlm. 153.

C. Pendidikan dan Fungsi: Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah

Pendidikan merupakan salah satu fungsi yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah secara terpadu untuk mengembangkan fungsi pendidikan. Keberhasilan pendidikan bukan hanya dapat diketahui dari kualitas individu, melainkan juga keterkaitan erat dengan kualitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas anak didik dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu/kualitas layanan pendidikan. Karena masyarakat senantiasa mengalami perubahan, baik yang direncanakan maupun tidak, pendidikan juga dituntut untuk cepat tanggap atas perubahan yang terjadi dalam melakukan upaya yang tepat serta normatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jalaluddin (2003) mengatakan, manusia sebagai makhluk sosial memerlukan pendidikan khusus. Pendidikan khusus itu diarahkan kepada usaha membimbing dan pengembangan potensi manusia agar serasi dengan lingkungan sosialnya. Berdasarkan ruang lingkup lingkungan sosial tersebut perlu dirumuskan pendidikan khusus, dengan konsep perumusannya: (1) pendidikan keluarga; (2) pendidikan kelembagaan yang terdiri atas: (a) kelembagaan formal seperti madrasah ataupun pesantren hingga ke jenjang perguruan tinggi; dan (b) kelembagaan non-formal, seperti *majlis ta'lim*, baik di masjid maupun majlis lainnya.¹⁷

Dilihat dari ruang lingkupnya, pendidikan terdiri dari tiga jenis. *Pertama*, pendidikan dalam keluarga (informal), maksudnya pendidikan keluarga dan lingkungan. *Kedua*, pendidikan di sekolah (formal), maksudnya jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. *Ketiga*, pendidikan dalam masyarakat (nonformal), maksudnya jalur pendidikan di luar formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.¹⁸

Fungsi pendidikan di sekolah selanjutnya sedikit banyak dipengaruhi oleh corak pengalaman seorang di lingkungan masyarakat. Kondusif tidaknya dan positif tidaknya pengalaman seorang di lingkungan

¹⁷Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 78.

¹⁸<http://www.erayonpedia.org>, diakses 21/10/2010.

masyarakat, tidak dapat dielakkan pengaruhnya terhadap keberhasilan fungsi pendidikan. Dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi harus dijalankan agar efektif, lembaga-lembaga itu harus saling berhubungan satu dengan lainnya secara efisien dan produktif. Meskipun ada beberapa lembaga yang mungkin mampu memberikan kebutuhan yang diperlukan masyarakat, namun tidak dapat dipungkiri ada suatu lembaga yang akan tetap dominan dan menggunakan pengaruhnya yang tidak kecil terhadap lembaga lain. Katakanlah, lembaga keluarga dan pendidikan, keduanya membantu sosialisasi orang-orang muda. Dalam masyarakat modern, sekolah memiliki tanggung jawab utama bagi pelaksanaan fungsi pendidikan. Dalam masyarakat agraris pedesaan, keluarga akan banyak menjalankan fungsi pendidikan, karena mungkin diharapkan bahwa sewaktu-waktu anak-anak akan memikul tanggung jawab pengelolaan ladang milik keluarga dan harapan lain dari orang tua bahwa anak-anaknya bisa hidup lebih baik dari mereka. Keluarga merupakan bagian dari pranata sosial begitu juga dengan pendidikan. Pengaruh keluarga sangat memengaruhi kepribadian anak, sebab waktu terbanyak anak adalah keluarga, dan di dalam keluarga itulah diletakkan sendi-sendi dasar pendidikan.

Pendidikan keluarga yang dapat membentuk karakter anak didik memiliki maksud berikut:

Pertama, pendidikan dan anak. Ada perbedaan pendapat di kalangan orang tua tentang nilai latihan yang diberikan di sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), di mana sebagian kalangan berpendapat bahwa anak berumur 2,5 tahun sampai dengan 3 tahun adalah masa krusial yang sangat perlu mendapat kasih sayang dan perhatian langsung dari orang tuanya. Jika anak dikirim untuk bersekolah di TK, berarti sebagian tanggung jawab mengasuh anak dipindahkan ke sekolah. Sebagian kalangan berpendapat bahwa agar orang tua (terutama ibu) agar tetap bebas. Meskipun demikian, nilai-nilai yang diperoleh anak selama di TK dalam proses sosialisasi sangat dibutuhkan, karena dia dapat berteman dengan anak sebaya dengannya untuk keterampilan dasar. Semua itu, akan memberikan bantuan kepadanya pada kehidupan sekolah dan kehidupan selanjutnya.

Kedua, pengaruh sekolah selama tahun-tahun pertama. Sifat yang dimiliki anak usia Sekolah Dasar (SD) dalam merencanakan program sekolah yang akan diberikan pada mereka maka perlu dipertimbangkan dengan matang. Sejak anak-anak berumur 9-12 tahun, anak diharapkan

dapat dibimbing dan dibantu untuk ikut serta mengambil bagian dalam kerja kelompok agar dapat bekerja sama dengan teman-teman sebaya dengan lebih baik. Mereka juga perlu diberikan kesempatan untuk melatih pengarahannya sendiri berdasarkan minat dan perhatiannya.

Ketiga, pendidikan selama remaja. Pada jenjang sekolah menengah, jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Perguruan Tinggi (PT) yang diorganisasikan dengan baik dan optimal dapat memberikan banyak peluang kepada para anak didik untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial yang diprakarsainya. Ada juga jenis kegiatan yang harus diorganisasikan sendiri oleh mereka di bawah bimbingan seorang pendidik yang simpatik dan bijaksana. Dalam melakukan kegiatan tersebut, pendidikan merupakan faktor penting terhadap masa penyesuaian diri bagi anak usia remaja.

Keempat, pengaruh sosialisasi atau pergaulan. Media cetak dan elektronik serta film memiliki perhatian besar dari kalangan remaja. Hal ini dapat berpengaruh penting terhadap perkembangan sikap, perilaku, dan cita-cita sosialnya. Sekalipun dapat berdampak buruk, namun pengaruh pendidikan nonformal memiliki nilai yang besar dalam melahirkan seorang individu anak, di mana ketika dia melihat dan membaca, dia akan menemukan nilai-nilai kehidupan yang lain. Sekolah sebagai lembaga layanan terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat dan membawa konsekuensi, konseptual dan teknis sehingga berkesesuaian antara fungsi pendidikan yang dimainkan oleh sekolah dengan yang dibutuhkan masyarakat. Untuk menjalankan pendidikan secara rasional dengan persyaratan kemampuan dan kepribadian yang secara ideal maupun praktis diciptakan dan dibutuhkan masyarakat, diperlukan suatu mekanisme informasi timbal balik yang rasional, objektif dan realistis antara sekolah sebagai produsen pendidikan dengan masyarakat yang mengonsumsi keluaran (*output*) sekolah.

Pendidikan sebagai pranata sosial, sudah tentu tidak bisa lepas pula dari ketergantungan saling silang budaya. Keterkaitan dengan itu, mengamati dunia pendidikan tentu tidak cukup hanya dengan melihat masalah internal pendidikan, namun perlu pula melihat beberapa komponen lain, misalnya: sosial, budaya, ekonomi, politik, sejarah, dan filsafat.

Jadi, pendidikan dan pranata sosial adalah sesuatu yang bertalian satu sama lain. Beberapa kebutuhan manusia, seperti kebutuhan pendidikan, akan diperoleh lebih terstruktur dengan adanya lembaga sosial atau

pranata sosial. Pranata sosial akan ada jika ada kebutuhan individu yang digabungkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Pranata sosial melibatkan bukan saja pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya.

Pendidikan juga mempersiapkan anak didik untuk mempersiapkan kebahagiaan hidup secara seimbang antara dunia dan akhirat, antara kehidupan pribadi dengan kehidupan kolektif. Yakni, menjadi masyarakat yang baik dengan mematuhi norma atau aturan berlaku dalam masyarakat serta memiliki peranan dan kontribusi bagi kehidupan masyarakat.

Secara tradisional di pendidikan, seperti dikatakan Eleanor Drago dan Severson (2010),¹⁹ terdapat tiga jenis kapasitas yang sangat diperlukan dalam mengembangkan prestasi anak didik (*student achievement*): pertama, *school or organizational capacity*, yakni kemampuan kolektif sekolah sebagai suatu fungsi, semua bekerja untuk meningkatkan prestasi. Kedua, *instructional capacity*, yakni kemampuan pendidik/guru dalam memberikan pelajaran. Ketiga, *developmental capacity*, yakni pendidik mesti didorong agar diperoleh pencapaian dan pengembangan belajar anak didik yang optimal. Pengembangan kapasitas lebih fokus pada kognitif, afektif, interpersonal dan intrapersonalitas untuk dapat mengelola lebih baik terhadap permintaan daripada kepemimpinan, mengajar, belajar, dan kehidupan.

Seorang pendidik/guru memiliki tanggung jawab dan bahkan menunjukkan suatu otoritas lebih besar di sekolah. Kini, sudah banyak upaya yang dilakukan untuk membantu pendidik/guru untuk meningkatkan kapasitas untuk membangun sekolah sebagai pusat belajar (*learning centers*) di mana anak didik dan orang dewasa tumbuh. *Learning centers* dimaksudkan, yakni sekolah dan sistem sekolah mendukung perkembangan dan belajar anak didik, generasi muda dan orang dewasa (*adults*). Sebagai *learning centers* atau *mentoring communities*, atas masukan dari para pendidik, kepala sekolah, pemerintah daerah, dan elite masyarakat, diharapkan dapat memperbaiki kemungkinan kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran.

Pendidik saat ini, dikatakan Eleanor Drago dan Severson (2010), mereka bekerja dalam suatu konteks dengan meningkatnya kompleksitas

¹⁹Eleanor Drago dan Severson, *Leading Adult Learning. Supporting Adult Development in Our Schools*, Corwin A Sage Company, USA, 2010, p. 8.

dan meningkatnya tanggung jawab, dan mereka tidak selalu memiliki alat dan dukungan dalam menghadapi situasi tersebut. Suksesnya reformasi sekolah mesti tumbuh "dari dalam ke luar", "*from the inside out*". Ditekankan bahwa membangun suatu pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana mendukung pertumbuhan dan belajarnya orang dewasa, ke depan merupakan suatu area riset dan menjadi perhatian esensial.²⁰

Sistem sekolah akan terus berubah dalam masalah akuntabilitas, diversitas yang lebih besar populasi anak didik, dan standar dasar reformasi. Memberikan kepemimpinan dan tekanan tertentu dalam upaya mengembangkan prestasi anak didik, sistem sekolah, peneliti, pengambil kebijakan, dan para pelaku reformasi sekolah, merupakan sebagai upaya pencarian dalam meyakinkan pendekatan-pendekatan baru (Blankstein, Houston, & Cole, 2007; Wagner, 2007). Kita mesti memiliki strategi-strategi yang terbaru (*fresh*) karena sejumlah tantangan yang dihadapi memerlukan lebih dari pendekatan (*approaches*) yang ada, yang dikatakan Ronald Heifets (1994) sebagai "*a technical fix*" Problem-problem teknis merupakan problem di mana kita dipandang sebagai masalah dan tentu perlu ada solusinya dengan jelas. Kita menghadapi tantangan terbaru dalam pendidikan yang belum pernah kita hadapi sebelumnya, yang justru memungkinkan kita sedang menghadapi suatu kondisi hanya beradaptasi dengan tantangan, *adaptive challenges*.²¹

Adaptasi dengan tantangan memiliki pengertian bahwa situasi dan problem di mana bukan sebagai suatu problem dan bukan juga sebagai suatu solusi yang diketahui atau telah diidentifikasi. Jenis problem ini memerlukan pendekatan-pendekatan baru dan akurat karena kita bekerja didalamnya. Tanpa adanya alat dan dukungan dalam menghadapi sejumlah tantangan tersebut, telah memungkinkan sebagian pendidik, kepala sekolah, dan pejabat (*superintendents*), menjadi tidak fokus dan meninggalkan profesinya karena harus mendukung lingkungannya. Menggunakan model-model pengembangan kepemimpinan di sekolah yang efektif, membantu kita membangun kognitif, afektif, kapasitas interpersonal dan intrapersonal. Untuk itu, kita perlu belajar untuk mengetahui berbagai problem tersebut menuju suatu pengembangan respons yang lebih tepat dan akurat.

²⁰Eleanor Drago dan Severson, *ibid.*, p. 6.

²¹*Ibid.*, p. 6.

Salah satu cara untuk memfasilitasi pengembangan kepemimpinan kepala sekolah, pendidik, dan pejabat (dinas) pendidikan terkait, adalah berupaya membentuk sekolah dan sistem sekolah lebih efektif ke dalam *mentoring communities*; yakni suatu konteks kolaborasi belajar di mana para pendidik saling berkompetisi dan mendukung satu sama lain menuju perkembangan. Suatu langkah yang patut dilakukan dalam *mentoring communities*, perlunya membantu para pendidik dalam menghadapi tantangan dan secara simultan perlunya membangun kerja sama pada kapasitas kepemimpinan. Atas dasar perlunya adaptasi terhadap kondisi sekarang, pada abad ke-21, suatu hal sangat mungkin jika para pendidik harus mengubah cara bekerja, berkembang, dan belajar bersama, dalam mendukung perkembangan anak didik dan orang dewasa.

Lebih dari itu, upaya penguatan pendidikan sebagai pranata sosial di Indonesia pada abad ke-21, dapat dilakukan dengan melakukan beragam cara yang komprehensif, salah satunya dengan mengoptimalkan *mentoring communities* atau *learning centers*. Segala upaya dilakukan dalam kaitannya dengan dukungan terhadap proses belajar di sekolah dengan mengoptimalkan peran pendidik, kepala sekolah, pejabat (dinas pendidikan) terkait, tidak lain, adalah agar dapat mempersiapkan generasi masa depan (anak didik, orang dewasa) agar tumbuh optimal. Semakin banyak para pendidik belajar dan terlibat dalam iklim belajar yang profesional, semakin banyak mereka akan mengambil pembelajaran dan sangat memungkinkan akan meningkatkan kualitas praktik pembelajaran.

Selanjutnya, penguatan pendidikan sebagai pranata sosial pada konteks yang lebih luas menunjukkan masih banyak kendala. Katakanlah, sebagai upaya merespons perlunya pendidikan yang merata bagi warga negara (*equally education*), telah dilakukan pendidikan jarak jauh (*distance education*) dengan memanfaatkan proses belajar dengan menggunakan instrumen pendukung melalui media belajar dengan elektronik atau *e-learning*, pada umumnya belum berjalan optimal. Selain itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional RI dan Kementerian Agama RI, dalam mempercepat kualitas pendidikan di sekolah dan madrasah, juga mulai melakukan program *e-books*, di mana buku-buku dapat diakses melalui internet oleh masyarakat atau orang tua.

Program belajar dengan *e-learning* dan *e-books* ini patut diapresiasi, mengingat sebagai indikator respons positif pendidikan di Indonesia terhadap iklim pendidikan internasional. Media belajar yang menggunakan jasa internet tersebut, sudah barang tentu secara konseptual sangat

mendukung proses pembelajaran dan mempercepat peluang yang sama dalam pendidikan, misalnya dengan mendukung program pendidikan jarak jauh (*distance education*) seperti pendidikan terbuka (*open education*). Pada umumnya, masyarakat Indonesia sebagian besar belum terdidik dan terbiasa menggunakan komputer dan internet, karena memang kurang lebih delapan puluh persen (80%) penduduknya tinggal di pedesaan, yang belum sepenuhnya terakses dengan jaringan, kesanggupan biaya, pengetahuan internet. Suatu kultur masyarakat agraris-sederhana dan memang mayoritas mereka di pedesaan memiliki pendapatan rendah masih melekat kuat pada masyarakat pedesaan. Internet dan *e-learning* dan *e-books* masih suatu hal asing bagi sebagian masyarakat Indonesia. Program pemerintah yang sedang menggalakkan internet sebagai media pembelajaran harus didukung dengan suatu sistem perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) yang relevan dengan kondisi sosio-kultural masyarakat kota (*urban society*) dan masyarakat pedesaan (*rural society*) yang barang kali memerlukan penanganan berbeda dalam tujuan yang sama, yakni sebagai upaya mencerdaskan generasi muda, anak didik, ke depan.

Mengingat pendidikan sebagai pranata sosial tidak terpisah dengan pranata sosial lainnya, baik ekonomi, politik, budaya, dan agama, maka tingkat efektivitas dan keakuratan suatu program penguatan pendidikan sebagai pranata sosial tersebut, sangat tergantung peran dan fungsi satu pranata dengan pranata lainnya. Suatu hal harus menjadi kesadaran bersama bahwa pengetahuan tentang teknologi sudah menjadi kebutuhan masyarakat global; kendatipun, kecepatan perkembangan sains-teknologi sebagai kecenderungan globalisasi sering kali meninggalkan dampak sosial dan psikologi yang dibawanya. Sejumlah kalangan pengamat memprediksi membenarkan adanya keraguan tentang adanya kesenjangan kemajuan sains-teknologi internet dapat memberi manfaat sosial dan psikologis masyarakat global, seperti dikatakan Robin Mason (1998):

*It is well known that futurist and predictors of technology adoption, vastly overestimate the speed of technology take-up, but underestimate, the social and psychological impact of the change that technology brings. Doubtless this applies equally to the globalisation of education.*²²

Dalam Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan agama diposisikan tidak

²²Robin Mason, "Trends in Globalisation", *Globalising Education: Trends and Applications*, Routledge, London and New York, 1998, p. 135.

kalah pentingnya dengan pendidikan umum (Pasal 15) dalam membentuk peserta didik menjadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Materi kajian bahasa meliputi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dengan konsideran bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional; bahasa daerah merupakan bahasa ibu peserta didik; dan bahasa asing terutama bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat penting kegunaannya dalam pergaulan global. Sama halnya, materi kajian matematika antara lain berhitung, ilmu ukur, aljabar dimaksudkan untuk mengembangkan logika dan kemampuan berpikir anak didik. Materi kajian ilmu pengetahuan alam antara lain: fisika, biologi, dan kimia dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap lingkungan alam dan sekitarnya. Materi kajian ilmu sosial antara lain: ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat. Materi kajian seni meliputi: menulis, menggambar/melukis, menyanyi, dan menari. Materi kajian jasmani dan olah raga dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas. Materi kajian keterampilan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki keterampilan. Materi kajian muatan lokal dimaksudkan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.²³

Pendidikan sebagai pranata sosial sesungguhnya sebagai salah satu upaya dan strategi dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional yang mengharapkan terciptanya generasi masa depan yang berilmu pengetahuan-berteknologi dan beriman-bertakwa dapat terwujud dengan efektif. Tujuan pembangunan nasional tersebut akan terwujud apabila pendidikan sebagai pranata sosial dapat berfungsi dengan normal dan efektif dalam menciptakan SDM yang berkualitas, ilmu pengetahuan yang relevan dengan zamannya dan mampu hidup pada era globalisasi dengan menjaga identitas tertentu yang melekat pada diri sebagai pribadi, agama, dan bangsa, seperti

²³"Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)....", *op.cit.*, hlm. 38.

Bab 9

PENDIDIKAN DAN STRATIFIKASI SOSIAL

Ahli sosiologi berpendapat bahwa dalam semua masyarakat memiliki ketidaksamaan di berbagai bidang. Misalnya, dalam bidang ekonomi, sebagian anggota masyarakat memiliki kekayaan yang berlimpah dan kesejahteraan hidup yang terjamin; sedangkan sebagian lainnya dalam keadaan miskin dan tidak sejahtera. Pada bidang politik, sebagian orang memiliki kekuasaan dan sebagian lainnya dikuasai. Inilah realitas sosial dalam masyarakat, yang dapat tangkap oleh pemerintah dan daya pikir manusia. Perbedaan anggota masyarakat ini, seperti telah dikatakan terdahulu, dinamakan stratifikasi sosial (*social stratification*). Pendidikan, dalam hal ini, memiliki peranan strategis dalam membentuk stratifikasi sosial.

A. Stratifikasi Sosial

R.K. Kelsall dan H.M. Kelsall (1974),¹ bahwa pada suatu masyarakat merupakan suatu hal yang ditandai adanya ketidaksamaan struktur (*structured inequality*) yang tampak pada sejumlah pengaturan institusi sosial pada suatu masyarakat. Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial pada dasarnya berbicara tentang penguasaan sumber-sumber sosial. Sumber sosial segala sesuatu yang oleh masyarakat dipandang sebagai suatu yang berharga,

¹R. K.Kelsall & H.M. Kelsall, *Social Process: Aspects of Modern Sociology*, Long Man Group Limited, New York, 1974, p. ix.

tetapi terbatas dalam jumlah sehingga memperolehnya diperlukan usaha-usaha tertentu. Terjadinya stratifikasi sosial dikarenakan tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga rasa tanggung jawab sosial berkurang lalu dilanjutkan adanya ketimpangan pemilikan nilai atau harga. Akibatnya, sesama anggota kelompok sosial menilai dan memilah-milah yang akhirnya tersirat dan diakui adanya perbedaan, pada akhirnya muncullah *strata*. Bentuk pelapisan dalam masyarakat berbeda banyak sekali, tetapi pelapisan itu tetap ada.²

Stratifikasi sosial adalah sebuah konsep yang menunjukkan adanya perbedaan dan/atau pengelompokan suatu kelompok sosial (komunitas) secara bertingkat. Misalnya, dalam komunitas tersebut terdapat strata tinggi, strata sedang, dan strata rendah.

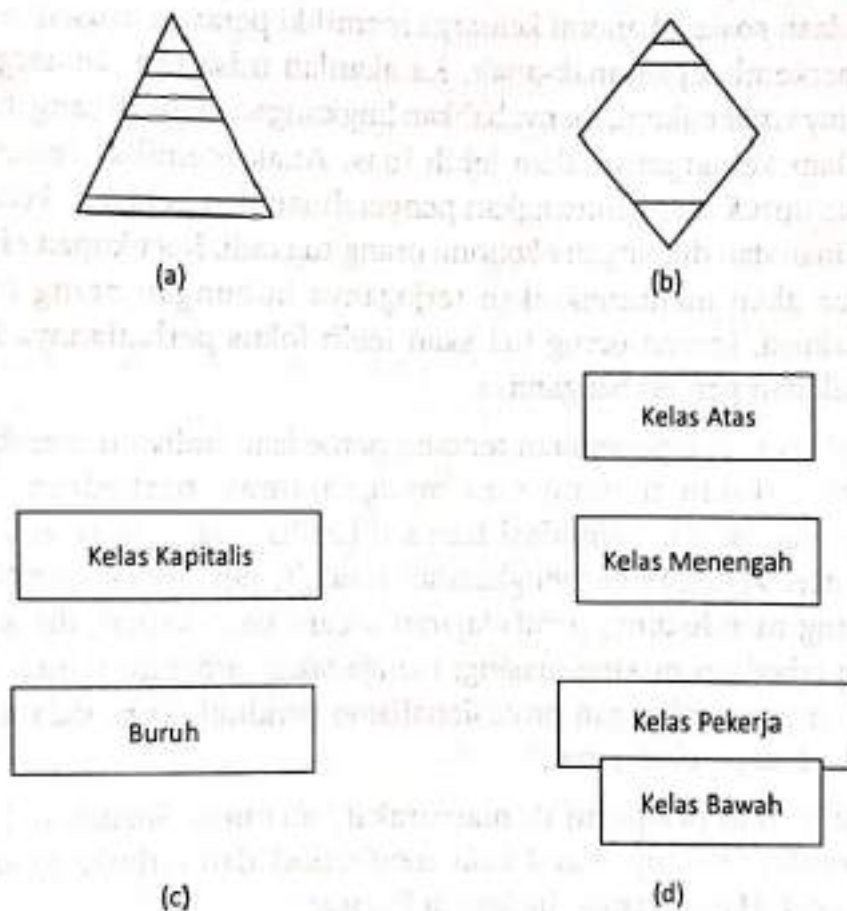
Strata sosial rendah meliputi keluarga ekonomi lemah: buruh tani, pedagang kecil, karyawan harian, berpendidikan formal rendah, tempat tinggal sederhana dan kurang baik, perhatian pada pemenuhan kebutuhan hari ini, jangkauan hari esok terbatas, anak diarahkan segera lepas dari tanggung jawab, produktivitas rendah, taat, tahan penderitaan, masukkan ke sekolah kurang bermutu/syaratnya ringan; *strata sosial menengah*, bercirikan: penghasilan melebihi keperluan hidup, biasa menabung, terpelajar, pendidikan sebagai alat kemajuan, mengandrungi masa depan lebih baik, menyekolahkan anak dalam waktu yang panjang, dan sekolah bermutu tinggi; dan *strata sosial tinggi*, yakni keluarga lapisan atas, dengan ciri-ciri: kehidupan ekonomi sangat baik, kaya raya, berwibawa, tidak khawatir kehidupan ekonomi di kemudian hari, mempertahankan status, pendidikan formal tidak dipandang sebagai alat mencapai kemajuan. Perbedaan atau pengelompokan ini didasarkan pada adanya suatu simbol-simbol tertentu yang dianggap berharga dan bernilai, baik berharga atau bernilai sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya, maupun dimensi lainnya dalam suatu kelompok sosial (komunitas). Adapun ukuran atau kriteria yang menonjol atau dominan sebagai dasar pembentukan stratifikasi sosial.³

Kegunaan dari terma "*stratification*" telah menjadikan diskusi pada basis-basis dan bentuk-bentuk ketidaksamaan (*inequality*) telah menjadi instrumen yang luas dalam membawa konsep ke arah kerangka debat

²Syahrial Syarbani, dkk., *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 32.

³<http://www.scribd.com/doc/15507472/stratifikasi-sosial-pola-asuh-anak>, (diakses pada tanggal 15/10/2010).

sosiologi pada tahun-tahun terakhir (1960-an dan 1970-an). Gambar 9.1 menjelaskan tentang stratifikasi sosial (*social stratification*). Suatu cara dari representasi dari bentuk-bentuk alternatif dari stratifikasi sosial adalah dengan diagram. Selanjutnya, jika sejumlah masyarakat, termasuk tradisi masyarakat sipil agraria, eksibisi: (a) *steep pyramid structure*, masyarakat Barat modern dapat dipresentasikan sebagai yang memiliki suatu bentuk struktur *diamond*; (b) sama halnya, dalam analisis kelas, potensi konflik dari struktur kelas dapat direpresentasikan secara dramatis sebagai contoh; (c) dua struktur kelas dari tipe ideal konsep-konsep Marxian daripada masyarakat kapitalis; atau (d) lebih kompleks tiga atau lebih struktur kelas yang kadang-kadang terlihat lebih sebagai representasi struktur kelas dari masyarakat Barat modern.⁴



Gambar 9.1. Stratifikasi Sosial

Jika kualitas sekolah berdampak terhadap kualitas lulusan pendidikan, dan jika kualitas pendidikan berdampak terhadap lapangan kerja yang

⁴David Jary & Julia Jary, *Dictionary of Sociology*, The Harper Collins, USA, 1991, p.463.

diperoleh dan upah atau penghasilan diterima, masa depan anak-anak dari lapisan sosial yang lebih tinggi (menengah atau atas) akan tetap bertahan, maka di sini kualitas sekolah atau pendidikan dapat mempertahankan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan gejala sosial yang tidak dapat dihindari dan terdapat di setiap masyarakat mana pun di dunia ini. Pandangan dan keperluan mengenai pendidikan, dorongan, cita-cita dan hal yang lain bertalian dengan pendidikan, diwarnai stratifikasi sosial. Masyarakat yang menganut sistem sosial terbuka memiliki kesempatan luas untuk berusaha naik ke tangga sosial yang lebih tinggi. Konsekuensinya terbuka pula untuk turun/jatuh dalam tangga sosial. Gejala naik dan turunnya tangga pelapisan sosial ini tidak terdapat dalam masyarakat yang menganut sistem pelapisan sosial tertutup.

Keadaan sosial ekonomi keluarga memiliki peranan krusial terhadap proses perkembangan anak-anak. Katakanlah misalnya, keluarga yang ekonominya mencukupi, menyebabkan lingkungan materiil yang dihadapi anak dalam keluarganya akan lebih luas. Anak memiliki kesempatan lebih luas untuk mengembangkan pengetahuan dan beragam kecakapan atas jaminan dan dukungan ekonomi orang tua tadi. Kecukupan ekonomi orang tua akan memungkinkan terjaganya hubungan orang tua dan anak-anaknya, karena orang tua akan lebih fokus perhatiannya kepada anak-anak dan perkembangannya.

Teori-teori dan penemuan tentang perbedaan individu memberikan sejumlah anjuran tentang cara mengeliminasi perbedaan, yakni: program nutrisi dan stimulasi harus diberikan pada anak-anak yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah; penciptaan mekanisme sosial yang mendukung; pembelajaran secara kontekstual, disesuaikan dengan perbedaan masing-masing; mengadakan program remediasi dua tahap; dan pengembangan profesionalisme pendidik/guru dalam upaya meningkatkan pembelajaran.⁵

Sifat sistem pelapisan di masyarakat, menurut Soekanto (1990)⁶ dapat bersifat tertutup (*closed social certification*) dan terbuka (*open social stratification*). Hal ini dapat dijelaskan bahwa:

Pertama, sistem tertutup, di mana membatasi kemungkinan berpindahnya seorang dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik berupa gerak

⁵Nyayu Khodijah, *Psikologi Belajar*, (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006), 232-233.

⁶http://bayuekayulian.blogspot.com/2007/06/stratifikasi-sosial-dalam-masyarakat_27.html diakses pada tanggal 19/10/2010.

ke atas maupun gerak ke bawah. Di dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran. Mobilitas dengan jalan ini agaknya sangat terbatas bahkan mungkin tidak ada. Contoh masyarakat dengan sistem stratifikasi sosial tertutup ini adalah masyarakat berkasta, sebagian masyarakat feodal atau masyarakat yang dasar stratifikasinya tergantung pada perbedaan rasial.

Kedua, sistem terbuka, yang mana masyarakat di dalamnya memiliki kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan. Atau, bagi mereka yang tidak beruntung, untuk jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan yang bawah, kemungkinan terjadinya mobilitas sosial sangat besar. Contoh, pada masyarakat demokratis.

Jadi, suatu masyarakat, dinamakan tertutup, mana kala setiap anggota masyarakat tetap pada status yang sama dengan orang tuanya. Sedangkan dinamakan terbuka, karena setiap anggota masyarakat menduduki status berbeda dengan orang tuanya, di mana bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Mobilitas sosial yang disebut tadi, berarti perpindahan status dalam stratifikasi sosial. Berbagai faktor yang menyebabkan perpindahan status, antara lain pendidikan dan pekerjaan.

Secara historis, setidaknya ada empat basis sistem stratifikasi yang eksis dalam masyarakat manusia: perbudakan (*slavery*), kasta (*caste*), kepemilikan tanah (*estates*), dan kelas (*class*),⁷ yang dapat dijelaskan:

Pertama, perbudakan (*slavery*), pada sistem seperti ini masyarakat dibagi menjadi dua kategori: pemilik budak dan budak, di mana seorang atau sekelompok orang dimiliki oleh seorang. Hal ini sudah lama tidak berlaku lagi. Salah satu sebab adanya budak adalah perang, di mana pihak yang kalah dijadikan tawanan kerja paksa.

Kedua, kasta (*caste*), bertalian dengan kepercayaan bangsa India di mana mereka percaya terhadap reinkarnasi bahwa manusia akan dilahirkan kembali, dan setiap orang wajib menjalani hidup sesuai dengan kastanya. Bagi mereka yang tidak menjalankan kastanya, maka pada kehidupan mendatang akan dilahirkan kembali pada kasta yang rendah. Setiap orang dalam sistem kasta ini memperoleh tingkatan kasta yang rendah. Setiap orang dalam sistem kasta ini mendapatkan tingkatan kastanya berdasarkan kasta keluarga mereka.

Ketiga, kepemilikan tanah (*estates*), berhubungan dengan sistem feodal di mana kedudukan seorang dinilai berapa banyak memiliki tanah.

⁷http://arioadityo.multiply.com/journal/item/7/stratifikasi_sosial (diakses pada tanggal 10/3/2010).

Tanah ini merupakan hadiah atau penghargaan untuk para raja dan bangsawan atas dukungannya terhadap raja.

Keempat, kelas (*class*), yakni pembagian masyarakat atas ekonomi yang tercermin dalam gaya hidup (*life style*) seorang. Perlu dijelaskan di sini bahwa stratifikasi sosial dan kelas sosial merupakan dua hal yang berbeda, tetapi sering kali digunakan secara bergantian sehingga dalam beberapa bagian menjadi rancu. Stratifikasi sosial lebih merujuk kepada pembagian sekelompok orang ke dalam tingkatan-tingkatan atau status yang berjenjang secara vertikal. Kelas sosial lebih sempit lagi. Istilah kelas merujuk pada satu lapisan/status tertentu dalam sebuah stratifikasi sosial. Orang-orang yang berasal dari kelas sosial biasanya memiliki orientasi politik, nilai dan budaya, sikap, dan perilaku sosial yang cenderung sama.

Perubahan sosial yang dialami masyarakat sejak zaman kemerdekaan sampai zaman revolusi industri selanjutnya hingga sekarang secara mendasar dan menyeluruh telah memperlihatkan pembagian kerja dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut diferensiasi sosial tidak hanya berarti peningkatan perbedaan status secara horizontal maupun vertikal. Hal ini telah menarik para perintis sosiologi awal untuk memerhatikan diferensiasi sosial (*social differentiation*), yang termasuk juga stratifikasi sosial. Perbedaan yang terlihat dalam masyarakat, ternyata juga memiliki berbagai macam implikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Status yang diperolehnya kemudian menjadi kunci akses ke segala macam hak-hak istimewa dalam masyarakat. Di mana pada dasarnya hak istimewa tersebut merupakan hasil dari rampasan dan penguasaan secara paksa oleh yang satu terhadap lainnya. Pihak yang mendominasi dan didominasi, pada akhirnya, merupakan sumber dari ketidaksamaan dalam masyarakat. Beragam, argumentasi pun diajukan guna menjelaskan ketidaksamaan ini yang kemudian berubah menjadi ketidakadilan.

Keberadaan bangsa Indonesia terkini, merupakan salah satu negara besar yang demokratis di dunia setelah Amerika dan Jepang, akan sangat besar kemungkinan terjadinya stratifikasi sosial berdasarkan sistem terbuka, seperti dikatakan Soekanto. H.A. Tilaar (2008)⁸ mengatakan bahwa masyarakat Indonesia akan menuju ke suatu masyarakat industri, suatu masyarakat terbuka. Keterbukaan itu didukung oleh kemajuan

⁸H.A.R Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 91-92.

ilmu pengetahuan dan teknologi dengan adanya kemudahan-kemudahan komunikasi. Keterbukaan masyarakat merupakan suatu proses yang tidak dapat dibendung sejalan dengan berlangsungnya proses demokrasi yang melanda kehidupan manusia dewasa ini. Hal ini terlihat benteng-benteng otokrasi rontok satu per satu karena mendapat tekanan atas hasrat manusia untuk mewujudkan salah satu hakikat kemanusiaannya berupa demokrasi. Cepat atau lambat, proses ini akan muncul dan terus berlangsung. Tempo serta intensitas proses demokrasi itu dipengaruhi oleh beragam faktor, antara lain kehidupan politik bangsa yang menjamin keterbukaan, seperti diisyaratkan dalam UUD 1945.

Wahana yang disediakan dalam UU itu hanya dapat berfungsi bila manusia Indonesia itu cukup cerdas. Tanpa kecerdasan, tidak mungkin ia mengadakan refleksi, menganalisis data, berpikir logis dan sistematis, serta dapat mengantisipasi kehidupan masa depan yang lebih baik. Dengan kecerdasan, manusia dapat meningkatkan wawasannya dan menentukan serta mempersiapkan partisipasinya dalam pembangunan masyarakat dan bangsanya. Keterbukaan dan kebebasan merupakan dua sisi dari kebebasan manusia. Manusia yang bebas adalah manusia yang terbuka, ia terbuka untuk dialog dengan sesama, dan ia terbuka untuk dirinya sendiri. Karena itu, seorang yang bebas adalah seorang yang berani berintrospeksi untuk melihat kelebihan maupun kekurangan dirinya. Demikian juga karena ia menyadari akan kekurangannya, dia terbuka untuk ide yang baru dari orang lain atau dari lingkungannya.⁹

Latar belakang munculnya stratifikasi sosial dapat disebabkan adanya perbedaan perlakuan dan penghargaan masyarakat terhadap suatu yang dimiliki. Setiap masyarakat memiliki suatu yang dihargai, bisa berupa kepandaian, kekayaan, kekuasaan, profesi, keaslian keanggotaan masyarakat, dan lain sebagainya. Selama manusia membedakan penghargaan terhadap sesuatu yang dimiliki tersebut, pasti akan menimbulkan lapisan-lapisan dalam masyarakat. Semakin banyak kepemilikan, kecakapan masyarakat/ seorang terhadap sesuatu yang dihargai, semakin tinggi kedudukan atau lapisannya. Sebaliknya, bagi mereka yang hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki sama sekali, maka mereka mempunyai kedudukan dan lapisan/strata yang rendah.

Seorang yang mempunyai tugas sebagai pejabat/ketua atau pimpinan pasti menempati lapisan yang tinggi daripada sebagai anggota masyarakat

⁹H.A.R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional*, *ibid.*, hlm. 92.

yang tidak mempunyai tugas apa-apa. Karena penghargaan terhadap jasa atau pengabdian seseorang bisa pula ditempatkan pada posisi yang tinggi, misalnya pahlawan, pelopor, penemu, dan lain sebagainya. Dapat juga karena keahlian dan keterampilan seseorang dalam pekerjaan tertentu dia menduduki posisi tinggi jika dibandingkan dengan pekerja yang tidak memiliki keterampilan apa pun.¹⁰

Dilihat dari sumber terjadinya stratifikasi sosial, sejumlah ahli sosiologi mengatakan: (1) P.A. Sorokin: stratifikasi sosial bersumber dari distribusi atau pembagian yang tidak sama dalam hak, pembagian tugas, kewajiban/tanggung jawab, nilai-nilai sosial, kekuatan sosial dan pengaruh, di antara anggota masyarakat; (2) Selo Soemartjan: sumber stratifikasi sosial adalah sesuatu yang dihargai tinggi/rendah oleh masyarakat, dalam hal uang, benda-benda ekonomis, ilmu, dan lain sebagainya; (3) Max Weber: sumber-sumber strata yang berbeda: berkembangnya corak hidup yang khusus, seperti tipe pekerjaan; kharisma; dan otoritas pemilik dan/atau birokrasi; dan (4) Robbin William Jr: sistem stratifikasi sosial berpangkal pada sistem penjenjangan dalam masyarakat.¹¹

Made Pidarta (2004)¹² mengatakan bahwa ada hubungan saling memberi dan saling menerima antara lembaga pendidikan dengan masyarakat sekitarnya. Lembaga pendidikan merealisasikan apa yang dicita-citakan oleh warga masyarakat tentang pengembangan putra-putra mereka. Hampir tidak ada orang tua anak didik yang mampu membina sendiri anak-anak mereka untuk dapat tumbuh dan berkembang secara total, integratif, dan optimal. Itulah sebabnya lembaga pendidikan mengambil alih tugas ini dengan memberi suatu yang berharga bagi masyarakat.

Untuk menentukan golongan/kelompok sosial dapat diikuti tiga metode: metode objektif; metode subjektif, dan metode reputasi. *Metode objektif* merupakan stratifikasi sosial ditentukan berdasarkan kriteria objektif antara lain: jumlah pendapat, lama atau tinggi pendidikan, dan jenis pekerjaan. *Metode subjektif*, di mana dengan menggunakan metode ini kelompok/golongan sosial dirumuskan berdasarkan pandangan menurut anggota masyarakat menilai dirinya dalam hierarki kedudukan dalam masyarakat itu; dan *metode reputasi*, di mana metode ini dikembangkan

¹⁰<http://www.roysatriadi.co.cc/2010/03/makalah-isd-stratifikasi-sosial.htm>. (diakses pada tanggal 16/10/2010).

¹¹Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, op.cit., hlm.38-39.

¹²Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 180-181.

W.I. Warner. Menurut metode ini, golongan/kelompok sosial dirumuskan berdasarkan bagaimana anggota masyarakat menempatkan masing-masing dalam stratifikasi masyarakat itu.¹³

B. Hierarki Kelas dan Realitas Sosial

Suatu kelompok kelas sosial terdiri dari orang-orang yang memiliki kebiasaan dan nilai-nilai yang sama. Di dalam suatu komunitas kecil, keanggotaan dari kelas sosial cenderung memiliki organisasi-organisasi yang sama dan menghibur satu sama lain di rumah mereka. Jika mereka tinggal di kota-kota besar, keanggotaan mereka begitu besar yang sebetulnya sedikit dari mereka dapat berasosiasi satu sama lain. Bahkan, di kota-kota besar, jika anggota dari sosial kelas yang sama menghadapi kesulitan-kesulitan, mereka segera mengatur suatu kesepakatan yang bagus dari persamaan dalam cara hidup mereka dan mengatur satu persamaan lain sebagai kesamaan sosial.

Keberagaman kelas sosial diatur ke dalam suatu keseluruhan struktur hierarki. Daniel U. Levin & Robert J. Havighurst (1989) mengatakan:

The various social classes are organized into an overall hierarchical structure. Most persons recognize that they occupy a position on a social scale. They acknowledge that there are other people and other groups that have more or less economic and political power or social prestige than their own group. Within a particular community people can rank themselves and their neighbors according to power or prestige; that is, they can assign different individuals to particular positions on a social ladder.¹⁴

Hal ini menjelaskan bahwa keberagaman kelas sosial diatur ke dalam suatu struktur hierarki. Hampir semua orang memandang bahwa mereka menempatkan suatu posisi dalam suatu skala sosial. Mereka mengetahui bahwa di sana terdapat orang lain atau kelompok lain yang kurang lebih kekuatan ekonomi dan politik atau prestise sosial dari kelompok mereka sendiri. Dalam suatu komunitas tertentu, orang-orang dapat menempatkan mereka sendiri dan tetangga mereka menurut prestise dan kekuatan; yakni mereka dapat menyetujui perbedaan individu untuk posisi tertentu pada suatu masyarakat. Semua level masyarakat besar atau kecil menunjukkan fenomena tingkatan (*rank*): pemimpin dan

¹³S.Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm, 26.

¹⁴Daniel U. Levine and Robert J. Havighurst, *Society and Education*, Seventh Edition, Allyn and Bacon, United States, 1989, p. 2-3.

masyarakat yang berprestise tinggi menempatkan pada posisi-posisi menengah; dan yang lainnya menempatkan pada posisi bawah pada suatu skala sosial. Sedikit berhubungan dengan bentuk atau format dari pemerintah. Suatu demokrasi memiliki tingkatan (*rank*); sehingga posisi seseorang di Uni Soviet (ketika itu), bahwa orang tertinggi posisinya di Uni Soviet adalah para pemimpin Partai Komunis dan petinggi pemerintahan, dan para pejabat militer. Dalam suatu sistem demokrasi, orang-orang pada level tertinggi adalah mereka yang memiliki kekuatan ekonomi atau prestise sosial.

Dalam mempelajari struktur sosial, para ahli sosiologi memilih untuk menjelaskan satu atau dimensi lainnya dengan melakukan studi stratifikasi sosial (*social stratification*). W. Lloyd Warner, Meeker, dan Eells (1960) meneliti tentang dinamika komunitas organisasi, yakni mereka memfokuskan pada prestise dan bentuk-bentuk interaksi sosial yang mengatur kehidupan sosial pada suatu komunitas. Prosedur lazim adalah ilmuwan sosial untuk bergerak ke dalam suatu komunitas dan hidup di sana pada suatu waktu, berbicara dengan orang lain dan mengamati kehidupan sosial. Peneliti memperoleh kelompok-kelompok sosial dan bertanya tentang struktur sosial dari suatu komunitas. Ilmuwan sosial mempelajari tentang siapa berhubungan dengan siapa, siapa yang dipertimbangkan sebagai posisi teratas, siapa yang di bawah, dan mengapa. Secara perlahan, peneliti menunjukkan suatu gambaran dari suatu komunitas sebagaimana dipandang atau dipersepsikan oleh anggotanya. Sungguh jarang seorang warga melihat seluruh struktur komunitas secara jelas, tetapi ilmuwan sosial menggabungkan pandangan-pandangan dari banyak orang ke dalam suatu gambaran komposisi tunggal yang mempresentasikan konsensus. Gambaran ini menunjukkan kelompok-kelompok yang mengatur dalam suatu jaringan, sebagaimana halnya pada suatu gejala sosial, dari yang tertinggi (*top*) ke yang terendah (*bottom*) dalam bentuk-bentuk dari status yang disetujui mereka oleh warga mereka. Setelah garis-garis umum dari struktur sosial telah diperoleh dan posisi-posisi dari orang tertentu telah disetujui sangat mungkin untuk menempatkan orang lain dalam hubungannya dengan orang asli (*original people*). Akhirnya, mayoritas dari populasi dapat dilokasikan pada pemetaan sosial dalam cara ini.

Metode pemetaan sistem sosial dan penemuan kelas sosial dari partisipasi seorang disebut *method of evaluated social participation*, sering disingkat E.D. *Pertama*, dengan melakukan wawancara terhadap anggota-

anggota komunitas, garis-garis besar dari struktur sosial diperoleh, dan nama-nama diperoleh dari sedikit orang yang diwawancarai setuju menempatkan posisi yang diberikan dalam struktur. Hal itu, selanjutnya, dicatat bahwa dengan siapa orang-orang tersebut berhubungan dengan klub-klub sosial, klik-klik sosial informal, klub-klub pelayanan, asosiasi-asosiasi peribadatan, dan lain sebagainya. Sehingga orang lain yang ditempatkan dalam hubungan terhadap kelompok asli. Akhirnya, mayoritas populasi ditempatkan dalam cara ini.

Jika ilmuwan sosial berharap untuk mengetahui status sosial dari Mr. X, di mana namanya tidak dibawa ke dalam penelitian, peneliti akan menanyakan siapa teman Mr. X, klub dan asosiasi apa yang dia miliki. Kemudian, ditemukan bahwa Mr. X telah dekat dengan salah satu kelompok yang telah didefinisikan dalam pemetaan sosial. Partisipasi sosial Mr. X kemudian dievaluasi dalam hubungannya dengan orang lain dalam komunitas dan tempatnya dalam struktur sosial telah ditentukan. Mereka yang menempati tingkatan tinggi ditempatkan pada status sosial yang tinggi (*upper class*) dan mereka yang menempati tingkatan rendah dipertimbangkan pada kelas rendah (*lower class*), dengan kemungkinan banyak kelas sosial atau level status sosial, di antaranya, perempuan/wanita dan anak-anak secara umum disepakati skor kelas sosial dari kepala rumah tangga laki-laki.¹⁵

Kebanyakan riset tentang status sosial atau kelas sosial hanya menggunakan satu atau dua dari kemungkinan status sosial dalam kategori individu dalam beberapa skala status. Satu dari sejumlah pendekatan yang digunakan dengan menanyakan responden tentang indikator pekerjaan dan pendidikan dengan menggunakan kategori yang ditawarkan August Hollingshead (1957) sebagai bagian dari Dua Faktor Index dari Posisi Sosial; responden kemudian ditempatkan dalam kategori kelas sosial I (*High*) hingga V (*Low*). Banyak studi lainnya, hanya menggunakan status sosial seperti skala North-Hatt (Reiss, 1961), yang menempatkan pekerjaan-pekerjaan pada suatu skala 8 (*shoe shiner*) ke-93 (*supreme court justice*), khususnya ketika pengukuran-pengukuran lain dari posisi-posisi sosial sulit diperoleh untuk suatu sampel yang kasar. Pada tahun-tahun terakhir, beberapa studi tentang anak-anak dari kepala keluarga berjenis kelamin perempuan di tetangga miskin telah menggunakan pendidikan ibu sebagai alat ukur kelas sosial karena informasi lainnya tidak diperoleh.

¹⁵Daniel U. Levine & Robert J. Havighurts, *Society and Education*, *op.cit.*, hlm. 3-4.

Para peneliti sering menjustifikasi dan hanya menggunakan satu atau dua pengukuran dari status sosial, karena pekerjaan, pendidikan, pendapatan, rumah/tetangga, dan variabel status sosial lainnya hanya secara umum dikorelasikan satu sama lain. Pendapatan, sebagai contoh, adalah bagian dari suatu fungsi pekerjaan, dan sejumlah daripada pendidikan membantu menentukan pendapatan dan pekerjaan seorang. Penelitian yang dilakukan Hope (1982) mengidentifikasikan bahwa skor-skor prestise pekerjaan sebagiannya didasarkan pada keyakinan penghargaan ekonomi orang, yang diasosiasikan dengan suatu pekerjaan dan nilai-nilai yang diberikan kepada masyarakat. Ahli fisika, sebagai contoh, menempatkan tingkatan (*rank*) yang lebih tinggi pada kedua ukuran tersebut. Tidaklah mengherankan bila prestise pekerjaan secara signifikan berkorelasi dengan pendapatan.

Treiman (1977) melakukan penelitian tentang studi lintas nasional, di mana temuannya menunjukkan berikut: *Pertama*, pekerjaan yang memiliki prestise yang tinggi dalam suatu negara cenderung memiliki prestise yang tinggi di negara lain, berhubungan dengan perbedaan karakteristik dalam politik, sosial, dan ekonomi. *Kedua*, dalam lintas negara, terdapat hubungan/korelasi yang tinggi antara status pekerjaan dan pendidikan; dan antara status pekerjaan dan pendapatan. *Ketiga*, suatu standar internasional skala pekerjaan memiliki korelasi yang tinggi dengan skor-skor dari skala-skala pekerjaan lokal yang berkembang pada negara-negara tertentu. *Keempat*, status pekerjaan menunjukkan stabil sepanjang waktu. Walaupun tempat banyak perubahan dalam tipe-tipe pekerjaan di mana orang-orang telah bekerja pada periode sejarah pekerjaan berbeda, pekerjaan terus eksis untuk sepanjang periode waktu pada umumnya di bawah relatif sedikit perubahan dalam status. *Kelima*, hubungan dekat antara pekerjaan dan pendapatan/kekayaan juga telah sangat stabil sepanjang waktu. Misalnya, data pendapatan keterkaitan dengan perbedaan pekerjaan di Amerika Serikat, di mana pada 1776 bertalian kuat dengan data 1890, dengan data pendapatan berhubungan dengan pekerjaan di London pada 1870, dengan data pendapatan dengan pekerjaan di Inggris pada 1888, dan dengan data pendapatan pada Florentine pada 1427.¹⁶

Hal ini penting untuk dicatat bahwa mengukur status pekerjaan dan indikator-indikator status lainnya adalah tidak sama persis, seperti mengukur kelas sosial. Terminologi kelas sosial (*social class*) merujuk

¹⁶Daniel U. Levine & Robert J. Havighurst, *Society and Education*, op.cit., hlm. 4.

pada kelompok-kelompok besar dari sejumlah orang yang memiliki politik dan tujuan ekonomi dan keinginan dengan posisi mereka dalam struktur sosial. Barang kali, konsep kelas sosial yang paling berpengaruh adalah konsep Karl Marx dan para pengikutnya, yang telah membuat perhatian pada *capitalist* (mereka yang mengontrol sejumlah besar modal; *bourgeoisie* [orang-orang kelas menengah (*middle-class*)] dengan jumlah properti signifikan dan sejumlah kontrol terhadap investasi, cara-cara produksi, dan kekuatan-kekuatan pekerjaan lainnya; *petitbourgeoisie* [orang kelas menengah bawah (*lower-middle-class*)] dengan kontrol properti yang signifikan, investasi, dan produksi, tetapi tidak pada pekerjaan lainnya; *proletariat* (pekerjaan manual dengan tidak ada kontrol properti dan produksi); *lumpenproletariat* (sangat miskin, pekerja tanpa keterampilan); dan *intelligentsia* (orang-orang berpengaruh dan kekayaan berasal dari bekerja dengan ilmu pengetahuan daripada barang-barang materiil).¹⁷

Pada awal periode industri, mayoritas individu dalam kebanyakan masyarakat adalah para proletarian dengan sedikit kontrol terhadap produksi atau kekuatan-kekuatan kerja mereka sendiri. Perhatian yang fundamental antara kelas sosial dalam hampir semua konseptualisasi yang terjadi antara pekerja-pekerja manual, yang relatif tidak memiliki keterampilan dan memiliki sedikit kekuatan untuk memengaruhi keputusan-keputusan ekonomi dan pekerja bukan manual relatif memiliki pendidikan bagus, status pekerjaan, yang setidaknya memengaruhi keputusan-keputusan persetujuan *labor* mereka. Jika kelas sosial sungguh eksis dan memiliki berbagai hal penting dalam menentukan atau merefleksikan apa yang terjadi terhadap orang-orang, kelas sosial harus lebih dekat berhubungan dengan berbagai ukuran, seperti prestise pekerjaan. Yakni, mengetahui kelas sosial seorang—sebagai contoh, suatu klasifikasi menurut pekerjaan manual atau nonmanual atau suatu klasifikasi kelas rendah atau kelas atas (*lower class* atau *upper class*) menurut prestise pekerjaan dan pendidikan—harus lebih berhubungan kuat dengan perilaku dan hasil daripada suatu skor yang sederhana pada prestise pekerjaan. Suatu penelitian lanjutan menunjukkan bahwa kelas sosial adalah suatu konsep yang berarti dari sudut pandang ini.

Terminologi yang digunakan untuk mengategorikan kelas-kelas sosial, perhatian antara status tinggi (*upper/high status*), menengah (*middle*), dan rendah (*lower*) atau kelas pekerja. Ahli sosiologi sering membedakan antara kelas pekerja rendah (*lower-working class*) dan kelas

¹⁷Daniel U. Levine & Robert J. Havighurst, *Society and Education*, *op.cit.*, hlm. 5.

pekerja tinggi (*upper-working class*), dan antara kelas rendah-menengah (*lower-middle class*) dan kelas atas-menengah (*upper-middle class*). Dalam banyak kasus, suatu perhatian juga dibuat antara kelas tinggi-tinggi (*upper-upper class*), dan kelompok kelas rendah-tinggi (*lower-upper class groups*). Sejumlah pengamat berargumen bahwa suatu kelas baru (*a new class*) telah muncul memiliki interes ekonomi dan politik tertentu dan bentuk-bentuk kultural dalam masyarakat modern, masyarakat pascaindustri.

Bruce-Briggs (1979) dalam Daniel U. Levine dan Robert J. Havighurst (1989) mengidentifikasi tiga kelompok besar yang saling tumpang tindih yang telah diidentifikasi sebagai "kelas baru" (*a new class*): Pertama, kelas menengah baru (*the new middle class*) yang terdiri dari para pekerja kulit putih (*white collar workers*) yang secara umum tidak dibayar tinggi, tetapi telah memiliki akses untuk mengamankan dan secara fisik bukan pekerjaan yang diminta melalui pendidikan. Kedua, para manajer yang memiliki *property* dari korporasi untuk pekerjaan mereka, seperti dilakukan para kapitalis pada era-industri. Ketiga, kelompok yang dikatakan sebagai "*earning its living*" atau menggunakan belajar, khususnya kemampuan untuk menggunakan kata-kata.¹⁸

Hubungan antara latar belakang pendidikan dimiliki masyarakat dan ketidaksamaan struktural sosial (*social structured inequality*) tidak dapat menghilangkan ketidaksamaan struktur sosial-ekonomi pada suatu kelompok masyarakat. Meskipun suatu kelompok masyarakat di mana banyak kalangan anak mudanya memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi, katakanlah tamatan universitas, tetapi tidak serta-merta dapat memperoleh akses memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang memadai, sehingga diharapkan dapat mengubah struktur sosial-ekonomi ke arah lebih tinggi.

Bagi kalangan kelompok masyarakat dari kelas bawah (*low class*) akan sangat berarti bila setelah memperoleh pendidikan tinggi memiliki akses memperoleh pekerjaan, sehingga dapat mengubah struktur sosial yang sering kali diukur dengan tingkat pendapatannya. Akses untuk berbagai bentuk status pekerjaan juga akan menyulitkan bila tidak memiliki latar belakang pendidikan atau tidak menamatkan pendidikan tertentu, katakanlah di perguruan tinggi, di mana aksesnya akan terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa *ijazah*, tamatan pendidikan di perguruan

¹⁸Daniel U Levine & Robert J. Havighurst, *Society and Education*, *op.cit.*, hlm. 5.

tinggi, walaupun tidak selalu mudah memperoleh akses langsung dalam status pekerjaan pada suatu perusahaan/instansi, tetapi akan jauh lebih baik dan lebih berprospek dalam memperoleh pekerjaan dibandingkan dengan mereka (generasi muda) yang tidak menempuh atau gagal dalam pendidikan. Kelompok masyarakat (generasi muda) yang *uneducated* ini umumnya cenderung akan lebih sulit merangkak dan akhirnya dapat mengubah struktur sosial-ekonomi ke arah yang lebih tinggi pada masyarakat mana pun di dunia ini.

Bab 10

PENDIDIKAN DAN MOBILITAS SOSIAL

Pendidikan telah menjadi sektor strategis dalam sistem dan program pembangunan suatu bangsa. Banyak negara telah menjadikan sektor pendidikan sebagai *leading sector*, sektor utama atau unggulan dalam program pembangunan. Ternyata, yang menjadikan pendidikan sebagai *leading sector*, telah menjadi negara maju dan mampu menguasai pasar dunia.¹ Jepang menjadi negara maju (*developed country*) dikarenakan pendidikan menjadi perhatian utama dalam kebijakan pembangunan pendidikan sejak 1945. Cina menjadi salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia, tetapi diperhitungkan dunia karena pesatnya kemajuan ekonomi, perdagangan, dan teknologi, tidak terlepas pula adanya peran pendidikan. Malaysia, mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad, telah memfokuskan pembangunan pendidikan dan ekonomi sejak 1970-an, yang dikenal dengan kebijakan program percepatan (*affirmative action programs*) atau *positive discrimination program* dengan mendorong putra-putri bangsa Melayu (khususnya) untuk menuntut ilmu pengetahuan, termasuk ke sejumlah negara maju dalam upaya mengejar ketertinggalan dalam berbagai sektor pembangunan ketika itu. Kini, Malaysia telah menargetkan menjadi suatu negara maju pada 2020.

¹Abd. Muhyi Batubara, *Sosiologi Pendidikan*. (Jakarta: PT Ciputat Press, 2004), hlm. 5.

A. Pendidikan: "Jalan" Menuju Kemandirian Anak Didik

Dilihat dari aspek bahasa, pendidikan berasal dari kata didik yang berarti pemeliharaan, yakni memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan). Dalam bahasa Arab, kata pendidikan disebut *tarbiyah*, masdar kata kerja *rabba yu rabbi-tarbiyatan*, yang artinya mendidik, mengasuh.¹ Naquib Al-Attas dalam Abuddin Nata (2005)² mengatakan bahwa kata yang lebih tepat untuk mewakili kata pendidikan dalam bahasa Arab adalah *ta'dib*. Istilah *tarbiyah* dinilai terlalu luas, yakni mencakup hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Sedangkan kata *ta'dib* sasaran katanya adalah manusia.

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan menurut bahasa meliputi mendidik, memelihara, dan mengasuh. Berdasarkan istilah, terdapat banyak pengertian tentang pendidikan. Banyaknya pengertian ini bukan berarti terdapat kontradiksi, tetapi sebaliknya satu sama lain saling melengkapi dalam arti melengkapi kesempurnaan dari pengertian pendidikan itu. Di antara pengertian yang dikemukakan sejumlah akademisi pendidikan, diungkapkan Zuhairini (1995),³ pendidikan adalah "suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup." Dikatakan Sudirman, et.al. (1991),⁴ bahwa pendidikan adalah "usaha yang dijalankan seorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi seseorang atau sekelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mempunyai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental."

Ahmad D. Marimba (1986) menuturkan bahwa pendidikan merupakan bimbingan atau pimpinan secara sadar pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian utama.⁵ M. Athiyah Al-Abrasyi (1970)⁷ mengatakan pendidikan merupakan mendidik akhlak dan jiwa mereka dengan kesopanan

¹Muhammad Idris Abdur Rouf Marbawi, *Qomus Idris Al-Marbawi Arab-Melayu*, (Jakarta: Sirkah Nur Al-Tsaqofi Al-Islamiyah, 1998), Juz I, hlm. 225.

²Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Media Pratama, 2005), hlm. 10.

³Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara Press, 1995), Cetakan ke-2, hlm. 149.

⁴Sudirman, et.al., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), Cetakan ke-5, hlm. 4.

⁵Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Maa'rif, 1986), hlm. 19.

⁷M. Athiyah Al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), Cetakan ke-6, hlm.1.

yang tinggi, mempersiapkan mereka dalam kehidupan yang suci, ikhlas, dan jujur. Dalam UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.⁸

Uraian di atas menunjukkan bahwa ada sejumlah unsur pendidikan sebagai pokok terselenggaranya proses pendidikan. Unsur-unsur dimaksudkan adalah usaha, waktu, subjek (pendidikan), objek (terdidik), sasaran (perkembangan jasmani dan rohani anak didik), serta tujuan pendidikan. Dari pengertian pendidikan itu dapat dijelaskan bahwa jenis-jenis pendidikan meliputi: pendidikan agama, pendidikan keterampilan, pendidikan politik, dan lain sebagainya. Macam-macam pendidikan itu tercipta karena adanya perbedaan tujuan yang hendak dicapai. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang diberikan atau disampaikan dari orang yang sudah dewasa kepada anak yang belum dewasa menuju perkembangan ke arah kedewasaan pribadi yang matang dan mandiri, baik jasmani maupun rohani.

B. Pendidikan dan Mobilitas Sosial

Mobilitas sosial adalah sebuah gerakan masyarakat dalam kegiatan menuju perubahan yang lebih baik. Henry Clay Smith (1968) mengatakan mobilitas sosial adalah gerakan dalam struktur sosial (gerakan antar-individu dengan kelompoknya).⁹ Haditono (1991) mengatakan mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari kedudukan yang satu ke kedudukan yang lain, tetapi sejajar. Paul B. Horton dan Chester L. Hunt (1992) mengatakan mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lain.¹⁰

David Jary dan Julia Jary (1991) mendefinisikan mobilitas sosial (*social mobility*) yakni:

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, diterbitkan Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2008, hlm. 111.

⁹Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 36.

¹⁰Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, Alih bahasa: Amiruddin Ram, (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 36.

... the movement of individuals, sometimes groups, between different positions in the hierarchy of social stratification within any society. Within modern societies, class positions with the occupational structure are usually of prime interest in studies of social mobility. Social mobility may involve movement up a class or status hierarchy, upward mobility, or down, downward mobility. It may take place from generation to another, intergenerational mobility, where the focus of interest for sociology is on differences between the socioeconomic class or status of a persons's family of origin compared with his or her achieved class or status position, or it may be more short-term, foreexample, the ups and downs of individual career, intergenerational mobility.... It is usually accepted that, in general, modern societies allow more mobility than earlier types of society, that is, comparative terms of open-class societies.¹¹

Dapat dijelaskan bahwa pergerakan individu, kadang-kadang kelompok antara posisi berbeda dalam hierarki stratifikasi sosial pada masyarakat. Dalam masyarakat modern, posisi-posisi kelas dalam struktur pekerjaan menjadi perhatian utama dalam studi mobilitas sosial. Mobilitas sosial meliputi pergerakan suatu kelas atau hierarki status, mobilitas ke atas (*upward mobility*), atau mobilitas ke bawah (*downward mobility*; di mana fokus dan perhatian sosiologi adalah pada perbedaan antara kelas sosial-ekonomi atau posisi status, atau hal itu mungkin merupakan lebih pada waktu singkat, sebagai contoh, naik atau turun karier individu, *intragenerational mobility*. Hal itu biasanya diterima bahwa, secara umum, masyarakat modern lebih menerima mobilitas dibandingkan tipe-tipe masyarakat tradisional (masa lampau), yakni terma-terma komparatif dari kelas pada masyarakat terbuka (*open-class societies*).

P.A.Sorokin (1928) mengatakan mobilitas sosial dapat dibagi menjadi dua: (1) *mobilitas vertikal*, meliputi (a) *social climbing*, dari status yang rendah ke status yang tinggi, di mana status yang tinggi itu telah ada sebelumnya; dan membentuk kelompok atas status yang baru, karena status yang lebih atas belum ada (promosi), misalnya kelompok konglomerat, eksekutif, supereksekutif, dan seterusnya; (b) *social sinking*, dari kelompok tinggi/atas turun ke rendah; dan derajat kelompoknya turun; (2) *mobilitas horizontal*, yakni apabila perubahan terjadi secara linear, contohnya seorang petani yang berubah pekerjaannya menjadi buruh pabrik.¹²

Gerak sosial vertikal yang naik mempunyai dua bentuk utama: (1) masuknya individu yang mempunyai kedudukan rendah ke dalam

¹¹David Jary & Julia Jary, *Dictionary of Sociology*, (The Harper Collins Publisher), 1991, hlm. 454-455.

¹²Ary H. Gunawan, *Pendidikan*, *op.cit.*, hlm. 43.

kedudukan yang lebih tinggi, di mana kedudukan tersebut telah ada sebelumnya. Misalnya, seorang yang bekerja di kantor A dan diangkat menjadi pejabat di kantor A; (2) pembentukan suatu kelompok baru, yang kemudian ditempatkan pada derajat yang lebih tinggi dari kedudukan individu-individu pembentuk kelompok tersebut. Misalnya, dengan dibentuknya sebuah organisasi, memberi kesempatan kepada seseorang untuk menjadi ketua umum, bertanda yang bersangkutan naik status. Sementara itu, gerak vertikal menurun mempunyai dua bentuk utama: (a) turunnya kedudukan individu yang lebih rendah derajatnya. Misalnya seorang pejabat dipecat karena korupsi; dan (b) turunnya derajat sekelompok individu yang dapat berupa disintegrasi kelompok sebagai satu kesatuan.¹³

Kenaikan status sosial dianggap baik karena membuktikan keberhasilan usaha seseorang. Kenaikan status dianggap negatif jika dapat membuat seorang menjadi tegang, angkuh, pamer kekayaan, kegoncangan kehidupan keluarga dengan bertambah angka perceraian keluarga. Seharusnya, naik status tetap membuat seorang stabil mentalnya dan tetap membuat stabil pribadinya.

Terdapat dua pengertian mobilitas sosial. *Pertama*, bahwa suatu sektor dalam masyarakat secara keseluruhan berubah kedudukannya terhadap sektor yang lain. Sebagai contoh, kedudukan pendidik (guru) yang begitu terhormat pada zaman dahulu sudah tidak lagi berada pada posisi yang setinggi itu di zaman sekarang. *Kedua*, mengenai mobilitas sosial adalah kemungkinan bagi individu untuk pindah dari lapisan sosial yang satu ke lapisan sosial lain, yang dapat dilihat, di sekitar lingkungan di mana individu berada.¹⁴

Dalam dunia modern, banyak orang berupaya melakukan mobilitas. Mereka yakin bahwa melakukan jenis pekerjaan yang paling cocok bagi diri mereka. Bila tingkat mobilitas sosial tinggi, meskipun latar belakang sosial berbeda, mereka tetap merasa mempunyai hak yang sama dalam mencapai kedudukan sosial yang lebih tinggi. Bila tingkat mobilitas mereka rendah, tentu saja kebanyakan orang akan terkungkung dalam status nenek moyang mereka, dan mereka akan hidup dalam kelas sosial tertutup. Mobilitas sosial lebih mudah terjadi pada masyarakat terbuka

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 276-277.

¹⁴S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 38.

karena lebih memungkinkan untuk berpindah strata. Sebaliknya, pada masyarakat yang sifatnya tertutup kemungkinan untuk pindah strata lebih sulit.¹⁵

Suatu masyarakat yang sifatnya tertutup (*closed society*) yang menganut sistem kasta akan menyulitkan mobilitas sosial. Di India, sebagai contoh, jika seorang lahir dari kasta lebih rendah untuk selama bersangkutan tetap berada pada kasta Brahmana. Meskipun dia memiliki kemampuan dan keahlian, kasta tidak berubah karena yang menjadi kriteria strata adalah keturunan. Tidak terjadi gerakan atau mobilitas sosial dari kasta satu ke kasta lain. R. K. Kessal dan H.M. Kessal (1974) mengatakan perpindahan atau mobilitas sosial dapat berupa *intragenerational* atau *intergenerational*. *Intragenerational* dapat berupa perbandingan posisi seseorang dalam skala sosial pada kehidupan masa lalu dan kemudian ditemukan menurun atau cenderung meningkat. Selanjutnya, *intergenerational*, mobilitas sosial seorang dipandang dengan melihat perbandingan generasi dirinya dengan generasi sebelumnya, generasi orang tuanya, apakah cenderung naik atau menuun dalam skala sosial. Mobilitas pada *intergenerational* sangat tergantung pada apakah suatu masyarakat bersifat tertutup (*closed society*) atau terbuka (*open society*), yang dapat dilihat dengan mempelajari studi tentang akses dan promosi keseluruhan tingkatan pekerjaan dengan status tinggi dalam suatu masyarakat. Lebih detail, diungkapkan R.K. Kessal & H.M. Kessal (1974):

Social mobility can be either intragenerational or intergenerational. The former occurs when, comparing someone's position on the social scale in his later as against his eralier adult life, he is found to have risen or fallen. The latter occurs when, if someone's postion in adult ife is compared with his position at birth(at which point he is assumed to have the status of his father), he is found to have risen or fallen in the social scale. With regard to the measurement of intergenerational mobility, we have already seen that a general indication of how open a particular 'open society' actually is, could be obtained if we had an adequate number of detailed studies of access to and promotion within a whole range of high status occupations in that society.¹⁶

Sementara itu, P.A. Sorokin dalam Ary H. Gunawan (2000)¹⁷ mengatakan ada sejumlah saluran mobilitas sosial:

¹⁵Lihat: (http://id.wikipedia.org/wiki/gerak_sosial, diakses tanggal 15/10/2010).

¹⁶R.K. Kessal & H.M. Kessal, *Stratifikasi...*, op.cit., p. 104.

¹⁷Lihat: (Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, op.cit., hlm. 44).

1. Angkatan Bersenjata

Angkatan bersenjata merupakan organisasi yang dapat digunakan untuk saluran mobilitas vertikal ke atas melalui tahapan yang disebut kenaikan pangkat. Misalnya, seorang prajurit yang berjasa pada negara karena menyelamatkan negara dari pemberontakan, dia akan mendapatkan penghargaan dari masyarakat. Dia mungkin dapat diberikan pangkat/kedudukan yang lebih tinggi, walaupun berasal dari golongan masyarakat rendah.

2. Lembaga Keagamaan

Lembaga keagamaan dapat meningkatkan status sosial seseorang, misalnya seorang yang berjasa dalam perkembangan agama seperti *ustadz*, pendeta, dan biksu. Status sosial para penyebar jajaran agama ini akan meningkatkan status sosialnya di masyarakat, terutama bagi komunitas pengikut agama tertentu.

3. Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai *social elevator* (perangkat) yang bergerak dari kedudukan yang rendah ke kedudukan lebih tinggi. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan lebih tinggi. Seorang anak dari keluarga miskin mengenyam sekolah sampai jenjang yang lebih tinggi. Setelah lulus dia memiliki pengetahuan bisnis dan menggunakan pengetahuannya untuk berusaha, sehingga dia berhasil menjadi pengusaha sukses, yang telah meningkatkan status sosialnya.

4. Organisasi Politik

Seperti angkatan bersenjata, organisasi politik memungkinkan anggotanya yang loyal dan berdedikasi tinggi untuk menempati jabatan yang lebih tinggi, sehingga status sosialnya meningkat.

5. Ekonomi

Organisasi ekonomi, seperti perusahaan, koperasi, BUMN, dapat meningkatkan tingkat pendapatan seorang. Semakin besar prestasinya, semakin besar jabatannya. Jika jabatannya tinggi maka pendapatannya akan bertambah. Karena pendapatannya bertambah berakibat pada kekayaannya bertambah. Juga, karena kekayaannya bertambah akibatnya status sosial di masyarakat meningkat.

6. Keahlian

Seperti situs-situs karya ilmiah, orang yang rajin menulis dan menyumbangkan pengetahuan/keahliannya kepada kelompok pasti statusnya akan dianggap lebih tinggi dari pengguna biasa. Sejumlah pemikiran atau ide-ide penting akan bermanfaat bagi para pembaca dan mungkin akan berguna dalam menambah ilmu pengetahuan terkait, atau bahkan ide tersebut dapat menjadi bahan dan inspirasi solusi terhadap suatu permasalahan kehidupan yang sedang dihadapinya.

7. Perkawinan

Melalui perkawinan, seorang bisa berubah kedudukan atau status sosialnya. Misalnya, seorang pria miskin yang menikah dengan seorang janda kaya dengan sendirinya status sosial pria itu berubah menjadi orang kaya yang dikarenakan istrinya kaya.

Seperti telah dipaparkan sebelumnya bahwa pendidikan menjadi salah satu saluran bagi seorang individu atau kelompok sosial untuk melakukan mobilitas sosial. Pendidikan telah membuka kemungkinan adanya mobilitas sosial. Dengan pendidikan seorang dapat meningkatkan status sosialnya. Pendidikan secara merata memberi kesamaan dasar pendidikan dan mengurangi perbedaan antara golongan tinggi dan rendah. Melalui pendidikan, seorang yang tidak bisa membaca jadi bisa membaca surat kabar dan majalah yang sama, bisa memikirkan masalah sosial, budaya, politik, agama, dan ekonomi yang sama.

Pendidikan dapat dilihat, antara lain, sebagai suatu persiapan bagi struktur pekerjaan dan pendidikan juga bisa memberi peluang-peluang bagi individu untuk meningkatkan status pekerjaannya dibandingkan, misalnya, dengan status pekerjaan ayahnya. Dalam memperbandingkan status pekerjaan ayah dan anak, hal ini telah terjadi mobilitas antar-generasi. Mobilitas juga bisa terjadi dalam bentuk mobilitas intergenerasi (*intragenerational movement*), atau sejauh mana individu yang sama mengalami perubahan status dalam masa hidupnya sendiri.¹⁸

Terdapat dugaan sebelumnya bahwa bertambah tingginya taraf pendidikan makin besar kemungkinan mobilitas bagi anak-anak golongan rendah dan menengah. Hal ini tidak selalu benar jika pendidikan itu hanya

¹⁸Philip Robinson, *Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 286.

terbatas pada pendidikan tingkat menengah. Jadi, walaupun kewajiban belajar ditingkatkan hingga SMA, belumlah jaminan akan terjadi mobilitas akan meningkat. Pendidikan tinggi/universitas masih dapat memberikan peluang bagi mobilitas sosial, walaupun bagi lulusannya yang berijazah belum ada jaminan akan meningkatkan status sosialnya. Pendidikan tinggi/universitas masih selektif dan tidak semua orang tua yang mampu membiayai studi anak kuliah di perguruan tinggi.

Sistem seleksi yang sering kali menggunakan komputerisasi untuk menentukan lulus tidaknya anak didik masuk perguruan tinggi terutama perguruan tinggi negeri, sehingga objektivitas tetap terjaga. Lebih dari itu sistem komputerisasi tidak dipengaruhi oleh latar belakang orang tua dengan beragam lapisannya. Hal ini memberi peluang lebih luas bagi anak didik golongan rendah dan menengah untuk memasuki perguruan tinggi/universitas. Mobilitas sosial melalui saluran pendidikan pun tampak terbuka bagi semua lapisan masyarakat.

Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya mobilitas sosial melalui saluran pendidikan, pada dasarnya, sama dengan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya mobilitas sosial pada umumnya. Faktor pengaruh mobilitas sosial¹⁹ itu, antara lain:

1. *Perubahan kondisi sosial.*

Di mana kemajuan teknologi, misalnya, dapat memberi peluang kemungkinan timbulnya mobilitas sosial. Penggunaan internet di sekolah bukanlah suatu hal yang luar biasa. Di institusi pendidikan, para pendidik dan fasilitas penunjang pembelajaran sudah mulai banyak yang memiliki layanan internet. Perbedaan anak didik dari kalangan berbeda mulai direduksi dan dapat menggunakan internet bersama-sama. Pengetahuan mereka bertambah dan memungkinkan mereka untuk berprestasi dan akhirnya status sosial pun dapat meningkat pula, katakanlah sebagai anak didik cerdas yang berasal dari kalangan keluarga kurang mampu.

2. *Ekspansi teritorial dan gerak populasi.*

Ekspansi teritorial dan perpindahan penduduk yang membuktikan ciri fleksibilitas struktur stratifikasi dan mobilitas sosial. Misalnya, perkembangan kota, transmigrasi, bertambah, dan berkurangnya penduduk.

¹⁹Lihat: ("http://id.wikipedia.org/wiki/gerak_sosial", *op.cit*).

3. *Komunikasi yang bebas*

Situasi-situasi yang membatasi komunikasi antarstrata yang beragam akan memperkokoh garis pembatas di antara strata yang ada dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman di antara mereka dan akan menghalangi mobilitas sosial. Sebaliknya, pendidikan dan komunikasi yang bebas serta efektif akan memudahkan semua batas garis dari strata sosial dan merangsang mobilitas sekaligus menerobos rintangan yang menghadang.

4. *Pembagian kerja*

Terjadinya mobilitas bisa juga dipengaruhi oleh tingkat pembagian kerja yang ada. Jika tingkat pembagian kerja tinggi dan terspesialisasi maka mobilitas sosial akan menjadi lemah dan menyulitkan orang untuk bergerak dari satu strata ke strata yang lain karena spesialisasi pekerjaan menuntut keterampilan khusus. Kondisi ini dapat memacu anggota masyarakatnya untuk lebih giat berusaha agar dapat memperoleh status sosial tersebut.

5. *Tingkat fertilitas yang berbeda*

Kelompok masyarakat yang berlatar belakang tingkat sosial-ekonomi dan pendidikan rendah cenderung memiliki tingkat fertilitas lebih tinggi. Pada sisi lain, pada masyarakat berlatar belakang kelas sosial-ekonomi lebih tinggi cenderung membatasi tingkat reproduksi dan fertilitas. Dalam hal ini, orang yang berlatar belakang tingkat sosial-ekonomi dan pendidikan lebih rendah mempunyai kesempatan untuk banyak bereproduksi dan memperbaiki kualitas keturunan, dan sekaligus menunjukkan mobilitas sosial bisa terjadi.

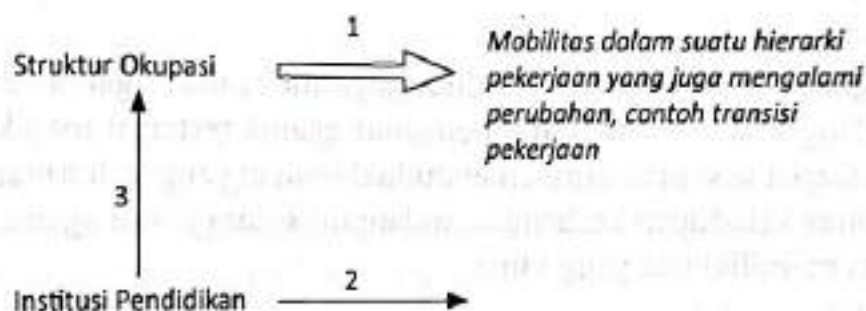
6. *Kemudahan dalam akses pendidikan.*

Jika kualitas pendidikan mudah didapat, mempermudah orang untuk melakukan mobilitas dengan bekal ilmu yang diperoleh saat menjadi anak didik. Sebaliknya, kesulitan dalam akses pendidikan bermutu, akan menjadikan orang yang tak memperoleh pendidikan yang bagus, kesulitan untuk mengubah status, akibat dari kurangnya ilmu pengetahuan.

Suatu hal yang menjadi perhatian penting dalam studi mobilitas sosial adalah antara *structural* dan *nonstructural social mobility*, merujuk kepada pergerakan-pergerakan yang terjadi sebelumnya oleh perubahan dalam bentuk perubahan struktur pekerjaan (misalnya, dalam relatif kelas-kelas tertentu, status kelompok-kelompok, dan lain-lain) dalam

suatu masyarakat tertentu, kemudian terhadap pergerakan-pergerakan tertentu yang melibatkan perubahan-perubahan.

Suatu asumsi yang dapat dinyatakan dalam terma ini adalah struktur pekerjaan merupakan suatu hal yang fundamental dalam menentukan bentuk dan jumlah mobilitas sosial dalam suatu masyarakat atau periode sejarah—yakni memproduksi mobilitas struktural (*structural mobility*)—dari perbedaan dalam institusi pendidikan, motivasi individu, dan lainnya—yakni sumber-sumber mobilitas nonstruktural (*nonstructural mobility*). Tetapi, meskipun kemudian kapasitas memengaruhi level mobilitas mungkin dibatasi, faktor nonstruktural seperti pendidikan berbeda, mereka juga bertindak untuk adanya perubahan bagi struktur pekerjaan, misalnya mendorong *up-grading* atau *occupational transition*, dengan menggantikan *collage graduate* untuk *nongraduate* atau *upgrading* lebih umum dalam status, isi dan materi pekerjaan tertentu. Seperti dapat dilihat pada gambar 10.1 berikut:



Gambar 10.1. Social Mobility (Mobilitas Sosial)

Gambar di atas menunjukkan: “ketika terjadi perubahan dalam struktur sosial dapat dilihat sebagai determinan utama dari kelanjutan/perkembangan peluang-peluang/kesempatan-kesempatan untuk mobilitas sosial. (1) institusi-institusi pendidikan bertindak sebagai terdepan dari mobilitas sosial yang terpenting dalam masyarakat modern, dan dapat memengaruhi siapa yang melakukan mobilitas. (2) institusi-institusi pendidikan. (3) juga perubahan-perubahan yang tampak pada struktur pendidikan.”²⁰

Sejumlah faktor yang dapat menghambat terjadinya mobilitas sosial dalam pendidikan,²¹ antara lain:

²⁰David Jary dan Julia Jary, *Dictionary of Sociology*...., *op.cit.*, hlm. 455.

²¹http://id.wikipedia.org/wiki/gerak_sosial, *ibid.*

1. Perbedaan kelas rasial

Seperti terjadi di Afrika Selatan pada masa lalu. Ketika itu, ras berkulit putih berkuasa dan tidak memberi kesempatan kepada mereka yang berkulit hitam untuk dapat duduk bersama-sama di pemerintahan sebagai penguasa, dan juga termasuk di sistem pendidikan. Sistem ini dinamakan *Apartheid* dan dianggap berakhir ketika Nelson Mandela, seorang kulit hitam, terpilih menjadi presiden Afrika Selatan. Agak mirip dengan kondisi etnis Aborigin di Australia belum memiliki peluang optimal dalam sistem pemerintahan dan pendidikan di Australia. Anak-anak Aborigin umumnya memiliki sekolah khusus yang disebut sekolah Aborigin. Sama halnya dengan etnis Mahowak di Canada (Amerika Utara) agak mirip kondisinya dengan etnis Aborigin, mereka memiliki perkampungan/desa dan sekolah khusus. Dilihat dari kondisi struktur sosial-ekonomi, pendidikan, dan politik, mereka hingga kini belum menempatkan posisi sejajar dengan orang kulit putih (*white colour*).

2. Agama

Negara yang mayoritas penduduknya menganut agama tertentu, Kadang kala, mereka yang menganut agama tertentu mereka akan mendapat kesulitan untuk menduduki tempat yang terhormat dalam realitas kehidupan berbangsa, walaupun secara resmi agama minoritas memiliki hak yang sama.

3. Diskriminasi kelas

Dalam sistem kelas terbuka dapat menghalangi mobilitas sosial ke atas. Hal ini terbukti dengan adanya pembatasan status organisasi tertentu dengan berbagai syarat dan ketentuan, sehingga hanya sedikit orang yang mampu memperolehnya. Misalnya, ketika penerimaan siswa unggulan dibatasi hanya 120 orang siswa prestasi terbaik yang lupus, sehingga Anaya 120 orang yang mendapat kesempatan untuk menaikkan status sosialnya menjadi siswa unggulan di kota tertentu.

4. Kemiskinan

Kemiskinan dapat menghambat seorang untuk berkembang dan mencapai status sosial tertentu. Misalnya, seorang anak memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya karena orang tuanya tidak dapat lagi membiayai sekolahnya. Sehingga, anak tadi tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan status sosialnya.

5. *Perbedaan jenis kelamin*

Dalam masyarakat, perbedaan jenis kelamin, juga berpengaruh terhadap prestasi, kekuasaan, status sosial, dan kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan status sosial. Dalam bidang pendidikan, jika ada siswa perempuan dan siswa laki-laki yang lebih cerdas kadangkala perlakuan berbeda juga terjadi, misalnya anak laki-laki lebih diutamakan untuk menjadi ketua kelas.

Jadi, dapat dijelaskan bahwa mobilitas sosial merupakan perpindahan seorang atau kelompok dari status sosial yang satu ke status sosial yang lain. Mobilitas sosial dalam pendidikan adalah perpindahan seorang atau kelompok sosial dari status yang satu ke status yang lain dalam ruang lingkup pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu jalan" untuk mencapai kedudukan yang lebih baik dalam masyarakat. Dengan pendidikan, status sosial seorang dapat meningkat, dan sekaligus sebagai salah satu saluran atau sarana untuk mobilitas sosial, selain lembaga agama, angkatan bersenjata, perkawinan, organisasi politik, ekonomi dan keahlian. Sejumlah faktor yang dapat memengaruhi mobilitas sosial dalam pendidikan yakni: perubahan kondisi sosial, ekspansi teritorial dan gerak populasi, komunikasi yang bebas, pembagian kerja, tingkat fertilitas yang berbeda, dan akses pendidikan. Selain itu, ada pula faktor penghambatnya, antara lain: perbedaan kelas rasial, agama, diskriminasi kelas, kemiskinan, dan perbedaan jenis kelamin.

berbagai urusan dalam kehidupan keluarga, sehingga apabila suami tidak bekerja atau tidak mempunyai penghasilan, suatu keluarga secara ekonomi akan mengalami lumpuh. Dalam perkembangannya, pada masyarakat modern sekarang suami tidak selalu merupakan posisi yang menentukan jalannya kehidupan keluarga.

Laju kecepatan perubahan sosial tidak selalu sama antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Misalnya antara masyarakat desa dengan masyarakat kota. Demikian juga antara masyarakat yang terisolasi (terasing) dengan masyarakat terbuka mempunyai hubungan sosial dengan masyarakat lain. Masyarakat terisolasi mempunyai laju perubahan yang sangat lambat, sehingga sering disebut *masyarakat statis*. Disebut *masyarakat statis* tentu saja bukan berarti tidak mengalami perubahan sama sekali atau mengalami stagnasi (kemandegan), tetapi perubahan yang terjadi berlangsung dengan lambatnya sehingga hampir tidak menunjukkan gejala perubahan. Sedangkan masyarakat yang terbuka hubungannya dengan masyarakat luas mengalami perubahan yang berlangsung dengan cepat, sehingga sering disebut masyarakat dinamis. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, perubahan sosial akan mengubah struktur dan fungsi dari unsur-unsur sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, perubahan sosial dalam masyarakat mengandung pengertian ketidaksesuaian di antara unsur-unsur sosial yang saling berbeda dalam masyarakat sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak serasi fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan.

Struktur sosial merupakan bentukjalinan di antara unsur-unsur sosial yang pokok dalam masyarakat yang menunjukkan pada bentuk seluruh jaringan hubungan antarindividu dalam masyarakat di mana terjalin interaksi dan komunikasi sosial. Sedangkan sistem sosial menunjukkan pada bagaimana hubungan antara unsur-unsur sosial dalam masyarakat sehingga membentuk suatu kebulatan (totalitas) yang berfungsi.

Perubahan sosial, dapat dikatakan bahwa perubahan pada segi struktural masyarakat seperti pola-pola perilaku dan pola interaksi antar-anggota masyarakat; perubahan pada segi kultural masyarakat seperti nilai-nilai, sikap-sikap, serta norma-norma sosial masyarakat; perubahan di berbagai tingkat kehidupan manusia mulai dari tingkat individual, keluarga, masyarakat hingga ke tingkat masyarakat dunia; perubahan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan (*disequilibrium*) dalam suatu sistem masyarakat.

Dilihat dari bentuknya, perubahan sosial dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk, baik perubahan lambat dan perubahan cepat. *Pertama*, perubahan memerlukan waktu lama, dan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat yang dinamakan evolusi. Pada evolusi perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Perubahan tersebut terjadi karena usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan dan kondisi baru, yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Rentetan berbagai perubahan tersebut, tidak perlu sejalan dengan rentetan kejadian di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan.

Ada sejumlah teori tentang evolusi, yang dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori:

1. *Unilinear Theories of Evolution.*

Teori ini berpendapat bahwa manusia dan masyarakat (termasuk kebudayaannya) mengalami perkembangan sesuatu melalui tahap-tahap tertentu, bermula dari bentuk-bentuk sederhana, kemudian bentuk yang kompleks sampai pada tahap sempurna. Pelopor teori *evolution* antara lain: August Comte, dan Herbert Spencer. Pitirim A. Sorokin (1928) menyatakan bahwa masyarakat berkembang mulai tahap-tahap yang masing-masing didasarkan pada suatu sistem kebenaran. Pada tahap pertama dasarnya kepercayaan, tahap kedua dasarnya adalah indra manusia, dan tahap terakhir adalah kebenaran.

2. *Universal Theory of Evolution.*

Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidaklah perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Teori ini mengemukakan bahwa kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi yang tertentu. Prinsip-prinsip teori ini diuraikan oleh Herbert Spencer yang antara lain mengatakan bahwa masyarakat merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen ke kelompok heterogen baik sifat maupun susunannya.

3. *Multilined Theories of Evolution.*

Teori ini lebih menekankan pada penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat, misalnya, mengadakan penelitian perihal pengaruh perubahan sistem pencaharian dari sistem berburu ke pertanian, terhadap sistem kekeluargaan dalam masyarakat yang bersangkutan dan seterusnya.

Dalam perkembangannya dewasa ini, agak sulit untuk menentukan apakah suatu masyarakat berkembang melalui tahap-tahap tertentu dan sukar dipastikan apakah tahap yang dicapai dewasa ini merupakan tahap terakhir. Juga sulit menentukan ke arah mana masyarakat akan berkembang, apakah pasti menuju ke bentuk kehidupan sosial yang lebih sempurna jika dibandingkan dengan masa sebelumnya.

Perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi dengan cepat dan menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat (yaitu lembaga-lembaga kemasyarakatan) lazimnya dinamakan revolusi. Unsur-unsur revolusi adalah adanya perubahan yang cepat, dan perubahan tersebut mengenai dasar atau sendi pokok kehidupan masyarakat. Suatu revolusi dapat berlangsung dengan didahului oleh suatu pemberontakan (*revolt, rebellion*) yang kemudian menjadi revolusi. Pemberontakan para tani di Banten pada 1888 misalnya, didahului dengan kekerasan, sebelum menjadi revolusi yang mengubah berbagai sendi kehidupan masyarakat. Secara sosiologis, agar suatu revolusi dapat terjadi, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, di mana harus ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan.

Di masyarakat harus ada perasaan tidak puas dengan keadaan, dan harus ada keinginan untuk mencapai perbaikan dengan perubahan keadaan tersebut; adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat tersebut; pemimpin yang dapat menampung keinginan masyarakat untuk kemudian merumuskan serta merumuskan rasa tidak puas tadi menjadi program dan arah gerakan; pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat. Artinya bahwa tujuan tersebut terutama sifatnya konkret dan dapat dilihat oleh masyarakat. Diperlukan juga suatu tujuan yang abstrak, misalnya, perumusan sesuatu ideologi tertentu; dan harus ada "momentum", yaitu saat di mana segala keadaan dan faktor sudah tepat dan baik untuk memulai suatu gerakan. Apabila "momentum" keliru, maka revolusi dapat gagal.

Kedua, perubahan kecil dan perubahan besar. Sedikit sulit untuk merumuskan masing-masing pengertian di atas, karena batas-batas pembedaannya sangat relatif. Sebagai pegangan dapatlah dikatakan perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Perubahan mode pakaian, misalnya, tak akan membawa pengaruh apa-apa bagi masyarakat dalam keseluruhannya, karena tidak

mengakibatkan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sebaliknya, suatu proses industrialisasi yang berlangsung pada masyarakat agraris, misalnya, merupakan perubahan yang akan membawa pengaruh besar pada masyarakat. Berbagai lembaga-lembaga kemasyarakatan akan ikut terpengaruh misalnya hubungan kerja, sistem milik tanah, hubungan kekeluargaan stratifikasi masyarakat dan seterusnya.

Ketiga, perubahan yang dikehendak (*intended change*) atau perubahan yang direncanakan (*planned-change*) dan perubahan yang tidak dikehendaki (*unintended-change*) atau perubahan yang tidak direncanakan (*unplanned-change*). Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki perubahan dinamakan *agent of change*, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. *Agent of change* memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Dalam melaksanakannya, *agent of change* langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan. Bahkan mungkin menyiapkan pula perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan *agent of change* tersebut. Cara-cara memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan rekayasa sosial (*social engineering*) atau sering pula dinamakan perencanaan sosial (*social planning*).¹

Perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan, merupakan perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki, berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Jika perubahan yang tidak dikehendaki tersebut berlangsung bersamaan dengan suatu perubahan yang dikehendaki, perubahan itu mungkin mempunyai pengaruh yang demikian besarnya terhadap perubahan yang dikehendaki.

Secara umum para ahli sosiologi membedakan bentuk perubahan sosial (*social change*) menjadi dua: (1) *progress*, yaitu perubahan sosial yang membawa ke arah kemajuan sehingga bisa menguntungkan

¹Abdullah Idi, "Bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan S1 & S2," *op.cit.*, hlm. 39.

dalam kehidupan sosial bagi masyarakat. Bentuk *progress* ini dibedakan menjadi: *planned progress* (kemajuan yang dikehendaki), contohnya adalah pembangunan listrik masuk desa, intensifikasi pertanian, modernisasi desa, dan lain-lain; *unplanned progress* (kemajuan yang tidak dikehendaki) contohnya adalah akibat gunung merapi meletus menyebabkan warga masyarakat makin makmur dengan sawah pertanian yang bertambah subur serta tambah pasir semakin melimpah untuk ditambah; (2) *regress*, yaitu perubahan sosial yang membawa ke arah kemunduran sehingga kurang menguntungkan bagi masyarakat seperti: perang yang berakibat hancurnya barang-barang, perabot, dan sarana infrastruktur masyarakat serta binasanya ribuan hewan bahkan jiwa manusia.

Dilihat dari proses terjadinya perubahan sosial, proses awal perubahan sosial adalah: *Pertama*, komunikasi (*communication*), di mana melalui kontak komunikasi, unsur-unsur baru dapat menyebar, baik berupa ide, gagasan, keyakinan, maupun kebendaan. Dan proses penyebaran unsur kebudayaan dari satu masyarakat kepada masyarakat lain disebut proses difusi. Proses berlangsungnya difusi akan mendorong terjadinya akulturasi dan asimilasi.² Dalam proses difusi berlangsung, ada banyak kejadian yang beragam masuk unsur-unsur kebudayaan baru dari satu kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat lainnya. Beberapa kejadian tersebut adalah : secara damai; melalui paksaan atau kekerasan; melalui simbiotik yaitu melalui proses hidup secara berdampingan. Ada tiga macam proses simbiotik: *mutualistik*, proses simbiotik yang saling menguntungkan; *komensalistik*, proses simbiotik di mana satu pihak untung sedang pihak lainnya tidak untung dan tidak rugi; dan *parasitistik*, proses simbiotik di mana yang satu untung dan yang lain dirugikan.

Kedua, akulturasi (*acculturation*), yang merupakan proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar secara lambat dengan tidak menghilangkan sifat khas kepribadian kebudayaan sendiri. Contohnya, budaya *selamatan* merupakan bentuk akulturasi antara budaya lokal dengan Jawa dengan budaya Islam.

Ketiga, asimilasi (*assimilation*), berupa suatu proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru yang berbeda. Proses asimilasi akan berlangsung lancar dan cepat apabila ada faktor-faktor pendorong, seperti: adanya toleransi antarkebudayaan yang berbeda; adanya kesempatan yang sama

²Difusi dapat dibedakan menjadi dua tipe: *intra society diffusion*, yaitu difusi yang terjadi di antara anggota dan individu dalam satu masyarakat; dan *inter society diffusion* yaitu difusi yang terjadi dari satu masyarakat ke masyarakat lain.

dalam bidang ekonomi; adanya sikap menghargai terhadap hadirnya orang asing dan kebudayaan yang dibawa; adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa; adanya unsur-unsur kebudayaan yang sama; terjadinya perkawinan campuran (*amalgamasi*); adanya musuh bersama dari luar. Adapun faktor-faktor yang bisa menjadi menghambat proses asimilasi seperti: letak geografis yang terisolasi; rendahnya pengetahuan tentang kebudayaan lain; adanya ketakutan terhadap kebudayaan lain; adanya sikap superior yang menilai tinggi kebudayaan sendiri; adanya perbedaan ciri-ciri yang mencolok; perasaan *in-group* yang kuat; dan adanya perbedaan kepentingan.

Dilihat dari dampak perubahan sosial, tidak satu pun perubahan sosial yang tidak membawa pengaruh bagi masyarakat. Perubahan sosial merupakan perubahan dalam hubungan sosial atau perubahan terhadap kesinambungan hubungan sosial. Perubahan sosial tidak hanya membawa pengaruh positif bagi kehidupan masyarakatnya, tetapi juga berdampak negatif. Dampak atau akibat positif dari perubahan sosial adalah semakin kompleksnya alat dan perlengkapan dalam memenuhi kebutuhan hidup, majunya teknologi di berbagai bidang kehidupan, industri berkembang maju, tercipta stabilitas politik, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan sebagainya. Di pihak lain, adanya perubahan sosial yang beberapa di antaranya adalah adanya modernisasi dan globalisasi³ yang terjadi dalam masyarakat, selain membawa pengaruh positif juga membawa dampak negatif.

Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuknya yang paling mutakhir. Negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang lain, seperti budaya dan agama. Ada pula yang berpandangan bahwa globalisasi adalah suatu

³Globalisasi diambil dari kata *global*, yang maknanya ialah universal. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekadar definisi kerja (*working definition*), sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai sesuatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat.

proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronik. Contoh globalisasi dalam dunia perdagangan internasional, di mana penggunaan sistem mata uang tunggal di Eropa yang disebut Euro; di kawasan Asia Pasifik berkembang *Asia Pacific Trade Association (AFTA)*.

Beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia, antara lain: (a) perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya, sementara melalui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda; (b) pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam *World Trade Organization (WTO)*; (c) peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa (terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olah raga internasional). Saat ini, kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan; (d) meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain.

Faktor yang sangat berpengaruh bagi terjadinya perubahan sosial budaya sebagai akibat globalisasi adalah faktor nilai budaya dari luar, seperti: senantiasa meningkatkan pengetahuan; patuh pada hukum; kemandirian; kemampuan melihat ke depan; keterbukaan; etos kerja; rasionalisasi; efisiensi dan produktivitas; keberanian bersaing, bertanggung jawab dan keberanian menanggung risiko.

Sementara itu, sejumlah saluran proses globalisasi yang umumnya adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan, seperti: lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan; lembaga keagamaan; lembaga perniagaan dan industri internasional; saluran komunikasi dan telekomunikasi internasional; turisme atau wisata mancanegara; lembaga internasional yang mengatur peraturan-peraturan internasional; dan lembaga kenegaraan baik dalam lingkungan diplomatik secara bilateral maupun regional.

Kecenderungan dan respons masyarakat terhadap globalisasi, dapat dikategorikan: *pertama*, masyarakat yang menerima arus globalisasi, yakni

para individu atau kelompok masyarakat dari kalangan generasi muda yang memiliki kecenderungan terbuka menerima unsur-unsur perubahan dan modernisasi; individu atau kelompok masyarakat yang berkedudukan atau status sosialnya sudah mapan seperti ahli ilmu pengetahuan, ahli politik dan pemerintahan serta kalangan bisnis; individu atau kelompok masyarakat perkotaan terutama yang telah menikmati berbagai media komunikasi dan informasi globalisasi, baik media elektronik seperti televisi, film, radio, komputer maupun media cetak, seperti majalah, tabloid dan koran. Kedua, masyarakat yang menolak arus globalisasi, yakni individu atau kelompok masyarakat tertinggal yang berada di daerah terasing yang kontakannya dengan budaya luar negeri terbatas. Ketiga, yakni para individu atau kelompok masyarakat dari kalangan generasi tua mereka mempunyai kecenderungan untuk mencurigai unsur-unsur globalisasi tersebut. Keempat, yakni para individu atau kelompok masyarakat yang belum mapan dan belum siap menerima perubahan-perubahan mental maupun fisik. Unsur-unsur globalisasi yang sukar diterima masyarakat meliputi: unsur budaya yang sukar disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat; teknologi yang rumit dan mahal harganya; unsur budaya luar yang menyangkut paham ideologi politik dan keagamaan; unsur globalisasi yang mudah diterima masyarakat; unsur globalisasi yang mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat; teknologi tepat guna, yaitu unsur teknologi yang secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat pemakainya.

Dilihat dari kecenderungan globalisasi terhadap budaya Indonesia dapat berdampak positif dan negatif. Dampak positif dari globalisasi, yaitu: masyarakat berwawasan semakin luas; masyarakat dapat mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa penting di luar negeri; masyarakat mengenal berbagai macam kebudayaan luar negeri; masyarakat dapat mengembangkan kebudayaan bangsa yang sesuai dengan peradaban kita dengan konsep luar negeri; masyarakat bersifat kritis dan aktif terhadap permasalahan aktual yang menyangkut budaya; dan globalisasi akan memperkaya unsur kebudayaan Indonesia.

Sedangkan, dampak negatif dari globalisasi yaitu terjadinya *culture shock*, di mana goncangan budaya bangsa akibat informasi penonjolan budaya asing; terjadi *culture lag*, yaitu ketimpangan budaya akibat perbedaan masyarakat maju di kota-kota dengan masyarakat desa di daerah terpencil; memperkecil unsur-unsur budaya asli Indonesia karena ada desakan budaya asing; masyarakat cenderung bersifat konsumerisme;

masyarakat cenderung melakukan pemborosan dan bersikap tidak jujur; dan kurang disiplin pribadi atau kelompok yang akibatnya masyarakat tidak mau kerja sama.

Perubahan sosial berhubungan dengan masuknya modernisasi dan globalisasi ke negara Indonesia. Modernisasi adalah suatu bentuk perubahan sosial, biasanya merupakan perubahan sosial yang terarah (*directed change*) dan didasarkan pada suatu perencanaan. Globalisasi merupakan proses terbentuknya sebuah sistem organisasi dan komunikasi antara masyarakat seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Globalisasi merupakan sebuah proses yang di dalamnya batas-batas negara luhur dan tidak penting lagi dalam kehidupan sosial. Modernisasi dan globalisasi membawa perubahan dalam masyarakat yang menjadi objeknya. Dampak yang ditimbulkan dari adanya globalisasi tidak selalu positif, tetapi banyak juga dampak negatif yang disebabkan oleh globalisasi.

Sebagian kalangan berpendapat di era globalisasi atau memasuki Milenium III, berbagai persoalan dan perubahan sosial yang dihadapi (masyarakat) begitu *unpredictability*,⁴ di mana kecenderungan ketidakmampuan untuk memperhitungkan apa yang akan terjadi. Hal ini menuntut adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik. Perubahan itu sendiri didorong oleh tiga faktor, yakni: perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kependudukan, dan faktor ekologi atau lingkungan hidup.⁵

Kuntowijoyo (1997) ada tiga tahapan perubahan masyarakat. *Pertama*, tahap masyarakat ganda, yakni ketika terpaksa ada pemilahan antara masyarakat madani (*civil society*) dengan masyarakat politik (*political society*) atau antara masyarakat dengan negara. Karena adanya pemilahan ini, maka dapat terjadi negara tidak memberikan layanan dan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. *Kedua*, tahap masyarakat tunggal, yaitu ketika masyarakat madani sudah berhasil dibangun. *Ketiga*, tahap masyarakat etis (*ethical society*) yang merupakan tahap akhir dari perkembangan tersebut.⁶ Masyarakat etis, yakni masyarakat yang dibentuk oleh kesadaran etis, bukan oleh kepentingan

⁴Muis Sad Iman. *Pendidikan Partisipatif*. (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), hlm. 2.

⁵*Ibid.*, hlm. 1.

⁶Faisal Jalal dan Dedi Supriadi (eds.), *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), hlm. 42.

bendawi. Kesadaran etis ini pun mengimplikasikan keragaman nilai etis yang perlu dicari kompatibilitasnya dalam nilai-nilai universal dan nilai-nilai Pancasila.⁷

Alvin Toffler (buku *Future Shock* tahun 1970) mengatakan bahwa garis perkembangan peradaban manusia terangkum ke dalam tiga gelombang (*third wave*). Gelombang pertama (*first wave*) disebut fase pertanian, yang menggambarkan betapa bidang pertanian telah menjadi basis peradaban manusia. Pada fase ini, keberhasilan dan kekuasaan ditentukan oleh tanah dan pertanian. Gelombang kedua (*second wave*) disebut sebagai fase industri, lantaran industri menjadi poros dan sumber pengaruh dan kekuasaan. Peradaban manusia pun didominasi oleh para penguasa industri yang umumnya terdiri kaum konglomerat dan pemilik modal. Gelombang ketiga (*third wave*) disebut fase informasi. Menempatkan informasi sebagai primadona dan penentu kesuksesan. Toffler pun membuat semacam prognosis, bahwa "siapa yang menguasai informasi maka ia akan menguasai kehidupan."⁸

Jika melihat ketiga faktor perubahan dan perkembangan peradaban seperti diramalkan Toffler sejak 1970, sekarang kita berada pada fase ketiga, yaitu fase informasi. Indikatornya adalah maraknya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia, sebagai salah satu faktor pendorong perubahan sosial dan peradaban manusia. Dalam fase ini, siapa yang menguasai informasi, baik ilmu pengetahuan dan teknologi, dia akan menguasai dunia. Bangsa Indonesia yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) karena mayoritas penduduknya belum menguasai informasi dan sulit mengakses pendidikan yang modern (maju), maka bangsa akan mengalami ketinggalan dibandingkan dengan negara lainnya.

Seperti telah diungkapkan terdahulu bahwa perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Hirschman mengatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari perubahan.

Ada pula beberapa faktor yang menghambat terjadinya perubahan, misalnya kurang intensifnya hubungan komunikasi dengan masyarakat

⁷*Ibid.*, hlm. 43

⁸Abdullah Idi & Toto Suharto. *Revitalisasi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. vii-viii.

lain; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang lambat; sifat masyarakat yang sangat ada kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat dalam masyarakat; prasangka negatif terhadap hal-hal yang baru; rasa takut jika terjadi kegoyahan pada masyarakat bila terjadi perubahan; hambatan; dan pengaruh atau kebiasaan.⁹

Ahli sosiologi telah mengumpulkan dan menganalisis berbagai studi mengenai perubahan sosial (*social change*). Dari berbagai studi tersebut dapat digolongkan penelaahan perubahan sosial tersebut berputar kepada enam persoalan pokok, yaitu:

1. *Apakah sebenarnya yang berubah?* Pertanyaan ini tertuju kepada struktur sosial yang mengalami berbagai perubahan. Struktur sosial misalnya keluarga. Lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga keagamaan, lembaga-lembaga politik dan bermacam-macam jenis lembaga yang ada di dalam suatu masyarakat. Perubahan tersebut ada yang lambat ada pula yang berjalan dengan cepat.
2. *Bagaimana hal tersebut itu berubah?* Perubahan sosial tersebut tentunya mengambil berbagai bentuk perubahan sesuai dengan kondisi di mana perubahan terjadi.
3. *Apa tujuan perubahan itu?* Sudah tentu perubahan sosial yang terjadi bukanlah suatu perubahan yang otomatis dan mekanistik, tetapi tentunya mempunyai suatu tujuan.
4. *Seberapa cepat perubahan itu?* Perubahan sosial ada yang secara revolusioner, mungkin ada yang berjalan secara bertahap. Perubahan secara bertahap pun berjenis-jenis, ada yang cepat ada yang lambat.
5. *Mengapa terjadi perubahan?* Seperti yang telah kita lihat dalam pertanyaan nomor 3, perubahan sosial selalu mempunyai tujuan. Oleh sebab itu, tentunya ada sebab-sebab mengapa terjadi perubahan.
6. *Faktor apa saja yang berperan di dalam perubahan?* Suatu perubahan sosial mengenai kehidupan bersama manusia tentunya mempunyai berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu jaringan dari berbagai faktor yang telah menyebabkan perubahan sosial tersebut. Pertanyaan 2, 3, dan 4 memerlukan tinjauan historis.¹⁰

⁹<http://www.id.wikipedia.org>, *op.cit.*

¹⁰H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 3-4.

Dari sini tampak bahwa manusia adalah faktor utama yang memengaruhi terjadinya sebuah perubahan. Pada dasarnya, manusia tak lepas dari perkembangan individu baik karena pergumulan/interaksi antar sesama maupun proses belajar ataupun mengajar. Misalnya, ketika seorang mengenal komputer, maka dia menggunakan komputer sebagai alat menulis yang sebelumnya menggunakan mesin ketik manual. Dalam hal ini terjadi perubahan seseorang setelah dia mengenal komputer dia mulai melupakan mesin ketik manual.

Sejumlah teori perubahan sosial yang dapat dikemukakan, antara lain:

1. *Linear Theory*, yang melalui tahapan-tahapan (*stages*) dan selalu menuju ke depan; misalnya adanya perubahan masyarakat, dari masyarakat buta huruf menjadi masyarakat melek huruf.
2. *Spiralic Theory*, yang melalui pengulangan-pengulangan diiringi kematangan di dalamnya; misalnya pandangan masyarakat dalam berpolitik dengan sistem multipartai.
3. *Cyclical Theory*, melalui putaran panjang yang pada suatu saat menemukan *track* yang pernah dilalui; misalnya kembalinya masyarakat Barat kepada hal-hal yang natural dalam pengobatan, keyakinan, dan sebagainya.
4. *Teori Historis*, kemajuan masyarakat mengacu masyarakat maju berdasar zamannya. Episentrumnya berpindah-pindah; dari Sungai Indus (India), Sungai Yang Tse (Cina), Lembah Sungai Nil (Mesir), Yunani-Romawi, Eropa Barat, Amerika Utara, sampai Jepang.
5. *Teori Relativisme*, kemajuan masyarakat mengacu masyarakat Barat, khususnya AS. Episentrumnya Barat. Modernisasi = westernisasi. Kriteria: teknologi maju, organisasi sosial mendukung, ekonomi maju, dan politik mapan.
6. *Teori Analitik*, kemajuan masyarakat ditandai dari berbagai aspek: ekonomi, politik, keluarga, mobilisasi sosial, dan agama yang semuanya itu bertumpu pada perkembangan iptek (pendidikan).

Teori-teori ini memberikan gambaran mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial (*social change*) yang terjadi di masyarakat. Misalnya *Linear Theory*, dengan melalui beberapa tahap menuju ke depan, atau menuju perubahan yang lebih baik. Contohnya perubahan masyarakat yang awalnya buta huruf menjadi melek huruf setelah adanya pendidikan.

B. Pendidikan dan Perubahan Sosial

Pertama, perubahan sosial ditinjau dari pendidikan tradisional, kita lihat pedagogik tradisional memandang lembaga pendidikan sebagai salah satu dari struktur sosial dan kebudayaan dalam suatu masyarakat. Lembaga pendidikan, seperti sekolah perlu disiapkan agar lembaga tersebut berfungsi sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi. Apabila lembaga sekolah tidak dapat mengikuti perubahan sosial maka dia kehilangan fungsinya dan kemungkinan besar dia ditinggalkan masyarakat.¹¹

Sebagai lembaga sosial, proses belajar di sekolah disesuaikan dengan fungsi dan peranan lembaga pendidikan. Fungsi sekolah ialah mentransmisikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan kebudayaan pada saat itu. Di dalam pedagogik tradisional, tempat individu adalah sebagai objek perubahan sosial. Individu tersebut mempelajari peranan yang baru di dalam kehidupan sosial yang berubah. Sekolah adalah tempat yang memperoleh legitimasinya dari kehidupan masyarakat atau pemerintah yang mempunyainya. Dalam pendekatan perencanaan pendidikan, kita mengenal empat pendekatan: (1) *social demand approach* (pendekatan kebutuhan sosial); (2) *man power approach* (pendekatan ketenagakerjaan); (3) *cost and benefit* (pendekatan untung-rugi); (4) *cost effectiveness* (efektivitas). Keempat pendekatan ini mencoba memberikan alternatif pendekatan perencanaan pendidikan agar sesuai dengan perubahan sosial di lingkungan sekitarnya. Misalnya di suatu daerah lebih banyak dibutuhkan tenaga kerja dalam bidang teknik, maka dapat mendirikan sekolah dengan pendekatan perencanaan *man power Approach*, seperti: STM, SMK.¹²

Kedua, perubahan sosial ditinjau dari pedagogik modern (pedagogik transformatif). Titik tolak dari pedagogik transformatif ialah "individu-yang-menjadi." Hal ini berarti seorang individu hanya dapat berkembang di dalam interaksinya dengan tatanan kehidupan sosial budaya di mana dia hidup. Individu tidak dapat berkembang apabila diisolasi dari dunia sosial budaya di mana dia hidup. Adanya suatu pengakuan peran aktif partisipatif dari individu yang menjadi dalam tatanan kehidupan sosial dan budayanya. Individu bukanlah sekadar menerima nilai-nilai tersebut hanya dapat dimilikinya melalui peranannya yang aktif partisipatif di dalam aktivitas sosial budaya dalam lingkungannya. Jadi, berbeda dengan pandangan pedagogik tradisional yang melihat individu sebagai suatu makhluk yang pasif reaktif, yang hanya berkembang karena

¹¹H.A.R. Tilaar. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*, op.cit., hlm. 5.

¹²*Ibid.*, hlm. 5.

pengaruh-pengaruh dari luar, termasuk pengaruh dari perubahan sosial yang terjadi dalam lingkungannya.

Pandangan pedagogik transformatif terhadap individu bukanlah sebagai suatu *entity* yang telah jadi, tetapi yang sedang menjadi. Individu mempunyai peran emansipatif di dalam kehidupan sosial budaya, termasuk melalui proses pendidikan dalam lingkungan keluarga (*batih*) dan sekolah. Di dalamnya peranannya yang emansipatif tersebut maka individu bukan hanya sebagai objek dari perubahan sosial, tetapi sekaligus pula berperan sebagai faktor dari pengubah dan pengarah dari perubahan sosial¹³ atau sebagai agen perubahan (*the agent of social change*).

Dalam pendidikan transformatif, peserta didiklah yang berperan terjadinya perubahan dalam diri mereka. Adapun peran guru hanyalah sebagai pendorong dan motivator. Dalam hal ini, kita ingat filosofi Ki Hadjar Dewantara yang berbunyi: *Tut Wuri Handayani* artinya dari belakang memberikan dorongan dan arahan. Hal ini mempunyai makna yang kuat tentang peran dan fungsi guru. Para guru perlu berperan sebagai pendorong atau motivator. Mereka juga perlu berperan sebagai pengarah atau pembimbing yang tidak membiarkan peserta didik melakukan hal yang kurang sesuai dengan tujuan pendidikan. Dengan demikian, para guru perlu menjadi fasilitator agar dorongan dan bimbingan dapat terwujud dalam perubahan perilaku peserta didik.¹⁴

Kalau di atas telah disinggung berbagai persoalan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat maupun di lingkungan lembaga pendidikan (sekolah), baik pendidikan tradisional maupun modern, peran pendidikan nasional sebagai pendorong perubahan sosial terlihat dalam UU Sisdiknas 2003 Pasal 3:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹⁵

¹³*Ibid.*, hlm. 6.

¹⁴Ella Yulaelawati. *Kurikulum dan Pembelajaran. Filosofi, Teori, dan Aplikasi*. (Bandung: Pakar Ray, 2004), hlm. 2.

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru & Dosen, Dilengkapi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Buku Teks Pelajaran, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2006, hlm.58.

Dalam UU Sisdiknas di atas, tampak bahwa fungsi pendidikan nasional sebagai salah satu faktor perubahan sosial atau pengembangan potensi/kompetensi peserta didik. Perubahan-perubahan tersebut adalah pengembangan kemampuan (baik intelektual maupun interaksi sosial); pembentukan watak; pembentukan peradaban bangsa yang bermartabat di mata bangsa lain; dan mencerdaskan bangsa kehidupan bangsa; dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sebagai antisipasi perubahan sosial yang senantiasa dinamis dan mondial, diupayakan suatu persiapan generasi masa depan yang dapat hidup sesuai dengan zamannya. Karena itu, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, diperlukan standar nasional pendidikan sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setidaknya terdapat delapan standar nasional pendidikan: standar isi; standar proses; standar kompetensi lulusan; standar pendidik dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; standar pembiayaan; dan standar penilaian pendidikan.¹⁶

Jadi, dengan melihat nilai-nilai perubahan sosial yang terangkum dalam fungsi pendidikan nasional, dapat dipahami bahwa pendidikan nasional memiliki muatan nilai sebagai pendorong terjadi perubahan sosial, khususnya pengembangan potensi/kompetensi peserta didik sebagai salah satu bagian dari masyarakat (sosial).

Sebagaimana pandangan pendidikan transformatif terhadap individu bukanlah sebagai suatu *entity* yang telah jadi, tetapi yang sedang menjadi. Individu mempunyai peran emansipatif di dalam kehidupan sosial budaya, termasuk melalui proses pendidikan dalam lingkungan keluarga (*batih*) dan sekolah. Di dalam peranannya yang emansipatif tersebut, individu bukan hanya sebagai objek dari perubahan sosial, tetapi sekaligus sebagai faktor dari pengubah dan pengarah dari perubahan sosial.

¹⁶Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, terutama Bab I Pasal 1 dan Bab II Pasal 2. Penjelasan lebih lanjut tentang Standar Nasional Pendidikan, dapat dilihat pada: Lampiran 2.

Keberadaan pendidikan sebagai faktor perubahan sosial, peranan pendidik/guru memiliki peranan strategis dalam mewujudkan anak didik agar siap dalam menghadapi perubahan sosial yang diharapkan. Sebagaimana diungkapkan Amanda Coffey (2001) bahwa pendidik/guru dari hari ke hari bekerja untuk sekolah, sebagai kunci pelaku implementasi (*implementers*) kebijakan pendidikan. Sebagai aktor sosial yang utama dalam pendidikan, pendidik memiliki tanggung jawab dalam melengkapi praktik pedagogik sebagaimana halnya transmisi pengetahuan dan keterampilan. Mereka juga bertanggung jawab terhadap manajemen ruangan kelas. Pendidik menempati posisi terdepan dalam kebijakan dan perubahan sosial.¹⁷

Karena pendidikan, sebagai suatu proses sosial, dan terdapat banyak jenis masyarakat, suatu kriteria untuk mengkritisi dan membangun pendidikan berimplikasi pada suatu masyarakat yang ideal. Terdapat dua hal penting dalam mengukur suatu bentuk masyarakat yang dikatakan ideal adalah sejauh mana keinginan (*interest*) dari suatu kelompok dapat diperoleh semua anggota kelompok masyarakat tersebut, dan pemenuhan serta kebebasan dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan dengan kelompok masyarakat di mana suatu perubahan sosial tanpa mengakibatkan ketidakteraturan (*disorder*). Dalam teks klasik, tulisan John Dewey (2006), dalam tulisannya berjudul *The Democratic Conception in Education*, dalam Hugh Lauder et.al. (eds.) (2006) diungkapkan:

*An undesirable society, in other words, is one which internally and externally sets up barriers to free intercourse and communication of experience. A society which makes provision for participation in its good of all its members on equal terms and which secures flexible readjustment of its institutions through interaction which gives individuals as personal interest in social relationships and control, and the habits of mind which secure social changes without introducing disorder.*¹⁸

Indonesia, dalam program pembangunan nasional, selalu menempatkan pendidikan menjadi salah satu sektor prioritas pembangunan nasional. Dari masa ke masa, pendidikan di Indonesia terus mengalami kemajuan, kendatipun terdapat sejumlah kendala dihadapi. Hingga 1990-an, untuk pendidikan dasar (*primary education*) hampir tercapai; pendidikan menengah (*secondary education*); dan pendidikan tingkat menengah atas

¹⁷Amanda Coffey, *Education and Social Change*. Open University Press, 2001, USA, p. 84.

¹⁸Hugh Lauder, et al. (Eds.), *Education, Globalization & Social Change*, Oxford University Press, 2006, p. 100.

(higher education) terus mengalami peningkatan. Seperti diungkapkan Don Adams (1997):

Indonesian education in the 1990s, reflects past successes and persisting problems. The central government can be credited with developing a complex educational bureaucracy which, in spite of the geographic size, linguistic, and cultural diversity of Indonesia, maintains a unified national system has been' remarkable. Between 1970 and 1990, universal primary education was nearly achieved, the secondary enrollment rate grew from 10% to over 40%, and the higher education enrollment ratios increased from less than 2% to over 7%. However, comparison with neighboring Asian countries, Indonesia's investment in education is low and a number of serious problems of quality, equity, and efficiency exist at all levels.... Inequalities in distribution of education have restricted opportunities for advanced education for girls and have been partly responsible for female labor force participation in Indonesia lagging behind several other Asian countries.¹⁹

Dengan meningkatnya anggaran pendidikan nasional hingga 12 % dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak 2005, diharapkan dapat berimplikasi positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional. Dengan anggaran pendidikan tersebut, pemerintah telah melaksanakan program yang akan bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional ke depan, seperti pelaksanaan sertifikasi pendidik (guru dan dosen), peningkatan sarana-prasarana fisik sekolah/madrasah, kesempatan studi lanjut bagi pendidik meningkatkan anggaran penelitian, dan lain-lain. Salah satu implikasi penting dari kebijakan menaikkan anggaran pendidikan nasional sejak 2005, diharapkan dapat memacu suatu kondisi proses pendidikan nasional yang berkualitas, yang mampu membawa bangsa ini, menjadi salah satu bangsa terdepan, di mana generasi muda (*youth generation*) dapat berkompetitif dengan bangsa yang telah maju lainnya. Karena harus diakui bahwa kualitas pendidikan nasional masih banyak yang perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitasnya. Untuk kualitas perguruan tinggi *ranking* dunia, perguruan tinggi dalam negeri tertinggal jauh dalam hal kualitas. Pada 2009, hanya ada dua perguruan tinggi dalam negeri yang masuk 1000 top universitas dunia.²⁰

Penyiapan sumber daya manusia (*man power*) atau generasi muda potensial, dalam merespons kebutuhan perubahan sosial, yang berbentuk

¹⁹Boediono & Don Adams, *International Handbook of Education an Development: Preparing Schools, Students and Nations for the Twenty-First Century*, edited by William K. Cummings and Noel F.McGinn, BPC Wheatons Ltd., Exeter, Great Britain, 1997, p. 408.

²⁰Lebih detail tentang hasil evaluasi perguruan tinggi kelas dunia tersebut, dapat dilihat: *Lampiran 3, sumber data: (http://www.webometrics.info/distribution_by_country.asp).*

era-globalisasi, merupakan pilihan yang harus diambil dalam kebijakan pendidikan dan proses pembelajaran. Globalisasi ekonomi dan revolusi informasi mendorong suatu perubahan radikal dalam proses belajar, dengan mempromosikan suatu komodikasi pendidikan yang baru dan dengan terpaksa harus mengeluarkan proses pembelajaran tradisional dari lembaganya. Post-modernisme, masyarakat global telah bergerak jauh dalam fragmentasi dan diversifikasi bahwa tujuan pendidikan yang lama dari transformasi budaya, kini, secara absolut diakui kembali (*reclaim*). Post-modernisme global telah membawa dua krisis sekaligus: *a crisis in rationality* dan pluralisasi budaya yang secara fundamental menempatkan tujuan-tujuan pendidikan nasional sebagai *a unified 'project'*. Pendidikan, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, akan mengontrol atau dikontrol, di mana fungsi pendidikan berubah sebagai suatu instrumen penyiapan reproduksi budaya (*reproducing society*) atau sebagai instrumen rekayasa sosial dalam skala besar dengan penempatan progresif dari standar universal sistem pendidikan dengan menggunakan belajar jaringan internet (*network*), sekolah bersentuhan pada tindakan mengedepankan rasionalitas, disiplin pengetahuan, sosialisasi tereduksi untuk pengembangan dan sertifikasi kompetensi individual. Sejumlah tujuan nasional pendidikan dibatasi untuk memenuhi berbagai persyaratan ekonomi di bawah sejumlah kondisi kompetisi global.²¹

Suatu generasi muda yang diharapkan bangsa ini ke depan adalah generasi muda yang cerdas, mandiri, berpengetahuan, berteknologi, berketerampilan, jujur, kerja keras, dan *berakhlakul karimah*, sesuai dengan makna tujuan pendidikan nasional. Proses pendidikan yang mampu menghasilkan suatu generasi muda seperti digambarkan dengan ideal tersebutlah, barangkali mungkin dapat membawa suatu perubahan sosial yang positif bagi suatu bangsa ke depan. Banyak bangsa-bangsa yang tadinya terbelakang (*under developing countries*), dalam waktu yang tidak terlalu lama, telah menjadi negara maju (*developing countries*) berawal dari kebijakan spektakuler pemerintah yang disertai komitmen yang tinggi dalam melakukan investasi sumber daya manusia (*human power investment*), bukan hanya mengandalkan sumber daya alam (*natural resources*).

²¹Andy Green, 'Education, Globalization, and the Nation States', in Hugh Lauder, et.al. (eds.), *Education, Globalization & Social Change*, Oxford University Press, UK, 2006, p. 193.

Bab 12

PROFESIONALISME GURU DAN GLOBALISASI

Salah satu elemen penting dalam proses pembelajaran adalah pendidik yang profesional. Kenyataannya, meskipun sejumlah pendidik memiliki profesi yang sama sebagai pendidik/guru, mereka memiliki perbedaan atau beragam pada level profesionalismenya. Seorang pendidik dikatakan profesional, tidak cukup hanya menyandang suatu gelar (*degree*) atau ijazah (*certificate*) yang dimiliki sebagai persyaratan normatif dan administratif minimal sebagai pendidik. Globalisasi dengan sejumlah kecenderungannya membutuhkan antisipasi dan kompetensi guru dalam profesinya agar proses pembelajaran mampu menghasilkan lulusan (*output*) sesuai yang dibutuhkan masyarakat global.

A. Persyaratan Profesionalisme Guru

Seorang pendidik/guru diharuskan memiliki suatu persyaratan profesional yang kompleks. Myra Pollack Sadkar dan David Miller Sadkar (1991) mengatakan:

A professional is a person who is an expert, and by view of that expertise is permitted to operate fairly, independently, to make decisions, to exercise discretion to cut a little to the left or to the right.... If we are to achieve that professional status, we have to take a step beyond collective bargaining—not to abandon it, but to build on it, develop new processes, new institutions, new procedures that will bring us what teachers want in

*addition: status, dignity, a voice in professional matters, the compensation of a professional.*¹

Dari pendapat Myra dan David di atas jelaslah bahwa seorang yang dikatakan profesional adalah orang yang dipandang ahli dalam bidangnya, di mana yang bersangkutan bisa membuat keputusan dengan independen dan adil. Jika seorang menjadi profesional, haruslah membuat suatu langkah penawaran kolektif dengan membangun proses yang baru, institusi yang baru, prosedur yang baru, yang menggiring pada suatu pemahaman pada apa sesungguhnya yang diinginkan pendidik: status, dignitas, profesional, dan kompensasi yang logis dari suatu pekerjaan profesional.

Proses pembelajaran di sekolah/madrasah sesungguhnya merupakan upaya merealisasikan kurikulum ideal/konsep/tekstual (*ideal curriculum*) ke kurikulum aktual (*actual curriculum*). Kurikulum tipe pertama, *ideal curriculum*, merupakan kurikulum yang masih dalam bentuk teks, ideal, di cita-citakan dan belum dilaksanakan. Sedangkan kurikulum tipe kedua, *actual curriculum*, kurikulum yang diaplikasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Yang paling menentukan keberhasilan dalam proses pembelajaran di kelas adalah sejauh mana adanya kesenjangan (*gap*) antara kurikulum ideal dan kurikulum aktual.² Ketika pelaksanaan kurikulum aktual dalam proses pembelajaran di kelas, seorang pendidik sesungguhnya memiliki tanggung jawab terdepan terhadap sukses tidaknya dari proses pembelajaran tersebut, karena seorang pendidik sekaligus sebagai pengembang kurikulum (*curriculum developer*).

Agar suatu proses pembelajaran berkualitas dan relevan, *up to date*, dengan kebutuhan sumber daya manusia (*man-power*) teraplikasi dengan baik, seorang pendidik diharapkan dapat selalu melakukan introspeksi dan meningkatkan sejumlah kompetensi dimiliki dan memerhatikan tentang pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Seorang pendidik selanjutnya diharapkan dapat memerhatikan tentang kecenderungan globalisasi yang berkonsekuensi pada terjadinya perubahan paradigma pembelajaran, yakni dari paradigma "lama" ke paradigma "baru". Perlu memahami tentang globalisasi yang dapat berdampak terhadap kemajuan peradaban dunia, yang merupakan suatu pelajaran penting bagi pendidik yang senantiasa perlu melakukan mengedepankan profesionalisme dan responsif terhadap setiap

¹Myra Polack Sadkar & David Miller Sadkar, *Teachers, Schools, and Society*, Second Edition, McGraw-Hill, Inc., USA, 1991, p. 45.

²Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktik*, *op.cit.*, hlm. 282.

permasalahan pembelajaran, dan inovatif terhadap perubahan sosial-pendidikan yang senantiasa dinamis.

Upaya memperbaiki kualitas dan profesionalisme pendidik di sekolah/madrasah karenanya memang patut terus menjadi perhatian. Sebagai respons terhadap globalisasi dan tuntutan kebutuhan terhadap kualitas pembelajaran dalam menciptakan anak didik yang berkualitas, berkompetitif dan mandiri kemudian hari, berbagai persyaratan seorang pendidik profesional perlu terus-menerus diperbaiki. Seperti diungkapkan Sudarwan Damin (2002) bahwa ketika persaingan dalam aneka perspektif sosial, ekonomi, teknologi, dan kemanusiaan semakin bereskalasi secara masif, persyaratan kemampuan yang diperlukan orang untuk melakukan aneka pekerjaan semakin meningkat. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh di bangku sekolah sering kali tidak memadai lagi karena tuntutan persyaratan kerja bereskalasi ekstra tinggi sementara menu' sajian di sekolah teramat lambat pemutakhirannya. Lingkup pengetahuan dan keterampilan yang dapat diberikan guru pun terbatas oleh kalender kerja, di samping kemampuan guru sendiri yang tidak tanpa batas.³

B. Globalisasi dan Tantangan Profesionalisme Guru

Antara globalisasi dan demokrasi telah menarik perhatian banyak ilmuwan abad ke-21. Globalisasi diyakini sebagai suatu pendorong gelombang demokratisasi dunia. Huntington menyebutnya sebagai *The Third Wave* untuk menggambarkan gelombang demokratisasi dunia di Negara Dunia Ketiga. Data kuantitatif menunjukkan bahwa sekarang ini tidak kurang dari 117 negara dari 191 negara telah melakukan pemilihan umum multipartai. Hal ini menunjukkan bahwa sistem politik demokrasi (dengan menggunakan ukuran ini) telah dianut oleh banyak negara, demikian diungkapkan Jaan Aart Scolte.⁴

Nurcholish Madjid menuturkan modernisasi berarti rasionalisasi untuk memperoleh daya-guna yang maksimal dalam berpikir dan bekerja demi kebahagiaan umat. Lanjut Madjid, modernisasi berarti berpikir dan bekerja menurut *fitrah* atau *sunnatullah* (hukum ilahi) yang hak, sebab alam adalah hak. *Sunatullah* telah mengejawantahkan dirinya

³Sudarwan Damin, *Inovasi Pendidikan, Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2002), hlm. 19.

⁴Abdullah Idi, "Guru dan Globalisasi," *Perspektif: Jurnal Balai Diklat Keagamaan Palembang*, Vol. 2, No.1 Januari-Juni 2009, hlm. 1.

dalam alam, sehingga untuk menjadi modern, manusia harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku di alam. Pemahaman manusia tentang hukum-hukum alam inilah yang kemudian melahirkan ilmu pengetahuan. Akibatnya, sering dikatakan bahwa modern berarti ilmiah. Oleh karena ilmu pengetahuan ilmiah diperoleh manusia melalui akal (rasio), modern dapat pula berarti rasional.⁵ Disebut modern, seorang harus dapat berpikir dan bertindak secara ilmiah dan rasional.

Dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* disebutkan bahwa istilah globalisasi berasal dari kata *global* yang dalam bahasa Inggris berarti *embracing the whole of a group of items* (merangkul keseluruhan kelompok yang ada). Supriyoko (1993) menunjukkan bahwa dalam globalisasi terdapat saling ketergantungan (*interdependency*) dalam masalah sosial, kultural, dan politik suatu bangsa akan saling mengait dengan bangsa lain. Sebagai contoh, hasil KTT Bumi (*Declaration of Rio: Principles of Forestry*) di Brazil berpengaruh pada kebijakan perhutanan di negara lain. Contoh lain, sikap Amerika Serikat terhadap negara-negara Arab, khususnya Irak dan Iran; dan sikap Eropa terhadap Bosnia pada beberapa waktu yang lalu sangat memengaruhi kebijakan politik negara lain.

Bertalian dengan permasalahan Perubahan Iklim Global di abad ke-21 kian nyata, seperti terlihat pada Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim (COP) ke-16, pada 8 Desember 2010, di Cancun, Meksiko, telah berhasil memecahkan kebekuan di antara negara kaya dan miskin. Negara maju dan negara miskin telah sepakat memperlambat perubahan iklim, dan akan ada kemitraan dalam pendanaan yang digunakan untuk mitigasi, adaptasi, dan transfer teknologi. Sebelumnya, negosiasi berlangsung alot setelah beberapa negara industri yang menjadi kunci seperti Jepang, Rusia, dan Amerika Serikat menyatakan tidak akan melanjutkan komitmen kedua protokol Kyoto. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menegaskan, mulai 2020, negara maju harus bisa menggalang dana US\$100 miliar (sekitar 900 triliun) per tahun untuk membantu negara miskin dalam melawan pemanasan global sesuai dengan kesepakatan COP-15 di Kopenhagen, Denmark, 2009.⁶

⁵Muslim Abdurrahman, "Bagaimana Indonesia Dibaca Pemikir Islam: Sebuah Resensi Pemikiran," dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mu'nim Saleh (Eds.), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, Cetakan I, (Jakarta: P3M, 1989), hlm. 217.

⁶Bantuan US \$100 miliar tersebut akan diambil dari 1,5 % pendapatan bersih negara-negara maju. Tapi, Amerika Serikat (AS), Presiden Barack Obama, hanya memberi sinyal akan membantu negara miskin dalam mengatasi perubahan iklim, sifatnya tidak mengikat. AS sampai sekarang (2010) memang menolak terikat komitmen penurunan emisi karbon

Globalisasi sebagai suatu produk pembangunan dimotori Barat selaku pemegang konstelasi dunia dalam sains-iptek dan ekonomi. Namun, perlu disadari bahwa keberhasilan Barat menjadi pihak paling berpengaruh di dunia sesungguhnya tidak terlepas dari keberadaan dan peranan lembaga pendidikan. Jadi, persoalan globalisasi tidak terlepas dari keberadaan lembaga pendidikan selaku pencetak Sumber Daya Manusia (SDM). Munculnya kategori negara berkembang (*developing countries*) dan negara-negara maju (*developed countries*), pada dasarnya sebagai konsekuensi atas perbedaan tingkat kualitas SDM untuk keperluan modernisasi. Sebagaimana modernisasi, globalisasi merupakan keharusan sejarah. Globalisasi merupakan bagian dari dinamika peradaban manusia. Islam memandang menuntut ilmu dengan orang yang berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*). Manusia harus berupaya mengejar ilmu tentang bagaimana sesungguhnya *syariat* dan *akhlak Islam*. Seorang mewujudkan dimensi praktik agama (*syari'ah*) dan dimensi pengamalan (*akhlak*), dia harus mendahulukan dimensi pengetahuan (*ilmu*). Sebab dimensi ilmu merupakan prasyarat bagi terlaksananya dimensi peribadatan dan dimensi pengamalan.⁷

Seiring dengan berkembangnya aktivitas manusia, era globalisasi pun mengandung banyak kecenderungan. Pengklasifikasian atas kecenderungan yang muncul sangat tergantung pada cara seorang memahami dinamika dunia, dan sejauh mana dia merasa terlibat di dalam kondisi global. Emil Salim (2005) mengatakan globalisasi memiliki beberapa kecenderungan berikut: perkembangan globalisasi ekonomi, perkembangan teknologi yang cepat, perubahan demografi, perubahan politik, dan perubahan sistem nilai.⁸ Supriyoko (1993) menyatakan konsep dasar globalisasi dapat dilihat dari aspek: ketergantungan (*interdependency*) dalam masalah sosial, politik dan budaya; peran strategis informasi; dan era industri sebagai kemajuan suatu bangsa.⁹

dioksida seperti dituangkan dalam Protokol Kyoto. Di sisi lain, Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg mengingatkan negara-negara berkembang untuk bersungguh-sungguh ikut menurunkan emisi karbon di negara berkembang. Sebab pemimpin negara donor (negara maju) harus bersitegang dengan rakyat mereka untuk mengeluarkan dana bantuan. Komentar negara maju diperlihatkan langsung oleh Australia. Di Bali (9/12/2010) Menlu Kevin Rudd, mengumumkan negaranya akan mengalokasikan A\$45 juta untuk membantu Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim. Jumlah itu merupakan bagian dari A\$599 juta alokasi mereka secara keseluruhan. Lihat: (*Media Indonesia*, 10/12/2010).

⁷Djamaludin Ancok dan Suroso dalam (Abdullah Idi dan Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam*, Pengantar: J. Suyuthi Pulungan, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2006, hlm.111).

⁸*Republika* (4/9/2005).

⁹Supriyoko, "Pendidikan Politik di Era Globalisasi", dalam M. Mansyur Amin dan Ismail S. Ahmad (Eds.), *Dialog Pemikiran Islam dan Realitas Empirik*, (Yogyakarta: LKPSMNU, 1993), hlm. 103.

Sebutan era informasi menggarisbawahi peran strategis dan informasi, yakni bahwa kendali atas dunia benar-benar ditentukan oleh pihak yang menguasai informasi. Terlebih lagi, informasi telah menafikan sekat-sekat geografis yang ada di dunia. Beberapa bukti bisa diilustrasikan di sini: pernyataan politik para pemimpin dunia dapat dinikmati dalam waktu yang nyaris bersamaan oleh segala masyarakat di seantero dunia; peristiwa politik seperti Pemilu Umum di Amerika Serikat (AS) atau meninggalnya artis penyanyi Michael Jackson (27 Juni 2009) dapat diketahui secara cepat oleh masyarakat dunia melalui internet atau TV; pertandingan sepak bola Liga Italia atau Liga Inggris dapat ditonton oleh masyarakat dunia secara langsung melalui saluran TV; sama halnya bencana Tsunami di Aceh (2004) menewaskan ribuan penduduk, dan banjir dan longsor tanah yang menewaskan ratusan penduduk di Wasior-Papua Barat (2010), gempa di Mentawai-Sumatera Barat (2010), dan meletusnya Gunung Merapi-Yogyakarta (2010) dapat dilihat masyarakat dunia dengan cepat, melalui media elektronik TV dan internet.

Perubahan dan perkembangan industri merupakan kemajuan bangsa di dunia, dan ini tidak dapat dilepaskan dari pergeseran konsentrasi sumber investasi. Sumber investasi negara praindustri terkonsentrasi pada pertanian (*land*), negara-negara industri pada permesinan (*machinery*), dan negara pasca-industri pada pengetahuan (*knowledge*). Kemajuan suatu negara sekaligus memberi peluang bagi negara tersebut untuk mengalami perubahan status. Misalnya, dari status negara agraris menjadi negara industri, dari negara industri menjadi negara pasca-industri. Indonesia, hingga kini, masih dikategorikan sebagai negara agraris dan dapat juga sebagai negara praindustri (*pre-industrial country*).

Aspek perubahan demografi merupakan salah satu kecenderungan lain di era-globalisasi. Kini, penduduk dunia mengalami pertumbuhan sekitar dua kali lipat dari jumlah penduduk tahun 1950 yang berjumlah kurang lebih 2,5 miliar. Berbagai persoalan pun muncul akibat perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang cepat, seperti ancaman bahaya kelaparan, ekologi, polusi, dan hal-hal lain berkaitan dengan kesejahteraan hidup manusia. P. Kennedy mensinyalir, diduga tidak kurang dari 1 miliar orang di dunia menderita kelaparan karena kekurangan makanan. Seperti diungkapkan P. Kennedy (1993):

Agricultural and industrial development have also affected the quantity and quality of the earth's eater supplies. The larger cause, once again, is

*the increase in global population this century from 1.6 billion to more than 5 billion.*¹⁰

Sama halnya dengan Kennedy, masalah kemiskinan memang telah lama menjadi perhatian sejumlah pihak. Pada 2000, Sekjen Persatuan Bangsa-Bangsa (*United Nations*), Kofi Annan, telah memprakarsai program *Mellinium Development Goals (MDGs)* untuk mengentaskan kemiskinan di negara-negara berkembang (*developing countries*) dan negara terbelakang (*under developing countries*) dalam tempo waktu 15 tahun. Dalam kenyataannya, angka kemiskinan dunia tidak berkurang dan justru bertambah sekitar 100 juta jiwa, dari sekitar 2 jiwa miliar sebelumnya hingga kini (2010) menjadi 2,1 miliar jiwa.

Aspek lain yang menjadi keresahan masyarakat dunia adalah bertalian dengan rusaknya lingkungan. Kerusakan lingkungan tampak sudah mengglobal dan lebih transparan. Negara maju sering berpendapat bahwa negara berkembang sebagai pelaku kerusakan lingkungan karena tindakan penebangan hutan untuk sumber ekonomi atau devisa negara. Hal itu telah memunculkan reaksi keras dari negara berkembang dan justru menuding sebaliknya bahwa polusi (*pollution*) di muka bumi sebagian besar justru dilakukan negara maju (*developed countries*), melalui berbagai pabriknya sebagai sumber pencemaran. Tuding-menuding antara negara berkembang dan negara maju sebenarnya hanya menimbulkan kelelahan belaka dan sering kali tanpa adanya solusi. Suatu hal pasti bahwa isu ekologi sudah menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat pada negara mana pun di dunia, karena isu ekologi sesungguhnya adalah isu ekologi-nasional dan mondial.

Disadari atau tidak, baik negara maju maupun negara berkembang, sebetulnya telah merusak lingkungan, pada level yang mendasar sekalipun, dengan peran berbeda. Di negara berkembang terjadi penebangan hutan besar-besaran (*illegal logging*) dan tanpa terkontrol, perusahaan penggalian tambang yang tidak terkontrol, dan pencemaran air laut yang merusak ekosistem. Negara maju memiliki peran berbeda, di mana hasil penebangan hutan sering kali atas permintaan atau setidaknya diekspor ke negara maju. Kerusakan lingkungan tidak terlepas dari peran negara maju maupun negara berkembang. Suatu hal yang perlu disadari bahwa penebangan hutan berlebihan dapat menimbulkan tanah longsor yang berdampak pada kerugian harta benda dan nyawa manusia. Selain itu,

¹⁰P. Kennedy, *Preparing for Twenty First Century*, Harper Collin, Australia, 1993, p. 101.

kerusakan pada suatu negara akan berdampak pada negara lain. Sebagai ilustrasi, pembakaran hutan pada suatu negara akan berdampak pada polusi udara atas asap bekas pembakaran. Jadi, suatu hal yang penting adalah perlunya upaya mengatasi kerusakan ekologi (darat, udara, laut), sebagaimana upaya dunia mengatasi kerusakan ekologi seperti diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi berdasarkan *Declaration of Rio tentang Principle of Forestry*.

Perhatian terhadap *Global Warming*, sebagai bentuk nyata terhadap proses kerusakan ekologi. Kepada generasi dunia yang akan hidup pada abad mendatang perlu dibekali dengan penguatan sains-teknologi dan spiritual-keagamaan yang diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat dunia yang semakin kompleks. Selain pentingnya substansi kurikulum yang dapat menjawab tantangan zaman bagi generasi anak didik mendatang, tidak ada pilihan lain, kecuali, pendidik/guru dalam proses pembelajaran di sekolah/madrasah perlunya mengedepankan kualitas tugas dalam profesi yang diembannya. Kehidupan masa depan membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki anak didik yang akan hidup pada zaman berbeda, di mana dunia senantiasa dinamis yang membutuhkan adaptasi (dengan pengetahuan dan keterampilan) pada era globalisasi.

Globalisasi telah mengubah cara hidup manusia sebagai individu, sebagai warga masyarakat dan warga bangsa. Tidak seorang pun dapat menghindari dari arus globalisasi. Setiap individu dihadapkan pada dua pilihan: *pertama*, dia menempatkan dirinya dan berperan sebagai pemain dalam arus perubahan globalisasi; dan *kedua*, dia menjadi korban globalisasi. Arus globalisasi juga masuk dalam wilayah pendidikan dengan berbagai implikasi dan dampaknya, positif dan negatif. Dalam konteks ini, tugas dan peranan seorang pendidik/guru sebagai ujung tombak dunia pendidikan di sekolah/madrasah sangat terdepan dalam menciptakan SDM yang dapat berkompetitif dengan generasi bangsa lain dalam suatu masyarakat dunia.

Sejalan dengan perkembangan sains-teknologi dan meluasnya pengaruh globalisasi, pendidik senantiasa dituntut dapat mengimbangi perkembangan sains-teknologi yang terus berkembang. Seorang pendidik diharapkan mampu pula menghasilkan anak didik sebagai SDM yang memiliki kompetensi tinggi dan siap menghadapi tantangan hidup dengan penuh percaya diri. Untuk menciptakan SDM berkualitas tersebut seperti diungkapkan Louis V. Gerstner, Jr., dkk (1995), dibutuhkan sekolah

kerusakan pada suatu negara akan berdampak pada negara lain. Sebagai ilustrasi, pembakaran hutan pada suatu negara akan berdampak pada polusi udara atas asap bekas pembakaran. Jadi, suatu hal yang penting adalah perlunya upaya mengatasi kerusakan ekologi (darat, udara, laut), sebagaimana upaya dunia mengatasi kerusakan ekologi seperti diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi berdasarkan *Declaration of Rio* tentang *Principle of Forestry*.

Perhatian terhadap *Global Warming*, sebagai bentuk nyata terhadap proses kerusakan ekologi. Kepada generasi dunia yang akan hidup pada abad mendatang perlu dibekali dengan penguatan sains-teknologi dan spiritual-keagamaan yang diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat dunia yang semakin kompleks. Selain pentingnya substansi kurikulum yang dapat menjawab tantangan zaman bagi generasi anak didik mendatang, tidak ada pilihan lain, kecuali, pendidik/guru dalam proses pembelajaran di sekolah/madrasah perlunya mengedepankan kualitas tugas dalam profesi yang diembannya. Kehidupan masa depan membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki anak didik yang akan hidup pada zaman berbeda, di mana dunia senantiasa dinamis yang membutuhkan adaptasi (dengan pengetahuan dan keterampilan) pada era globalisasi.

Globalisasi telah mengubah cara hidup manusia sebagai individu, sebagai warga masyarakat dan warga bangsa. Tidak seorang pun dapat menghindari dari arus globalisasi. Setiap individu dihadapkan pada dua pilihan: *pertama*, dia menempatkan dirinya dan berperan sebagai pemain dalam arus perubahan globalisasi; dan *kedua*, dia menjadi korban globalisasi. Arus globalisasi juga masuk dalam wilayah pendidikan dengan berbagai implikasi dan dampaknya, positif dan negatif. Dalam konteks ini, tugas dan peranan seorang pendidik/guru sebagai ujung tombak dunia pendidikan di sekolah/madrasah sangat terdepan dalam menciptakan SDM yang dapat berkompetitif dengan generasi bangsa lain dalam suatu masyarakat dunia.

Sejalan dengan perkembangan sains-teknologi dan meluasnya pengaruh globalisasi, pendidik senantiasa dituntut dapat mengimbangi perkembangan sains-teknologi yang terus berkembang. Seorang pendidik diharapkan mampu pula menghasilkan anak didik sebagai SDM yang memiliki kompetensi tinggi dan siap menghadapi tantangan hidup dengan penuh percaya diri. Untuk menciptakan SDM berkualitas tersebut, seperti diungkapkan Louis V. Gerstner, Jr., dkk (1995), dibutuhkan "sekolah

unggul" atau sekolah berkualitas yang memiliki ciri-ciri: (1) kepala sekolah yang dinamis dan komunikatif dengan kemerdekaan memimpin strategi untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dengan jelas; (2) pendidik yang kompeten yang senantiasa bergairah dalam melaksanakan tugas dengan profesional dengan inovatif; (3) siswa-siswa yang sibuk, bergairah, dan kerja keras dalam proses pembelajaran; (4) masyarakat dan orang tua yang berperan dalam menunjang pendidikan.¹¹

Sejumlah kecenderungan dan tantangan globalisasi yang harus diantisipasi pendidik dengan pentingnya mengedepankan profesionalisme. *Pertama*, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan mendasar. Dengan kondisi ini, seorang pendidik diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan responsif, arief, dan bijaksana. Responsif artinya pendidik harus bisa menguasai dengan baik produk iptek, terutama yang berkaitan dengan dunia pendidikan, seperti pembelajaran dengan menggunakan multimedia. Tanpa penguasaan iptek yang baik, pendidik akan tertinggal dan menjadi korban iptek.

Kedua, krisis "moral" yang melanda bangsa dan negara Indonesia akibat pengaruh iptek dan globalisasi telah terjadi pergeseran nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tradisional yang sangat menjunjung tinggi moralitas bisa saja dapat bergeser seiring dengan pengaruh iptek dan globalisasi. Di kalangan remaja sangat begitu terasa akan pengaruh iptek dan globalisasi. Pengaruh hiburan baik berasal dari media cetak maupun media elektronik yang menjurus pada hal-hal pornografi telah menjadikan sebagian remaja tergoda dalam suatu "pilihan" kehidupan yang menjurus pada pergaulan bebas dan materialisme. Mereka sebenarnya hanya menjadi korban dari globalisasi yang selalu menuntut kepraktisan, kesenangan belaka (*hedonisme*) dan budaya cepat saji (*instant*).

Ketiga, krisis sosial, seperti kriminalitas, kekerasan, pengangguran, dan kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat dunia. Akibat perkembangan industri dan kapitalisme maka muncul masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Tidak semua lapisan masyarakat bisa mengikuti dan menikmati dunia industri dan kapitalisme. Mereka yang lemah secara pendidikan, akses, dan ekonomi akan menjadi korban ganasnya industrialisasi dan kapitalisme. Ini merupakan tantangan bagi guru dalam merespons realitis ini, terutama dalam kaitannya dengan

¹¹Abdullah Idi, "Bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan S1 & S2", *op.cit.*, hlm. 123.

dunia pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang formal dan sudah mendapat kepercayaan (*trust*) dari masyarakat harus mampu menghasilkan peserta didik yang siap hidup dalam kondisi dan situasi bagaimanapun. Dunia pendidikan harus menjadi solusi dari suatu masalah sosial (kriminalitas, kekerasan, pengangguran, dan kemiskinan) bukan menjadi bagian bahkan penyebab dari masalah sosial tersebut.

Keempat, krisis identitas sebagai bangsa. Sebagai bangsa dan negara di tengah bangsa lain di dunia membutuhkan identitas kebangsaan (nasionalisme) yang tinggi dari warga negara Indonesia. Semangat nasionalisme dibutuhkan tetap eksisnya bangsa dan negara Indonesia. Nasionalisme yang tinggi dari warga negara akan mendorong jiwa berkorban untuk bangsa dan negara sehingga akan membuat perilaku positif dan terbaik untuk bangsa dan negara. Dalam dekade terakhir, ada kecenderungan menipisnya jiwa nasionalisme di kalangan generasi muda. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti kurang apresiasinya generasi muda terhadap "kebudayaan asli" bangsa Indonesia, pola dan gaya hidup remaja yang kebarat-baratan, dan beberapa indikator lainnya. Melihat realitas perilaku generasi muda ini, pendidik/guru sebagai penjaga nilai-nilai termasuk nilai nasionalisme harus mampu memberikan kesadaran kepada generasi muda akan pentingnya jiwa nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak semua nilai-nilai global harus diterima dan tidak semua nilai-nilai "tradisional" bangsa harus ditinggalkan. Misalnya, nilai-nilai bangsa yang mengedepankan musyawarah, kerja sama, gotong royong, dan salig membantu tetap relevan dalam menyelamatkan generasi masa datang di tengah kehidupan pada era globalisasi yang membawa nilai-nilai sebaliknya.

Kelima, adanya perdagangan bebas, baik tingkat ASEAN, Asia Pasifik, maupun dunia. Kondisi ini membutuhkan kesiapan yang matang terutama dari segi SDM. Indonesia, ke depan, membutuhkan SDM yang andal dan unggul yang siap bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Dunia pendidikan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam menciptakan SDM yang berkualitas. Dibutuhkan pendidik/guru yang visioner, kompeten, berdedikasi tinggi dan berkomitmen agar mampu membekali peserta didik, *output*, dengan sejumlah kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan di tengah masyarakat sedang dan terus berubah.¹²

¹²J. Basuki, "3 Kebijakan Pendidikan Tinggi: Peningkatan Mutu Pendidikan Berdasarkan Konsep TQME3", *Makalah Kuliah Umum*, pada Program Magister Administrasi Publik (MAP) Stisipol Candramuka Palembang, 2009, hlm. 2.

Bertalian dengan perubahan paradigma tersebut, setidaknya terdapat tiga acuan dasar pendidikan nasional. *Pertama*, acuan filosofis, yakni yang mampu mengembangkan kreativitas, kebudayaan, dan peradaban; mendukung desiminasi nilai keunggulan; mengembangkan nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, keadilan, dan keagamaan; dan mengembangkan secara berkelanjutan kinerja kreatif dan produktif yang koheren dengan nilai-nilai moral. *Kedua*, acuan nilai kultural, yakni nilai inti ideal acuan pendidikan yaitu nilai pemberdayaan untuk kemandirian dan keunggulan; pada tingkat instrumental, otonomi, kecakapan, kesadaran berdemokrasi, kreativitas, daya saing, estetika, kearifan, moral, harkat, martabat, dan kebanggaan; pada tingkat operasional, pentingnya kerja keras, sportivitas, kesiapan bersaing, bekerja sama, dan disiplin diri. *Ketiga*, acuan lingkungan strategis yakni masih berlangsungnya beragam krisis, reformasi total terhadap birokrasi, ekonomi, sosial, politik, hukum, dan kehidupan beragama; pendidikan dengan standar global; dan penggunaan berbagai cara belajar dengan mendayagunakan beragam sumber belajar.¹³

Dalam pembangunan SDM dikelompokkan pada dimensi pekerjaan dan angkatan kerja, serta ilmu pengetahuan dan kualitas hidup. Dimensi tersebut saling mendukung dan bertalian erat satu dengan lain dalam rangka peningkatan kualitas SDM. Setiap dimensi memiliki karakter dan masalah tersendiri yang memerlukan penyelesaian secara efisien dan efektif (pekerjaan dan angkatan kerja, serta Iptek dan kualitas hidup). Dimensi tersebut saling mendukung dan bertalian erat satu dengan lain dalam rangka peningkatan kualitas SDM. Setiap dimensi memiliki karakter dan masalah tersendiri yang memerlukan penyelesaian secara efisien dan efektif.¹⁴

Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional, diperlukan pendidik/guru dalam jumlah yang memadai dengan standar mutu kompetensi dan profesionalisme yang mumpuni. Untuk mencapai jumlah pendidik/guru profesional yang mencukupi dan dapat menggerakkan dinamika kemajuan pendidikan nasional diperlukan suatu proses yang

¹³Perlu dijelaskan bahwa unsur-unsur yang berperan dalam peningkatan profesionalisme guru, di antaranya: KKG/MGMP, LPMP/P4TK, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Pemerintah Daerah. Selain itu, organisasi profesi, perguruan tinggi, industri dan partner internasional merupakan unsur yang dapat berperan secara signifikan dalam peningkatan profesionalisme guru berkelanjutan. Lihat: (*Undang-Undang Guru Dosen: UU RI No.14/2005*, Sinar Grafika Press, 2008, terutama, Pasal 7 dan Pasal 20).

¹⁴Abdullah Idi dalam: (*Sumatera Ekspres*, 27/6/2009).

berkesinambungan, tepat sasaran dan efektif. Dalam kenyataannya, masih banyak guru yang belum memenuhi syarat untuk disebut sebagai guru profesional. Kenyataan ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi pemerintah.

Dalam meningkatkan kualitas pendidik/guru dilakukan dengan melakukan program sertifikasi guru yang berlangsung saat ini, kualifikasi menjadi salah satu syarat utama selain penilaian portofolio. Tantangan berikutnya adalah tuntutan masyarakat di mana pendidik/guru dituntut benar-benar profesional dalam menjalankan tugasnya. Karena itulah, perlu dicermati Kebijakan Pemerintah atau Undang-Undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Pada Pasal 7 dan Pasal 20 diamanatkan:

Pasal 7:

Pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

Pasal 20:

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.¹⁵

Pendidik, dalam hal ini, merupakan seorang yang paling bertanggung jawab dalam peningkatan kualitas pendidikan. Dalam sejarah peradaban dunia, guru berada di garda terdepan dalam menciptakan kualitas SDM. Pendidik berhadapan langsung dengan peserta didik di kelas melalui proses pembelajaran di kelas. Di tangan pendidik dihasilkan peserta didik yang berkualitas, baik secara akademis, *skill* (keahlian), kemandirian emosional, moral dan mental-spiritual. Dari peran dan fungsi pendidik, dihasilkan generasi masa depan yang siap hidup dengan tantangan zaman berbeda. Karena itu, diperlukan sosok pendidik/guru yang mempunyai kualifikasi, kompetensi dan dedikasi tinggi dalam menjalankan profesinya. Pendidik/guru adalah "kurikulum berjalan" yang menentukan kualitas pembelajaran.

¹⁵Unsur-unsur yang berperan dalam peningkatan profesionalisme pendidik/guru di antaranya adalah KKG/MGMP, LPMP/P4TK, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Pemerintah Daerah. Organisasi profesi, perguruan tinggi, industri dan partner internasional juga merupakan unsur yang dapat berperan secara signifikan dalam peningkatan profesionalisme guru berkelanjutan. Lihat: (*Undang-Undang Guru Dosen/UURI No. 14 Tahun 2005*, Penerbit Sinar Grafika, 2008, terutama pada Pasal 7 dan Pasal 20).

Fuad Hasan,¹⁶ mantan Mendiknas RI, pernah mengatakan sebaik apa pun kurikulum dan sistem pendidikan yang ada, tanpa didukung oleh mutu pendidik/guru yang memenuhi syarat, semuanya akan sia-sia. Kenyataan menunjukkan bahwa kualitas pendidik/guru di Indonesia masih banyak aspek yang perlu dibenahi. Boediono dan Don Adam (1997) mengatakan proses Rencana Pembangunan Pendidikan 25 Tahun ke-2 (1993-2018) meliputi empat hal penting yang saling berkorelasi: peranan tim-komite, kapabilitas sistem pendidikan, perubahan sosial dan industri; dan menetapkan tujuan dan target pendidikan nasional jangka panjang. Seperti diungkapkan Boediono dan Don Adam:

The process of Developing the Second 25-Year Education Plan (1993-2018) involved for major interrelated, non-sequential phases: (1) creating and defining the roles of planning committees and teams; (2) critiquing the capabilities of the existing educational system; (3) examining in detail the educational, demographic, conomic, and socio-cultural changes of rapidly industrializing societies; and (4) establishing long-term educational goals and targets.¹⁷

Seperti telah diketahui sebelumnya, bahwa profesi sebagai pendidik adalah suatu profesi yang membutuhkan kualifikasi, kompetensi dalam tugas sebagai pendidik, memahami perkembangan anak dalam mendukung proses pembelajaran di kelas. Safarina HD (2008)¹⁸ mengatakan bahwa seorang guru merupakan pendidik profesional, karenanya secara implisit seorang guru telah merelakan dirinya untuk mengemban sebagian tanggung jawab pendidikan dari orang tua para anak didik. Orang tua mengharapkan *amanah* yang disampaikannya kepada sekolah/para guru agar seoptimal mungkin dapat mengembangkan potensi, bakat dan minat anak-anaknya agar suatu saat mampu menjadi manusia yang cerdas dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara. Adanya pelimpahan *amanah* ini, dikarenakan tidak semua orang dapat menjadi guru, karena profesi guru membutuhkan profesionalisme dan mengedepankan kepentingan sosial dan keikhlasan dalam melaksanakan tugas.

¹⁶Kompas, 15/4/2004.

¹⁷Boediono and Don Adams, *International Handbook of Education & Development: Preparing Schools, Students and Nations or the Twenty-First Century*, Edited by William K. Cummings and Noel MaGinn, BPC Wheatons Ltd., Exeter, Great Britain, 1997, p. 406.

¹⁸Safarina HD, "Urgensi Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran," *Makalah Kuliah Umum*, Wisuda Sarjana STKIP Sera-Lahat, Sumatera Selatan, 24 Mei 2008, hlm. 5.

"baru", di mana seorang pendidik diharapkan: (1) tidak terjebak pada rutinitas belaka, tetapi selalu mengembangkan dan memberdayakan diri secara terus-menerus untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya. Pendidik/guru sedapat mungkin menghindari dari "jebakan" aktivitas datang, mengajar, pulang, begitu selanjutnya berulang-ulang sehingga lupa mengembangkan potensi diri secara maksimal; (2) mampu menyusun dan melaksanakan strategi dan model pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM) yang menggairahkan motivasi belajar peserta didik. Pendidik perlu menguasai berbagai macam strategi dan pendekatan serta model pembelajaran sehingga proses pembelajaran berlangsung dalam suasana yang kondusif dan menyenangkan; (3) mengurangi dominasi dalam pembelajaran sehingga pemberian kesempatan pada peserta didik agar lebih berani, mandiri, dan kreatif dalam proses pembelajaran; (4) memperkaya bahan pembelajaran sehingga peserta didik mendapatkan sumber belajar yang lebih bervariasi; (5) menyukai apa yang diajarkannya dan menyukai mengajar sebagai suatu profesi yang menyenangkan; (6) mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir sehingga memiliki wawasan yang luas dan tidak tertinggal dengan informasi terkini; (7) mampu menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat luas dengan selalu menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji dan mempunyai integritas yang tinggi; (8) mempunyai visi ke depan dan mampu membaca tantangan zaman sehingga siap menghadapi perubahan dunia yang tak menentu yang membutuhkan kecakapan dan kesiapan yang baik.²²

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Jansen H. Sinamo (2008), dengan istilah *Mentalitas Profesional* bahwa pada abad ke 21 sangat menonjol dicirikan oleh globalisasi yang serba kompetitif dengan perubahan yang terus dan cepat. Tidak terbayang lagi ada organisasi, termasuk lembaga pendidikan, dapat bertahan tanpa didukung profesionalisme. Bukan sekadar profesionalisme biasa, tetapi profesionalisme kelas tinggi, *world-class professionalisme*, yang memungkinkan kita dapat sejajar dan bermitra dengan orang-orang dan organisasi-organisasi terbaik dari berbagai pelosok dunia. Sinamo menulis setidaknya ada tujuh mentalitas profesional yang harus dimiliki kalangan profesional: mentalitas mutu, seorang profesional menampilkan kinerja yang terbaik; mentalitas

²²Abdullah Idi, "Bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan S1 & S2," *op.cit.*, hlm. 43.

altruistik, seorang profesional selalu dimotivasi oleh keinginan mulia berbuat baik; mentalitas melayani, melayani konstituen dengan optimal; mentalitas pembelajar, menerima pendidikan dan pelatihan secara mendalam sebelum menjadi profesional; mentalitas pengabdian, adanya rasa keterpanggilan untuk mengabdikan pada bidang yang telah dipilihnya; mentalitas kreatif, selalu menginginkan kreativitas, berdaya cipta, dan inovatif; dan mentalitas etis, tidak mengkhianati etika dan moralitas profesinya.²³

Tampak bahwa untuk menjadi pendidik profesional tidak sederhana. Seorang pendidik yang ingin menjadi pendidik profesional, dengan senantiasa perlunya beradaptasi dan merespons paradigma baru tantangan profesi guru, yang bersangkutan hendaklah memiliki motivasi kuat untuk menjadi maju dan profesional. Semua pendidik bisa menjadi profesional asalkan ada niat, keinginan, motivasi dan komitmen melakukan dan menggapainya.

Agar bangsa Indonesia menjadi maju dan berperadaban ke depan, perhatian terhadap kebijakan pendidikan nasional harus menjadi terdepan dalam prioritas pembangunan. Kualitas pendidikan tidak terlepas dari peranan kualitas proses pembelajaran, yang dalam pelaksanaannya lebih ditentukan pendidik/guru berkualitas dan profesional. Agar proses pembelajaran berkualitas dan tetap relevan, *up to date* terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka menciptakan SDM, *man-power*, yakni anak didik sebagai generasi masa depan yang berkualitas, pendidik hendaknya perlu menyadari, introspeksi diri dengan mengedepankan pentingnya profesionalisme, dan beradaptasi dalam iklim sosial-pendidikan yang dinamis, dan perlu melihat inovasi terhadap teknik pembelajaran. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah diperlukan seorang pendidik dengan perlunya meningkatkan kreatif, inovatif, dan bermentalitas profesional.

²³Jansen H. Sinamo, 7 *Mentalitas Profesional* (19 Juni 2007), diakses via internet 27/8/2008.

Bab 13

CATATAN PENUTUP:

Dilema UN: Antara Etika dan Profesional Guru?

Dengan merujuk UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 (terutama Pasal 57, 58, 59) dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (terutama Pasal 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72),¹ tujuan umum dilaksanakannya UN di sekolah/madrasah, barang kali, dapat dikatakan sebagai “bahan” evaluasi terhadap kualitas pendidikan nasional; dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pendidikan nasional. UN, dalam hal ini, dapat pula dijadikan sebagai tolok ukur dalam melihat kualitas pendidikan nasional dibandingkan dengan kualitas pendidikan negara lain, seperti negara Asia Tenggara dan Asia. Pada akhirnya, UN dapat digunakan untuk melihat pada level apa derajat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Akan tetapi, harus diakui pula bahwa tujuan ideal-filosofis dilaksanakannya UN yang ideal itu, tidak terlepas dari adanya prokontra, dikarenakan masih terdapat banyaknya kelemahan. Fakta menunjukkan bahwa proses pelaksanaan UN belum menunjukkan indikator yang memungkinkan tercapainya tujuan ideal-filosofis UN, di mana dalam tataran praksis masih terdapat sejumlah kelemahan mendasar. Salah satu persoalan dimaksudkan adalah keterkaitan dengan standar kelulusan UN (misalnya pada 2009/2010 standar kelulusan 5,5) tidak berjalan

¹Lebih detail, baca: (“Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional” *op.cit.*, terutama hlm. 1-81 dan 119-121).

simetris dengan kualitas pendidikan rata-rata nasional sesungguhnya yang diperoleh dari proses pembelajaran. Secara totalitas, pelaksanaan UN 2009/2010 pada umumnya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pelaksanaan UN 2009/2010 misalnya telah dicerai buruknya sistem manajemen UN. Dari informasi media massa lokal dan nasional misalnya, dari ratusan koli kotak berisi soal UN SMA, MA dan SMK mengalami koli sudah "bocor". Koli atau kotak berisi soal asli, soal susulan, lembar jawaban ujian (LJU), amplop kosong, dan kaset soal bahasa Inggris (*listening*) ada yang sudah dibuka. Hal itu mengindikasikan bahwa pelaksanaan UN belum terkoordinasi dengan baik. Dari informasi berbagai media massa lokal dan nasional serta media elektronik diperoleh sejumlah daerah memperlihatkan "kunci jawaban" mengalami kebocoran sebelum pelaksanaan UN dimulai.

Pada awalnya, untuk mereduksi permasalahan UN, Muhammad Nuh, Menteri Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), mengemukakan bahwa Kemendiknas telah mempersiapkan formula baru penentuan kelulusan siswa. Formula itu menggabungkan hasil UN, ujian akhir sekolah (UAS), dan nilai rapor siswa. Konsep tentang kelulusan bahwa "bila nilai rapor dan UAS rendah, nilai UN harus tinggi atau nilai rata-rata nilai untuk SMP/MTs. SMA/MA minimal 5,5". Diungkapkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendiknas, Mansyur Ramli, ada dua konsep opsi tentang penentuan nilai akhir UN: (1) *opsi 1 (pertama)*, nilai akhir UN dan UAS digabungkan, dan nilai rata-rata yang didapatkan harus lebih besar dari 5,5 atau ada empat nilai 5,5 yang diperoleh anak didik. Jika hanya mendapat nilai 4, siswa tidak akan lulus. Opsi 1 dinilai semakin menjaga mutu. Pasalnya, akan ada perbaikan yang dilakukan sekolah agar siswa mendapat nilai baik dalam rapor. Namun, opsi 1 memiliki konsekuensi tidak akan ada UN ulangan bagi siswa yang tidak lulus di ujian pertama seperti UN 2010; dan (2) *opsi 2 (kedua)* yang diusulkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendiknas adalah siswa boleh saja memperoleh nilai 4 pada dua mata pelajaran dari enam pelajaran yang diujikan. Opsi itu dianggap ketat oleh Balitbang sehingga perlu ada UN ulangan bagi siswa yang gagal.²

²Hasil Rapat Panitia Kerja UN pada awalnya telah mengusulkan UN tahun depan (2011) tidak perlu UN ulangan karena dinilai mubazir. Sama halnya, beberapa anggota DPR RI mendesak agar UN ulangan dihapus, dengan pertimbangan memberi waktu kepada anak didik/siswa mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi negeri melalui Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN). Selanjutnya, baca: (*Media Indonesia*, 10/12/2010).

Pada akhirnya, pemerintah (Mendiknas) telah memutuskan bahwa standar kelulusan UN (terutama untuk UN 2011) telah diturunkan, dari 5,5 menjadi berkisar 4 -4,25. Diungkapkan Muhammad Nuh, Menteri Kementerian Pendidikan Nasional, nilai sekolah yang akan digabungkan dengan nilai UN adalah gabungan nilai UAS ditambah nilai rapor semester 1-4 (kelas I dan II). Nilai gabungan antara nilai sekolah dengan UN ditetapkan rata-rata 5,5. Dengan adanya formula baru ini UN ulang tahun depan (2011) akan dihapus. Dikatakan Muhammad Nuh, syarat yang ada saat ini lebih longgar (rendah) yakni maksimum 2 mata pelajaran dengan nilai 4 dan minimum 4 mata pelajaran dengan nilai minimum 4,25.³ Jadi, pada akhirnya standar kelulusan pada 2011 telah diturunkan dari 5,5 menjadi berkisar 4-4,25. Nilai gabungan UN dan UAS minimal 5,5 menjadi standar untuk menentukan kelulusan UN 2011.

Meskipun sudah diputuskan bahwa standar kelulusan merupakan gabungan UN dan UAS yang berjumlah minimal 5,5, agaknya pihak pemerintah, Kementerian Depdiknas dan Kementerian Agama RI, belum menemukan suatu formula UN yang tepat dan meyakinkan untuk diterapkan secara baku dalam menentukan kelulusan UN untuk tahun-tahun mendatang. Formula yang tepat dan substantif pun tetap penting didiskusikan guna menemukan formula UN yang akurat, efektif dan efisiensi. Selama ini, banyak pihak mensinyalir bahwa pertimbangan angka (kelulusan) agaknya lebih dominan dibandingkan bagaimana proses memperolehnya. Padahal, persoalan UN selama ini sesungguhnya sangat bertalian dengan "nilai/angka" dan "proses/cara" memperolehnya, yang sering kali menimbulkan prokontra bagi berbagai elemen masyarakat. Agaknya, dengan melihat dua konsep opsi yang ditawarkan Kemendiknas semula dan keputusan standar kelulusan UN dengan gabungan UN (minimal 4,00/4,25) dan UAS dengan minimal 5,5 tetap saja menjadi persoalan tersendiri bagi kebanyakan sekolah/madrasah.

Karenanya, sangat mungkin persoalan serupa pada pelaksanaan UN ke depan akan berulang (seperti tahun sebelumnya) mengingat angka selalu jadi patokan dalam menentukan kelulusan, bukan proses dan kemampuan faktual sekolah yang beragam, baik di kota, desa, dan daerah terpencil. Di satu sisi, penyeragaman aplikasi sistem UN merupakan

³Kendatipun demikian, diakui oleh Menteri Kementerian Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh, ada beberapa kelemahan formula baru UN, yakni, terutama bertalian dengan disparitas penilaian sekolah. Tapi, pemerintah menghargai sekolah dengan mendorong objektivitas dan kemandirian guru untuk menilai siswa. Lihat: (Sumatera Ekspres, 15/12/2010).

pendidik/guru di mana sebagian mereka telah membantu menjawab item-item pertanyaan pada soal. Pendidik/guru yang sibuk anak didik yang santai. Bukankah indikasi ini merupakan proses pembodohan dan mendidik anak-didik menjadi malas dan tidak mandiri? Tidak ada suatu ujian sekolah di lembaga pendidikan terkemuka apa pun dan di mana pun didunia ini, di mana seorang pendidik harus menjawab soal-soal yang seharusnya tugas dan kewajiban anak didik, karena yang dievaluasi anak didik. Padahal, kualitas pendidikan nasional bukan selalu diukur dengan angka-angka tetapi dikedepankan dengan pentingnya kualitas kepribadian, moral, budi-pekerti, dan akhlak-perilaku, seperti diharapkan dalam konsep tujuan pendidikan nasional, yakni menciptakan manusia Indonesia yang beriptek dan berimtak, yang juga sebagai konsep dan cita-cita luhur pembangunan pendidikan nasional.

UN diharapkan dapat mendorong berbagai elemen untuk menjunjung tinggi dan mewujudkan cita-cita luhur pendidikan nasional tersebut. Evaluasi terhadap pelaksanaan UN 2009/2010 yang cenderung dan berpotensi melakukan "pembobongan publik" dan melakukan kecurangan terencana padahal sangat berbahaya bagi generasi masa depan bangsa, hendaknya segera ditinggalkan. Anak-didik akan jadi cerdas, berkepribadian, mandiri, berketerampilan, bermoral dan berakhlak hanya terjadi jika iklim pendidikan yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan yang mengedepankan kejujuran, disiplin, kerja keras, toleransi, dan transparansi dalam berbagai pergaulan dalam kehidupan masyarakat global. Antara pengetahuan (umum dan agama) harus berhubungan (*connecting*) dengan perilaku anak didik yang diharapkan.

Kelima, pelaksanaan UN, dengan sengaja atau tidak, telah mengabaikan "proses" dan cenderung mengedepankan formalitas. Angka tertinggi menjadi ukuran keberhasilan UN, bukannya bagaimana proses memperoleh angka dan makna terkandung. Sekadar ilustrasi, bila anak didik memperoleh hasil UN rata-rata 9-10, tetapi ketika ikut ujian masuk PTN mayoritas tidak lulus, angka 9 maknanya kurang berarti bagi anak didik; bahkan angka 9 telah menjadi beban dan dapat saja berdampak pada "frustasi". Ternyata nilai 9 juga tidak bermakna apa-apa dalam merancang cita-cita anak didik. Atau, seorang anak tamatan SMA/MA ikut tes kerja di perusahaan atau instansi pemerintah karena lulus nilai bahasa Inggris dengan angka 9, tetapi ketika diwawancara dalam bahasa Inggris oleh pihak perusahaan/instansi ternyata dia tidak bisa menjawab

alias tidak lulus, karena nilai 9 UN memang diperoleh dari kunci jawaban. Nilai 9 bahasa Inggris bagi dia tidak bermakna apa-apa. Lalu, apa makna sesungguhnya UN bagi anak didik?

Keenam, pelaksanaan UN, di satu sisi, dipastikan membutuhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bernota bene uang masyarakat; di sisi lain, kualitas UN masih mengalami sejumlah kelemahan. Ke depan, UN harus dievaluasi mendasar, baik dari aspek substansi (terutama standar soal dan kelulusan) dan pelaksanaannya. Seperti telah diungkapkan sebelumnya, salah satu kelemahan yang paling menonjol dalam pelaksanaan UN adalah tingginya standar UN (5,5) bagi sekolah/madrasah. Padahal, kualitas sekolah/madrasah di kota-kota dengan daerah pedesaan, dan daerah terpencil, dipastikan tidaklah sama, dikarenakan proses pembelajaran di sekolah/madrasah yang berbeda.

Ke depan, bertalian dengan standar kelulusan UN yang terlalu tinggi (5,5) yang mengabaikan realitas dan fakta sesungguhnya dari proses pembelajaran di sekolah/madrasah perlu dibenahi. Ada baiknya dilakukan penelitian ilmiah tentang berapa sesungguhnya standar UN yang pantas dan realistis ke depan. Bila standar UN terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan standar kualitas pembelajaran kecurangan-kecurangan pelaksanaan UN pasti berulang. Sebaliknya standar UN yang realistis dan sejajar dengan kualitas proses pembelajaran, kecurangan-pelaksanaan UN dapat diminimalisasikan.

Ketujuh, mengingat tantangan ke depan bagi generasi/anak didik adalah mereka harus mengalami suatu kehidupan yang berbeda dengan generasi pendahulunya, pelaksanaan UN dan proses pembelajaran di sekolah sedapat mungkin dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang tidak ketinggalan zaman (*up to date*) bagi anak didik. Era globalisasi yang ditandai dengan derasnya kemajuan sains-teknologi dan transparansi hampir tanpa batas, maka SDM anak bangsa pun harus dipersiapkan seoptimal mungkin untuk merespons dan menjawab kebutuhan bangsa Indonesia ke depan, agar bisa mandiri dalam kehidupannya dan bisa kompetitif dalam kehidupan masyarakat global yang senantiasa dinamis dan mengedepankan pentingnya pengetahuan dan berbagai keterampilan.

Selanjutnya, kedelapan, salah satu nilai identitas yang selalu diperjuangkan dan dijaga oleh *founding fathers* adalah pentingnya menegakkan nilai kejujuran dan kegigihan/kerja keras dalam berjuang (menuntut

ilmu) yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui pendidikan yang tercermin dalam setiap perilaku kehidupan berbangsa. Sistem UN seharusnya tidak hanya "menargetkan" standar angka-angka yang realistis, tetapi juga harus mampu menumbuhkan dan mentransfer benih-benih dan nilai-nilai kejujuran pada generasi bangsa, sebagai salah satu identitas bangsa Indonesia yang tetap terus berlanjut dan terjaga. Sistem UN tidak statis, tetapi dinamis mengikuti dinamika realitas sosial, karenanya, sistem UN pun dapat saja dievaluasi dan diperbaiki demi penyempurnaannya, dengan mengedepankan makna substantifnya bagi anak didik demi kepentingan kemajuan bangsa. UN tentu sangat diperlukan dalam mengevaluasi pendidikan nasional, akan tetapi, jika sejumlah kelemahan substantif pelaksanaan UN tidak direspons dengan baik; tentu tidak diharapkan, bisa saja, UN justru akan menjadi suatu dilema: "antara etika dan profesionalisme guru?"

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslim. 1989. "Bagaimana Indonesia Dibaca Pemikir Islam, Sebuah Resensi Pemikiran." Dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mu'nim Saleh (Eds.), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*. Cetakan I, Jakarta: P3M.
- Ahmadi, Abu. 1991. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- AK, Maudjahid & Ahmad Syahid (Eds.) 2003. *Memelihara Tradisi, Merayakan Inovasi, 25 Tahun Puslitbang Agama dan Keagamaan*. Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI. Jakarta.
- Amanda Coffey, 2001. *Education and Social Change*. USA: Open University Press.
- Ardiwinata, Rustanah. 1998. *Praktikum Pengalaman Lapangan*. Dirjen Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam & UT.
- Barnadib, Sutari Imam. 1984. *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) IKIP.
- Basuki, J. 2009. "Kebijakan Pendidikan Tinggi: Peningkatan Mutu Pendidikan Berdasarkan Konsep TQME". *Makalah Kuliah Umum*. Program Magister Administrasi Publik (MAP) STISIPOL Candradimuka Palembang, Tanggal 31/12/2009.
- Bouman, B.J. 1976. *Ilmu Masyarakat Umum: Pengantar Sosiologi*. Jakarta: PT Pembangunan.

- Brown, Francis J. 1961. *Educational Sociology*. Second Edition Modern Asia Education. E. Tuttle Company. Tokyo.
- Cohen, Bruce J. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta Press.
- Daradjat, Zakiyah. 1992. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Departemen Agama.
- Davis, Kingsley. 1960. *Human Society*. Columbia University. The Macmillan Company. New York.
- Departemen Agama RI. 2006. *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*. Jakarta.
- Departemen Agama RI. 2007. *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Dewey, John. 2006. "The Democratic Conception in Education", in Hugh Laud, et.al. (eds.). *Education, Globalization & Social Change*. Oxford University Press. UK.
- Ditmitriadis, Greg and George Kamberelis. 2006. *Theory for Education*. New York: Routledge.
- Djaali. 2008. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Angkasa.
- Djamarah, Saiful Bahri. 2000. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Don, Adams & Boediono. 1997. *International Handbook of Education and Development: Preparing Schools, Students and Nations for the Twenty-First Century*. Edited by William K. Cummings and Noel F. McGinn, BPC Wheatons Ltd., Exeter. Great Britain.
- Duke, Daniel Linden. 1990. *Teaching: Introduction*. London: MacGraw-Hill Publishing Company.
- Epstein, Joyce L. & Associates. 2009. *School, Family, and Community Partnerships, Your Handbook for Action*. USA: Corwin Press.
- Gay, L.R. 1992. *Educational Research: Competencies for Analysis and Application*. Fourth Edition. Macmillan Publishing Company. New York.
- Good, William J. 2002. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Green, Andy. 2006. "Education, Globalization, and the Nation States", in Hugh Laudr, et al. (eds.), *Education, Globalization, & Social Change*, Oxford University Press, UK.
- Greene, William L. 2002. "Ethnic Identity and the Sociocultural Playing Field Choices Made by Ethnically Mixed Adolescent in Hawaii",

- Sociocultural Influences on Motivation and Learning*. Edited by Dennis M. McInerney & Shawn van Etten. Volume 2. Information Age Publishing. USA.
- Gunawan, Ary. H. 2005. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasbullah. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- HD, Safarina. 2008. "Urgensi Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran". *Orasi Ilmiah*. Wisuda Sarjana STKIP Sera-Lahat-Sumatera Selatan. Tanggal 24/5/2008.
- Herrington, George S. 1974. *An Analysis of Courses in Educational Sociology with Proposal Changes*. USA.
- Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). 2010. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Horton, Paul B. & Chester L. Hunt. 1992. *Sosiologi*. Alih Bahasa Amiruddin Ram. Jakarta: Erlangga.
- Huki, Wila. 1986. *Pengantar Sosiologi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Idi, Abdullah. 2001. *The Conditions for Learning at University: A Comparison Between Indonesia and Tasmania, Australia*. Palembang: Unsri Press. Sumatera Selatan.
- . 2009. "Guru dan Globalisasi", *Perspektif: Jurnal Balai Diklat Keagamaan Palembang*, Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2009, hlm. 1.
- . 2010. "Bahan Kuliah Sosiologi Pendidikan" Program S1 & S2 IAIN Raden Fatah Palembang.
- dan Toto Suharto. 2006. *Revitalisasi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Iman, Muis Sad. 2004. *Pendidikan Partisipatif*. Yogyakarta: Safiria Insan Press.
- Jalal, Faisal & Dedi Supardi (eds.). 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa Press.
- Jary, David & Julia Jary. 1991. *Dictionary of Sociology*. The Harper Collins Publisher.
- Kahmad, Dadang. 2006. *Sosiologi Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kahrudin, Mahdiah. 1993. *Remaja Dakwah Islam dan Perjuangan*. Jakarta: Kalam Mulia.

- Karsidi, Ravik. 2005. *Sosiologi Pendidikan*. Lembaga Pendidikan (LPP), UNS dan UPT. Surakarta.
- Kelsall, R.K. & H.M. Kelsall. 1974. *Stratification*. New York: Longman Group Limited.
- Kennedy, P. 1993. *Preparing for Twenty First Century*. Australia: Harper Collin.
- Khadijah, Nyayu. 2006. *Psikologi Belajar*. Palembang: IAIN Raden Fatah Palembang Press.
- Knowles, M. 1990. *The Adult Learner: A Neglected Species*, Fourth Edition, Gulf, Houston.
- Koentjaraningrat. 2005. *Pengantar Antropologi III*. Jakarta: Rineka Cipta Press.
- . 2006. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kompas, 21/4/2004.
- Kunandar. 2007. *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lauder, Hugh, Phillip Brown, Jo-Anne Dillabough, and A.H.Halsey (Eds.). 2006. *Education, Globalization & Social Change*. Oxford University Press. UK.
- Levine, Daniel U and Robert J. Havighurst. 1989. *Society and Education*. Seventh Edition. Allyn & Bacon. United States.
- Lyson, A. 1976. *Individu dan Masyarakat*. Bandung: Sumur Bandung.
- Macionis, John J. & Linda M. Gerber. 2002. *Sociology*. Updated Fourth Canadian Edition. Prentice Hall. USA.
- Macionis, John J. 1989. *Sociology*. Second Edition. Prentice-Hall. Englewood Cliffs. New Jersey.
- Mahariono, Bambang, dkk. 1997. *Fungsi Keluarga dalam Meningkatkan Kualitas SDM di Jawa Timur*. Surabaya: Depdiknas.
- Mansyur, M. Cholil. 1997. *Sosiologi Masyarakat Kota-Desa*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Marimba, Ahmad D. 1981. *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Mastuhu. 1999. *Pemberdayaan Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos.
- Mulyasa, E. 2008. *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Narwoko, S.J. Dwi dan Bagong Suyante. 2007. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Nata, Abuddin. 2002. *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Pidarta, Made. 2004. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Purwanto, Ngalim. 1985. *Ilmu Pendidikan: Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ramayulis. 2001. *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Ritzer, George. 1983. *Sociological Theory*. Alfred A. Knope. New York.
- Ritzer, G. & J. Goodman, D. 2005. *Teori Sosiologi Modern*. Penerjemah: Alimandan. Jakarta: Prenada Media.
- Robinson, Philip. 1986. *Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: CV Rajawali Press.
- Ross, Ralp and Ernest van Den Haag. 1957. *The Pabric of Society*. New York.
- S. Nasution. 2009. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara Press.
- Sadkar, Myra Pollack & David Miller Sadkar. 1991. *Teachers, Schools, and Society*. Second Edition. USA: McGraw Hill, Inc.
- Sanderson, S.K. 2000. *Makro Sosiologi, Sebuah Pendekatan Realitas Sosial*. Edisi Kedua. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sastrawijaya, A. Tresna. 1991. *Pengembangan Program Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sinamo, Jansen. H. 2007. *7 Mentalitas Profesional*. Diakses via Internet (27/8/2008).
- Soekanto, Soerjono. 1997. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- . 2000. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soetjipto dan Rafli Kosasi. 2007. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta Bekerja Sama dengan Pusat Perbukuan Diknas.
- Stalcup, R.J. *Sociology and Education*. 1968. Columbus, Ohio: C.E. Merrill.
- Suhendi, Hendi dan Ramdani Wahyu. 2001. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.

- Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Supriyoko. 1993. "Pendidikan Politik di Era Globalisasi." Dalam M. Masyhur Amin dan Ismail S. Ahmad (Eds.). *Dialog Pemikiran Islam Dalam Realitas Empirik*. Yogyakarta: LKPSMNU.
- Syani, Abdul. 2007. *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syarbani, Syahrial, dkk. 2002. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia Press.
- Tafsir, Ahmad. 1994. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Perubahan Sosial & Pendidikan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- . 2008. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya Press.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. 2009. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Dosen UNS. 1984.
- Tim Penyusun Kamus. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005). 2008. Jakarta: PT Rineka Grafika Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Dilengkapi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Buku Teks Pelajaran. Indonesia Legal Center Publishing. Jakarta. 2008.
- Vembriarto, St. 1987. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Paramita.
- Wiersma, William. 1991. *Research Methods in Education*. Fifth Edition. Allyn & Bacon. USA.
- Winarno, Budi. 2007. *Globalisasi dan Krisis Demokrasi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yulaelawati, Ella. 2004. *Kurikulum dan Pembelajaran Filosofi, Teori, dan Aplikasi*. Bandung: Pakar Ray.
- Zuhairini. 1995. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sumber lain:

<http://www.scribd.com/doc/15507472/stratifikasi-sosial-pola-asuh-anak>.

<http://www.bayuekayulian.blogspot.com/2007/06/stratifikasi-sosial-dalam-masyarakat-27.html>.

http://ariodityo.multiply.com/journal/item/7/stratifikasi_sosial.

<http://www.roysatriadi.co.cc/2010/03/makalah-isd-stratifikasi-sosial.html>.

http://id.wikipedia.org/wiki/gerak_sosial.

http://www.webometrics.info/distribution_by_country.asp.

Sumatera Ekspres. 15/12/2010.

Sumatera Ekspres. 21/12/2005.

Sumatera Ekspres. 27/06/2009.

Media Indonesia, 10/12/2010.

Kompas, 21/4/2004.

Republika, 4/9/1995.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

**Lampiran 1. Lenkis' Work
Sociocultural Evolution : A Summary**

Type of Society	Historical Period	Productive Technology	Population Size
Hunting and Gathering Societies	Only type of society until about 10.000 years ago, still common several centuries ago, the few examples remaining today are threatened with extinction	Primitive weapons	Twenty-five to forty people
Horticultural and Pastoral Societies	From about 10.000 years ago, with decreasing numbers after about 3.000 B.C.E	Horticultural societies use hand tools for cultivating plants; pastoral societies are based on the domestication of animals	Settlements of several hundred people, interconnected through trading ties to form societies of several thousand people
Agrarian Societies	From about 5.000 years ago, with large but decreasing numbers today	Animal-drawn plow	Millions of people
Industrial Societies	From about 1750 to the present	Advanced sources of energy; mechanized production	Millions of people
Post-Industrial Societies	Emerging in recent decades	Computers that support an information-based economy	Millions of people

Type of Society	Settlement Pattern	Social Organization	Examples
Hunting and Gathering Societies	Nomadic	Family centered; specialization limited to age and sex; little social inequality	Pygmies of central Africa Kung of the Kalahari Aborigines of Australia Batek and Semai of Malaysia
Horticultural and Pastoral Societies	Horticulturalists form relatively small permanent settlements; pastoralists are nomadic	Family centred; religious system begins to develop; moderate specialization; increased social inequality	Middle Eastern societies about 5.000 B.C.E. Various societies today in New Guinea and other Pacific islands Yanomamo today is South America
Agrarian Societies	Cities become common, though they generally contain only a small proportion of the population	Family loses significance as distinctive religious, political, and economic system emerge.; extensive specialization; in-creased social inequality	Egypt during construction of the Great Pyramids Medieval Europe Numerous non industrial societies of the world today
Industrial Societies	Cities contain most of the population	Distinct religious, political, economic, educational, and family systems; highly specialized; marked social inequality persists, diminishing somewhat over time	Most societies today in Europe, North America, Australia and Japan; these societies generate most of the world's industrial production
Post-Industrial Societies	Population remains concentrated in cities	Similar to industrial societies with information processing and other service work gradually replacing industrial production	Industrial societies noted above are now entering post-industrial stage

LAMPIRAN 2

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
- c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- (2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- (3) Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
- (4) Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- (5) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- (6) Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (7) Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
- (8) Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
- (9) Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
- (10) Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (11) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- (12) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (13) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

- (14) Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (15) Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
- (16) Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (17) Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (18) Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (19) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- (20) Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (21) Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
- (22) Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- (23) Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
- (24) Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
- (25) Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
- (26) Warga negara adalah warga negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (27) Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- (28) Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

- (29) Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
- (30) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV
**HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA,
ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH**

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

BAB V

PESERTA DIDIK

Pasal 12

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban
 - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB VI

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pasal 14

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 15

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Pasal 16

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua

Pendidikan Dasar

Pasal 17

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 25

- (1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kelima

Pendidikan Nonformal

Pasal 26

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keenam
Pendidikan Informal

Pasal 27

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 28

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedelapan
Pendidikan Kedinasan

Pasal 29

- (1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- (2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- (3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

BAB IX STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 35

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB X KURIKULUM

Pasal 36

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memerhatikan:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - f. tuntutan dunia kerja;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - h. agama;
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 37

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. keterampilan/kejuruan; dan
 - j. muatan lokal
- (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan; dan
 - c. bahasa
- (3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 38

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.
- (3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.
- (4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

BAB XI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 39

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pasal 40

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 41

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- (4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 42

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

- (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 43

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 45

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

- (2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 52

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Badan Hukum Pendidikan

Pasal 53

- (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
- (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
- (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

12A.114 Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 55

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 56

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis.
- (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 65

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola warga negara Indonesia.
- (4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XIX

PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama

sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

I. UMUM

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna. Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi:

1. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
2. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
3. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
4. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
5. peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
6. penyediaan sarana belajar yang mendidik;
7. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
8. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
9. pelaksanaan wajib belajar;
10. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
11. pemberdayaan peran masyarakat;
12. pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
13. pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional perlu pula disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu diperbaharui dan diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerja sama yang saling melengkapi dan memperkuat.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)

butir a

Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3).

butir b

Pendidik dan/atau guru yang mampu mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3).

butir c

Cukup jelas

butir d

Cukup jelas

butir e

Cukup jelas

butir f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan yang sederajat dengan SD/MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA adalah program seperti Paket C.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Akademi menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.

Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.

Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Institut menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Gelar akademik yang dimaksud, antara lain, sarjana, magister, dan doktor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan perguruan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.

Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.

Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C. Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Kursus dan pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional. Kursus dan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi dan akreditasi yang bertaraf nasional dan internasional.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Taman kanak-kanak (TK) menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Raudhatul athfal (RA) menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri seperti pada taman kanak-kanak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bentuk pendidikan jarak jauh mencakup program pendidikan tertulis (korespondensi), radio, audio/video, TV, dan/atau berbasis jaringan komputer. Modus penyelenggaraan pendidikan jarak jauh mencakup pengorganisasian tunggal (*single mode*), atau bersama tatap muka (*dual mode*). Cakupan pendidikan jarak jauh dapat berupa program pendidikan berbasis mata pelajaran/mata kuliah dan/atau program pendidikan berbasis bidang studi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengajaran bahasa daerah pada jenjang pendidikan dasar di suatu daerah disesuaikan dengan intensitas penggunaannya dalam wilayah yang bersangkutan. Tahap awal pendidikan adalah pendidikan pada tahun pertama dan kedua sekolah dasar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Standar isi mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan ke dalam persyaratan tentang kompetensi tamatan.

kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Standar tenaga kependidikan mencakup persyaratan pendidikan prajabatan dan kelayakan, baik fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Peningkatan secara berencana dan berkala dimaksudkan untuk meningkatkan keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetisi antarbangsa dalam peradaban dunia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan bersifat mandiri pada tingkat nasional dan provinsi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dengan pertimbangan:

1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional;
2. Bahasa daerah merupakan bahasa ibu peserta didik; dan
3. Bahasa asing terutama bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat penting kegunaannya dalam pergaulan global.

Bahan kajian matematika, antara lain, berhitung, ilmu ukur, dan aljabar dimaksudkan untuk mengembangkan logika dan kemampuan berpikir peserta didik.

Bahan kajian ilmu pengetahuan alam, antara lain, fisika, biologi, dan kimia dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap lingkungan alam dan sekitarnya. Bahan kajian ilmu pengetahuan sosial, antara lain, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat. Bahan kajian seni dan budaya dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Bahan kajian seni mencakup menulis, menggambar/melukis, menyanyi, dan menari. Bahan kajian pendidikan jasmani dan olah raga dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas.

Bahan kajian keterampilan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki keterampilan. Bahan kajian muatan lokal dimaksudkan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan penghasilan yang pantas dan memadai adalah penghasilan yang mencerminkan martabat guru sebagai pendidik yang profesional di atas kebutuhan hidup minimum (KHM).

Yang dimaksud dengan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, antara lain, jaminan kesehatan dan jaminan hari tua.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bertugas di mana pun dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberian fasilitas oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dimaksudkan untuk menghindari adanya daerah yang kekurangan atau kelebihan pendidik dan tenaga kependidikan, serta juga dimaksudkan untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Program sertifikasi bertujuan untuk memenuhi kualifikasi minimum pendidik yang merupakan bagian dari program pengembangan karier oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Soal 4

Jan 11

Kekapala

Jan 12

Kekapala

Jan 13

Kekapala

Jan 14

Kekapala

Jan 15

Kekapala

Jan 16

Yang dimaksud dengan ... adalah ... yang ...

Jan 17

Kekapala

Soal 5

Jan 11

Yang dimaksud dengan ... adalah ... yang ...

Jan 12

Kekapala

Jan 13

Kekapala

Soal 6

Kekapala

Soal 7

Jan 11

Kada ... adalah ... yang ...

Jan 12

Kekapala

Jan 13

Kekapala

Jan 14

Kekapala

Soal 19

Apr 20

Cutting price

Apr 21

Cutting price

Apr 22

Cutting price

Apr 23

Cutting price

Apr 24

Cutting price

Apr 25

Yang dimaksud dengan strategi program yang tidak konvensional merupakan yang tidak mengaitkan suatu tanggapan

Apr 27

Cutting price

Soal 20

Apr 17

Yang dimaksud dengan respon negatif adalah/merupakan istilah untuk menyebut respon konsumen terhadap suatu produk yang tidak terduga dan tidak diharapkan dan yang biasanya akan menghambat/merusakkan atau mengancam kegiatan penjualan

Apr 18

Cutting price

Apr 19

Cutting price

Soal 21

Cutting price

Soal 22

Apr 17

Salah satu masalah pemasaran adalah terdapat istilah yang menunjukkan dua sisi suatu masalah, yakni sisi, kelemahan/kekurangan suatu produk yang dapat merugikan konsumen

Apr 18

Cutting price

Apr 19

Cutting price

Apr 20

Cutting price

LAMPIRAN 3

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDAR
NASIONAL PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
3. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

4. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
5. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
6. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
7. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
8. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
9. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
10. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
11. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
12. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.
15. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

17. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
18. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
19. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
20. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
22. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan.
23. Departemen adalah departemen yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
24. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Departemen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;
25. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
26. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
27. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
28. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II LINGKUP, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar penilaian pendidikan
- (2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.
- (3) Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pasal 3

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Pasal 4

Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

BAB III

STANDAR ISI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

Bagian Kedua
Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
Pasal 6

- (1) Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
 - a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan, dan
 - c. kepribadian;
 - d. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. kelompok mata pelajaran estetika;
 - f. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan
 - g. kesehatan.
- (2) Kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal terdiri atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan.
- (3) Satuan pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan.
- (4) Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran memengaruhi pemahaman dan/atau penghayatan peserta didik.
- (5) Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.
- (6) Kurikulum dan silabus SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi.

Pasal 7

- (1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/ Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.
- (3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan

- dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang relevan.
- (4) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB/Paket B, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan/atau teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.
 - (5) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA/SMALB/Paket C, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.
 - (6) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.
 - (7) Kelompok mata pelajaran estetika pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.
 - (8) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.

Pasal 8

- (1) Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat dan/atau semester sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar.
- (3) Ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk setiap program studi.
- (2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

Bagian Keempat
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Pasal 16

- (1) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.
- (2) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi sekurang-kurangnya:
 - a. Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK pada jalur pendidikan formal kategori standar;
 - b. Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK pada jalur pendidikan formal kategori mandiri;
- (3) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah keagamaan berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.
- (4) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi sekurang-kurangnya model-model kurikulum satuan pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) sekurang-kurangnya meliputi model kurikulum tingkat satuan pendidikan apabila menggunakan sistem paket dan model kurikulum tingkat satuan pendidikan apabila menggunakan sistem kredit semester.

Pasal 17

- (1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.
- (2) Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.
- (3) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya untuk program paket A, B, dan C ditetapkan oleh dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan berdasarkan kerangka dasar kurikulum sesuai dengan peraturan pemerintah ini dan standar kompetensi lulusan.
- (4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kelima
Kalender Pendidikan/Akademik

Pasal 18

- (1) Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk jeda tengah semester selama-lamanya satu minggu dan jeda antar semester.
- (3) Kalender pendidikan/akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
STANDAR PROSES

Pasal 19

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.
- (3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Pasal 20

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) harus memerhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis.

- diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- (5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29

- (1) Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki:
- kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
 - latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - sertifikat profesi guru untuk PAUD
- (2) Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
- kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
 - latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - sertifikat profesi guru untuk SD/MI
- (3) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
- kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
 - latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs
- (4) Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
- kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
 - latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - sertifikat profesi guru untuk SMA/MA
- (5) Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
- kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - sertifikat profesi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB
- (6) Pendidik pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
- kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)

- b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
- c. sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK.

Pasal 30

- (1) Pendidik pada TK/RA sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (2) Pendidik pada SD/MI sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (3) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (4) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (5) Pendidik pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran dan instruktur bidang kejuruan yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (6) Pendidik pada SDLB, SMPLB, dan SMALB terdiri atas guru mata pelajaran dan pembimbing yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (7) Pendidik pada satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C terdiri atas tutor penanggung jawab kelas, tutor penanggung jawab mata pelajaran, dan narasumber teknis yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (8) Pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilan terdiri atas pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur, dan penguji.

Pasal 31

- (1) Pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan minimum:
 - a. lulusan diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) untuk program diploma;
 - b. lulusan program magister (S2) untuk program sarjana (S1); dan
 - c. lulusan program doktor (S3) untuk program magister (S2) dan program doktor (S3).
- (2) Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) butir a, pendidik pada program vokasi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai

- d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan
- (3) Kriteria untuk menjadi kepala SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK meliputi:
 - a. Berstatus sebagai guru SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK; dan
 - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
- (4) Kriteria untuk menjadi kepala SDLB/SMPLB/SMALB meliputi:
 - a. Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan khusus;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di satuan pendidikan khusus; dan
 - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan, pengelolaan, dan kewirausahaan di bidang pendidikan khusus.
- (5) Kriteria kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 39

- (1) Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan.
- (2) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan meliputi:
 - a. berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;
 - b. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan;
 - c. lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan.
- (3) Kriteria pengawas suatu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 40

- (1) Pengawasan pada pendidikan nonformal dilakukan oleh penilik satuan pendidikan.

- (2) Kriteria minimal untuk menjadi penilik adalah:
- berstatus sebagai pamong belajar/pamong atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan luar sekolah dan pemuda sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal;
 - memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik; dan
 - lulus seleksi sebagai penilik.
- (3) Kriteria penilik suatu satuan pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 41

- Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.
- Kriteria penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pasal 42

- Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pasal 43

- Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.

- (2) Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik.
- (3) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.
- (4) Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.
- (5) Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (6) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.

Pasal 44

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
- (2) Standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas lahan per peserta didik.
- (3) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenis, serta letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan yang menjadi pengumpan masukan peserta didik.
- (4) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut.
- (5) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.

Pasal 45

- (1) Standar rasio luas ruang kelas per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (2) Standar rasio luas bangunan per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan dasar dan menengah adalah kelas B.
- (4) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan tinggi adalah kelas A.
- (5) Pada daerah rawan gempa bumi atau tanahnya labil, bangunan satuan pendidikan harus memenuhi ketentuan standar bangunan tahan gempa.

- (6) Standar kualitas bangunan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), dan (5) mengacu pada ketetapan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 46

- (1) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- (2) Kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 47

- (1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memerhatikan masa pakai.
- (3) Pengaturan tentang masa pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 48

Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai 47 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII

STANDAR PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan

Pasal 49

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

- k. rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun;
 - l. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir.
- (3) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memerhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.
- (4) Untuk jenjang pendidikan tinggi, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui oleh lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus mendapat persetujuan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan tinggi yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus mendapat persetujuan dari lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 56

Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan.

Pasal 57

Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.

Pasal 58

- (1) Laporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan pengawas atau penilik satuan pendidikan.
- (2) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pendidik ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan dan orang tua/wali peserta didik, berisi hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (3) Laporan oleh tenaga kependidikan ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan, berisi pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (4) Untuk pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pimpinan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada komite sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, yang berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (5) Untuk pendidikan dasar, menengah, dan nonformal laporan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan ditujukan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Untuk pendidikan dasar dan menengah keagamaan, laporan oleh pengawas satuan pendidikan ditujukan kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (7) Untuk jenjang pendidikan tinggi, laporan oleh kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Menteri, berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (8) Setiap pihak yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) wajib menindaklanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukannya.

Bagian Kedua

Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 59

- (1) Pemerintah daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:
 - a. wajib belajar;
 - b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah;

- c. penuntasan pemberantasan buta aksara;
 - d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
 - e. peningkatan status guru sebagai profesi;
 - f. akreditasi pendidikan;
 - g. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.
- (2) Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah

Pasal 60

Pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:

- a. wajib belajar;
- b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi;
- c. penuntasan pemberantasan buta aksara;
- d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. peningkatan status guru sebagai profesi;
- f. peningkatan mutu dosen;
- g. standardisasi pendidikan;
- h. akreditasi pendidikan;
- i. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional, dan global;
- j. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan; dan
- k. penjaminan mutu pendidikan nasional.

Pasal 61

- (1) Pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (2) Menteri menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

BAB IX
STANDAR PEMBIAYAAN

Pasal 62

- (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya
- (5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

BAB X
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 63

- (1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
 - a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;
 - b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
 - c. penilaian hasil belajar oleh pemerintah.
- (2) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:
 - a. penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan
 - b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.
- (3) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

- (1) Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan.
- (2) Dalam penyelenggaraan ujian nasional BSNP bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai ujian nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 68

Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

- a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
- b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
- c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;
- d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pasal 69

- (1) Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan jalur nonformal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- (2) Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya.
- (3) Peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti ujian nasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BSNP.
- (4) Peserta ujian nasional memperoleh surat keterangan hasil ujian nasional yang diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional.

Pasal 70

- (1) Pada jenjang SD/MI/SDLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
- (2) Pada program paket A, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- (3) Pada jenjang SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

- (4) Pada program paket B, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- (5) Pada SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan.
- (6) Pada program paket C, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan.
- (7) Pada jenjang SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran kejuruan yang menjadi ciri khas program pendidikan.

Pasal 71

Kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Kelulusan

Pasal 72

- (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:
 - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;
 - c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. lulus Ujian Nasional.
- (2) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB XI

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (BSNP)

Pasal 73

- (1) Dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan, dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

- (2) BSNP berkedudukan di ibu kota wilayah Negara Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BSNP bersifat mandiri dan profesional.

Pasal 74

- (1) Keanggotaan BSNP berjumlah ganjil, paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota BSNP terdiri atas ahli-ahli di bidang psikometri, evaluasi pendidikan, kurikulum, dan manajemen pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.
- (3) Keanggotaan BSNP diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa bakti 4 (empat) tahun.

Pasal 75

- (1) BSNP dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota atas dasar suara terbanyak.
- (2) Untuk membantu kelancaran tugasnya BSNP didukung oleh sebuah sekretariat yang secara *ex-officio* diketuai oleh pejabat Departemen yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) BSNP menunjuk tim ahli yang bersifat *ad-hoc* sesuai kebutuhan.

Pasal 76

- (1) BSNP bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.
- (2) Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional setelah ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BSNP berwenang:
 - a. mengembangkan Standar Nasional Pendidikan;
 - b. menyelenggarakan ujian nasional;
 - c. memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.
 - d. merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 77

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), BSNP didukung dan berkoordinasi dengan Departemen dan departemen yang

menangani urusan pemerintahan di bidang agama, dan dinas yang menangani pendidikan di provinsi/kabupaten/kota.

BAB XII

EVALUASI

Pasal 78

Evaluasi pendidikan meliputi:

- a. evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- b. evaluasi kinerja pendidikan oleh pemerintah;
- c. evaluasi kinerja pendidikan oleh pemerintah daerah provinsi
- d. evaluasi kinerja pendidikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- e. evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat atau organisasi profesi untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan;

Pasal 79

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir a dilakukan oleh satuan pendidikan pada setiap akhir semester.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. tingkat kehadiran peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - b. pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler;
 - c. hasil belajar peserta didik; dan
 - d. realisasi anggaran
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 80

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir b dilakukan oleh Menteri terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir c dilakukan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan keagamaan secara berkala.

Pasal 81

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir c dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, pada pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan nonformal termasuk pendidikan anak usia dini, secara berkala.

Pasal 82

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir d dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, pada pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal termasuk pendidikan anak usia dini, secara berkala.

Pasal 83

- (1) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 82 dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali.
- (2) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sekurang-kurangnya:
 - a. Tingkat relevansi pendidikan terhadap visi, misi, tujuan, dan paradigma pendidikan nasional;
 - b. Tingkat relevansi satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat akan sumber daya manusia yang bermutu dan kompetitif;
 - c. Tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
 - d. Tingkat efisiensi dan produktivitas satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
 - e. Tingkat daya saing satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada tingkat daerah, nasional, regional, dan global.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Menteri.
- (4) Atas dasar evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3), Menteri melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai:
 - a. Tingkat relevansi pendidikan nasional terhadap visi, misi, tujuan, dan paradigma pendidikan nasional;
 - b. Tingkat relevansi pendidikan nasional terhadap kebutuhan masyarakat akan sumber daya manusia yang bermutu dan berdaya saing;
 - c. Tingkat mutu dan daya saing pendidikan nasional;
 - d. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan;
 - e. Tingkat pemerataan akses masyarakat ke pelayanan pendidikan; dan
 - f. Tingkat efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas pendidikan nasional.

Pasal 84

- (1) Evaluasi dapat dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat.
- (2) Evaluasi sebagai dimaksud pada ayat (1) secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menentukan pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, program, dan/atau satuan pendidikan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara mandiri, independen, objektif, dan profesional.
- (5) Metode dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik dan dilaporkan ke BSNP.

Pasal 85

- (1) Untuk mengukur dan menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh peserta didik, program dan/atau satuan pendidikan, masyarakat dapat membentuk lembaga evaluasi mandiri.
- (2) Kelompok masyarakat yang dapat membentuk lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi secara profesional, independen dan mandiri.
- (3) Pembentukan lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

BAB XIII

AKREDITASI

Pasal 86

- (1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
- (2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan akreditasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87

- (1) Akreditasi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. BAN-S/M terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - b. BAN-PT terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi; dan
 - c. BAN-PNF terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.
- (2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
 - (3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
 - (5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

- (1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
 - a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
 - b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIV SERTIFIKASI

Pasal 89

- (1) Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.
- (3) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. Identitas peserta didik;
 - b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya;

- c. Pernyataan tentang status kelulusan peserta didik dari Ujian Nasional beserta daftar nilai mata pelajaran yang diujikan; dan
 - d. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan
- (4) Pada jenjang pendidikan tinggi ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:
- a. Identitas peserta didik;
 - b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- (5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.
- (6) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya berisi:
- a. Identitas peserta didik;
 - b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi untuk semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang dipersyaratkan dengan nilai yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Daftar semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang telah ditempuh uji kompetensinya oleh peserta didik, beserta nilai akhirnya.

Pasal 90

- (1) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi yang setara dengan sertifikat kompetensi dari pendidikan formal setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri/profesi sesuai ketentuan yang berlaku
- (2) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh ijazah yang setara dengan ijazah dari pendidikan dasar dan menengah jalur formal setelah lulus uji kompetensi dan ujian nasional yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XV

PENJAMINAN MUTU

Pasal 91

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pasal 92

- (1) Menteri mensupervisi dan membantu satuan perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu.
- (2) Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama mensupervisi dan membantu satuan pendidikan keagamaan melakukan penjaminan mutu.
- (3) Pemerintah provinsi mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.
- (5) BAN-S/M, BAN-PNF, dan BAN-PT memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, dan kepada pemerintah dan pemerintah daerah.
- (6) LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), LPMP bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan tinggi.
- (8) Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.

Pasal 93

- (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan yang tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan ini dapat memperoleh pengakuan dari pemerintah atas dasar rekomendasi dari BSNP
- (2) Rekomendasi dari BSNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian khusus.
- (3) Pengakuan dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Pada saat mulai berlakunya peraturan pemerintah ini:

- a. Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Panitia Nasional Penilaian Buku Pelajaran

- (PNPBP) masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya badan baru berdasarkan peraturan pemerintah ini.
- b. Satuan pendidikan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan peraturan pemerintah ini paling lambat 7 (tujuh) tahun.
 - c. Standar kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku efektif sepenuhnya 15 (lima belas) tahun sejak ditetapkan peraturan pemerintah ini.
 - d. Ujian nasional untuk peserta didik SD/MI/SDLB mulai dilaksanakan 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan peraturan pemerintah ini.
 - e. Penyelenggaraan ujian nasional dilaksanakan oleh Pemerintah sebelum BSNP menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan peraturan pemerintah ini.

Pasal 95

Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Standar Nasional Pendidikan pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan pemerintah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan pemerintah ini harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya peraturan pemerintah ini.

Pasal 97

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada Tanggal 16 Mei 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI
MANUSIA

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

Sugiri, S.H

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2005
TENTANG
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

II. UMUM

Pada hakekatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi: (1) pemersatu bangsa, (2) penyamaan kesempatan, dan (3) pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global.

Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi pendidikan nasional adalah:

- (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
- (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global;
- (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
- (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
- (6) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan
- (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan visi dan misi pendidikan nasional tersebut di atas, reformasi pendidikan meliputi hal-hal berikut:

Pertama : penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, di mana dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Prinsip tersebut menyebabkan adanya pergeseran paradigma proses pendidikan, dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Paradigma pengajaran yang lebih menitikberatkan peran pendidik dalam mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didiknya bergeser pada paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki kecerdasan, memiliki estetika, sehat jasmani dan rohani, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kedua : adanya perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumber daya pembangunan, menjadi paradigma manusia sebagai subyek pembangunan secara utuh. Pendidikan harus mampu membentuk manusia seutuhnya yang digambarkan sebagai manusia yang memiliki karakteristik personal yang memahami dinamika psikososial dan lingkungan kulturalnya. Proses pendidikan harus mencakup:

- (1) penumbuhkembangan keimanan, ketakwaan
- (2) pengembangan wawasan kebangsaan, kenegaraan, demokrasi, dan kepribadian;
- (3) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (4) pengembangan, penghayatan, apresiasi, dan ekspresi seni; serta
- (5) pembentukan manusia yang sehat jasmani dan rohani.

Proses pembentukan manusia di atas pada hakekatnya merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

Ketiga : Adanya pandangan terhadap keberadaan peserta didik yang terintegrasi dengan lingkungan sosial-kulturalnya dan pada gilirannya akan menumbuhkan individu sebagai pribadi dan anggota masyarakat mandiri yang berbudaya. Hal ini sejalan dengan proses pentahapan aktualisasi intelektual, emosional dan spiritual peserta didik di dalam memahami sesuatu, mulai dari tahapan paling sederhana dan bersifat eksternal, sampai tahapan yang paling rumit dan bersifat internal, yang berkenaan dengan pemahaman dirinya dan lingkungan kulturalnya.

Keempat : Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional, diperlukan suatu acuan dasar (*benchmark*) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitan ini, kriteria dan kriteria penyelenggaraan pendidikan dijadikan pedoman untuk mewujudkan:

- (1) pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistik;
- (2) proses pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis;
- (3) hasil pendidikan yang bermutu dan terukur;
- (4) berkembangnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;
- (5) tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal;
- (6) berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan satuan pendidikan; dan
- (7) terlaksananya evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Acuan dasar tersebut di atas merupakan Standar Nasional Pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, Standar Nasional Pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional.

Standar Nasional Pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Standar Nasional Pendidikan tinggi diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dalam mengembangkan mutu layanan pendidikannya sesuai dengan program studi dan keahlian dalam kerangka otonomi perguruan tinggi. Demikian juga standar nasional pendidikan untuk jalur pendidikan nonformal hanya mengatur hal-hal pokok dengan maksud memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang memiliki karakteristik tidak terstruktur untuk mengembangkan programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan jalur informal yang sepenuhnya menjadi kewenangan keluarga dan masyarakat didorong dan diberikan keleluasaan dalam mengembangkan program pendidikannya sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, Standar Nasional Pendidikan pada jalur pendidikan informal hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi peserta didik saja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Pendidikan nasional yang bermutu diarahkan untuk pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud pendidikan umum meliputi SD/MI/paket A, SMP/MTs/Paket B, dan SMA/MA/Paket C atau bentuk lain yang sederajat. Yang dimaksud pendidikan kejuruan meliputi SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat. Yang dimaksud pendidikan khusus meliputi SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat. Pelaksanaan semua kelompok mata pelajaran disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik dan psikologis peserta didik.

Ayat (1) butir a

Yang dimaksud dengan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia termasuk di dalamnya muatan akhlak mulia yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual. Peningkatan potensi spiritual dalam kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia untuk MA atau bentuk lain yang sederajat, dapat dimasukkan dalam kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (1) butir b

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.

Kesadaran dan wawasan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mencakup upaya pendidikan untuk pembentukan pribadi yang unggul secara individual, dan pembudayaan serta pembentukan masyarakat madani.

Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat diamalkan sehari-hari oleh peserta didik di dalam dan di luar sekolah, dengan contoh pengamalan diberikan oleh setiap pendidik dalam interaksi sosialnya di dalam dan di luar sekolah, serta dikembangkan menjadi bagian dari budaya sekolah. Muatan bahasa mencakup antara lain penanaman kemahiran berbahasa dan apresiasi terhadap karya sastra. Untuk menanamkan apresiasi terhadap karya sastra Indonesia, BSNP menetapkan karya-karya sastra Indonesia unggulan yang wajib dipelajari oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.

Ayat (1) butir c

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/Paket A atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan mandiri. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB/Paket B atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri.

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA/SMALB/Paket C atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi lanjut akan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri.

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk kompetensi, kecakapan, dan kemandirian kerja.

Ayat (1) butir d

Kelompok mata pelajaran estetika pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni.

Kemampuan mengapresiasi dan kemampuan mengekspresikan keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis.

Ayat (1) butir e

Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SD/MI/SDLB/ Paket A atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportifitas dan kesadaran hidup sehat.

Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SMP/MTs/ SMPLB/Paket B atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sportivitas dan kesadaran hidup sehat.

Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SMA/MA/ SMALB/Paket C atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sikap sportif, disiplin, kerja sama, dan hidup sehat.

Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan seperti keterbebasan dari perilaku seksual bebas, kecanduan narkoba, HIV/AIDS, demam berdarah, muntaber, dan penyakit lain yang potensial untuk mewabah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)
Pelaksanaan pendidikan secara holistik dimaksudkan bahwa proses pembelajaran antar kelompok mata pelajaran bersifat terpadu dalam mencapai standar kompetensi yang ditetapkan.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Ilmu pengetahuan alam sekurang-kurangnya terdiri atas fisika, kimia, dan biologi. Ilmu pengetahuan sosial sekurang-kurangnya terdiri atas ketatanegaraan, ekonomika, sosiologi, antropologi, sejarah, dan geografi.

Ayat (6)
Ilmu pengetahuan alam dipilih dari muatan dan/atau kegiatan fisika, kimia, atau biologi yang disesuaikan dengan program kejuruan masing-masing. Ilmu pengetahuan sosial dipilih dari muatan dan/atau kegiatan ketatanegaraan, ekonomika, sejarah, sosiologi, antropologi, atau geografi yang disesuaikan dengan program kejuruan masing-masing.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Dalam mengembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulum, perguruan tinggi melibatkan asosiasi profesi, instansi pemerintah terkait, dan kelompok ahli yang relevan, misalnya, di bidang kedokteran

melibatkan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan Konsil Kedokteran Indonesia.

Ayat (2)

Pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa hanya diajarkan pada program sarjana dan diploma.

Ayat (3)

Mata kuliah statistika dan matematika dimaksudkan untuk memberikan dasar-dasar pemahaman dan penerapan metode kuantitatif yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan program studi yang bersangkutan. Untuk program studi tertentu mata kuliah matematika dapat diganti dengan mata kuliah logika.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi satuan pendidikan yang berupaya menerapkan sistem satuan kredit semester karena sistem ini lebih mengakomodasikan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Dengan diberlakukannya sistem ini maka satuan pendidikan tidak perlu mengadakan program pengayaan karena sudah tercakup (*built in*) dalam sistem ini.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Dengan diberlakukannya Standar Nasional Pendidikan, maka Pemerintah memiliki kepentingan untuk memetakan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah mengkategorikan sekolah/madrasah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori mandiri, dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori standar. Berbagai upaya ditempuh agar alokasi sumber daya pemerintah dan pemerintah daerah diprioritaskan untuk membantu sekolah/madrasah yang masih dalam kategori standar untuk bisa meningkatkan diri menuju kategori mandiri. Terhadap sekolah/madrasah yang telah masuk dalam kategori mandiri, pemerintah mendorongnya untuk secara bertahap mencapai taraf internasional. Terkait dengan penuntasan wajib belajar, pemerintah tetap berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan wajib belajar sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sisdiknas terlepas dari apakah sekolah/madrasah termasuk dalam kategori mandiri atau standar.

Pemerintah mendorong dan memfasilitasi diberlakukannya sistem satuan kredit semester (SKS) karena kelebihan sistem ini sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan ayat (1).

Terkait dengan itu SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, dan SMA/MA/SMLB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dapat menerapkan sistem SKS. Khusus untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat yang berkategori mandiri harus menerapkan sistem SKS jika menghendaki tetap berada pada kategori mandiri.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Untuk pendidikan tinggi kalender pendidikan disebut kalender akademik

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Penilaian hasil pembelajaran mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan/atau afektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran.

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penggunaan teknik penilaian yang lain sesuai dengan karakteristik hasil pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik

Ayat (3)

Observasi dimaksudkan untuk mengukur perubahan sikap dan perilaku peserta didik sebagai indikasi dari keberhasilan pembelajaran dalam aspek afektif dan psikomotorik.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan karakteristik program studi akademik, vokasi, dan profesi.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendidik pada ketentuan ini adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan berkompentensi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Yang dimaksud dengan pendidik sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) pada ketentuan ini adalah peran pendidik antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Butir a

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Butir b

Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Butir c

Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Butir d

Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Standar kualifikasi pendidik sebagaimana diatur dalam pasal ini diterapkan secara bertahap. BSNP menetapkan pentahapannya untuk masing-masing jenjang pendidikan. Dalam menetapkan pentahapan tersebut BSNP memperhatikan pertimbangan dari Menteri.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sumber belajar lainnya antara lain journal, majalah, artikel, website, dan compact disk.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Pengelolaan satuan pendidikan meliputi perencanaan program, penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kegiatan

pembelajaran, pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasana pendidikan, penilaian hasil belajar, dan pengawasan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Anggota Dewan Pendidik terdiri atas para pimpinan satuan pendidikan dan semua pendidik tetap. Pimpinan satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat maka dewan pendidik dan/atau komite sekolah/madrasah menyerahkan pengambilan keputusan yang bersangkutan kepada lembaga berwenang di atasnya. Dalam hal sekolah/madrasah yang bersangkutan merupakan satuan pendidikan negeri, maka lembaga yang berwenang adalah dinas kabupaten/kota yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kantor departemen yang menangani urusan di bidang agama kabupaten/kota. Dalam hal sekolah/madrasah yang bersangkutan merupakan satuan pendidikan swasta, maka lembaga yang berwenang adalah badan hukum yang menjadi penyelenggara satuan pendidikan dimaksud.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Butir a

Cukup Jelas.

Butir b

Cukup Jelas.

Butir c

Cukup Jelas.

Butir d

Cukup Jelas.

- Butir e**
Cukup Jelas.
- Butir f**
Cukup Jelas.
- Butir g**
Cukup Jelas.
- Butir h**
Cukup Jelas.
- Butir i**
Cukup Jelas.
- Butir j**
Cukup Jelas.
- Butir k**
RAPBS harus bersifat komprehensif yang meliputi sumber dan alokasi penggunaan biaya untuk satu tahun yang secara akuntabel dan transparan diketahui oleh orang tua/wali peserta didik.
- Butir l**
Cukup Jelas
- Ayat (3)**
Cukup Jelas.
- Ayat (4)**
Cukup Jelas.
- Pasal 54**
Cukup Jelas.
- Pasal 55**
Cukup Jelas.
- Pasal 56**
Cukup Jelas.
- Pasal 57**
Yang dimaksud dengan supervisi manajerial meliputi aspek pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan. Yang dimaksud dengan supervisi akademik meliputi aspek-aspek pelaksanaan proses pembelajaran.
- Pasal 58**
Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)**
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pihak terkait antara lain perangkat daerah atau instansi yang menangani urusan pendidikan di kabupaten/kota.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Yang termasuk biaya personal peserta didik antara lain pakaian, transpor, buku pribadi, konsumsi, akomodasi, dan biaya pribadi lainnya.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Ujian nasional mengukur kompetensi peserta didik dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh peserta didik, satuan pendidikan, dan/atau program pendidikan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Hasil ujian nasional dapat dibandingkan baik antar satuan pendidikan, antara daerah, maupun antar waktu untuk pemetaan mutu pendidikan secara nasional.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

BSNP melakukan evaluasi penyelenggaraan ujian nasional dan dapat mengusulkan hal-hal yang perlu diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 68

Butir a

Cukup Jelas.

Butir b

Hasil ujian nasional dijadikan sebagai salah satu dasar seleksi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Satuan pendidikan dapat melakukan seleksi dengan menggunakan instrumen seleksi yang materinya tidak diujikan dalam Ujian Nasional, misalnya tes bakat skolastik, tes inteligensi, tes minat, tes bakat, tes kesehatan, atau tes lainnya sesuai dengan Kriteria pada satuan pendidikan tersebut.

Butir c

Cukup Jelas.

Butir d

Cukup Jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Surat keterangan hasil ujian nasional sekurang-kurangnya berisi:

- a. Identitas peserta didik;
- b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menempuh Ujian Nasional;
- c. Tanggal dan satuan pendidikan di mana Ujian Nasional telah ditempuh oleh peserta didik;
- d. Nilai Ujian Nasional untuk setiap mata pelajaran yang diujikan; dan
- e. Status kelulusan Ujian Nasional, untuk jenjang SMP/SMPLB/MTs atau bentuk lain yang sederajat, SMA/SMALB/MA atau bentuk lain yang sederajat, dan SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dalam mengembangkan kriteria kelulusan, BSNP mempertimbangkan keragaman mutu pendidikan secara nasional dan/atau tolok ukur (benchmark) yang bersifat regional maupun internasional. Kriteria kelulusan peserta didik yang dikembangkan oleh BSNP tidak menghambat penuntasan program wajib belajar.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Menteri menunjuk pejabat yang bertanggung jawab sebagai ketua sekretariat BSNP yang melaksanakan pengelolaan ketenagaan, sarana

dan prasarana, serta administrasi dan keuangan untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas BSNP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Penunjukan tim ahli didasarkan atas keahlian yang relevan dengan bidang yang dikembangkan yang berasal dari asosiasi profesi, tenaga ahli yang direkomendasikan oleh instansi pemerintah terkait dan lainnya. Misalnya, pengembangan kompetensi lulusan SMK di bidang pelayaran melibatkan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang perhubungan; pengembangan kompetensi lulusan SMK di bidang pariwisata melibatkan ahli dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan asosiasi jasa travel; pengembangan kompetensi lulusan SMK di bidang kesehatan melibatkan unsur profesi bidang kesehatan dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Contoh dari kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi tersebut adalah organisasi profesi berbadan hukum yang diakui oleh pemerintah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong dan membantu satuan pendidikan formal dalam melakukan penjaminan mutu (quality assurance) agar memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, sehingga dapat dikategorikan ke dalam kategori mandiri.

Bantuan pemerintah dan pemerintah daerah kepada satuan pendidikan dalam penjaminan mutu lebih diprioritaskan pada satuan pendidikan formal dan nonformal yang menyelenggarakan program wajib belajar dan satuan pendidikan formal yang masih berada pada kategori standar.

Dalam rangka lebih mendorong penjaminan mutu ke arah pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada penjaminan mutu satuan pendidikan tertentu yang berbasis keunggulan lokal.

Dalam rangka lebih mendorong penjaminan mutu ke arah pendidikan yang berdaya saing pada tingkat global, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada satuan pendidikan tertentu yang berkategori mandiri dan berorientasi untuk bertaraf internasional.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Butir a

Cukup Jelas.

Butir b

Cukup Jelas

Butir c

Sebelum standar kualifikasi akademik berlaku efektif, BSNP mengembangkan standar antara yang secara bertahap menuju pencapaian standar kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 peraturan pemerintah ini.

Butir d

Cukup Jelas.

Butir e

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4496**

LAMPIRAN 4

RANKING WEB OF WORLD UNIVERSITIES

Country Scoreboard

Rank	Country	System	Access	Flagship	Economic	Overall
1	United States	100	100	100	100	100
2	United Kingdom	74	91	96	98	90
3	Germany	83	95	84	96	89
4	Canada	71	95	96	62	81
5	Taiwan	52	74	96	90	78
6	Sweden	49	84	88	74	74
7	Spain	62	82	88	57	72
8	Japan	52	42	96	70	65
9	Brazil	51	35	96	79	65
10	Netherlands	50	76	88	39	63
11	Switzerland	44	66	92	50	63
12	Australia	50	70	88	43	63
13	Norway	43	67	92	44	61
14	Italy	51	50	88	51	60
15	Finland	42	64	92	38	59
16	Austria	42	52	88	36	54
17	Czech Republic	42	53	84	36	54
18	Hong Kong, China	41	53	84	35	53
19	Belgium	42	50	84	36	53
20	Denmark	41	58	76	36	53
21	Portugal	42	46	72	38	49
22	China	42	22	80	51	49
23	Mexico	40	25	92	35	48
24	Israel	41	47	68	35	48
25	France	43	31	76	35	46
26	Ireland	39	43	68	34	46
27	Singapore	38	33	68	32	43
28	Korea, Rep.	41	30	64	35	42
29	Thailand	40	26	68	33	42
30	Saudi Arabia	38	26	64	33	40

- Four normalized indicators are used with equal weighting as follows:
- **System:** Number of universities in the Top 500 in the given country, divided by the mean position of those institutions.
 - **Access:** A score built according to ranks (5 points for a university in the top 100, 4 points for 101-200, 3 points for 201-300, 2 for 301-400 and 1 for 401-500) divided by the population size (root of the population in thousands) of the country (World Bank, 2007).
 - **Flagship:** A normalized score (100 for positions 1-20, 96 for 21-40, and so on) based on the leading university rank for countries with institutions among the Top 500.
 - **Economic:** Same score as the access defined before but divided by the GDP (PPP) per capita for the country in question (World Bank, 2007).

The Country Scoreboard has been designed following the model of the QS SAFE National System for evaluation of the countries' higher education system according to the presence of their Universities in the Top 500 of the Ranking Web.

Sumber: <http://www.webometrics.info/distribution-by-country.asp>

Rank	Country	System	Access	Flagship	Economic	Overall
31	Hungary	39	34	56	33	40
32	Slovenia	37	32	60	31	40
33	Chile	38	25	56	40	40
34	Russia Federation	37	22	64	31	39
34	Poland	40	28	44	38	37
36	Estonia	37	35	44	31	37
37	Serbia	37	26	44	34	35
37	Argentina	37	22	44	33	34
39	Greece	38	28	36	34	34
39	New Zealand	37	25	40	31	33
41	Iceland	37	30	20	31	29
42	Costa Rica	37	25	24	31	29
43	South Africa	37	21	20	31	27
44	Turkey	37	20	16	31	26
45	Columbia	37	21	12	31	26

Distribution by Continent

Continent	Top 200	Top 500	Top 1000
USA & Canada	106	180	334
Europe	60	223	412
Asia	19	50	148
Latin America	6	21	58
Oceania	6	14	35
Arab World	1	2	4
Africa	0	1	5

Distribution by Country

Rank	Country	Top 200	Top 500	Top 1000
1	United States of America	94	155	296
2	Germany	14	49	63
3	Canada	12	25	38
4	United Kingdom	10	36	70
5	Japan	7	13	50
6	Spain	6	27	43
7	Australia	6	13	28
8	Sweden	6	10	14
9	Taiwan	5	14	35
10	Brazil	5	12	32
11	Italy	4	17	38
12	Netherlands	4	12	13
13	Switzerland	3	6	10
14	Norway	3	4	4
15	Czech Republic	2	7	10
16	China	2	6	19
17	Austria	2	6	9
18	Hong Kong	2	5	6
19	France	1	8	36
20	Finland	1	7	11
21	Portugal	1	7	9
22	Republic of Korea	1	6	12
23	Belgium	1	6	7
24	Denmark	1	5	8
25	Thailand	1	4	9

Rank	Country	Top 200	Top 500	Top 1000
26	Israel	1	4	7
27	Mexico	1	4	6
28	Ireland	1	4	6
29	Saudi Arabia	1	2	4
30	Singapore	1	2	2
31	Russian Federation	1	1	5
32	Poland		5	16
33	Greece		3	7
34	Hungary		3	5
35	Chile		2	4
36	Turkey		1	8
37	New Zealand		1	7
38	Colombia		1	5
39	South Africa		1	5
40	Argentina		1	3
41	Estonia		1	2
42	Serbia		1	2
43	Slovenia		1	2
44	Costa Rica		1	1
45	Iceland		1	1
46	Malaysia			6
47	India			4
48	Slovakia			4
49	Lithuania			3
50	Romania			3
51	Indonesia			2
52	Perusahaan			2
53	Venezuela			2
54	Uruguay			1
55	Bulgaria			1
56	Iran (Islamic Republic of)			1
57	Jamaica			1
58	Philippines			1
59	Puerto Rico			1

Sumber: <http://www.webometrics.info/distribution-by-country.asp>

BIODATA PENULIS

Abdullah Idi lahir di Sempan (Bangka), 27/09/1965. Sejak 1991, menjadi dosen tetap di Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang. Selain memberi kuliah di Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah Palembang (2006-sekarang), menjadi dosen Program Magister Administrasi Publik (MAP) STISIPOL Candradimuka (2006-sekarang); dan dosen Program Pascasarjana (S2) Universitas PGRI Palembang (2007-sekarang). Pernah menjadi Pembantu Rektor III IAIN Raden Fatah Palembang (2003-2007), dan dipercaya menjadi Direktur MAP Stisipol Candradimuka Palembang (2008-2011).

Menamatkan Sekolah Dasar (SD) dan *Diniyah* (1979), SLTP (1982), SLTA (1985) di Bangka; S1 Fak. Tarbiyah/PAI IAIN Raden Fatah Palembang (1990); mengikuti Program Pembibitan Dosen IAIN se-Indonesia di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1991); menyelesaikan Master of Education (M.Ed.) M.Ed.) di *School of Education, University of Tasmania, Australia* (1994) ; dan menyelesaikan Doktor (Dr.) Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2006). Pada 2006, menerima penghargaan sebagai Guru Besar Sosiologi berdasarkan Surat Keputusan Mendiknas RI per 1 Desember 2006.

Sejumlah karya ilmiah telah diterbitkan: *Filsafat Pendidikan*, Edisi 2, 2002, Penerbit PT Gaya Media Pratama Jakarta (bersama Prof. Dr. H. Jalaludin); Edisi ke-2 diterbit Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2007; *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*, Penerbit PT Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999; Edisi ke-2 diterbit Ar-Ruzz Media Yogyakarta, 2007; *The Conditions for Learning at University: A Comparison Between Indonesia and Tasmania, Australia: A Cross Socio-Cultural Studies (Tesis S2)*, Unsri Press, 2001; *Islam: Dalam Sejarah dan Budaya Sumatera Selatan*, Unsri Press (2001,

Co-Author/Contributor); *Sejarah Perkembangan Islam di Eropa (A History of Islamic Spain)*, Montegomerry Watt, Edinburgh University, 1992, Pustaka Raja Yogyakarta, 2003 (*Translator*); *Rekonstruksi dan Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam, et al*, Global Pustaka Yogyakarta (2005), *Co-Author/Contributor*); *Revitalisasi Pendidikan Islam*, Tiara Wacana Yogyakarta (Toto Suharto, 2006); *Sejarah Sosial Cina dan Melayu Bangka*, Ar-Ruzz Media Yogyakarta (2006); dan *Asimilasi Melayu dan Cina di Bangka*, Tiara Wacana Yogyakarta (2009).

Sejumlah riset yang telah dilakukan bertalian dengan sosiologi agama, etnisitas, multikultura/pluralisme, dan pendidikan Islam. Penulis artikel pada jurnal dan media massa, dan menghadiri *forum ilmiah: seminar nasional, internasional, konferensi internasional*. Pengalaman ilmiah lainnya: mengunjungi berbagai universitas di Singapura dan Malaysia (2006); peserta *Short Course on Social Work*, McGill University, Montreal-Canada (2007); dan dipercaya menjadi *pendamping* pada *Program Research Fellowships* bagi Dosen PTAI se-Indonesia, di The University of Melbourne-Australia (2010).

BIODATA EDITOR

Safarina menamatkan pendidikan S1 di FKIP Unsri (1996) jurusan Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia, S2 di Pascasarjana Unsri (2003) Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia, S2 di Magister Administrasi Publik (MAP) STISIPOL Candradimuka Palembang (2011).

Penulis artikel di jurnal, koran, penulis novel yang berjudul *Cinta yang Terpaut* (Penerbit Ar-Ruzz, Yogyakarta, 2008), dan analog puisi Parkit (Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, 2011).

Selain mengajar Bahasa dan Sastra Indonesia di MAN 2 Palembang, Dosen Luar Biasa di beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, juga menjadi editor beberapa judul buku.